

NUSANTARANOMICS

Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris
(Pendekatan Heterodoks)

Buku "Nusantaranomics" Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris (Pendekatan Heterodoks) adalah sebuah pemikiran ekonomi alternatif yang diangkat dari nilai-nilai budaya lokal secara sosiologi maupun antropologi dan juga nilai-nilai agama yang hidup di Kepulauan Nusantara (baik agama Samawi maupun local) yang dikawinkan dengan nilai-nilai modern yaitu inovasi, efisiensi dan digitalisasi. Pendek kata Nusantaranomics adalah sebuah ekonomi hybrid yang berakar dari tradisi dan filosofi etnik Nusantara yang beragam. Gagasan ini awalnya digaungkan oleh Prof. Dr. Didin S. Damanhuri dalam berbagai forum ilmiah dan tulisan di media massa koran. Selanjutnya, beliau praksiskan dalam bentuk pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S-3) khususnya di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB. Dari karya-karya ilmiah itulah bahan buku ini disusun lewat proses *Focus Group Discussion* (FGD) sehingga melahirkan buku yang hadir dihadapan pembaca. Tulisan yang disajikan dalam buku ini merupakan sintesis dari hasil diskusi yang telah diselenggarakan selama FGD sepanjang tahun 2022.

Dari sejumlah penulis dan pembahas yang tercantum dalam buku ini setidaknya telah melahirkan model-model pemikiran ekonomi alternatif dan kewirausahaan *genuine* khas masyarakat Kepulauan Nusantara yang hidup serta berdaya tahan tinggi hingga kini. Buku yang berjumlah 13 bab ini diharapkan akan menjadi "miles stone" baru dalam pemikiran ekonomi khas Indonesia yang dikonstruksikan ulang dengan kemajuan teknologi (digitalisasi), inovasi, dan efisiensi. Kelak akan melahirkan suatu Haluan pemikiran ekonomi Indonesia yang tidak lagi mengikuti arus pemikiran global yang belum tentu adaptif dengan kondisi sosiokultural, nilai-nilai kearifan lokal, ekologi, geografi, dan klimatologi Indonesia. Pasalnya, kerap kali yang diadopsi dari pemikiran luar justru mengalami kegagalan hingga memicu korupsi dan moral hazard yang mengakibatkan jauh panggang dari api mensejahterakan rakyat. Apalagi, konsep-konsep yang ditawarkan lembaga-lembaga keuangan internasional itu dibiayai oleh utang luar negeri. Akibatnya, menambah beban negara akibat utangnya bertambah. Oleh karena itu buku ini kelal menjadi oase untuk mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi ekonomi Indonesia dengan pendekatan baru yang khas.



PT Penerbit IPB Press

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251-8355 158 E-mail: ipbpress@apps.ipb.ac.id

Penerbit IPB Press ipbpress.official ipbpress.com

Ekonomi

ISBN : 978-623-467-703-4



Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris (Pendekatan Heterodoks)

NUSANTARANOMICS

Editor

Didin S. Damanhuri | Muhamad Karim | Auhadillah Azizy



NUSANTARANOMICS

Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris
(Pendekatan Heterodoks)



Penulis

Didin S. Damanhuri | Ahmad Erani Yustika | Arya Hadi Darmawan | A. Prasetyantoko
Andi Ishak | Bagong Suyanto | Endriatmo Sutarto | Elvawati | Fachru Nofrian
Gumilar Rusliwa Somantri | Haryono | Lala Kolopaking | Joharatul Jamilah
Iwan Nurhadi | Muhamad Karim | Muhammad Syukur | P. Setia Lenggono
Rokhani | Sofyan Sjaf | Umar Juoro



NUSANTARANOMICS

Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris
(Pendekatan Heterodoks)





NUSANTARANOMICS

Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris (Pendekatan Heterodoks)

Penulis:

Didin S. Damanhuri | Ahmad Erani Yustika | Arya Hadi Darmawan
A. Prasetyantoko | Andi Ishak | Bagong Suyanto | Endriatmo Sutarto
Elvawati | Fachru Nofrian | Gumilar Rusliwa Somantri | Haryono
Lala Kolopaking | Joharatul Jamilah | Iwan Nurhadi | Muhamad Karim
Muhammad Syukur | P. Setia Lenggono | Rokhani | Sofyan Sjaf | Umar Juoro

Editor:

Didin S. Damanhuri | Muhamad Karim | Auhadillah Azizy



Penerbit IPB Press
Jalan Taman Kencana No. 3,
Kota Bogor - Indonesia

C.01/02.2023

Judul Buku:

Nusantaranomics
Paradigma Teori dan Pengalaman Empiris (Pendekatan Heterodoks)

Penulis:

Didin S. Damanhuri | Ahmad Erani Yustika | Arya Hadi Darmawan | A. Prasetyantoko
Andi Ishak | Bagong Suyanto | Endriatmo Sutarto | Elvawati | Fachru Nofrian
Gumilar Rusliwa Somantri | Haryono | Lala Kolopaking | Joharatul Jamilah
Iwan Nurhadi | Muhamad Karim | Muhammad Syukur | P. Setia Lenggono
Rokhani | Sofyan Sjaf | Umar Juoro

Editor:

Didin S. Damanhuri | Muhamad Karim | Auhadillah Azizy

Penyunting Bahasa:

Atika Mayang Sari | Masbantar Sangadji | Pirlu Ramdhani | Muh. Firmansyah

Desain Sampul & Penata Isi:

Mokhammad Zulfatul Basith

Sumber Foto:

Unsplash.com

Jumlah Halaman:

332 + 26 hal romawi

Edisi/Cetakan:

Cetakan 1, Februari 2023

Diterbitkan dan dicetak oleh:

PT Penerbit IPB Press

Anggota IKAPI

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@apps.ipb.ac.id

www.ipbpress.com

ISBN : 978-623-467-703-4

© 2023, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku

tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.S

Rektor IPB University

Dalam pembangunan ekonominya dewasa ini, Indonesia membutuhkan dan mendisain suatu pendekatan baru yang khas dan bersifat *genuine*. Pendekatan ini diperlukan karena adanya karakter geografis dan sumberdaya alam yang melimpah serta sosial budaya masyarakat yang sangat beragam. Di samping itu, sebagian masyarakat Indonesia yang beragam belum tentu mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi kian cepat. Salah satu jawabannya adalah bagaimana mengongkritkan aksi *Pancasilanomics* dan merevitalisasi *Nusantaranomics*. Pendekatan ini juga menjadi anti tesis dominasi pemikiran ekonomi global sejak perang dunia kedua hingga saat ini. Setelah perang dunia kedua, pemikiran ekonomi dunia didominasi proyek modernisasi, ekonomi klasik maupun neoklasik.

Salah satu pendekatan di luar dominasi ekonomi klasik dan neo klasik yang berkembang di dunia yaitu heterodoks/eklektik. Prof. Didin S. Damanhuri merupakan salah satu pemikir ekonomi politik Indonesia dan dikenal banyak menggunakan pendekatan heterodoks dalam analisis maupun penyampaian gagasan-gagasannya. Hal itu dapat ditemui di berbagai tulisannya, termasuk dalam proses pembimbingan mahasiswa di IPB. Salah satu pemikiran beliau yang menonjol dan bercorak heterodoks adalah gagasannya tentang *Pancasilanomic* dan *Nusantaranomics*.

Pancasilanomics maupun *Nusantaranomics* bisa menjadi alternatif di luar pendekatan ekonomi arus utama yang mendominasi dunia. Namun, dalam konteks pemikiran, *Pancasilanomics* maupun *Nusantaranomics* perlu dibangun basis ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Dengan demikian pemikiran ini bakal terus bergulir sebagai kekuatan baru. Di samping itu,

perlu juga mengeksplorasi kekuatan-kekuatan potensi lokal dan pemikiran orisinal lainnya lewat riset. Sehingga akan berkembang pemikiran ekonomi yang membumi berdasarkan realitas Indonesia.

Implikasinya, bangsa Indonesia akan mampu membangun kepercayaan diri yang kuat dengan menggunakan kacamata, teori dan pendekatan yang tepat. Hal ini pada gilirannya akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan struktural yang dihadapi bangsa ini seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, ancaman krisis pangan dan dampak perubahan iklim global.

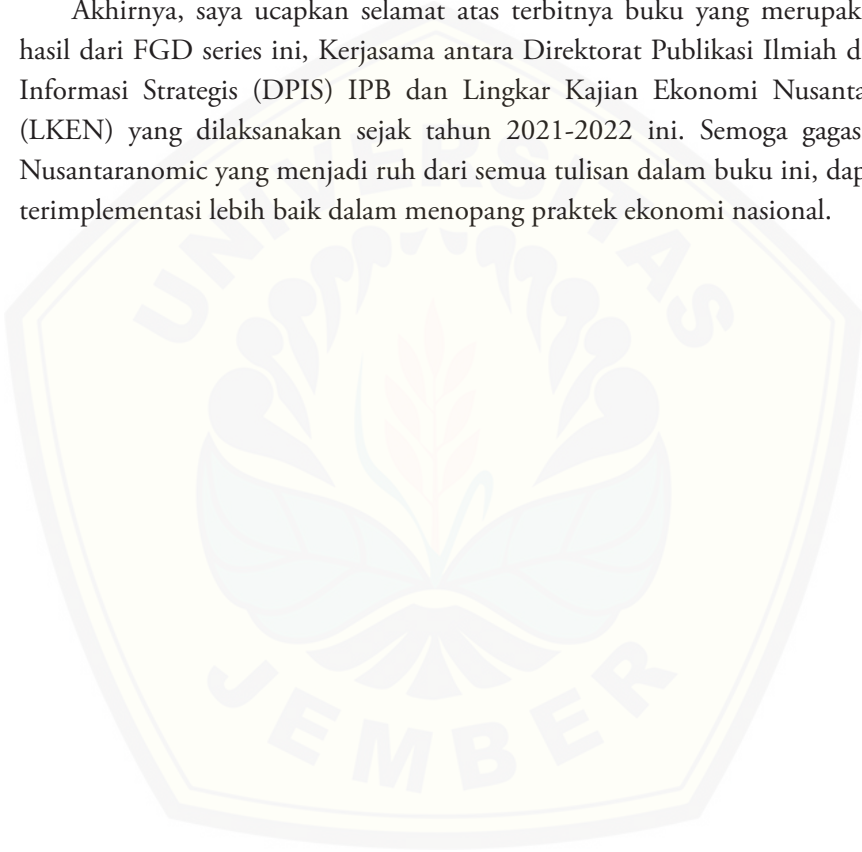
Secara kontekstual, pendekatan pluralisme dalam pemikiran pembangunan secara ekonomi, sosial dan budaya menjadi keniscayaan. Pasalnya, tidak ada pemikiran pembangunan di dunia ini yang bersifat tunggal. Gagasan *Nusantaranomcis* diharapkan nantinya akan menghasilkan pemikiran orisinal khas yang mengkristal dan mewarnai pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan sehingga berpotensi mendorong pencapaiannya sebagai negara maju tahun 2045.

Ide Nusantaranomic yang digagas oleh Prof. Didin S. Damanhuri beserta para kolega, merupakan gagasan alternatif yang potensial untuk dikembangkan khususnya dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah. Setiap daerah tentu memiliki tipologi dan keunikan tersendiri dalam praktek ekonominya dan hal itu dapat menjadi kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Nusantaranomics merupakan praktek ekonomi yang berakar dari tradisi, budaya, corak etnisitas dan semangat agama. Keberadaannya sudah berkembang lama dan membudaya di lingkungan masyarakat Indonesia dan bersifat resilien di kala krisis ekonomi menerpa. Namun keberadaannya perlu beradaptasi dengan kondisi zaman yang semakin terdisrupsi.

Buku ini, memberikan contoh dan gambaran bagaimana praktek nusantaranomic berkembang di daerah. Isi dari buku merupakan hasil disertasi yang sudah mendapatkan pengujian dan pengakuan dari kampus, *plus* dibenturkan dengan tanggapan dan pandangan dari para pakar ekonomi yang disampaikan dalam forum diskusi terbuka, dalam sesi *Focus Group Discussion* (FGD).

Melalui buku ini tentunya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan semua pihak dalam memetakan kekuatan potensi ekonomi di daerahnya. Dengan demikian diharapkan ekonomi daerah tumbuh kuat dan menjadi penopang utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Akhirnya, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku yang merupakan hasil dari FGD series ini, Kerjasama antara Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB dan Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN) yang dilaksanakan sejak tahun 2021-2022 ini. Semoga gagasan Nusantaranomic yang menjadi ruh dari semua tulisan dalam buku ini, dapat terimplementasi lebih baik dalam menopang praktek ekonomi nasional.





KATA PENGANTAR

Dr. Eva Anggraini, S.Pi., M.Si

Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis
IPB University

Perdesaan merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama ini, karena sebagian besar bahan baku bagi industri disuplai oleh kawasan ini. Namun paradigma pembangunan *urban bias*, yang lebih memprioritaskan peran perkotaan, seperti gayung bersambut dengan paradigma *urban phobia*, di mana kekhawatiran akan dampak negatif dari pertumbuhan wilayah perkotaan yang pesat, khususnya pada aspek sosial dan ekologi, mendorong isolasi wilayah perdesaan agar bebas dari kontaminasi perkotaan. Akibatnya perdesaan hanya difokuskan untuk kegiatan pertanian dan eksploitasi sumberdaya alam. Argumentasi ini memotivasi kajian IPB yang dipublikasikan dalam sebuah buku berjudul “Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Perdesaan”. Buku tersebut mengulas tentang peran penting perdesaan dalam pembangunan, serta instrumen untuk membangun ekosistem yang berketahanan dan bisnis perdesaan berbasis keunggulan lokal, agar perdesaan bisa menjadi lokomotif ekonomi nasional, bukan hanya sebagai elemen pendukung (Anggraini *et al.*, 2021). Kajian tersebut memberikan pesan bahwa pergeseran paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia untuk menempatkan perdesaan pada episentrum perekonomian benar-benar perlu didorong. Menjadikan perdesaan sebagai lokomotif ekonomi bukan untuk dimaknai sebagai pengurusan sumberdaya alam, namun sebaliknya, dengan menjadikannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi komitmen pelestarian sumberdaya alam pun semakin kuat dijalankan. Ekonomi yang dibangun dengan fondasi keunggulan lokal akan membangun ketahanan ekonomi yang kuat (*economic resiliency*).

Hasil kajian yang diuraikan di atas sangat selaras dengan pemikiran Nusantaranomics yang diulas di dalam buku ini. Sebagai sebuah model ekonomi, **Nusantaranomics bukan mengusung penyeragaman, melainkan keberagaman aplikasi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.** Artinya, keunggulan lokal, baik dalam bentuk sumberdaya alam/biofisik, sumberdaya manusia/keterampilan, maupun seni dan budaya, menjadi basis dari pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan didukung oleh modal sosial yang kuat, wirausaha lokal (*local entrepreneurship*) memiliki spirit yang membuatnya bisa langgeng dari masa ke masa. Keberagaman model ekonomi lokal ini tidak hanya merupakan kekayaan Indonesia, namun justru menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi disrupsi global yang akhir-akhir ini terjadi.

Menjadikan Nusantaranomics sebagai model pembangunan ekonomi wilayah dan nasional tentu memiliki tantangan, apalagi di era globalisasi, digitalisasi serta disrupsi yang penuh ketidakpastian. Berikut adalah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, meningkatkan kesiapan SDM lokal untuk menciptakan dan mengembangkan perekonomian yang sehat dan memiliki resiliensi. Meskipun banyak model ekonomi lokal merupakan warisan turun-temurun, namun peningkatan pengetahuan dan keterampilan sangat dibutuhkan agar bisa mengantisipasi dan merespons disrupsi global secara tepat. Untuk itu faktor *kedua*, yaitu dukungan pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memikirkan upaya peningkatan SDM lokal untuk bisa menjawab kebutuhan dan tantangan global. Kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya dengan perguruan tinggi untuk pengembangan sekolah vokasi, merupakan salah satu upaya yang perlu ditempuh. Tidak hanya itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi yang selektif, yaitu yang memajukan bukan sebaliknya yang mengamputi geliat ekonomi lokal. *Ketiga*, SDM lokal perlu terbuka dalam mengadopsi inovasi untuk peningkatan daya saing. Inovasi akan terus menjadi motor penting dalam ekonomi, karena permintaan pasar sangat dinamis, sehingga hilirisasi inovasi tepat guna perlu menjangkau pelaku-pelaku ekonomi lokal. *Keempat*, menciptakan dan mempertahankan ekosistem yang sehat (ekologi dan sosial) bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Di sini peran kelembagaan lokal formal dan informal menjadi sangat penting, namun tentunya harus selaras dengan regulasi pemerintah.

Di sisi lain pun, regulasi pemerintah yang bias konglomerasi dalam penguasaan sumberdaya alam perlu benar-benar dikendalikan, agar tidak meminggirkan dan mengorbankan kepentingan masyarakat lokal.

Pemikiran Nusantaranomics ini perlu disebarluaskan agar menjadi spirit bagi pertumbuhan ekonomi lokal, serta untuk memupuk harapan terbangunnya ketahanan ekonomi nasional. Implementasi Nusantaranomics yang berkelanjutan akan sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mewujudkan *green economy* (dan termasuk di dalamnya *blue economy*). Di masa yang akan datang pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari pengolahan sumberdaya alam, namun juga jasa ekosistem (seperti biodiversitas dan penyimpan cadangan karbon). Oleh karena itu, pengembangan model ekonomi lokal (Nusantaranomics) untuk jasa lingkungan/*intangible asset*, seperti perdagangan karbon dan *bioprospecting*, juga sangat terbuka lebar.





PENGANTAR EDITOR

Prof. Dr. Didin S Damanhuri adalah Guru Besar Ekonomi Politik dan Pembangunan IPB University. Beliau termasuk salah satu “empuhnya” pemikir Ekonomi Politik Mazhab Heterodoks/Eklektik di Indonesia. Penyematan gelar ini tak berlebihan. Pasalnya, nyaris semua pemikiran beliau yang tersurat dalam seratusan buku, ratusan artikel dalam dan luar negeri, dan jurnal yang mencerminkan mazhab itu. Mazhab pemikiran ekonomi politik yang menyempal dari model kapitalisme dan sosialisme/strukturalisme. Gagasan dan cita-cita beliau adalah hendak membangun *School of thought* tersebut di Indonesia dengan mengkonstruksi ekonomi khas Nusantara (Nusantaranomics) yang dipengaruhi sosio-antropologi, sosiologi, kebudayaan etnik dan kearifan lokal secara ekologi dan ekonomi.

Beliau hendak membumikan pemikiran para pendiri negara yang dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945 melalui revitalisasi dan transformasi nusantaranomics. Apalagi di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memengaruhi semua aspek kehidupan. Meskipun teknologi informasi itu hanyalah “alat” (*tools*) akan tetapi tak hanya mampu mendisrupsi semua aspek kehidupan sosial ekonomi. Melainkan juga melahirkan generasi baru dengan budaya baru. Prof. Didin ingin mentransformasikan nusantaranomics di era digital yang tak hanya melahirkan varian baru dalam pemikiran ekonomi. Melainkan juga dipraksiskan sebagai alternatif dalam membangun ekonomi nasional. Kemajuan negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia yaitu Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Cina akibat berkelindannya tiga hal dalam pembangunan ekonomi yaitu (i) nilai-nilai tradisi (*cultural values*); (ii) nilai-nilai modern yang diadopsi dari barat seperti efisiensi dan inovasi, dan (iii) nilai-nilai agama (*religion values*) yakni konfusianisme, Budhisme dan Islam. Akibatnya, yang muncul adalah model pembangunan ekonomi “khas” Asia yang beliau namakan nilai-nilai Asia (*Asian Values*).

Inilah yang menginspirasi beliau untuk merevitalisasi dan mentransformasikan Nusantaranomics. Menurut Damanhuri (2021), ide dasar Nusantaranomics adalah sebuah sistem ekonomi-politik yang berlandaskan ekonomi lokal, dengan praktik-praktik dan nilai-nilai lokal yang ada. Barangkali tidak rasional dalam kaca mata ekonomi dominan (baca: kapitalisme) saat ini, namun, terbukti efektif. Prof. Didin bersama sejawat dan bimbingan mahasiswanya telah mengumpulkan berbagai contoh praktik Nusantaranomics. Mulai dari praktik ekonomi lokal di Bugis, Jawa, Sunda, Batak hingga Minang, yang terbukti terus berkembang tanpa tergerus di era globalisasi. Nusantaranomics nantinya bakal menjadi sebuah mazhab ekonomi-politik Indonesia yang diangkat dari praktik-praktik dan nilai-nilai nyata yang bekerja dalam masyarakat. Praktik-praktik ini diformalkan menjadi sebuah mazhab—sebagaimana dahulu Bung Karno dan anggota BPUPKI lainnya merumuskan Pancasila. Gagasan tentang Nusantaranomics ini sejatinya merupakan aksi nyata dari sistem Ekonomi Pancasila.

Pemikiran ini di negara-negara Asia sudah terbukti eksis yang dikenal sebagai macan Asia. Mereka pun tetap eksis dan menjadi negara maju meskipun di tengah kemajuan teknologi informasi. Mereka juga mampu beradaptasi di era disrupsi ekonomi digital dan mentransformasi dirinya dalam mencapai keseimbangan baru dalam percaturan ekonomi global. Prof. Didin hendak meniru negara-negara macan Asia tersebut karena Indonesia memiliki keragaman budaya dengan kekhasan ekonomi berbasis etnik. Juga, nilai-nilai agama yang kuat dianut masyarakat Indonesia. Makanya, tak berlebihan jika Indonesia diramalkan bakal menjelma jadi negara maju dengan ekonomi yang menempati peringkat lima di dunia tahun 2045.

Gagasan ekonomi Nusantara yang digaungkan Prof. Didin telah melahirkan model kewirausahaan *genuine* khas masyarakat Nusantara. Pemikiran Prof. Didin ini persis dengan yang dikemukakan pakar ekonomi etnik, Mobasher. Mobasher (2002) menyatakan bahwa wirausaha sosial khas Indonesia lebih menekankan pada dimensi aktivitas kewirausahaan berbasiskan kebiasaan etnik (*ethnic based entrepreneurial activities*). Kelompok etnik berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang bermigrasi ke kota-kota besar juga ikut membawa dan mengembangkan ciri khas aktivitas ekonominya.

Dengan demikian, mereka itu dianggap sebagai bagian dari aktivitas ekonomi etnik tersebut. Contohnya, etnik Minangkabau dengan warung Padangnya, etnik Jawa dengan warung Tegalnya, bisnis besi tua orang Madura dan batik dari Jawa Tengah, Solo hingga Yogyakarta.

Bukan hanya Mobasher, pakar ekonomi etnik lainnya Light and Gold (2000) mendefinisikan kewirausahaan sosial khas Indonesia berbasiskan ekonomi milik kelompok etnik, sekaligus sebagai sumber daya ekonomi yang dimaknai berada dalam kendali etnik tersebut. Ida (2014) mengategorikan ekonomi etnik di Indonesia: *pertama*, kegiatan ekonomi suku-suku penghuni awal (asli) dari suatu daerah, yang dimiliki dan/atau diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Berbagai aktivitas ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan umumnya berlangsung secara subsisten. Aktivitas yang dilakukan yaitu kebiasaan berburu binatang untuk dikonsumsi secara terbatas, maupun diperdagangkan sebagai sumber pendapatan keluarga. Contohnya konkretnya yaitu berburu paus secara adat di daerah Lamalera di Nusa Tenggara Timur (NTT), meskipun ini bersifat adat dan tidak diperdagangkan.

Kedua, produk (kreasi) budaya. Produk ini ini dikembangkan orang-orang dari suatu etnik berbentuk kerajinan tangan yang termasuk bagian kreasi budaya. Kreasi budaya ini merupakan wujud dari kewirausahaan beridentitas khusus dan berperan juga sebagai sumber nafkah keluarga. Contohnya, batik di Jawa dan kain tenun di berbagai daerah.

Ketiga, sumber daya alam yang ada dalam komunitas etnik. Berbagai etnik di negeri ini mendiami daerah/wilayahnya secara turun-temurun dengan sumber daya yang khas. Oleh karena itu mereka mestinya diposisikan sebagai pemilik otentik sumber daya alam tersebut yang juga melekat dalam kehidupan kesehariannya.

Jika dicermati secara substansial, pola-pola wirausaha sosial khas Indonesia yang merupakan perwujudan cara ekonomi yang berkebudayaan sesungguhnya merupakan manifestasi dari Sistem Ekonomi Pancasila pada tataran aksi. Hal ini dibenarkan Prof. Mochtar Naim dkk (1987) dalam sebuah buku berjudul “**Jurus Manajemen Indonesia. Sistem Pengelolaan Restoran**

Minang sebuah *Prototype* Sistem Ekonomi Pancasila” yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia. Buku ini mengulas secara khusus tentang *prototype* Warung/Restoran Padang sebagai model khas praktik Sistem Ekonomi Pancasila, sekaligus sebagai model kewirausahaan sosial Indonesia berbasis etnik.

Inilah salah satu model manifestasi “Nusantaranomics” yaitu suatu model ekonomi alternatif berkebudayaan yang melekat pada komunitas etnik itu sendiri (*embedded*). Hal ini sejalan dengan pemikiran Healy (2009) yang menyatakan bahwa: (i) ekonomi alternatif merupakan proses produksi, pertukaran, tenaga kerja/kompensasi, keuangan, dan konsumsi yang berbeda dari kegiatan ekonomi arus utama (kapitalis); dan (ii) ekonomi alternatif merepresentasikan ruang sosial yang beragam/heterogen dan proliferaif (memperbanyak bentuk yang sama).

Dalam pandangan Damahuri bahwa model ekonomi Nusantara yang berkebudayaan etnik ini merupakan salah satu model pendekatan heterodoks dalam pembangunan ekonomi yang harus didorong di Indonesia agar mencapai pemerataan yang berkeadilan. Damahuri tak hanya mendorongnya pada tataran ontologis maupun epistemologis. Melainkan, juga telah mengkonsolidasikan dalam bentuk aksiologi lewat bimbingan berbagai riset mahasiswa S1, S2 dan S3 yang mengkhususkan pada ekonomi Nusantara berkebudayaan etnik ini di IPB University, Bogor. Riset-riset tersebut dilakukan melalui pendekatan-pendekatan ekonomi politik heterodoks yang jadi “*trade mark*”-nya dan beraliran di luar arus utama pemikiran ekonomi (**Muhamad Karim dan Auhadilah Azizy**).

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.S...... v

KATA PENGANTAR

Dr. Eva Anggraini, S.Pi., M.Si ix

PENGANTAR EDITOR..... xiii

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xxiii

DAFTAR GAMBAR.....xxv

PROLOG NUSANTARANOMICS: NEGARA KESEJAHTERAAN ALA INDONESIA

Didin S Damanhuri 1

Ketimpangan sebagai Problem Pembangunan di Indonesia.....2

Negara Kesejahteraan ala Eropa.....6

Negara Kesejahteraan ala *Asian Way*.....7

Negara Kesejahteraan ala Indonesia8

Ekonomi Pasar Pancasila: Aras Nasional Nusantaranomics10

Nusantaranomics: *Living Pancasila*omics di Aras Daerah.....15

Transformasi Nusantaranomics dalam ranah Keilmuan20

“*Epistemological Trap*”21

“*Heterodoxi* Pembangunan”25

1. APA ITU NUSANTARANOMICS?29

1.1 Nusantaranomics: Didin S. Damanhuri29

1.2 Nusantara Nusantaranomics: A. Prasetyantoko41

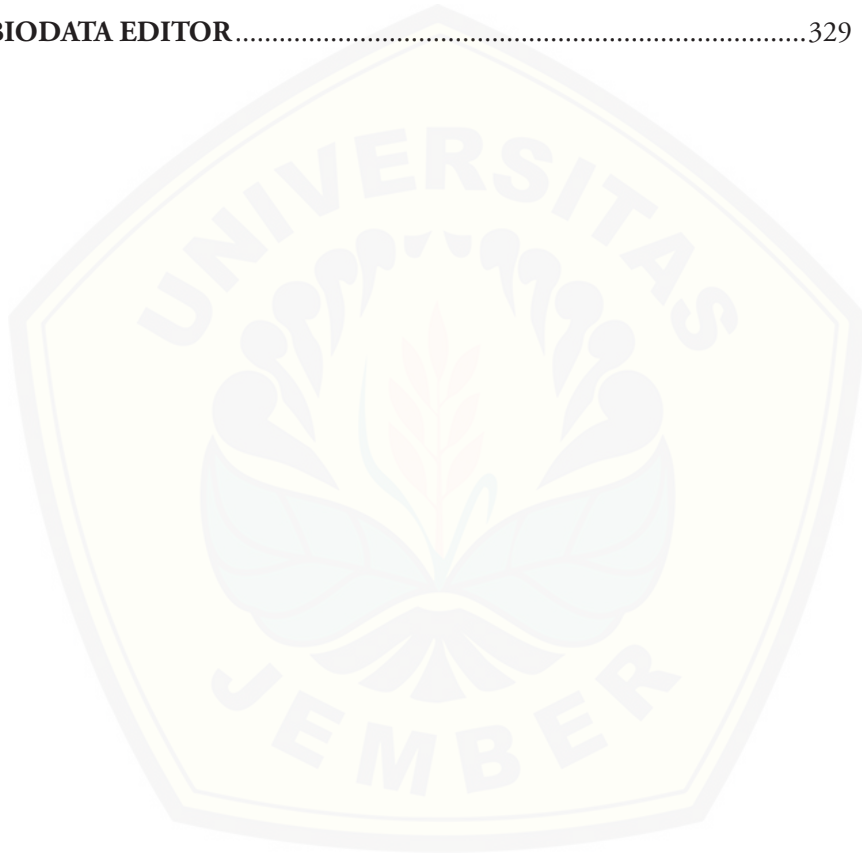
| | |
|--|-----|
| 2. LANDASAN TEORI NUSANTARANOMICS | 49 |
| 2.1 Teori Heterodoks: Muhamad Karim..... | 49 |
| 2.2 Teori Ekonomi Heterodoks: Fachru Nofrian | 62 |
| 2.3 Teori Ekonomi Kelembagaan: Ahmad Erani Yustika..... | 74 |
| 2.4 Teori Ilmu Sosial: Arya Hadi Darmawan | 81 |
| 3. KEWIRAUSAHAAN LOKAL DAN ETNIK DALAM MEMBANGUN EKONOMI DAERAH DAN PEDESAAN | |
| <i>Endriatmo Sutarto</i> | 89 |
| 3.1 Peluruhan “Etos Kolektif Resiprokal” dan Senjakala Sosial Safety Net bagi Masyarakat Desa dan Daerah | 90 |
| 3.2 “Korporatisme Negara dan Korporatisme Masyarakat” dan Dampak Eksesifnya pada Sendi-Sendi Kehidupan Sosial..... | 92 |
| 3.3 Bagaimana Memposisikan Wirausahawan Lokal dalam Konteks Transformasi Kultural-Struktural Pedesaan | 94 |
| 3.4 Penutup..... | 97 |
| 4. TANTANGAN POLITIK ETNIK DI ERA DIGITAL: PENGALAMAN EMPIRIS DALAM PEMBANGUNAN REGIONAL SULAWESI TENGGARA | |
| <i>Sofyan Sjaf</i> | 99 |
| 5. PRAKSIS SISTEM EKONOMI PANCASILA ALA “WIRUSAHA ETNIK BUGIS” DI KALIMANTAN TIMUR: PENGALAMAN PERIKANAN UDANG DI DELTA MAHAKAM | |
| <i>P. Setia Lenggono</i> | 111 |
| 5.1 Pembentukan Ekonomi Lokal | 111 |
| 5.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Lokal Terhadap Perubahan <i>Landscape</i> Ekologi | 117 |
| 5.3 Proses Reproduksi Ekonomi Lokal | 118 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| 5.4 | Pertumbuhan Ekonomi Lokal dalam Kelangkaan Sumberdaya Alam | 121 |
| 5.5 | Implikasi Teoretis | 134 |
| 5.6 | Implikasi Kebijakan | 135 |
| 5.7 | Catatan Kritis | 136 |
| 6. | PRAKSIS EKONOMI NUSANTARA ALA MASYARAKAT WAJO. SULAWESI SELATAN BERBASIS TENUNAN | |
| | <i>Muhammad Syukur</i> | 139 |
| 6.1 | Sejarah Perkembangan Tenun di Kabupaten Wajo | 143 |
| 6.2 | Tenun Bugis sebagai Praktik Ekonomi Nusanara (Nusantaranomics) | 144 |
| 6.3 | Tindakan Ekonomi Penenun Bugis | 149 |
| 7. | KONTRIBUSI EKONOMI DARI WIRUSAHA LOKAL BERBASIS KOPI: PELAJARAN DARI KABUPATEN SIMALUNGUN, SUMUT | |
| | <i>Rokhani</i> | 159 |
| 7.1 | Kolektivitas Ekonomi | 162 |
| 7.2 | Konstruksi Teori | 167 |
| 7.3 | <i>Empirical Evidence</i> : Kontribusi Ekonomi dari Wirusaha Lokal Berbasis Kopi di Kabupaten Simalungun | 171 |
| 7.4 | <i>Novelty</i> | 174 |
| 8. | DARI WIRUSAHA LOKAL MENUJU EKONOMI GLOBAL: PENGALAMAN DAN HISTORIS WIRUSAHA INDUSTRI BORDIR TASIKMALAYA DALAM PEREKONOMIAN LOKAL DAN GLOBAL | |
| | <i>Joharatul Jamilah</i> | 179 |
| 8.1 | Sejarah Transformasi Industri Bordir Tasikmalaya | 181 |
| 8.2 | Penggunaan Alat Kerajinan Bordir dari Masa ke Masa | 187 |
| 8.3 | Perubahan Motif dan Jenis Kerajinan Bordir dari Masa ke Masa | 189 |

| | | |
|------------|--|-----|
| 8.4 | Etika Moral, Jaringan Sosial, dan Tindakan Ekonomi Pengusaha Bordir..... | 190 |
| 8.5 | Isomorphisme Tindakan Ekonomi Pengusaha Bordir | 191 |
| 8.6 | Tipologi Pengusaha Bordir dan Jaringan Sosial..... | 194 |
| 8.7 | Jaringan Sosial Pengusaha Bordir..... | 197 |
| 8.8 | Ketahanan Industri Bordir: Keterlekatan Religio-Kultural dalam Jaringan Sosial..... | 201 |
| 8.9 | Ketahanan Industri Bordir: Perspektif Menak-Cacah..... | 202 |
| 9. | SOLIDARITAS PETANI DALAM MEMAJUKAN DESA DAN EKONOMI PEDESAAN (PELAJARAN DARI KONVERSI SIKLIKAL SAWAH - KELAPA SAWIT - SAWAH DI PEDESAAN BENGKULU) | |
| | <i>Andi Ishak</i> | 207 |
| 9.1 | Pendahuluan | 207 |
| 9.2 | Sistem Pertanian Masyarakat Air Manjuntjo..... | 211 |
| 9.3 | Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Mukomuko | 213 |
| 9.4 | Konversi Siklikal Sawah Irigasi di Air Manjuntjo..... | 217 |
| 9.5 | Penutup..... | 227 |
| 10. | SOLIDARITAS EKONOMI RAKYAT BERBASIS SAWIT VIS A VIS KORPORASI NASIONAL DAN ASING. KASUS SUMATRA BARAT | |
| | <i>Elvawati</i> | 229 |
| 10.1 | Ekspansi Kelapa Sawit: Transformasi Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani..... | 231 |
| 10.2 | Pergeseran Preferensi Rumah Tangga Petani..... | 232 |
| 10.3 | Transformasi Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani Lokal dan Transmigran..... | 235 |

| | | |
|------------|--|-----|
| 10.4 | Tipologi Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit Pasca Transformasi..... | 240 |
| 10.5 | <i>Heterodoks</i> sebagai Dasar Solidaritas Ekonomi Petani Sawit Minangkabau | 241 |
| 11. | TANTANGAN DAN PROSPEK WIRUSAHA ROTAN DI ERA INDUSTRI 4.0. PENGALAMAN DAN HISTORIS INDUSTRI ROTAN DI CIREBON | |
| | <i>Haryono</i> | 245 |
| 11.1 | Tindakan Ekonomi <i>Local Genuine Entrepreneurship</i> (LGE) di Cirebon..... | 248 |
| 11.2 | Peta Aksi Ekonomi di Jejaring Sosial..... | 256 |
| 12. | CREATIVEPRENEUR BERBASISKAN FESTIVAL DAN KEARIFAN LOKAL SUKU OSING DI BANYUWANGI | |
| | <i>Iwan Nurbadi</i> | 259 |
| 12.1 | Komodifikasi Budaya dan Transisi Etik dalam Perkembangan Pariwisata: Potret Suku Osing, Indonesia..... | 259 |
| 12.2 | Komodifikasi Budaya Osing sebagai Bentuk <i>Creativepreneur</i> | 266 |
| 12.3 | Utilitarianisme Konsekuensialisme Sebagai Etika Moral Ekonomi Osing dalam Kegiatan Pariwisata | 278 |
| 12.4 | <i>Creativepreneur</i> Suku Osing dalam bingkai Nusantaranomics ... | 284 |
| 13. | DIALEKTIKA PEMIKIRAN PAKAR TENTANG NUSANTARANOMICS | 289 |
| 13.1 | Solidaritas Ekonomi Rakyat dan Kewirausahaan Lokal dalam Menghadapi Tantangan Global: Prof. Bagong Suyanto... | 289 |
| 13.2 | Nusantaranomics; Ekonomi Kreatif dan Digital untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Dr. Umar Juoro..... | 290 |
| 13.3 | Reorientasi Ekonomi Indonesia Berbasis Ekonomi Nusantara: Gumilar Rusliwa Somantri | 293 |

| | |
|---|------------|
| 13.4 Digitalisasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Lokal pada Era Transisi Post-COVID19: Lala M. Kolopaking..... | 299 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 303 |
| BIODATA PENULIS & EDITOR | 315 |
| BIODATA EDITOR | 329 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 2.1 | Kritik Boyer terhadap Teori Neo-Klasik | 54 |
| Tabel 2.2 | Perbedaan pendekatan ekonomi heterodoks dengan konvensional | 58 |
| Tabel 2.3 | Paradoks-paradoks dalam ekonomi | 63 |
| Tabel 2.4 | Tantangan dan di tingkat global..... | 63 |
| Tabel 2.5 | Perbedaan Pendekatan Ekonomi Heterodoks dan Arus Utama..... | 64 |
| Tabel 2.6 | Perbedaan ekonomi neo-klasik dan <i>Regulation</i> (Heterodoks).... | 65 |
| Tabel 2.7 | Model-model ekonomi berdasarkan Teori Regulasi | 71 |
| Tabel 4.1 | Identifikasi praktik dalam arena ekonomi politik lokal di Kota Kendari | 105 |
| Tabel 7.1 | Identifikasi lembaga lokal berdasarkan konsep modal dan habitus Bourdieu di Nagori Sait Buttu Saribu, Kabupaten Simalungun 2016 | 160 |
| Tabel 8.1 | Contoh keterlekatan etika ekonomi dalam tindakan ekonomi pengusaha bordir..... | 191 |
| Tabel 8.2 | Beberapa contoh kesamaan tindakan ekonomi pengusaha bordir | 193 |
| Tabel 8.3 | Jaringan sosial pada 3 tipologi pengusaha bordir di Tasikmalaya | 201 |
| Tabel 8.4 | Lapisan sosial masyarakat Tasikmalaya kontemporer dalam kegiatan bordir | 204 |
| Tabel 9.1 | Jenis-jenis pertemuan warga di Dusun 7 Desa Tirta Mulya, Air Manjuntou..... | 212 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 9.2 | Kebun kelapa sawit yang dikonversi menjadi sawah secara swadaya oleh petani ekstrasmigran di Air Manjuntjo..... | 223 |
| Tabel 9.3 | Lokasi cetak sawah di Air Manjuntjo tahun 2017 | 225 |
| Tabel 10.1 | Tipologi rumah tangga petani kelapa sawit berdasarkan sektor dominan pasca transformasi..... | 240 |
| Tabel 10.2 | Solidaritas ekonomi dalam struktur neo dualisme | 243 |
| Tabel 11.1 | Data jumlah unit usaha dan tenaga kerja di industri rotan | 250 |
| Tabel 11.2 | Volume dan nilai ekspor mebel Kabupaten Cirebon tahun 2004–2010 | 250 |
| Tabel 11.3 | Perkembangan industri rotan di Kabupaten Cirebon tahun 2014–2017 | 252 |
| Tabel 11.4 | Nilai Lokal Masyarakat Cirebon | 256 |
| Tabel 11.5 | Jejaring sosial dalam manfaat ekonomi..... | 258 |
| Tabel 12.1 | Capaian indikator kinerja Kabupaten Banyuwangi periode 2010–2018..... | 260 |
| Tabel 12.2 | Komodifikasi ritual budaya Osing..... | 271 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|-----|
| Gambar 2.1 | Peta Pemikiran Heterodoks dalam Makro Ekonomi | 56 |
| Gambar 2.2 | Teori-teori yang Mempengaruhi <i>Regulation</i> (Boyer 1995) | 69 |
| Gambar 2.3 | Peta sejarah pemikiran dan Teori Ekonomi | 84 |
| Gambar 4.1 | Peta sebaran etnik di Indonesia | 100 |
| Gambar 4.2 | Posisi etnisitas -subjektivitas dan objektivikasi | 101 |
| Gambar 4.3 | Indeks gini rasio di Kota Kendari sebelum dan sesudah Pilkada 2010 | 103 |
| Gambar 4.4 | Posisi atau kedudukan pejabat berdasarkan etnis di pemerintahan Kota Kendari | 107 |
| Gambar 7.1 | Integrasi lembaga lokal di Nagori Sait Buttu Saribu, Kabupaten Simalungun 2016 | 164 |
| Gambar 8.1 | Bagan ketahanan industri bordir di Tasikmalaya | 202 |
| Gambar 8.2 | Transformasi Menak-Cacah dari Feodal-Tradisional ke Modern-Ekonomi | 204 |
| Gambar 9.1 | Lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Mukomuko. | 214 |
| Gambar 9.2 | Pemetaan kelompok sosial pemilik perkebunan kelapa sawit rakyat di Mukomuko. | 216 |
| Gambar 9.3 | Sawah baku pada daerah irigasi Air Manjuntou-daerah berwarna abu-abu tua adalah sawah baku yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat...218 | |
| Gambar 9.4 | Citra satelit penggunaan lahan sawah di 2 desa pada daerah irigasi Air Manjuntou: Lubuk Pinang (atas) dan Rawa Mulya (bawah) | 219 |
| Gambar 9.5 | Perubahan sistem penyakapan lahan sawah irigasi milik etnis Minang Mukomuko di Air Manjuntou. | 221 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Gambar 9.6 | Konversi kebun kelapa sawit kembali ke sawah oleh petani di Air Manjuntio. | 221 |
| Gambar 9.7 | Konversi kelapa sawit ke sawah oleh Pemerintah di Air Manjuntio. | 224 |
| Gambar 9.8 | Dinamika interaksi agensi-struktur dalam konversi perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sawah di Air Manjuntio. | 226 |
| Gambar 9.9 | Konversi sawah berpola siklikal di Air Manjuntio. | 227 |
| Gambar 9.10 | Sinergi agensi–struktur dalam program pembangunan pertanian. | 228 |
| Gambar 10.1 | Kepemilikan lahan sawit di Indoensia tahun 2021 | 230 |
| Gambar 10.2 | Kepemilikan lahan sawit di Sumatra Barat tahun 2021 | 231 |
| Gambar 10.3 | Milestone perkembangan pergeseran komoditas karet ke kelapa sawit di Solok, Sumatra Barat..... | 234 |
| Gambar 10.4 | Struktur pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit berdasarkan sumbernya pada desa lokal dan transmigrasi | 235 |
| Gambar 11.1 | Sistem Hubungan Kerja Industri Rotan..... | 252 |
| Gambar 12.1 | Sirkulasi komodifikasi budaya Osing | 261 |
| Gambar 12.2 | Karakteristik Suku Osing..... | 263 |
| Gambar 12.3 | Karakteristik <i>Creativepreneur</i> Suku Osing | 267 |
| Gambar 12.4 | Transisi komodifikasi selektif suku Osing | 277 |
| Gambar 12.5 | <i>Multiple Embeddedness</i> dalam budaya Suku Osing | 280 |
| Gambar 12.6 | <i>Multiple Embeddedness</i> dalam <i>Creativepreneur</i> Osing Kemiren | 285 |
| Gambar 12.7 | Model Pengembangan <i>Creativepreneurship</i> Osing Kemiren | 287 |
| Gambar 13.1 | Tahap Perkembangan Masyarakat..... | 300 |
| Gambar 13.2 | Tahapan krisis..... | 301 |

PROLOG NUSANTARANOMICS: NEGARA KESEJAHTERAAN ALA INDONESIA

Didin S Damanhuri

Tulisan Todung Mulia Lubis (Dubes Norwegia dan Islandia) bertajuk “Kapitalisme Kebablasan” (Kompas 9 November 2021) sangat menarik. Todung menggambarkan perkembangan kebijakan ekonomi Cina yang menjadi raksasa ekonomi terkaya kedua setelah AS dan lebih separuh kemiskinannya terentaskan namun sekarang menghadapi problem ketimpangan (*inequality*). Di lain pihak, dunia menyaksikan contoh bagaimana negara-negara Skandinavia (Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia dan Islandia) sebagai contoh Negara Kesejahteraan (*welfare state*) di mana ekonomi pasar dikelola dengan peran negara (pusat dan daerah) yang pada gilirannya mensejahterakan rakyatnya. Juga dengan pendapatan per kapita sangat tinggi, demokrasi yang bekerja, angka korupsi yang rendah dan masyarakatnya yang bahagia. Cina sendiri di bawah Presiden Xi kini masih sedang berupaya keras untuk mengoreksi sistem perekonomiannya agar terjadi pemerataan dan pembagian kekayaan.

Tahun 2020, menurut CNBC, 20% penduduk Cina terkaya memperoleh 10 kali lipat 20% penduduk termiskin. Sementara 10% orang terkaya memperoleh 41% pendapatan, sedangkan 50% termiskin hanya memperoleh 14,4% dari total pendapatan. Sementara, data *World Bank* dalam *Gini Coefficient by countries 2021* negara-negara Skandinavia menunjukkan angka rasio gini di bawah 30 (rasio gini angkanya antar 0 hingga 100, makin menuju 0 makin merata dan makin menuju 100 makin timpang). Indonesia sendiri angkanya 37,8. Tapi menurut *Credit Suisse*, ketimpangan berdasarkan kekayaan, 1% orang terkaya sama dengan 46,6% kekayaan nasional dan 10%

orang terkaya sama dengan 75,3% kekayaan nasional. Dengan demikian, Indonesia dilihat dari ketimpangan berdasarkan kekayaan, lebih buruk dari Cina.

Kalau Cina, dengan perkembangan perekonomian yang sangat pesat dari sisi pertumbuhan ekonominya namun karena sudah tampak trend memburuknya ketimpangan, Presiden Xi secara sangat serius mau mengoreksinya. Sementara, upaya Indonesia terkesan belum terlalu serius untuk mengoreksi kondisi ketimpangan yang buruk tersebut.

Ketimpangan sebagai Problem Pembangunan di Indonesia

Problem Ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia di samping sebagai dampak “salah strategi pembangunan”, juga karena ada faktor-faktor yang berasal dari dalam (*endogen*) yang menyebabkan lebih sulitnya bangsa Indonesia untuk mengawinkan antara Pertumbuhan dengan Pemerataan. Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Konsekuensinya, pulau-pulau yang makin jauh dari Jawa, secara alamiah makin kurang terurus, terutama untuk hal-hal pokok yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, seperti jaminan Kesejahteraan dan keamanan. Dengan demikian, untuk negara-negara kepulauan dengan luas wilayah seperti Indonesia, harusnya memiliki strategi pembangunan yang relatif berbeda dengan negara-negara yang daratan (*continental state*). Tapi sejak VOC (yang bersekutu dengan Kerajaan Agraris Mataram) berhasil menghancurkan Kerajaan Pesisir (Sunan Giri dan lain-lain) pada abad 15–16, diperkuat masa penjajahan dan diteruskan oleh Pemerintahan Nasional pasca kemerdekaan. Itulah mengapa pembangunan ekonomi di Indonesia lebih berorientasi daratan sudah sekitar 5 abad. Dengan Orientasi Daratan di mana Jawa yang wilayahnya hanya sekitar 7%, tapi dihuni oleh 62% penduduk serta adanya sentralisme yang berpusat di Jakarta, memiliki dampak tersendiri. Antara lain, sirkulasi uang yang beredar di Indonesia lebih dari 70-80% ada di Jakarta sehingga hal ini memicu ketimpangan antar wilayah: Jakarta-luar Jakarta, Jawa-luar Jawa dan KBI (Kawasan Barat Indonesia)-KTI (Kawasan Timur Indonesia).

Selanjutnya, Indonesia juga termasuk negara ke empat terbesar jumlah penduduknya di dunia (*big population*), setelah Cina, India dan Amerika Serikat, dengan jumlah lebih dari 270 juta dengan tingkat Keanekaragaman (*heterogenity*) yang tiada taranya di dunia baik secara horizontal (Suku, Etnis, Bahasa Daerah, Agama) maupun vertikal (Pendapatan, Pendidikan, Kekayaan Finansial, kesadaran politik, status sosial, akses terhadap sumber daya, akses terhadap modal finansial dan seterusnya). Hal ini tentu saja menimbulkan dampak terhadap kemampuan masing-masing orang dan kelompok masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang tidak sama sehingga pada gilirannya menimbulkan ketimpangan antar golongan pendapatan. Dalam bahasa teknis ekonomi, lazim digolongkan ke dalam kelompok 40% golongan pendapatan rendah/miskin, 40% golongan pendapatan menengah dan 20% golongan pendapatan tinggi/kaya. Rasio Gini adalah alat pengukuran yang menggambarkan ketimpangan antar golongan pendapatan tersebut, yang ukurannya antara 0 hingga 1. Makin mendekati angka 0 berarti menggambarkan keadaan yang makin merata. Sementara mendekati angka angka 1 menggambarkan keadaan yang makin timpang. Konsensus tentang rasio Gini tersebut, kalau angkanya di bawah 0,3 berarti relatif merata, antara 0,3–0,5 relatif timpang dan di atas 0,5 berarti dalam ketimpangan buruk. Sebagai catatan, waktu akhir tahun 1960-an Pakistan pecah menjadi dua negara, yakni Pakistan dan Bangladesh. Salah satu penjelasannya karena rasio Gini pendapatannya sudah di atas 0,5. Indonesia pada tahun 2015 rasio Gininya adalah 0,413 tapi dengan memakai data konsumsi (pengeluaran). Diperkirakan, kalau dihitung dengan data pendapatan, rasio Gininya sudah mendekati angka 0,5. Artinya sudah “sinyal merah” yang mengancam integritas nasional (Persatuan Indonesia, sila ke 3 dari Pancasila).

Kondisi sebagai Negara Kepulauan dan Negara berpenduduk besar secara alamiah memicu terhadap tingkat ketimpangan seperti diuraikan di atas. Juga saat bersamaan pembangunan ekonomi sejak 1970 (pada saat mana Pemerintahan Orde Baru menjalankan pembangunan ekonomi yang sistematis) hingga sekarang adalah berorientasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi atau lebih teknis Pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) yang tinggi (*GDP-oriented*). Strategi pembangunan yang GDP

oriented, di mana semua upaya pemerintah, swasta, BUMN, Koperasi dan masyarakat secara sadar atau tidak sadar mengukur kemajuannya berpusat kepada pencapaian GDP yang tinggi. Meskipun ada ukuran lain, misal pengurangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan. Tapi semua ukuran-ukuran tersebut mengacu kepada pencapaian GDP yang tinggi tersebut.

Penting dicatat, bahwa di dunia ini ada tiga model di mana Negara memperlakukan GDP. **Pertama**, yang saya sebut sebagai negara yang *GDP-oriented*. Yakni, Negara-Negara yang secara *over all* mengukur kemajuan Negaranya yang utama adalah melalui struktur GDP tersebut, yakni contohnya adalah negara *super power* seperti Amerika Serikat. Jadi AS lewat ukuran GDP tersebut merupakan Negara dengan tingkat kemakmuran yang tertinggi/terkaya di dunia. Meski kalau GDP itu dibagi dengan jumlah penduduk (GDP/capita), maka Luxemburg adalah Negara yang GDP/Capitanya paling tinggi di Dunia tahun 2021 yakni sekitar 118.000 USD (AS sekarang ini sekitar 63,416 USD) (katadata.co.id). AS dengan GDP tertinggi di dunia, dengan jumlah penduduk yang sekitar 350 juta, maka AS merupakan kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan kekuatan Iptek yang juga luar biasa. Dengan *GDP oriented*, AS telah menjadi Negara Adi-kuasa baik secara ekonomi, politik maupun militer. Namun kemiskinan masyarakat AS juga termasuk tinggi untuk ukuran Negara Maju, yakni 18% menurut catatan statistik mereka, dengan *homeless* sekitar 12%, serta gelandangan kira-kira 2 juta.

Kedua, adalah model Negara di mana GDP-nya itu hanya sebagai indikator, dengan peranan Negara, Koperasi, Serikat Buruh, *Civil Society* yang sama besarnya. Juga ada sistem jaminan sosial serta Pajak Progresif, yang kesemua itu pada gilirannya menciptakan peran yang *balance*, di mana di tengah peran kekuatan modal yang besar, terdapat peranan Negara yang efisien tetapi juga menjamin tentang kesejahteraan masyarakat bawah. Nah ini yang disebut dengan perspektif model GDP hanya sebagai indikator. Yakni tetap mereka memakai GDP, akan tetapi hanya untuk melihat sebagai salah satu indikator kemajuan yang diorientasikan untuk mencapai Keadilan Sosial masyarakat mereka. Sementara, GDP perkapitanya juga sangat tinggi, yakni Eropa itu berkisar antara 20.000 hingga lebih dari 100.000 USD, tetapi

dengan tingkat pemerataan yang tinggi, yaitu 40% penduduk termiskinnnya memperoleh lebih dari 22%. Hal itu khususnya dicapai oleh Negara-Negara Skandinavia, dan secara umum dicapai oleh Negara-Negara Eropa Barat. Meskipun mereka sekarang sedang menghadapi krisis dan belum sepenuhnya pulih, yang salah satu penyebabnya, karena penggunaan dana fiskal untuk jaminan sosial yang terlalu tinggi.

Lalu model **ketiga**, adalah yang saya sebut sebagai *Heterodox Model*, yakni keluar dari perspektif sosial demokrasi ala Eropa dan perspektif neoliberalisme ala AS. GDP itu tetap menjadi indikatornya, serikat buruhnya juga lemah, namun gerakan koperasinya relatif kuat, jaminan sosial juga tidak sistemik seperti di Eropa. Tapi Model Negara tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat bawahnya adalah sama tingginya dengan Negara-negara Skandinavia (Swedia dan sebagainya). Kenapa heterodox? Karena dia secara demokrasi politik pun bukan mengelola konflik, bukan *Conflictual Scenario of Democracy*. Tapi lebih *Consensus Scenario of Democracy*. Jadi, meski secara politik bersifat Feodalistik di mana masih ada *Teno-haika* (Raja yang sangat dihormati), juga ada peran konglomerasi yang sangat besar, tetapi industrinya hanya membuat *core technology*, sementara 90%-nya dibuat oleh UKM. Jadi ada sistem sub-kontrak, industri kecilnya luar biasa perannya. Kemudian juga *landreform* sudah dilaksanakan sejak tahun 50-an. Dengan begitu, Model Pembangunan Heterodox, menunjukkan bahwa, GDP hanyalah sebagai instrumen indikator untuk mencapai Tujuan Pembangunan, yakni Kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial.

Bagaimana Indonesia? Dengan kombinasi antara kondisi alamiah (Negara Kepulauan dan Negara berpenduduk Besar) serta Strategi Pembangunan yang *GDP Oriented* itulah yang dapat menjelaskan betapa sulitnya Indonesia keluar menjadi negara yang lebih merata hingga sekarang. Kalau kondisi alamiah adalah *hard fact* yang *given* namun tetap harus dijadikan “keunggulan”, tinggal bagaimana mengelolanya secara cerdas, cermat dan arif. Namun yang harus di-*Reform* adalah strategi pembangunan yang *GDP Oriented* dan seyogianya lebih tepat yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki bangsa ini.

Negara Kesejahteraan ala Eropa

Pembahasan tentang topik Negara Kesejahteraan (*welfare State*) dalam kepustakaan Ilmu Ekonomi Politik, adalah salah satu “Narasi Besar” yang menjelaskan sebuah Negara yang mengambil peran penting dalam mensejahterakan ekonomi dan sosial warga negaranya. Salah satu cirinya adalah jika Negara tersebut di satu pihak menetapkan pajak pajaknya secara progresif (makin tinggi pendapatan makin tinggi pajaknya secara progresif) dan di lain pihak negara tersebut mendistribusikannya dalam bentuk Program Jaminan Sosial yang efisien dan efektif. Hasilnya tercermin dalam struktur sosial ekonomi yang lebih merata (*egalitarian socio-economic structure*) seperti yang dibayangkan fonder dari Sistem ekonomi Sosialisme Demokrat Jean-Jacques Rousseau, dari Prancis dalam bukunya *Le Discourras sur l’Origine et les Fondaments de l’inegalite parmi les Hommes* (1755). Sebagaimana diketahui, Negara Kesejahteraan adalah istilah dari hasil gerakan dan peran Partai yang memperjuangkan sistem Sosialisme Demokrat. Mengapa disebut Demokrat? Hal ini karena menurut Pemikir besarnya, Pierre-Joseph.Proudhon (1809-1865), dia menolak jalan revolusi kekerasan yang dianut Sosialis Komunis. Tapi memperjuangkannya dengan *gradualism* melalui jalan kemenangan dalam kontestasi Pemilu dan mentransformasikan gagasannya ketika mereka memerintah.

Setelah mengalami evolusi selama sekitar 2,5 abad struktur sosial ekonomi egaliter yang diperjuangkannya mulai terwujud terutama di negara-negara Skandinavia (Swedia, Denmark, Finlandia, Norwegia dan Islandia) serta beberapa negara Eropa Barat seperti Prancis, Jerman, Belgia dan Belanda. Negara-negara Scandiavia sekarang ini menjadi *champion* di hampir segala Indeks Pokok Dunia. Misalnya seperti Indeks Negara-Negara paling merata, pendapatan per kapita tertinggi, *happiness Indeks* tertinggi, Indeks Korupsi paling tinggi (hampir tidak ada Korupsi) dan bahkan *Islamic Index* paling baik (dalam arti Indeks Islam *Muammalahl Public Religion*) seperti kemiskinan yang hampir nol dan pemerataan dan keadilan sosial paling baik (sebagai cerminan pelaksanaan surat *al Maun*). Tentu bukan hanya karena peran Negara yang aktif dan luas termasuk dalam memberlakukan Pajak Progresif sebagai kunci sukses. Juga adanya mekanisme pasar yang sehat bersamaan

dengan serikat buruh yang kuat, Gerakan Koperasi yang aktif, produktif dan masif, sistem jaminan sosial yang menyeluruh untuk seluruh penduduk dan efisien serta efektif, *Civil Society* yang berperan aktif baik secara ekonomi, sosial dan politik.

Negara Kesejahteraan ala *Asian Way*

Yang menarik adalah ketika saya melakukan riset 70 negara (seluruh negara maju dan beberapa negara berkembang) (Damanhuri, 1996). Dari Riset menunjukkan, ternyata tingkat pemerataan serta 40% penduduk terbawahnya yang paling sejahtera bukan hanya dicapai Swedia tapi juga oleh Jepang (bukan dalam kategori Negara berbasis Sosialisme Demokrat). Dalam buku saya *Ekonomi Politik dan Pembangunan* (2010, 2014), Jepang dan negara-negara Asia lain yang sukses lebih merupakan “sistem tersendiri yang menyempal” (*heterodox*), karena berbeda dengan Liberalisme, Sosialisme Demokrat, apalagi dengan Komunis. Antara lain dengan ciri-ciri: di samping ada peran Negara yang aktif dan mekanisme pasar yang sehat, isu kesejahteraan buruh lebih diselesaikan di tingkat mikro dengan dialog harian, mingguan dan terus-menerus antara Pemilika Modal-Manajemen dengan Buruh, Juga kesejahteraan petani, nelayan, UMKM dan ekonomi rakyatnya terjaring dalam sistem kemitraan (Besar-Menengah-Kecil) yang luas dalam perspektif *Japan Incorporated*.

Lebih fundamental lagi, negara-negara Barat termasuk negara-negara Kesejahteraan, konstruksi sosialnya berbasis Sekularisme (meminggirkan peran agama dalam kehidupan). Sementara, Jepang dan model Asia lainnya, agama tetap hidup malahan memberi dasar dalam berbagai format kegiatan sosial-ekonominya. Misalnya dalam Manajemen TQC (*Total Quality Control*) ala Jepang, karyawan dalam perusahaan menganggap bekerja untuk pengabdian seumur hidup, lebih menghargai *seniorime*, mengedepankan kerjasama dari pada kompetisi (secara makro, meski dalam skala mikro terdapat etos persaingan) dan seterusnya yang merupakan refleksi dari ajaran agama Sinto. Model Makro Ekonomi dan Politik pun mereka lebih mengedepankan Kerjasama dan Konsensus. Jadi nilai-nilai tradisi positif dan agama makin diinternalisasikan dalam pelbagai etos sosial dan ekonomi.

Terkait dengan Sistem Jaminan Sosial ala Asia, John Naisbitt dalam bukunya *Megatrends Asia* (1995) menyebut masih utuhnya keluarga batih (*extended family*) di Asia. Hal ini terdapat tradisi saling bantu dalam pelbagai risiko (Informasi mencari pekerjaan, kecelakaan kerja, pendidikan, kesehatan, PHK, hari tua, meninggal) peran keluarga inti maupun keluarga besar tetap berjalan bersamaan adanya peran negara dalam sistem jaminan sosial tersebut. Dengan begitu, menurut Naisbitt maka Asia lebih kompetitif secara makro ekonomi-sosial dibandingkan Barat yang hanya mengandalkan sistem Jamsos Formal sehubungan pada umumnya keluarga batih sudah punah dan lebih dominannya *single parent* dalam struktur sosial mereka.

Negara Kesejahteraan ala Indonesia

Indonesia adalah bagian dari Asia sehingga yang menjadi ciri-ciri Jepang dan model Asia pada umumnya baik dalam kerangka mikro maupun makro sosial, ekonomi maupun politiknya secara historis adalah mirip. Dan itu telah terpatikan dalam Konstitusi UUD'45. Hanya pasca Reformasi terjadi transformasi yang menggerus baik secara mikro maupun makro sosial, ekonomi maupun politiknya. Misalnya dalam politik, sila ke 4 Pancasila yang lebih mengedepankan Konsensus (Musyawarah Mufakat), namun sekarang berlaku system *one man one vote* (liberalisme politik). Begitu juga dalam kerangka mikro dan makro ekonominya lebih liberal dan peran Negara Aktif, cenderung digantikan oleh dominannya *market driven*. Lebih jauh, dalam pasal 33 ayat 3 di mana perekonomian lebih ditekankan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (*people driven*), sekarang lebih dominan dikedepankan “kemakmuran orang per orang” (*capitalist driven*). Namun di era Reformasi, telah berhasil dan dilaksanakannya sejak 2014 UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), UU BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek sebagai realisasi pasal 34 UUD45.

Nah, bagaimana Negara Kesejahteraan ala Indonesia dengan kondisi yang digambarkan tersebut? Untuk peran keluarga batih tampaknya masih relatif utuh. Dengan demikian, sistem jaminan sosial formal negara akan saling memperkuat dengan sistem jaminan sosial informal (keluarga batih). Ini faktor plus yang masih dipunyai Indonesia. Yang belum terjadi adalah

harapan banyak pihak untuk terwujudnya *Indonesia Incorporated*. Yakni Kemitraan produktif antara usaha skala ekonomi besar, menengah dan kecil. Sementara Sistem Politik yang liberal dan transaksional selama reformasi telah berdampak kepada ketimpangan ekonomi seperti yang dilaporkan *credit Suisse* (2020) bahwa 10% penduduk terkaya telah menguasai 75,3% pendapatan nasional. Meskipun Pemerintah telah berupaya dengan berbagai skema pemberdayaan ekonomi UMKM (KUR, PNPM, dan lain-lain). Namun Ekosistem Kebijakan Ekonomi Makro sementara ini menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5% selama reformasi masih jatuh lebih banyak kepada korporasi besar tanpa berdampak kepada perbaikan pemerataan secara signifikan. Sementara, Gerakan Koperasi di era reformasi cenderung makin marginal.

Apakah hal itu salah satunya karena di era reformasi ditinggalkannya *longterm planning* dalam pembangunan seperti perintah pasal 33 UUD45 ayat-1? Dengan begitu terjadi diskontinuitas dalam pembangunan yang tergantung kepada Parpol mana yang memenangkan Pemilu. Ini juga yang tengah dipertimbangkan oleh MPR untuk adanya PPHN (Pokok Pokok Haluan Pembangunan). Sementara dari hasil belasan Disertasi di mana Penulis menjadi salah seorang pembimbingnya, menemukan bukti adanya kokohnya *local economy*. Yakni peran *local genius* (berasal dari tradisi dan agama) terhadap pelbagai ragam Ekonomi Lokal di berbagai daerah; Minang, Sunda, Jawa, Bugis, Batak, Melayu dan seterusnya. Kesemua itu penulis menyebut adanya Nusantaranomics. Dengan begitu Negara Kesejahteraan ala Indonesia dalam masa Pancaroba sekarang ini, dengan ekosistem politik dan ekonomi makro yang tidak kondusif sementara dapat diredam dengan adanya peran UMKM dan Ekonomi Lokal termasuk di era pandemi yang meluluhlantakkan perekonomian dunia termasuk ekonomi nasional sekarang ini.

Ekonomi Pasar Pancasila¹: Aras Nasional Nusantaranomics

Prof. Dr. B.J. Habibie melontarkan gagasan perlunya direalisasikan tentang “Ekonomi Pasar Pancasila (EPP)” yang disampaikan di depan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Silaknas (Silaturahmi Kajian Nasional) ICMi di Istana Bogor 8 Desember 2017. Jadi istilahnya, tampaknya berbeda dengan perdebatan tentang Ekonomi Pancasila pada akhir 70-an hingga awal 80-an yang lebih bernuansa Ideologis. Barangkali waktu itu diwarnai sisa Perang Dingin, di mana Komunisme bangkrut yang ditandai dengan bubarnya Uni-Soviet dan Negara-Negara Eropa Timur awal 80-an dan munculnya tesis “*the end of History*” dari Fukuyama yang menganggap dunia berujung pada pilihan kepada Liberalisme. Namun kalangan Intelektual di Indonesia waktu itu, justru merespons dengan perlunya Ekonomi Pancasila (EP) sebagai negasi terhadap hegemoni Liberalisme. Hal itu baik karena pengalaman sejarah Kolonialisme yang menyengsarakan selama 3,5 abad, maupun karena kecenderungan gejala adanya Neo-liberalisme di era pasca runtuhnya komunisme.

Isu waktu itu muncul baik karena invasi modal asing terhadap perekonomian, maupun karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengangguran, kemiskinan serta ketimpangan malahan tetap tinggi. Oleh karena itu ditoleh Ekonomi Pancasila sebagai solusinya. Namun tafsir yang berbeda bermunculan, misalnya Arif Budiman lebih condong EP yang dekat kepada Sosialisme di mana peran Negara tetap sangat diperlukan. Sementara yang lainnya seperti Emil Salim cenderung EP yang harus lebih ramah terhadap Pasar. Dan Perekonomian secara empiris terus melaju dengan kebijakan-kebijakan Debirokratisasi, Privatisasi dan diadopsinya prinsip-prinsip WTO (*World Trade Organization*) yang menghendaki dicabutnya berbagai hambatan perekonomian baik subsidi maupun proteksi yang dianggap menghambat arus barang dan jasa secara global serta didorong agar Indonesia makin terintegrasi terhadap ekonomi internasional (globalisasi). Kecenderungan perekonomian yang sebelumnya lebih Etatis maka setelah tahun 90-an makin liberal di mana peran pelaku swasta makin mengemuka. Tapi karena yang

1 Dimuat Kompas, 15 Februari 2018.

real terjadi adalah proses konglomerasi yang makin membesar, arus moneter yang makin cepat tanpa diiringi sertor riil yang sama cepatnya, maka dalam perekonomian terjadi “ekonomi gelembung” (*bubble Economy*), sehingga mengakibatkan “krismon” (krisis moneter) 1998 yang kemudian menjadi Krisis Ekonomi dan Politik yang saling bertautan. Dengan demikian, Era Orde Baru berakhir dengan ditandai lengsernya Presiden Soeharto dan sejak itu mulailah memasuki Era Reformasi, di mana Ekonomi Pasar makin menghegemoni perekonomian.

Dalam banyak kesempatan memberikan kuliah atau sebagai narasumber berbagai seminar, sering penulis sampaikan, bahwa selain negara-negara Komunis (praktis sekarang tinggal Korea Utara), kalau bicara ekonomi pasti berbasiskan Ekonomi Pasar. Cuma Ekonomi Pasar di Eropa berdampingan dengan peran negara yang menjamin Kesejahteraan rakyatnya melalui sistem jaminan sosial untuk seluruh penduduk, mediator buruh dan majikan, pendorong Gerakan Koperasi yang sangat efisien dan *perform* dan seterusnya. Ekonomi Eropa umumnya lebih merata dan relatif kecil kemiskinannya, meski hingga sekarang lagi terserang krisis fiskal dan sosial sekaligus, yang belum juga berakhir. Kemudian kita mengenal Ekonomi Pasar Jepang yang dalam waktu relatif singkat (1970–1990-an) kinerja cabang-cabang industrinya (elektronik, telekomunikasi, otomotif) mampu men-*trespasse* cabang industri Amerika Serikat dan Eropa, berkat peran negara dengan apa yang disebut *Japan Incorporated*. Yakni, peran perencanaan jangka panjang dan sinerginya dengan pelaku lain (swasta, parlemen, dunia riset, para perwakilan di luar negeri), sementara itu dalam praksisnya, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak swasta untuk merealisasikan aksi koporasinya dalam mekanisme pasar (nasional maupun global). Menurut hasil studi, kesejahteraan buruhnya juga –bersama Swedia– yang paling tinggi di dunia, meskipun serikat buruh di Jepang tidak terlalu kuat seperti di Eropa.

Sementara itu, Ekonomi Pasar Amerika Serikat dengan peran negara yang relatif minimum, yang menghasilkan kinerja sebagai adi daya ekonomi, politik dan militer di dunia berkat kemajuan Iptek yang fantastis, namun kinerja sosialnya rapuh. Dewasa ini ada sekitar 2 juta gelandangan (karena krisis 2008), penduduk tanpa rumah sekitar 12 persen, kemiskinan (dengan

poverty line menurut ukuran mereka yang jauh lebih tinggi dari negara-negara sedang berkembang) sekitar 18 persen. Problem kemiskinannya lebih menjadi urusan yayasan-yayasan sosial seperti yayasan Keluarga Kennedy, Rockefeller, Ford, dan lain-lain. Sejak Administrasi Obama dari Partai Demokrat, memang sekarang untuk urusan kesehatan, terdapat Undang-Undang yang menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan yang gratis. Namun Era Trump ada kecenderungan untuk dikurangi, dengan alasan membebani Anggaran Negara.

Yang sangat menarik adalah pandangan Prof. Kishore Mahbubani – intelektual dari *Lee-Kuan Yew School of Public Policy Singapura*– yang sangat disegani oleh kalangan intelektual Amerika Serikat maupun Eropa karena pandangannya tentang Ekonomi Pasar di Asia. Menurut Mahbubani, negara-negara di Asia menempatkan Ekonomi Pasar sangat pragmatis dalam apa yang ia sebut *March to Modernity* dan meramalkan karena keadaan sekarang dan trennya ke depan. Menurutnya Asia akan menjadi “Pusat Peradaban dan Pembangunan” yang sekarang masih berpusat di negara-negara Barat. Namun demikian, sukses banyak negara Asia (Jepang, Cina, Korea Selatan, India, Malaysia, Thailand, Singapura), mekanisme pasarnya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agama, nilai tradisional dan dengan peran negara dan demokrasi politik yang unik dan bervariasi. Ia mencontohkan di Cina, bagaimana rakyatnya sekarang bukan hanya menikmati kemakmuran yang jauh lebih tinggi, tetapi juga mulai terdapat kebebasan atau demokratisasi secara riil berkat kemajuan ekonomi. Dengan demikian, menurut penulis, Ekonomi pasar di Asia menyempal dari arus tengahnya Ekonomi Pasar Amerika Serikat dan Eropa atau saya menyebutnya sebagai Ekonomi Heterodox (lihat buku penulis: *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara-negara Sedang Berkembang*, IPB Press, Bogor, 2010, 2103 dan 2014).

Di Indonesia, Ekonomi Pasar zaman Soeharto (1970–1998), meski politiknya otoriter, tetapi rakyatnya tetap mengalami pemberdayaan oleh peran negara lewat program-program ekonomi dan sosial. Yakni program 8 jalur pemerataan, program, kebijakan afirmatif pribumi, posyandu, swasembada pangan, dan lain-lain sehingga kemiskinan turun dari 56 persen

tahun 1970 menjadi 13 persen tahun 1998. Hal itu dimungkinkan karena stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen dan kinerja industri manufaktur yang tumbuh rata-rata 18 persen. Memang korupsinya tinggi, yakni rata-rata sekitar 30 persen dan birokrasinya yang menciptakan *state failure*. Kemudian Ekonomi pasar sejak 1998, lebih liberal, yang awalnya karena tekanan dari IMF yang memberikan pinjaman USD 45 miliar untuk mengatasi krisis moneter yang dahsyat yang bukan hanya menimpa Indonesia, tetapi juga negara-negara Asia Tenggara (Korea Selatan, Thailand, Singapura, Malaysia).

Mungkin karena di Indonesia terjadi *big-bang* demokrasi politik dan kebebasan pers serta Otonomi Daerah yang drastis, maka mendorong ekonomi pasar pun malahan terkesan liar. Misalnya privatisasi BUMN yang justru *bluechip* dilakukan terhadap Telkom, Indosat, BCA, dan banyak yang lain. Hal itu pada gilirannya mendorong penguasaan ekonomi oleh asing makin tajam, misalnya bidang pangan, perbankan, pertambangan, pasar modal, dan seterusnya serta maraknya impor barang dan jasa. Hal itu seperti sebuah paradoks. Di satu pihak kinerja pertumbuhan ekonomi yang tinggi –meski dunia dilanda krisis Amerika Serikat 2008 dan Eropa sejak 2010– dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6 persen sejak pemerintahan SBY dan sekitar 5% masa pemerintahan Jokowi sehingga menjadikan Indonesia bergabung dalam G-20 dengan tingkat kekayaan nasional (GDP) terbesar ke-16 di dunia. Namun demikian, di lain pihak kemiskinan –meski kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi sekitar 12 persen– tetapi yang hampir miskin (dengan pengeluaran 2 dolar/hari) masih lebih 50 persen. Yang paling memprihatinkan, adalah kesenjangan sosial. Rasio Gini pengeluaran menurut BPS yang sebelumnya sekitar 0,32 (2004), tahun 2012 sudah menjadi 0,413 (dalam dua tahun terakhir ada perbaikan sedikit menjadi 0,397 diduga karena pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mulai dilaksanakan sejak 2014). Apalagi kalau memakai data pendapatan, menurut perkiraan penulis, Gini rasionya sekitar 0,5, artinya kesenjangan yang sangat buruk. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih banyak dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya. Memang, pertumbuhan orang kaya di Indonesia adalah salah satu tertinggi di dunia.

Dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keragaman etnis, suku bangsa, agama dan lapisan sosial juga yang paling heterogen di dunia, maka ekonomi pasar tanpa peran aktif, bersih, efisien dan cerdas dari negara, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan politik. Modal Konstitusi-UUD 45 yang menuntut adanya Ekonomi Pasar Pancasila seperti dilontarkan Habibie bagi Indonesia amat memadai untuk mendorong Ekonomi Pasar dan peran Negara yang sinergis dan optimal. Kalau mempelajari *historical Economic thought*, Ekonomi modern yang lahir pasca Rennaissans Eropa, notabene diawali oleh adanya konstruksi Sekularisme. Dengan demikian, baik Ekonomi Liberal, Sosialisme-demokrasi maupun Komunisme tak lepas dari konstruksi Sekularisme yang telah meminggirkan agama yang sudah berlangsung sekitar 4 abad. Dengan Pancasila di mana keempat sila (Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial) haruslah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga Warna Agama haruslah mengkonstruksi “Ekonomi Pasar Pancasila (EPP). Dengan demikian EPP, lebih sebagai *Asian Way*, di mana karakteristik pasar/ekonomi dan politik/demokrasi sebagai Instrumen (bukan tujuan) sekaligus Arena di mana Negara membuat perencanaan jangka panjang dan semua pelaku Ekonomi (BUMN, Swasta dan Koperasi) berjalan dalam mekanisme pasar sehingga berjalan secara efisien dan efektif serta berperan untuk mencapai kemakmuran (pertumbuhan ekonomi) yang tinggi dan Keadilan Sosial (pemerataan Kesejahteraan seluruh rakyat). Sementara, agama berfungsi untuk menjamin akhlak individu, keluarga dan Negara.

Dalam konteks terakhir ini maka Spiritualitas dan Religiusitas para pelaku (individu, keluarga hingga Negara) harus mewarnai dalam pengelolaan dunia materi (Sumber Daya Alam dan Sumber Daya buatan seperti teknologi, mangemen, dan seterusnya) baik secara Mikro maupun makro. *Best practise*-nya adalah Jepang, sehingga model demokrasi-pun lebih dalam *Consensus Scenario* (tidak dalam terlalu ditonjolkan *conflictual scenario*). Sementara dalam Ekonomi secara makro berjalan dalam perspektif *Indonesia incorporated* dan secara mikro tetap dalam kompetisi (yang sehat). Nilai keluarga dengan kesucian pernikahan menjadi dasar kontruksi sosial (individu & keluarga) sehingga semua aktivitas ekonomi tidak merusaknya. Kalangan yang tertinggal dalam proteksi negara dan dibangun kelas menengah yang besar

dalam struktur belah ketupat di mana yang kaya dan miskin lebih sedikit. Untuk Indonesia yang mayoritas Muslim maka Keuangan dan perbankan syariah yang menghindari riba makin menjadi arus tengah yang mewarnai kegiatan ekonomi. Tentu energi Keagamaan harus makin mewarnai dalam kemasyarakatan dan kenegaraan serta menciptakan kedamaian, toleransi dan kerjasama dalam memerangi kemiskinan, kebodohan, kesenjangan dan keterbelakangan. Peran Pemimpin dan Sistem serta regulasi menjadi sangat penting dalam pengejawantahan semua proses pelaksanaan EPP. Dan dalam pelaksanaan EPP tersebut, terdapat pasal-pasal pokok pedoman dalam UUD'45 dalam kerangka EPP: pasal 23 (APBN untuk Kesejahteraan sebesarny rakyat), pasal 27 (berorientasi penciptaan kesempatan kerja penuh/ besar), pasal 33 (peran GBHN, ekonomi kekeluargaan modern, Sumber Daya Alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sebesarny, demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, kebersamaan, keberlanjutan dan kesatuan ekonomi nasional) serta pasal 34 (sistem jaminan sosial).

Demikianlah. Kemudian bagaimana hal itu dapat dilaksanakan? Para Pemimpin dan Elitlah yang harus bertanggung jawab di mana “Demokrasi yang Super Mahal” yang berjalan sekarang ini yang sangat menyulitkan pelaksanaan EPP yang harus di-*Reform* supaya kondusif terhadap pelaksanaan EPP tersebut.

Nusantaranomics: *Living Pancasila*omics di Aras Daerah²

Fachry Ali, Sejarawan yang juga Pengamat Politik dan Ekonomi (Kompas, 17 April 2018) menanggapi tulisan penulis (Kompas, 15 february 2018) dengan judul yang sama “Ekonomi Pasar Pancasila (EPP)”. Dalam tulisan tersebut Fachry ringkasnya menyimpulkan dengan gambaran empat pelaku “ekonomi akar rumput” (Andi, Surya, Asgar dan Salamun, semuanya bukan nama sebenarnya) yang hidup dengan prinsip “ekonomi tanpa menetapkan harga” sebagai representasi EPP. Sementara, semakin ke atas EPP yang

² Istilah nusantaranomic ini diinspirasi oleh pengalaman penulis dalam membimbing mahasiswa S3 di Fakultas Ekologi Manusia IPB yang bertemakan tentang *local economy*. Dari 11 (sebelas) *local economy* tersebut, penulis menamakannya dengan Nusantaranomics.

penulis gambarkan (antikonsentrasi kekayaan sebagai pengaruh agama dan sistem nilai), menurut Fachry belum berjalan dan Fachry menggambarkan EPP tersebut dekat dengan konstruksi CMEs (*Coordinated Market Economies*) mengutip Alavi Ali, “*On Brexit: Comparing Britain and German Varieties of Capitalism (Freie Universitat, Berlin 2017)* yang telah berjalan dengan sukses umumnya di Eropa, terutama di Jerman.

Secara umum tulisan Fachry mendekati apa yang penulis maksud dengan EPP secara empiris, namun belumlah komprehensif. Deskripsi Fachry tentang empat figur ekonomi akar rumput tersebut, sebenarnya oleh Prof. Mubyarto telah disebut adanya tiga motif sebagai gambaran EPP, yakni; motif ekonomi, sosial dan moral (Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, LP3ES, 1987*), seperti yang dikemukakan Fachry tentang “ekonomi tanpa menetapkan harga”. Kalau membaca gambaran empat figur akar rumput dalam tulisan Fachry, sebenarnya ada unsur harga juga, cuma sudah dikombinasikan oleh motif sosial (secara mikro: asas tolong-menolong yang secara makro pada gilirannya dapat mencegah konsentrasi kekayaan). Juga motif moral (seperti sikap Andi terhadap Abun dalam tulisan Fachry, yang meyakini bahwa kalau kita bersikap kasih, yang juga dapat mencegah konsentrasi kekayaan), maka “Allah akan memberi rezeki yang tak disangka-sangka”.

Gambaran EPP yang lebih diwakili ekononomi akar rumput menurut Fachry, penulis mengkategorikan dalam skala ekonomi subsisten (hanya untuk bertahan hidup). Itu tidak sepenuhnya benar. Dalam belasan Disertasi yang penulis ikut bimbing dalam konteks ekonomi, yakni kasus-kasus dalam temuan disertasi Doktor bidang Sosiologi-Ekonomi (di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Bengkulu yang merepresetasikan “ekonomi lokal”). Penulis kemudian mempopulerkan sebagai adanya “Nusantaranomics”. Keberadaan ekonomi-ekonomi lokal tersebut lebih mewakili ekonomi kelas menengah yang omzet umumnya sudah puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Tesis besarnya bahwa dalam Pembangunan Nasional terdapat “*endogen power*” terutama berupa Nilai dan Kecerdasan Lokal (*local genius and values*) yang bisa menjelaskan kenapa Ekonomi Daerah tetap bertahan (*resilient*) dan kuat (*persistent*) bahkan kemudian tumbuh berkembang (*developed*) meski bantuan

Pusat relatif minim atau malahan absen sama sekali. Dalam tulisan ini akan dikemukakan hanya dua kasus saja, yakni di Bengkulu dan Jawa Barat. Salah satunya adalah kasus dalam disertasi Dr. Andi Ishak.

Dalam disertasi tersebut adanya gambaran Petani Bengkulu yang mencerminkan Keberhasilan dalam *Entrepreneurship* secara kolektif serta berkembangnya *Local Economy* yang *unprecedented history* (karena tidak terjadi di tempat lain). Hal itu karena para petani secara kolektif mampu memutuskan konversi dari Sawah ke Kelapa Sawit (dengan meningkatkan Kesejahterannya pada saat harga sawit melonjak tinggi/*commodity boom*: 1998-2014) dan secara fantastik ketika harga sawit jatuh (*commodity bust*) di mana para petani kembali mampu mengkonversi ke sawah yang juga berhasil meningkatkan kesejahterannya (2014–2018). Keberhasilan para petani tersebut, juga karena ada peran Regulasi (UU Lahan Abadi yang dijadikan Perda) serta Peran Pemda dan DPRD yang mendukung konversi tersebut. Kebaruan (*Novelity*) tingkat teori, ditunjukkan disertasi oleh sdr. Andi Ishak tersebut, yakni dengan memakai teori Strukturasi Antony Giddens yang dikenal dengan Teori Sosiologi-ekonomi kritis karena *beyond* Struktural. Hal itu karena di samping menjelaskan gejala kemajuan Ekonomi Lokal tersebut secara struktural (bertindak mampu otonom sebagai *Agency* meskipun adanya invasi kapital internasional dan nasional oleh kalangan Konglomerat Sawit ke Bengkulu). Para Petani akhirnya dapat memutuskan juga secara otonom sebagai *Agency* (waktu mengkonversi sawah jadi kebun sawit maupun dari kebun sawit kembali menjadi sawah) yang dapat diterangkan secara Kultural (adanya mental *entrepreneurship*) yang menghadapi kekuatan besar kalangan konglomerat (nasional maupun internasional).

Kasus kedua yang ingin diketengahkan adalah temuan dari disertasi Dr. Jamilah dengan Judul “Ketahanan Industri Bordir: Studi Etika Moral Ekonomi Islami di Tataran Sunda”, pengusaha “*Islam Sundanis*” yang berkembang. Dalam disertasi tersebut ditemukan oleh Penelitian sdr. Jamilah yakni apa yang dia sebut faktor nilai-nilai dan budaya Islam dalam Kegiatan Ekonomi Daerah yang telah bertahan dan berkembang lebih dari satu abad. Dalam penelitiannya menemukan keberhasilan para pengusaha Islam Sundanis yang awalnya lebih merupakan kegiatan kerajinan skala rumah tangga sebagai

hobby dari kalangan Ningrat. Setelah memasuki kemerdekaan, kegiatan ekonomi bordir tersebut, kemudian menjadi kegiatan ekonomi rakyat yang masuk menjadi skala ekonomi komersial, terutama sejak Orde Baru dan Reformasi, berkat kebijakan pemihakan (*affirmative policy*) dari pemerintah sehingga produknya menjangar ke banyak daerah di Indonesia termasuk di Tanah Abang (pusat perdagangan retail terbesar di Asia Tenggara) dan ekspor (ke Asia Tenggara dan Timur Tengah) dengan omzet ratusan miliar rupiah, bahkan dalam secara kolektif (daerah) bisa triliunan rupiah.

Selanjutnya di era revolusi industri 4.0 (“ekonomi digital”), kita pun menyaksikan gejala EPP, yakni adanya korporasi kelas menengah-atas Bukalapak. Pada tahun 2017 nilai transaksi perusahaan ini adalah 10 triliun rupiah atau sehari 7 miliar yang melibatkan 7 juta perusahaan UMKM. Yang menarik, sebagai bukti adanya gejala EPP adalah Bukalapak sendiri hanya mendapat 1% dari omzet keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan ini 99% memperkaya Orang Lain (UMKM). Ini fenomenal, karena umumnya perusahaan-perusahaan swasta besar, sebagian besar keuntungannya jatuh kepada para *owner*-nya. Yang masih belum “normal” dalam kerangka EPP adalah belum sepenuhnya ada peran *active-state*, untuk mengawal agar jika terjadi suntikan dana asing tidak serta merta menggeser menjadi sekadar menyalurkan produk impor asal sebagai penyuntik dana asing tersebut. Lebih fenomenal lagi, ternyata Bukalapak ini *Owner* skaligus *Fonder*-nya Achmad Zacky berusia di 30-an tahun yang jebolan pesantren yang kemudian lulus sebagai sarjana teknik sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung yang sekarang menjadi salah seorang terkaya di Indonesia di bawah usia 30 tahun. Namun kesan saya kehidupannya tetap bersahaja namun sangat kreatif. Dalam sebuah kesempatan presentasi di Jakarta, penulis mendengarkan *Succes Stories*-nya di forum kalangan ahli dan dia santai saja dengan pake jins dan T-shirt.

Di samping itu, menurut penulis melihat di seputar para pengusaha besar yang bergerak di berbagai bidang (manufaktur, pertambangan, perkebunan, properti, retail dan seterusnya) yang kehidupannya sebagian besar lebih sebagai *economic animal*. Jenis pelaku ekonomi ini, oleh Kunio disebut sebagai pelaku semu (*erzats*), atau oleh Yahya Mumaimin disebut sebagai *political entrepreneur* dan atau dalam ekonomi politik yang berperilaku

sebagai “pemburu rente” (*rents seekers*). Yakni tipikal pelaku ekonomi yang hanya memburu “*super normal profit*” dengan menyasiasi berbagai regulasi kalau perlu dengan cara-cara korup. Itu jelas lebih menunjukkan ekonomi pra-modern (merkantilis dan primitif yang sedang dan akan di-*reform* oleh KPPU/Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di zaman reformasi ini. Di antara gejala umum yang terjadi tersebut, terdapat juga pengusaha-pengusaha besar yang *genuine entrepreneur* yang menggambarkan EPP. Meski mereka tidaklah dominan, tapi masih dapat kita temukan, di mana usahanya (BUMN maupun Swasta) yang *comply* terhadap berbagai regulasi, berusaha dan bersaing dalam mekanisme pasar yang normal, di samping mengeluarkan rupa-rupa pengeluaran non-pasar seperti CSR (*corporate sosial responsibility*), maupun terkait kebajikan agama, seperti ZISWaf (zakat, infak, shodaqoh dan wakaf) tanpa harus mengakibatkan kerugian perusahaan.

Kemudian, yang dalam nuansa *generalisasi* EPP, Fachry mengimajinasikan akan seperti CMEs atau Ekonomi Pasar Sosial (EPS) di Jerman. Saya tak sepenuhnya setuju dengan kontruksi EPP seperti EPS, karena di samping ada yang cocok (dalam hal adanya *active state* dan peran ekonomi sosial untuk memberdayakan UMKM dalam rangka menghindari konsentrasi kekayaan). Sementara yang kurang adalah absennya *cooperativisme* (“Ekonomi Kekeluargaan” seperti disebut dalam pasal 33 UUD’45 ayat 1 namun yang modern) dan bukan hanya gerakan koperasi sebagai lembaga, tapi juga *cooperativisme* di dalam perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta yang menurut penulis merefleksikan spirit keagamaan. Hal itu merupakan gejala yang ditemukan dalam model Jepang dengan kemitraan/sistem subkontrak antara besar, menengah dan kecil serta *Japan incorporated*. Yakni sinergi antara Negara, korporasi, parlemen, dunia riset dan para diplomat untuk meraih keunggulan di pasar global. Juga dalam sistem manajemen (*Total Quality Control*, bekerja seumur hidup dalam perusahaan) yang mengungguli sistem MBA ala Barat di mana di saat krisis, perusahaan Jepang tetap *survive* tanpa harus melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Juga kita temukan dalam sistem politik dengan Demokrasi Konsensus (bukan konfliktual) yang dalam sila keempat Pancasila merupakan Demokrasi “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, yang lebih mengedepankan “gotong-royong” modern dalam

rangka kepentingan nasional yang lebih luas. Lagi-lagi semua itu tampaknya konstruksi EPP ke depan akan lebih dekat dalam kerangka “*Asian way*” yang *best-practise* seperti yang dapat kita temukan dalam model Jepang. Yang dijelaskan konstruksi terakhir tersebut, memang masih merupakan cita-cita di masa depan setiap insan Indonesia, terutama kalangan elit, harus berupaya untuk mentransformasikannya. Hal itu karena merupakan amanah konstitusi-UUD45 yang wajib kita patuhi semua.

Transformasi Nusantaranomics dalam ranah Keilmuan

Dalam dunia perguruan tinggi dikenal konsep tridarma perguruan tinggi (PT), yakni: pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pendidikan merupakan wahana transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kebudayaan yang menghasilkan regenerasi para Ilmuwan, Teknolog dan Budayawan. Sementara, Penelitian adalah wahana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan sehingga terjadi kontinuitas atau disrupsi Keilmuan yang dalam perspektif Thomas Khun disebut adanya *Anomali* menuju terbentuknya Teori Baru (Khun, 1962). Juga bisa dengan menemukan keilmuan yang belum masuk dalam *framework* keilmuan yang mapan. Dengan bermodal ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, maka Perguruan tinggi agar tidak menjadi “Menara Gading”, wajib melakukan pengabdian pada masyarakat sehingga berkontribusi terhadap kemajuan, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Lebih jauh, dari masyarakat dapat juga terjadi umpan balik tentang relevansi keilmuan yang berkembang di PT, atau bahkan Perguruan Tinggi berguru kepada masyarakat dengan adanya nilai-nilai lokal, dunia kerja dalam industri, kebijakan para Guru Bangsa, dll). Dengan demikian, ada semacam siklus keilmuan yang tak hanya bersifat linier dengan adanya ilmu-ilmu yang mapan yang kemudian ditransformasikan lewat para mahasiswa dan para lulusannya hanya menjadi *follower* dan agen negara-negara maju untuk kemudian mencangkokkannya kepada masyarakat negara-negara berkembang. Ini yang pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia yang banyak menimbulkan masalah (ketimpangan

sosial ekonomi, dekadensi budaya dan kerusakan ekologi). Tapi kalau siklus itu bersifat penyerapan “ide-ide kemajuan” yang berasal dari negara maju yang relevan, kemudian secara proaktif melakukan kritik terhadap keilmuan yang mapan sekaligus merekonstruksi nilai-nilai lokal yang luhur dari bangsanya untuk disintesis dengan keilmuan yang mapan tersebut. Selanjutnya kemudian menjadi *body of knowledge* dan teori-teori baru yang pada gilirannya melahirkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang relevan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Itu seharusnya kalau Negara Berkembang mau mempunyai indentitas dalam proses kemajuan pembangunannya.

“Epistemonological Trap”

Mahasiswa kita dalam pembuatan skripsi S1, tesis S2 dan disertasi S3 baik di Perguruan Tinggi Indonesia maupun studi di Perguruan Tinggi Luar Negeri yang merupakan penggerak Ilmu Pengetahuan (IP) berbasis Riset, maupun riset-riset yang berjalan di Perguruan Tinggi dan lembaga Riset lainnya, semuanya lebih sebagai “art” (Mubyarto 1990). Dalam arti riset-riset tersebut hanya berjalan untuk mengulang dan mengokohkan paradigma ilmu pengetahuan yang telah mapan yang notabene tidak lepas dari bangsa yang telah mengkontruksi IP-nya. Jadi ada semacam jebakan Epistemonologi yang hanya mengulang dan lebih mengokohkan kebenaran teoritis sebuah riset yang berbasis “Masyarakat Barat” (*Eurocentrism*, bahkan *Western-centralism*) yang tidak selalu menguntungkan untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Riset-riset yang dikembangkan lebih didominasi teori-teori keilmuan (khususnya ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi) yang dasar-dasar Epistemonologi keilmuannya dikonstruksi oleh “*success Stories*” hasil dari *Renaissance* Eropa yang menghasilkan kemakmuran ekonomi yang menjadi cikal bakal terbangunnya peradaban Eropa dan Barat baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dengan kisah sukses pembangunan Eropa dan Barat Umum dalam memakmurkan masyarakat bangsanya, maka para Ilmuwan Modern mengkonstruksi Ilmu Pengetahuan berbasiskan Sekularisme, Materialisme dan Kapitalisme. Ini mengingat *renaissans* Eropa memang diawali oleh 3 revolusi tersebut. Kaisar Prancis Louis XIV yang paling berpengaruh di

Eropa masa itu, mengadopsi prinsip “pemisahan agama dari negara” (prinsip sekularisme) mengingat traumatisme Eropa dengan adanya dominasi Gereja terhadap ilmu pengetahuan sehingga antara lain terjadinya peristiwa hukuman terhadap Galileo Galilei, Astronom yang punya teori baru bahwa matahari sebagai pusat tata surya yang bertentangan dengan pendapat gereja waktu itu.

Kemudian, dengan prinsip sekularisme tersebut terjadi Revolusi Industri diawali dari Inggris yang menjalar ke seluruh Eropa dan menghasilkan kemakmuran material di mana Eropa sebelumnya mengalami masa kegelapan dengan adanya perang terus-menerus antar bangsanya (terutama rivalitas Inggris, Prancis dan Jerman) sehingga bangsa Eropa mengalami kemiskinan yang panjang sekitar 1000 tahun, dari abad 5 sampai abad 15 (Mason, 2018). Sementara Adam Smith, yang dianggap sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Modern, berdasarkan pengalaman sukses pembangunan ekonomi Eropa yang memakmurkan Bangsa-bangsa, menerbitkan buku yang sangat legendaris hingga kini yang bertajuk “*The Wealth of Nation*”. Yakni mengungkap rahasia Bangsa-Bangsa Eropa mengalami Kemakmuran Material, antara lain tentang teori pembangunan ekonomi berbasis kapitalisme di mana adanya kebebasan pelaku usaha untuk mengembangkan modal finansial dalam industri tanpa campur tangan pemerintah dan adanya kekuatan pasar sebagai *the invisible hand* yang pada gilirannya memakmurkan rakyat secara makro-agregat, meski menurut Marx, lapisan paling bawah mengalami proses pemiskinan. Dengan demikian, Adam Smith boleh juga dibilang sebagai Bapak Kapitalisme berbasis Sekularisme dan Materialisme.

Kita juga mencatat dalam sejarah, lewat Revolusi Prancis yang menghasilkan prinsip ‘Egalitarisasi Politik’ dengan pemikirnya Motesquieu, merumuskan prinsip politik sehingga terjadi demokratisasi dengan adanya pembagian kekuasaan antara Pemerintah, Parlemen dan Peradilan. Prinsip demokrasi politik Montesquieu tersebut menjadi satu paket dengan Ekonomi Modernnya Adam Smith, kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Kita mencatat, meski akhirnya ada varian peradaban Barat yang dikenal perbedaan antara Anglo Saxon Amerika dan Eropa Kontinental, tapi peradaban Barat adalah tetap dalam satu kesatuan. Maka pasca dekolonisasi Dunia Ketiga tahun 50-an, terjadi tranformasi besar-besaran peradaban barat terhadap

masyarakat dan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Apalagi dengan diadopsinya teori Ragnar Nurske (1953) tentang perlunya modal finansial dari luar (negara-negara Barat) terhadap negara berkembang untuk memecahkan “lingkaran setan kemiskinan”, sehingga mengalir deras arus masuk modal finansial tersebut sejak tahun 1960, 70-an dan berkelanjutan di era *developmentalism* (1970–2000) hingga Era Globalisasi (2000 hingga sekarang).

Jadi kita pahami yang terjadi bahwa pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah juga berarti *westernization*, baik dalam arti ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dan karena AS adalah pemenang perang dunia ke II, maka akhirnya Amerika Serikat (bersama sekutunya Eropa) yang memimpin transformasi peradaban Barat tersebut terhadap negara-negara berkembang. Maka dipahami pula, era kemerdekaan negara-negara berkembang sebagai adopsi secara sistematis prinsip sekularisme, materialisme dan kapitalisme dalam proses pembangunannya. Dengan konstruksi sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam sejarah negara-negara berkembang, proses transformasi tersebut sering menimbulkan kontradiksi. Meski ada sejumlah kemajuan dalam pembangunan ekonomi, tapi terjadi pula ketimpangan sosial, budaya, politik hingga kerusakan lingkungan. Hal ini karena ada semacam “jebakan epistemologis”, di mana bangsa bangsa di dunia ketiga, umumnya sangat kuat dengan peradaban spiritualisme, nilai-nilai religiusitas dan kekeluargaan yang berasal dari agama dan tradisi positif mereka. Dengan Pembangunan ekonomi besar-besaran yang terjadi sebagai adopsi dari prinsip-prinsip *westernism*, maka secara epistemologis (mengapa harus membangun?), masyarakat di negara-negara sedang berkembang, bukannya menolak kemajuan, tapi seringkali bersikap kritis. Yakni mempertanyakan: mengapa harus menanggalkan nilai-nilai kebajikan lokal (agama, tradisi dan budaya positif termasuk dalam prinsip-prinsip pelestarian lingkungan) yang harus serta merta digantikan oleh peradaban Barat yang tak relevan (individualisme, materialisme, kapitalisme dan sekularisme)?

Mengapa dengan Jebakan Epistemologis, berdampak pada masyarakat negara berkembang yang makin sekularistik, materialistik dan kapitalistik? Hal itu, secara teknokratis karena dalam proses pembangunan di negara-negara

sedang berkembang pasca dekolonisasi sangat mengejar (berorientasi) pada pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya (*Gross Domestic Product, GDP – Oriented*) (Michael Todaro, 2006) di mana ciri-cirinya terjadi: Sentralisasi, Homogenisasi, Urbanisasi dan *Financial Driven*. Hal itu ditambah dengan Bank Sentral dan Perbankan sebagai “*engine of growth*” yang makin mengokohkan *GDP oriented*, karena bersifat “*branch–banking system*” yang sentralistik dan menciptakan konsentrasi kapital di ibu kota dan kota-kota besar.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu, karena Perbankan yang bersifat “*branch–Banking System*” (bersama strategi pembangunan *GDP–Oriented*) menyedot dana pihak ketiga (Masyarakat) yang ada di daerah dan pedesaan ke ibu kota dan kota-kota besar (mengeringkan likuiditas daerah dan pedesaan) dan mengalokasikannya hanya ke sekitar ibu kota dan kota besar, serta sektor-sektor yang sensitif terhadap GDP (terutama sektor finansial dan sektor-sektor padat modal). Dengan demikian, pembangunan ekonomi menciptakan konsentrasi kapital finansial sehingga makin memperburuk ketimpangan. Juga bias ke ibu kota dan kota-kota besar serta ke pemilik modal sebagai pelaku utama pembangunan. Apalagi mereka umumnya bersifat *rent seekers* yang kemudian menjadi Pelaku Kartel dan pada gilirannya mereka membentuk Struktur Oligarki.

Dampak lebih lanjut pembangunan yang *GDP Oriented*, adalah terjadinya “*trickle-up effect*” dan bukannya “*trickle-down effect*” seperti jargon pembangunan berbasis Liberalisme, Yakni Menetesnya hasil-hasil pembangunan ke daerah dan pedesaan serta rakyat. Dalam proses “*Trickle-up*” sumber-sumber daya dan hasil-hasil pembangunan itu justru “*muncrat*” dari daerah-daerah dan pedesaan ke kota-kota besar dan ibu kota serta kepada para pelaku pembangunan (pelaku bisnis dan elit-elit pendukungnya di ibu kota dan kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang (NSB). Kemudian, juga dari NSB ke pusat-pusat metropolis dunia (negara-negara maju dengan pusat-pusat keuangan dunia seperti di New York, Berlin, Paris, London, Tokyo, Beijing dst. Sementara di daerah-daerah dan pedesaan (dengan sumber daya alam dan sumber daya tenaga kerja di dalamnya) serta NSB menjadi “korban pembangunan yang *GDP-oriented*. Yakni terjadi Pengeringan Likuiditas, Marginalisasi dan proses Pemiskinan.

“Heterodoxi Pembangunan”

Tapi di antara negeri-negara dunia ketiga (non-Barat), ada yang melakukan penyimpalan (*heterodoxi*) pembangunan. Diawali oleh Jepang dan diikuti sejumlah negara-negara Asia lainnya (terutama Korea Selatan, Cina, Malaysia, Thailand, Turki) yang secara sistematis di satu pihak tetap mengadopsi secara teknis kemajuan Barat. Tapi di lain pihak berhasil keluar dari *trap* Barat, dengan melakukan penyimpalan nilai-nilai fundamental. Yakni dengan ciri-ciri secara makro adanya: (1) Ideologi nasional yang kuat untuk menghadapi hegemoni negara-negara maju (*Advance Capitalist State*), (2) Peran “*Active State*” yang mampu mencegah akuisisi kaum modal terhadap pasar dan mencegah pemilik modal untuk mengendalikan negara menjadi alat untuk akumulasi kapital dan kepentingan mereka sendiri, (3) Independensi kebijakan pembangunan, (4) Kemandirian Ekonomi, kedaulatan politik dan Aksi Kebijakan berbasis *Sustainable Development* (ekonomi, sosial dan ekologi), (5) Kemandirian pangan, energi, finansial, teknologi dan pelaku bisnis dalam rangka Kepentingan Nasional. Kemudian juga, secara mikro dan nilai-nilai local, adanya ciri-ciri berkembangnya : (1) Ilmu sosial dan ekonomi berbasis lokal, (2) Teori-teori yang dibangun berdasarkan Ontologi, Epistemologi serta Aksiologi yang diangkat dari *success stories* negara-negara berkembang sendiri, (3) Proses “*hybrid*” antara hasil keterbukaan terhadap teori-teori yang berasal dari negara-negara maju dengan teori-teori berbasis keilmuan berasal dari bangsanya sendiri, (4) Riset-riset berbasis teori-teori Heterodox dan berbasis *Hybrid*, (5) Program-program pengembangan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, teori-teori dan hasil-hasil riset berbasis kepentingan nasional, (6) Teknologi-teknologi tepat guna, inovasi-inovasi, invensi-invensi yang otentik serta memberi solusi kepada rakyat dan bangsanya.

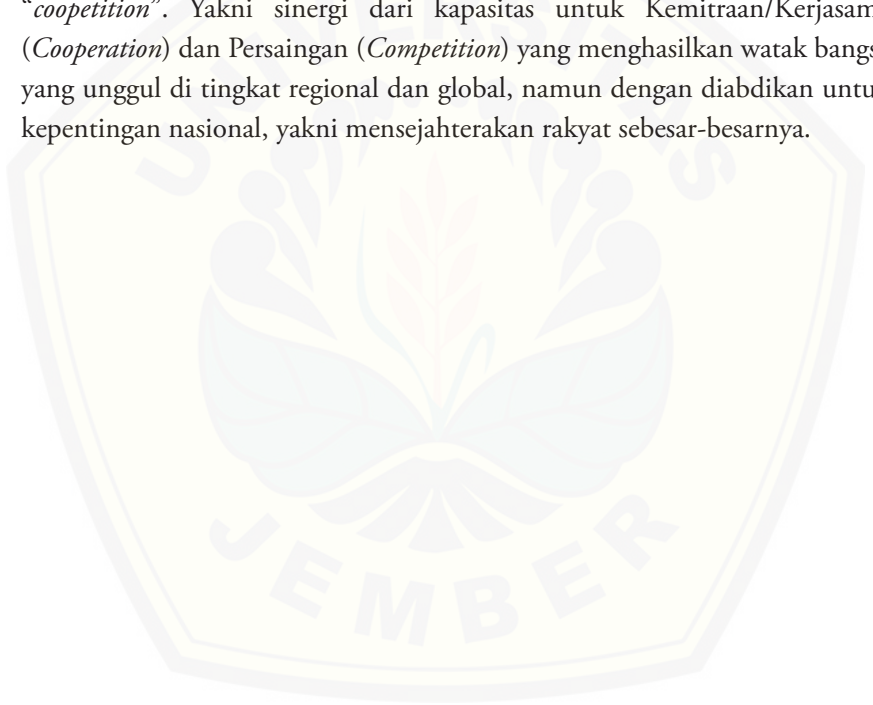
Bagaimana pun dengan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah dicapai hingga 77 tahun merdeka, proses pembangunan ekonomi di negeri ini kiranya belumlah mencapai apa yang disebut dalam UUD 1945 dalam pasal 33 ayat 3, yakni “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk memakmurkan rakyat sebesar-besarnya”. Dan seperti dijelaskan di atas, negara-negara berkembang yang justru telah mencapai kondisi tersebut adalah negara-negara seperti

Jepang, Korea Selatan, Cina, India, Turki, Malaysia, Thailand (3 negara yang disebut pertama malah sudah jadi negara maju), Indonesia dari Pemerintahan ke Pemerintahan telah sekuat tenaga untuk melaksanakan prinsip-prinsip Konstitusi dalam proses pembangunan ekonomi tersebut termasuk pasal 33 ayat 3 tersebut, Namun banyak faktor yang menjadi penghambat, termasuk dalam tulisan ini, apa yang disebut jebakan epistemologis (*Epistemological trap*) seperti telah dijelaskan di atas. Maka, menjadi tugas Perguruan Tinggi untuk mengatasinya.

Dalam konteks tulisan ini adalah terutama dalam kaitan dengan tugas Tridarma PT. Dalam ranah pendidikan dan penelitian, dengan melakukan apa yang disebut oleh kalangan ilmuwan "*French School (Derrida, 2017, Bourdieu, 2016, Foucault, 2001)*" yakni melakukan proses "*deconstruction*" (pembongkaran) sekaligus dilanjutkan dengan "*reconstruction*" (membangun kembali/merekonstruksi) teori-teori keilmuan sosial dan ekonomi sehingga lebih berbasis kepentingan rakyat (*people driven economy* dan bukan kepentingan segelintir pemilik modal yang malah membentuk struktur Oligarki) atau dalam prasa Konstitusi-UUD45 dengan "memakmurkan rakyat sebesar-besarnya" (bukan memakmurkan orang per orang).

Caranya adalah dengan mengembangkan pendekatan "*Eclectic*" baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam proses pembangunan. Yakni dengan ciri: *Zig zag* dalam mempergunakan metodologi-metodologi dan teori-teori yang relevan (dan mengabaikan yang tidak relevan), untuk menjelaskan, meramalkan, merencanakan sosial, memecahkan masalah masyarakat, bangsa dan Negara Pasca Kolonial ("*Post Colonial Society, Nation and State*"). Sementara, indikator-indikatornya adalah terjadinya kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (bukan sekadar kemakmuran orang per orang) dan kesejahteraan sosial (bukan sekadar kesejahteraan segelintir pemilik modal).

Dengan demikian pelaksanaan Tridarma PT, **dalam ranah Pendidikan** dengan melakukan transformasi keilmuan berbasis hasil riset, teori dan keilmuan berbasis lokal dan *hybrid* dengan pendekatan *Eclectic*, yakni mempergunakan metodologi-metodologi dan teori-teori yang relevan (dan mengabaikan yang tidak relevan). **Dalam ranah Penelitian**, dengan mengembangkan ilmu berbasis konstitusi, nilai lokal dan *Hybrid* yang mampu menghasilkan: Kritik Teori dan Teori-Teori Baru berbasis Lokal. Sementara, **dalam ranah Pengabdian pada Masyarakat**, secara makro ditujukan dalam rangka mencapai kondisi bangsa yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya “*coopetition*”. Yakni sinergi dari kapasitas untuk Kemitraan/Kerjasama (*Cooperation*) dan Persaingan (*Competition*) yang menghasilkan watak bangsa yang unggul di tingkat regional dan global, namun dengan diabdikan untuk kepentingan nasional, yakni mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya.





APA ITU NUSANTARANOMICS?

1.1 Nusantaranomics: Didin S. Damanhuri

Inspirasi Nusantaranomics berawal dari bimbingan mahasiswa S3 Sosiologi pendesaan salah satu Guru Besar, Prof. Dr. Didin S Damanhuri di IPB *University*. Dari seluruh bimbingan mahasiswa tersebut secara *evident* kuat, menemukan ragam entitas ekonomi berbasis daerah-daerah di Indonesia. Temanya besar dari semua riset disertasi tersebut ialah ekonomi lokal (*local economics*). Dari sekian disertasi mahasiswa ditemukan agregasi pemikiran yang kemudian dinamakan ekonomi nusantara (Nusantaranomics). Tulisan di *facebook* tersebut telah diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit Gramedia (Baca: Damanhuri). Pemikir ekonom besar dunia, Karl Polanyi melontarkan gagasan pemikiran ekonomi yaitu tidak perlu adanya universalitas dalam pemikiran ekonomi. Makanya, lahirnya konsep pluralisme dalam pemikiran ekonomi. Pemikir lainnya yang mengutarakan pluralisme ekonomi yaitu Julius Herman Boeke (1953). Ia seorang ilmuwan dan birokrat Belanda yang penah meneliti ekonomi Indonesia di masa silam. Hasil riset empirisnya menemukan teori *dual economy* di Indonesia. Teori ini ia sajikan dalam bukunya berjudul “*Economics and Economic Policy of Dual Societies, as Exemplified by Indonesia*”.

Terkait teori *dual economy* Boeke ini berhasil direvisi berkat hasil penelitian perkebunan Sawit di Sumatra Barat (baca: Ervawati). Temuan ini menarik karena *dual economy*-nya Boeke tidak memungkinkan terjadinya integrasi antara sektor tradisional dan modern. Apa yang menyebabkan terjadinya revisi teori *dual economy* Boeke? Ternyata ada keterkaitan dengan dengan nilai lokal (*local values*) dan *local genius*-nya masyarakat Minangkabau yang taat beragama Islam. Ia menemukan fakta baru bahwa dalam kasus perkebunan sawit di Sumatra Barat tidak tercipta *dual economy* dalam kerangka sosial

maupun ekonomi. *Dual economy* hanya terjadi dalam kategori teknoraktik ekonomi semata. Inilah salah satu contoh yang melatarbelakangi lahirnya gagasan Nusantaranomics.

Gagasan Nusantaranomics telah pula dimuat dalam opini Harian Umum Kompas berjudul “Ekonomi Pasar Pancasila” (Damanhuri, 2018). Sebelumnya gagasan ini juga telah dilontarkan dan dibahas dalam berbagai forum ilmiah. Pemikiran Nusantaranomics tersebut memungkinkan Indonesia memiliki sebuah *logical construct* dan *body of knowledge* dalam perspektif ekonomi global di satu pihak. Sementara, Asia dengan karakteristiknya *Asian way*-nya terbukti mampu mentransformasikan Jepang dan Korea Selatan sebagai kekuatan ekonomi dunia serta lahirnya Cina raksasa ekonomi dunia di pihak lain saat ini. Indonesia dalam perspektif *Asian way* berpotensi membangun dimensi ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam perspektif Nusantaranomics.

Epistemologi khas Asia ini acapkali disebut sebagai epistemologi timur. Salah seorang Pemikir Sosial Malaysia Syed Farid Alatas (2006) menyebut adanya Eistemologi khas Asia yang keluar dari dominasi Keilmuan Barat. Sementara pemikir asal Singapura yaitu Kishor Mahbubani (2008) menjelaskan cara Asia memperlakukan modernisasi Barat yang dipribumisasi lewat perilaku (*behavior*) ala Asia. Bahkan futuristik kondang dunia, John Naisbitt dalam bukunya berjudul “Megatren Asia” menyebutnya sebagai *Asian Way*.

Apabila merevisi peta bumi dan teori-teori ekonomi dunia, maka dirasakan bahwa dunia telah mengalami hegemoni pemikiran ekonomi secara ideologis yang disebut neoliberalisme. Sementara secara teknis dihegemoni lewat pemikiran ekonomi *ala* neoklasik. Namun, sebenarnya dalam era globalisasi saat ini, sebelum terjadinya pandemi telah berlangsung pluralisme ekonomi. Buktinya, seluruh indeks-indeks yang paling *performed* di dunia berasal dari negara-negara *welfare state model* atau sosialisme demokrasi yaitu negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia dan Islandia. Negara-negara ini tidak termasuk dalam skema Milton Friedman *ala* Amerika Serikat, karena adanya format *active state* bersamaan dengan mekanisme pasar yang sehat serta program-program jaminan sosial yang menyeluruh. Negara Negara Skandinavia adalah paling merata dengan

GDP/capita, *human development Indeks*, *happiness Indeks* hingga *Islamic Indeks* paling tinggi di dunia. Fenomena lainnya adalah Cina sebagai model pluralisme ekonomi. Meskipun sistem politiknya adalah Partai Komunis Cina (PKC) yang bersifat tunggal. Namun, ekonominya terutama di sepanjang wilayah pantai timurnya sangat liberal. Kemajuan Cina dengan pluralisme ekonominya ini terjadi akibat kecerdasan Deng Xiao Ping dalam mereformasi ekonominya. Akibatnya, *purchasing power parity* (PPP)-nya tertinggi di dunia melampaui Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Sejumlah negara Asia terutama Jepang dan Korea Selatan mengembangkan ekonominya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Asia (*Asian Way*). Jepang umpamanya, tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi dan agama tatkala melakukan restorasi Meiji. Jepang merevitalisasi nilai-nilai tradisi dan agama (Sintoisme), sebagai cabang dari Budhisme. Tujuannya adalah memperkuat karakter industrialisasi *ala* Jepang. Fenomena ini berbeda dengan Eropa Barat yang meninggalkan nilai-nilai tradisi dan agama pasca renaisans. Dengan kata lain, Eropa Barat lebih didominasi paham sekularisme. Jika dikomparasikan dengan konsep ekonomi versi UUD 1945 yang diarsiteki Bapak Pendiri Bangsa, Bung Hatta, maka Indonesia disebutnya sebagai model sosialisme *religious* atau sosialisme *ala* Indonesia. Pemikiran Bung Hatta berbeda dengan pemikiran Didin S Damanhuri yang menyebut Indonesia sejatinya lebih dekat dengan heterodoks model Jepang atau *Asian Way*.

Sayangnya, pemikiran heterodoks yang mengkonstruksikan model Jepang (*Asian Way*) belum diakui sebagai *grand theory* di luar arus utama. Sejak Karl Marx lewat karya besarnya *Das Capital* yang mengkritik renaisans Eropa yang menghasilkan kemakmuran dengan Kapitalisme tapi sekaligus menciptakan proses pemiskinan (proletarisasi). Pemikiran Karl Marx tersebut kemudian dikonkretkan oleh Lenin, dalam dalam perwujudan alternatif dari Kapitalisme, hanyalah dengan model Komunis (lewat Revolusi Bolshevik di Uni Soviet) atau oleh Mao Ze Dong di Cina. Sementara Jean-Jacques Rousseau, yang diteruskan oleh Pemikir-Pemikir Sosialisme Demokrat (Saint Simon, Robert Owen hingga Joseph Proudhon) yang menghasilkan model empiris apa yang disebut sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) *ala* Skandinavia. Rousseau yang mengkritik model Kapitalisme Eropa yang

menimbulkan ketimpangan kaya-miskin, kemudian mengkonstruksikan teori besar Sosialisme-Demokrat sebagai alternatif dari Kapitalisme. Yang menarik dari Proudhon di samping membongkar konstruksi pemikiran kapitalisme tapi juga mengkritik Marxisme sebagai “eksploitasi kaum proletar terhadap kaum kaya” dan juga merupakan “agama dari kesengsaraan” (*la religion se la miosere*).

Pemikiran heterodoks dalam pembangunan ekonomi sejatinya diawali oleh Jepang dengan kebijakan *long term planning*-nya. Lalu, diikuti Korea Selatan, Cina dan Indonesia lewat Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN). Secara objektif bahwa implementasi model heterodoks ala Indonesia pasca Orde Lama terbukti mampu meningkatkan GDP Indonesia dari USD 70 (1970) menjadi USD 1500 (1998), dan indeks ketimpangan Indonesia (gini rasio) rata-rata 0,30. Namun pencapaian sepanjang 32 tahun Orde Baru bermasalah karena dibarengi sistem pemerintahan yang anti demokrasi (otoritarianisme), KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan konglomerasi yang memarginalkan UMKM.

Secara normatif, Sistem Ekonomi Indonesia yang dirumuskan para pendiri bangsa seperti terkandung dalam Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian, kemudian dijabarkan oleh para Perumus Konstitusi-UUD 1945 terutama Bung Hatta adalah terinspirasi secara konsepsional oleh model negara-negara Skandinavia, Belgia dan Belanda di mana Bung Hatta waktu itu studi di Belanda melihat langsung keberhasilan Model Sosialisme Demokrat. Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, bukan hanya melihat kunci sukses dalam model Sosialisme Demokrat dengan adanya Gerakan Koperasi yang masif yang sukses mensejahterakan rakyatnya, namun juga sebagai Orang Minang terinspirasi dengan kekhasan budaya lokal Indonesia—terutama asal-usulnya—Minangkabau yang memang telah memiliki tradisi Demokrasi dan Ekonomi lokal. Dalam masyarakat adat Minangkabau telah mempraktikkan model demokrasi lokal yang disebut Kerapatan Adat Nagari yang mengedepankan musyawarah-mufakat. Juga praktik ekonomi seperti tergambar dari Manajemen Restoran Padang yang mengkombinasikan antara nilai-nilai Agama, Adat dan pencapaian keuntungan secara bersamaan.

Dari pemikiran ekonomi para pendiri bangsa, maka berkembang dan melahirkan terminologi tersendiri yang disebut Ekonomi Pancasila (*Pancasilanomics*). Pancasilanomics ini sejatinya bermula dari pemikiran Bung Hatta. Pemikiran ini dalam perjalanannya melahirkan perdebatan panjang semenjak Emil Salim menuliskan artikelnya di Harian Kompas tahun 1966 hingga kini. Pemikiran ini bukan tanpa kritik. Kritik justru datang datang dari intelektual kritis seperti Prof. Dr. Arif Budiman yang lebih menekankan kepada Sosialisme. Juga Prof. Dr. Sarbini Sumawinata yang lebih menekankan kepada Ekonomi Kerakyatan. Namun demikian, pemikiran ini terus dilanjutkan oleh Prof. Mubyarto, Prof. Sri Edi Swasono, Prof. Dawam Rahardjo antara 1970-1980-an. Setelah absen tahun 1990-2000-an, dalam satu dasawarsa terakhir ini beberapa ekonomi seperti Prof. Didin S. Damanhuri dan Dr. Arief Budimanta mengembangkan lebih lanjut lagi.

Pemikiran Ekonomi Pancasila ini tertuang dalam pasal-pasal ekonomi UUD 1945 (Baca berbagai studi: Syahrir, 1988; Damanhuri, 1990; Mubyarto, 2001; Swasono, 2005). Pasal-pasal tersebut antara lain:

Pertama, pasal 27 ayat (2) yaitu: “Tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kedua, pasal 33 ayat (1) sampai ayat (3) yaitu: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan sokoguru perekonomian nasional adalah koperasi, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prof. Didin menilai bahwa ayat ini merupakan “roh” dari ekonomi kerakyatan (*People Driven*).

Ketiga, pasal 34 yaitu “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara” yang melahirkan UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Damanhuri (2021) menyatakan bahwa jika ditelusuri dan dianalisis secara mendalam, prinsip-prinsip yang termasuk dalam pasal-pasal ekonomi UUD 1945 ini sangat dekat dengan gagasan kaum Sosialisme Demokrat dan “Negara Kesejahteraan” (*Welfare state*). Bung Hatta sebagai arsitek utama pasal-pasal ekonomi UUD 1945, telah bersentuhan dengan negara-negara penganut paham Sosialisme Demokrat semenjak masa studinya tahun 1930-an di Eropa. Bung Hatta telah mempelajari keberhasilan negara-negara: Belanda, Belgia dan negara-negara Skandinavia (Swedia, Finlandia, Denmark dan Norwegia) dan membicarakannya dalam pertemuan ilmiah dan berdiskusi tokoh-tokoh pergerakan. Makanya, model pembangunan ekonomi yang dikehendaki Bung Hatta mirip dengan negara-negara model sosialisme demokrat. Meskipun Bung Hatta juga terinspirasi dengan tradisi, kearifan lokal, dan agama di Indonesia. Sejatinya, ada beberapa negara-negara Asia yang sukses mempraktikkan model Negara Kesejahteraan dan/atau “*Heterodox Model*” ala Asia (Damanhuri, 1990) seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Cina. Model ini disebut sebagai “*People Driven*” (Ekonomi Kerakyatan) plus *Locals Economy* yang kalau diagregasikan disebutnya sebagai Ekonomi Nusantara (“Nusantaranomics”).

Selanjutnya, Damanhuri (2021) mengatakan bahwa jika direkonstruksi secara konsepsional, maka Nusantaranomics sejatinya menyamai *Model Asian Way* ala Jepang. Kemudian kalau dielaborasi lebih dalam, maka secara historis, pasca perang dunia kedua, Jepang dan Eropa mengalami rehabilitasi ekonomi lewat Program *Marshal Plan*. Pemikiran rekonstruksi pasca perang tersebut dibagi dalam tiga hal:

Pertama, *Asian Way* dan *Heterodox Model* ala Jepang. Menariknya, Jepang dalam merehabilitasi ekonominya pasca kekalahan dalam perang dunia kedua, mengembangkan suatu model pendekatan pembangunan heterodoks (menyempal dari arus tengah). Ia tidak hanya mengikuti program *Marshal Plan* yang liberal *ansich* ala Amerika Serikat. Melainkan, Jepang juga mengkombinasikannya dengan nilai-nilai agama (Sintoisme, Budhisme) dan tradisi (semangat Busido), *state lead market*, *long term plan* dan kemitraan. Nilai tradisi dan agama (*embedded*) dalam praktik ekonomi Jepang. Nusantaranomics dikonstruksinya mirip model Jepang yang telah mapan

dengan peradaban ekonominya hingga saat ini. Model ini disebut sebagai pendekatan *institutional driven* yang menghasilkan kemiskinan rendah, adanya gerakan koperasi, aksi kebijakan dalam kerangka negara kesejahteraan rakyat dan serikat buruh yang matang.

Kedua, Democratic-Sosialism model yang dikembangkan di Eropa Utara dan sebagian Eropa Barat. Bedanya dengan *Asian Way*, adalah model ini lebih berbasis sekularisme, negara kesejahteraan (*Welfare State*), *State-Market equilibrium with equity*, dan masifnya gerakan koperasi dalam perekonomian nasional. Rekonstruksi pembangunan ekonomi dalam model ini dikategorikan sebagai pendekatan *institutional driven* yang *output*-nya tidak sama dengan *Asian Way* dan *Heterodox Model* ala Jepang.

Ketiga, gelombang dekolonisasi di negara-negara dunia ketiga (negara berkembang) menghasilkan model yang berbeda dengan Jepang dan Eropa dalam rekonstruksi pasca perang dunia kedua. Pembangunan ekonomi negara-negara dunia ketiga malah berbasiskan utang luar negeri dan penanaman modal asing. Rekonstruksi pembangunan ekonomi yang berkembang dalam model ini secara empiris umumnya adalah dalam kerangka "*Finansial Capital Drivien*". Inilah yang melahirkan teori ketergantungan modal kapital. Model pembangunan ini merupakan konsekuensi dari tesis Ragnar Nurske terkait teori lingkaran setan kemiskinan yang merekomendasikan aliran modal asing untuk memecahkan kemiskinan.

Dalam pandangan Bung Hatta, pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia sejatinya telah mencapai tujuan kemerdekaan politik secara relatif telah tercapai. Namun, tujuan kemerdekaan ekonomi masih jauh dalam trajektori konstitusi-UUD45. Kemerdekaan ekonomi dikatakan tercapai apabila terjadi transformasi struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selama masa pemerintah Orde Lama memang telah dilaksanakan politik Benteng tahun 1950-an (Baca: Yahya Muhaimin), dan juga Orde Baru lewat kebijakan model pembangunan berbasis GBHN. Namun, hasilnya ternyata menimbulkan problem struktural dan kultural yang masih ditemukan hingga saat ini. Problem struktural yang dihasilkan adalah dalam struktur ekonomi nasional didominasi pelaku ekonomi pemburu rente (*rent seeker*), besarnya magnitudo korupsi, dan sistem politik

yang transaksional. Sementara problem kulturalnya adalah berkembangnya ekonomi politik neo-feodalisme (Gunnar Myrdal), perilaku kewirausahaan karena relasi dengan kekuasaan yang disebut Kunitz sebagai *Erzats Capitalism* dan negara yang berstruktur lemah (*soft state*), yang kompromistik dalam penegakan hukum yang berakibat maraknya korupsi.

Transformasi struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berbasis konstitusi adalah (Damanhuri, 2021):

Pertama, sistem politik, ekonomi dan bisnis yang berorientasi *people driven* yang dicirikan oleh negara yang aktif (*active state*) yaitu *smart, active* dan *people friendly*, mekanisme pasar (*market mechanism*) yang sehat serta *governance* (bebas korupsi), ekonomi yang inovatif berbasis pengetahuan (*knowledge base economy*) dan aktor-aktor politik (*Political Aktors*) yang berkualitas.

Kedua, ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang per orang. Hal ini dicirikan oleh gerakan ekonomi dari aras bawah (ekonomi lokal) yang disebutnya sebagai ekonomi Nusantara (Nusantaranomics). Nusantaranomics ini nantinya bakal menopang kelas menengah dan naik kelas menjadi aktor utama dalam industri berbasis digital. Di aras tengah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang pada gilirannya terbangun kelas menengah besar sebagai pilar penopang kesejahteraan rakyat.

Ketiga, di arah atas adalah badan usaha milik negara (BUMN) dan korporasi besar yang ditransformasikan jadi aktor ekonomi yang sehat lewat proses hilirisasi dan reindustrialisasi.

Untuk mewujudkan transformasi ekonomi tersebut, diperlukan reforma ekonomi yaitu membangun struktur ekonomi politik yang mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya melalui:

Pertama, dari aspek regulasi/perundang-undangan (UU) lewat (i) revisi berbagai Undang-Undang, antara lain UU Politik dan Pemilu, UU BI dan Perbankan, UU Lalulintas Devisa, UU Pasar Modal dan UU lainnya; (ii) memperkuat dan/atau merevisi UU lama di antaranya: UU Anti Monopoli

dan Persaingan Usaha, mengembalikan UU Tipikor dan KPK ke UU lama, membuat UU baru yaitu UU Pengembangan Kewirausahaan dan Teknologi dan lain-lainnya.

Kedua, dari aspek kebijakan yaitu (i) mengembangkan kembali perencanaan jangka panjang ala GBHN; (ii) penegakan sistem politik berbiaya murah non-transaksional; (iii) memperluas akses UMKM terhadap keuangan, informasi dan teknologi; (iv) membangun kemitraan usaha besar, menengah dan kecil; (v) mewujudkan kemandirian dalam kebijakan ekonomi, finansial, pangan, energi, dan teknologi; (vi) penegakan pemerintahan yang bebas korupsi meliputi tatakelola (*governance*) pemerintahan, legislatif, yudikatif, bisnis, dan *Civil Society*; (vii) otonomi daerah dan desentralisasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat serta menaikkan kelas Nusantaranomics dengan proses digitalisasi.

Mengapa transformasi ekonomi ini diperlukan? Damanhuri (2021) menyatakan bahwa transformasi ekonomi diperlukan karena bangsa ini masih diselimuti realitas ekonomi yang mengalami problem struktural. Problem ini menjadi tantangan utama dalam perekonomian nasional akibat ketimpangan dan kemiskinan struktural. Beragam studi membuktikan problem ketimpangan di Indonesia: *pertama*, Laporan *Credit Suisse* (2018) mencatat bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan dan 10% orang terkaya juga menguasai 75,3% total kekayaan. Fakta ini memposisikan Indonesia sebagai salah satu negara paling timpang di dunia.

Kedua, rasio gini kepemilikan aset di Indonesia lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Satu persen orang Indonesia menguasai 64% lahan (BPS, Indef, Credit Suisse, 2013) dan 1,25% rekening di perbankan menguasai 80,5% total simpanan (LPS, 2019).

Ketiga, BPS (2015) mencatat bahwa 30% kelompok terkaya di Indonesia menguasai 83% total konsumsi nasional.

Keempat, laporan OJK triwulan II (2017) menyatakan bahwa 48 grup konglomerasi keuangan menguasai 66,96 total aset sistem jasa keuangan (SJK).

Kelima, laporan najalah Forber (2006–2017) mencatat bahwa 40 orang terkaya di Indonesia sepanjang 2006–2017 meningkat terus-menerus dari USD 22,271 miliar tahun 2006 menjadi USD 110,72 miliar tahun 2017.

Keenam, menggunakan konsep *Material Power Indeks* (MPI) yang dikembangkan Jeffrey Winters (2013), memosisikan nilai MPI Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, kecuali Philipina. MPI Indonesia sebesar 584.478 menunjukkan bahwa rata-rata aset yang dikuasai oleh 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan nyaris 600 ribu kali lipat aset yang dimiliki rata-rata orang Indonesia.

Problem ketimpangan di Indonesia ini bukan tanpa alasan. Ketimpangan timbul karena adanya problem paradigmatik yaitu semua Negara berkembang pasca dekolonisasi mengadopsi modal pembangunan berparadigma liberal (baca: *GDP Oriented*) dengan segala implikasinya. Problem paradigmatik ini kian mengkristal semenjak proses globalisasi makin intensif berlangsung di semua aspek kehidupan terutama ekonomi. Apa dampaknya? *Pertama*, kian mengintensifkan proses globalisasi tanpa kebijakan selektif, maka tingkat ketimpangan kian melebar. Lalu, peran negara “minimalis” (*minimum state*) atas desakan IMF sejak tahun 2000. Akibatnya, negara-negara berkembang termasuk hanya menjadi *follower* dalam menghadapi globalisasi dan/atau mengalami interdependensi global. Fenomena ini dialami nyaris semua negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Kedua, negara-negara yang mampu “menjinakkan ketimpangan”, adalah tipologi negara “*active state*” (merujuk temuan World Bank terakhir) dan kreatif dalam menghadapi globalisasi. Misalnya Korea Selatan, Malaysia, Turki di era kepemimpinan Presiden Erdogan, dan India sejak kepemimpinan Perdana Menteri Modi.

Pembangunan di negara-negara yang berorientasi GDP *ansich* ternyata memberikan dampak secara ekonomi politik, sosial dan ekologi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia pembangunan berorientasi GDP menimbulkan dampak:

Pertama, penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk era otonomi daerah akan tetap memilih alokasi fiskal, moneter dan perbankan yang “sensitif terhadap pertumbuhan PDB/PDRB”. Imbasnya RAPBN dan RAPBD makin berorientasi padat modal dan teknologi serta kian rendah dalam menyerap tenaga kerja. Politik anggaran semacam ini makin menyulitkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Justru yang terjadi adalah kian melebarnya jurang ketimpangan antar golongan pendapatan, antar sektor maupun antar wilayah di Indonesia.

Kedua, Sistem Politik dan Pemilu yang “*High Cost*” berimbas terhadap kian jauh panggang dari api dalam menggapai kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya seperti Amanah pasal 33 UUD45. Ditambah pula perilaku elit-elit politik di pusat maupun daerah termasuk eksekutif, khususnya kepala daerah yang terpilih umumnya dengan budaya politik uang dan transaksional. Dus, pembangunan nasional dan daerah-daerah makin tidak demokratis dan tidak berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi.

Ketiga, era reformasi telah melahirkan peraturan perundangan yang memperkuat GDP oriented. Perundangan tersebut UU BI, Perbankan, Lalu Lintas Devisa, dan Pasar Modal yang bersifat “*Againt to Otonomi Daerah, Decentralized Economy and Political Democratic*”. Imbas dari model “*Finansial Centralism*” mengorbankan UMKM dan daerah-daerah yang kian menjauh dari Jakarta.

Keempat, pembangunan infrastruktur berbentuk fisik, sosial, ekonomi, politik, dan sifatnya *soft* sejatinya mendukung atau berorientasi GDP. Orientasi pembangunan infrastruktur demikian juga mengorbankan UMKM, daerah-daerah serta golongan berpendapatan rendah baik secara nasional maupun internal daerah.

Dari keseluruhan uraikan di atas, maka direkomendasikan (Damanhuri, 2021): *pertama*, Indonesia harus seyogiannya menolak peran negara yang minimal (“*minimum State*”). Secara Politik, Indonesia mestinya memerjuangkan untuk kembali pada sistem Sistem Presidensial Murni dan

memposisikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara sehingga dapat menciptakan “*Active State*” dan kreatif serta mandiri dalam interdependensi global.

Kedua, Indonesia mesti memiliki keunggulan dalam proses dan meraih *output* serta *outcome* yang bermanfaat dari globalisasi maupun rezim ekonomi internasional yang berlaku. Kemampuan menciptakan dan memanfaatkan keunggulan tersebut akan memajukan pembangunan daerah serta menyejahterakan rakyat di era otonomi dan desentralisasi.

Ketiga, semua *stakeholder* (legislatif, daerah-daerah, *civil society*, dan dunia usaha) mesti mendorong pembangunan yang berorientasi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat bukan orang per orang sesuai tuntutan konstitusi UUD45. Prof. Didin menyebutnya sebagai pembangunan ekonomi berbasis konstitusi-UUD45. Orientasi pembangunan yang mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat – dalam waktu bersamaan dengan pembangunan ekonomi daerah – bakal menghasilkan kesejahteraan seluruh rakyat yang sebesar-besarnya secara nasional maupun daerah dibarengi sistem politiknya yang makin demokratis dan pembangunannya yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Dengan konteks baru demikian, menghasilkan model pembangunan nasional yang berkeadilan dan desentralistik. Model pembangunan nasional tersebut juga merepresentasikan pembangunan ekonomi berorientasi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya, makin demokratis dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi.

Pemikiran ekonomi Nusantara (Nusantaranomics) bukannya tanpa tantangan. Era revolusi 4.0 lewat digitalisasi yang mendisrupsi semua aspek kehidupan jadi tantangan utama Nusantaranomics. Mau tidak mau Nusantaranomics mesti beradaptasi dengan percepatan perkembangan era digital. Tantangan Nusantaranomics di era digital yaitu: *pertama*, *disruptive effect*. Revolusi industri 4.0 bersifat *creative distraction*, karena sifatnya super cepat, eksponensial dan disruptif terhadap industri lama. Solusinya adalah strategi yang bijak dan hati-hati dalam menyikapi transformasi industri 4.0. Nusantaranomics mesti menerapkan strategi peralihan dan mutlak membutuhkan “*Afirmative Policy*” dari pemerintah.

Kedua, platform effect. Tantangan kedua ini berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi secara global. Kecenderungan ekonomi dunia yang mengarah kepada monopoli kian terang benderang. Fakta menunjukkan bahwa *Google* menguasai 88% bisnis *online search*, *Amazon* menguasai 70% *e-book*, dan *Facebook* menguasai 77% media sosial. Solusi akibat konsentrasi aset sebagai dampak revolusi industri 4.0 mesti direspons lewat “*Smart Regulation*” dari Negara.

Ketiga, automation effect dari revolusi 4.0 yang menimbulkan pengangguran massal akibat pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Solusinya adalah negara mesti menjamin kebijakan tersedianya lapangan kerja (*full employment policy*). Kebijakan ini mesti dibarengi oleh transformasi keterampilan (*skill transformation*) berbasis digital.

Keempat, negara mesti menaikkan kelas “Nusantaranomics” sehingga berperan sebagai penggerak ekonomi nasional (*Prime Mover*) berbasis digital sehingga menciptakan *quantum leave*.

Untuk mengatasi keempat tantangan tersebut dan mewujudkan solusinya, maka membutuhkan “*Active State dan Agile Government*” (Damanhuri, 2021).

1.2 Nusantara Nusantaranomics: A. Prasetyantoko

Gagasan Nusantaranomics merupakan sebuah gagasan alternatif dan khas bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Prasetyantoko (2021) menyatakan bahwa gagasan ini perlu diapresiasi dalam dua hal, yaitu: (1) gagasan ini lahir dari pemikir ekonom Indonesia dalam hal ini Prof. Didin Damanhuri yang telah berkontribusi bagi pemikiran ekonomi Indonesia dan posisinya sebagai intelektual ekonom di Indonesia, dan (2) Gagasan Nusantaranomics dengan pendekatan heterodoks menjadi “*icon*” baru dalam pemikiran ekonomi di Indonesia.

Prasetyantoko (2021) mengajukan pertanyaan kritis yaitu apa itu heterodoks? Pendekatan heterodoks merupakan pendekatan yang dibangun dengan “membuka” perspektif deterministik. Dengan kata lain pendekatan heterodoks adalah pendekatan yang tidak deterministik. Dalam bahasa

sederhananya dalam ekonomi yang umum yaitu membuka kurung *Ceteris Paribus* seoptimal mungkin. Konkretnya adalah mekanisme ekonomi apapun tak akan pernah keluar dari konteksnya. Artinya sebuah teori ekonomi yang dikeluarkan ahli di Amerika Serikat sekalipun pasti akan berujung pada konteks kenyataannya.

Jika di Asia dikenal *Asian Values* dan *Asian Paradigm*, maka gagasan Nusantaranomics dengan pendekatan heterodoks menjadi relevan. Pasalnya pendekatan apapun dalam ekonomi ketika akan dikembangkan baik secara kebijakan publik, pemikiran ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat mau tidak mau harus diletakan dalam konteks Indonesia saat ini. Hal ini menjadi amat fundamental (Prasetyantoko, 2021).

Seluruh komponen bangsa ini mesti menyadari bahwa kini saatnya membumikan pemikiran-pemikiran ekonomi yang khas dalam konteks Indonesia. Pertanyaannya adalah: bagaimana implikasi pendekatan heterodoks terhadap dunia kampus kekinian? Dalam konteks wabah pandemi Covid-19 yang melanda saat ini dan sebelumnya gelombang disrupsi teknologi, juga melahirkan pertanyaan kritisnya yaitu di mana posisi pendekatan heterodoks? (Prasetyantoko, 2021).

Di balik pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan kesadaran publik bahwa Covid-19 adalah momen penting dan sekaligus bisa merupakan malapetaka. Soalnya sebagian dari masyarakat Indonesia mengalami keduakaan akibat terinfeksi Covid-19. Akan tetapi, dalam kondisi kekinian berada di puncak mestinya bangsa ini mesti memutarbalik keadaan (*turning down*) dengan mengimplementasikan gagasan Nusantaranomics. Mengapa demikian? Pasalnya semua orang sudah berpikir soal pengelolaan ekonomi selama ini berbuntut malapetaka Covid-19. Fakta ini membuktikan bahwa pendekatan pengelolaan ekonomi selama ini ternyata tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Covid-19 hanyalah salah satu saja dan aneka ragam kasus sudah berlangsung selama ini. Penyebabnya adalah terganggunya keseimbangan. Virus Corona selama ini hanya hidup dalam ekosistemnya. Tatkala ekosistemnya terganggu maka virus Corona masuk dalam ekosistem manusia. Akibatnya, kita menghadapi bencana dan berantakannya tatanan manusia karena kita tak mampu hidup bersamaan akibat ekosistem terganggu. Makanya saat ini

kita menghadapi peristiwa penting dalam peradaban manusia sehingga kita mesti menemukan keseimbangan baru (1) dalam perspektif ilmu (2) dalam kebijakan publik dan (3) dalam masyarakat (manusia) dalam konteks ekonomi (Prasetyantoko, 2021).

Prasetyantoko (2021) juga mengingatkan pentingnya merujuk kembali pemikiran salah satu pendiri negara Bung Hatta. Menurutnya, Bung Hatta merupakan salah satu pemikir besar Indonesia dan seorang intelektual sejati, aktivis dan negarawan karena ikut menentukan dan membangun fondasi negeri ini terutama dalam bidang ekonomi. Semasa hidupnya, pemikirannya sangat jauh melampaui jamannya dan sangat visioner. Sebuah lembaga riset berwibawa, LP3ES Jakarta saat ini bahkan sedang menyusun “Bunga Rampai Pemikiran Bung Hatta”.

Prasetyantoko (2021) menyatakan bahwa dewasa ini berkembang salah satu teori moneter yang bersifat dinamis dan berubah cepat karena kebutuhan. Keilmuan pun berubah sebagaimana dalam kebijakan publik. Salah satunya adalah *non-convesional monetary policy* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat tatkala merespons krisis ekonomi tahun 2007–2008. Dalam praktiknya, Bank Sentral Amerika Serikat memberikan surat utang langsung yang diterbitkan pemerintah. Padahal kebijakan semacam ini tidak ditemukan dalam teori moneter. Uniknya praktik kebijakan moneter semacam ini sudah lazim dipraktikkan untuk merespons krisis ekonomi meskipun teorinya belum ada.

Menurut Prasetyantoko (2021) bahwa pandangan ekonomi Bung Hatta sebelum dan pasca Indonesia merdeka sejatinya telah memberikan fondasi pemikiran moneter yang mendasar. Pemikiran Bung Hatta tersebut adalah (1) Bung Hatta menganggap moneter sebagai soal sirkulasi uang, sehingga dipandang uang sebagai hasil kesepakatan. Maknanya uang adalah konvensi sosial; (2) Bung Hatta memandang Bank sebagai bisnis kepercayaan. Pemikiran Bung Hatta di masa kini menjadi sebagai fundamen berpikir mendasar di tengah pesatnya perkembangan teori moneter mengikuti perubahan arus perubahan yang terjadi.

Salah satu, fenomena yang menarik di era digital saat ini adalah lahirnya inovasi keuangan yang pesat. Di antaranya *Bitcoin* dan *Crypto Carancy*. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi dan melihat situasi perkembangan semacam itu? Merujuk pemikiran Bung Hatta bahwa ekonomi itu akan relevan jika berkontribusi terhadap (1) manusia dan (2) peradaban. Peradaban yang dimaksud adalah sistem sosial. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana melihat dan menyikapi perkembangan pesat inovasi keuangan saat ini? Jawabannya amat mudah. Inovasi keuangan tersebut mesti memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial sehingga memiliki kemampuan inklusif.

Secara konseptual, Prasetyantoko (2021) menyetujui fondasi berpikir yang dikembangkan Damanhuri sebagai kerangka berpikir (*frame work*) yang tidak boleh ditinggalkan. Mungkin ada yang bertanya secara sarkasme. Mengapa di tengah perkembangan inovasi keuangan (*Crypto Carancy* dan *Bitcoin*), masih merujuk pemikiran Bung Hatta? Apakah masih ada relevansinya? Pemikiran fundamen ala Bung Hatta tidak bisa ditinggalkan begitu saja di tengah perubahan situasi kian cepat. Oleh karena, ketika menghadapi perubahan situasi yang begitu cepat berubah diperlukan: **Pertama**, mesti memiliki sistematika berpikir yang solid dan salah satunya adalah Nusantaranomics sebagai suatu kerangka pikir yang dibutuhkan. Makanya, mendorong gagasan Nusantaranomics dengan pendekatan heterodoks sebuah keniscayaan. **Kedua**, tatkala membicarakan soal perubahan, maka dewasa inilah waktunya yang tepat. Pasalnya semua orang kini mencari pendekatan dan perspektif baru dalam pembangunan ekonomi. Soalnya pendekatan yang dijalankan sebelumnya diakui telah mengalami kegagalan dan dipertanyakan legitimasinya. Makanya, diperlukan inisiatif-inisiatif baru untuk menemukan kembali pendekatan yang lebih cocok. Salah satunya pendekatan Heterodoks yang relevan dalam pembangunan ekonomi pasca Covid-19 dan di masa yang akan datang.

Menurut Prasetyantoko (2021), jika Nusantaranomics dikaitkan dengan ekonomi dan tujuan usaha perekonomian, maka melahirkan dua hal, **pertama**, merujuk Laporan IMF tentang *World Economic Outlook* yang dipublikasikan April 2021 ditengarai bahwa *recovery economy* dunia bersifat

growing vaccine coverage dalam setahun ke depan dan penuh ketidakpastian. Upaya pemulihan ekonomi bakal berbeda di berbagai negara dan sektor sehingga mencerminkan adanya variasi gangguan (*diverging across*) akibat pandemi dan tingkat dukungan kebijakan. Prospek pemulihan ekonomi tidak hanya bergantung hasil pertempuran antara virus dan vaksin. Melainkan, juga bergantung pada efektivitas penerapan kebijakan ekonomi di tengah tingginya ketidakpastian sehingga mampu membatasi kerusakan berkelanjutan dari krisis belum pernah terjadi selama ini (IMF 2021).

Kedua, pasca Covid-19 aspek teknologi digital kian intensif. Teknologi tak akan lepas dan makin merasuk dalam kehidupan keseharian umat manusia di dunia. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut juga menyisakan pertanyaan pokok. Bagaimana teknologi dapat memberikan sifat inklusi? Dengan kata lain inovasi-inovasi yang dihasilkan dari teknologi memberi efek inklusi. Kini berkembang pula pemikiran inovatif di tengah stagnasi perbankan yang kesulitan menyalurkan kredit kepada masyarakat yaitu *finansial technology* (*fintech*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinikan *fintech* adalah sebuah inovasi industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Produk *fintech* adalah sebuah sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan spesifik. Inovasi dalam *fintech* adalah perusahaan jasa keuangan memanfaatkan teknologi yang menyediakan pelayanan jasa keuangan yang cepat dan mudah. Apakah inovasi teknologi tersebut akan menunjang inklusi finansial dalam sektor keuangan? Jika menunjang inklusi finansial sektor keuangan, inovasi tersebut harus didorong sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan arti pada makna kemanusiaan (*humanism*).

Dalam pembangunan ekonomi yang juga bersentuhan dengan gagasan Nusantaranomics ialah soal lingkungan (ekologi). Seluruh umat manusia di muka bumi ini tak bisa lagi bernegosiasi dengan masalah lingkungan. Misalnya isu lingkungan sudah menyangkut hidup dan matinya seluruh manusia di muka bumi ini. Jika tak berpikir tentang pentingnya pembangunan berorientasi keberlanjutan (*sustainability*), maka tinggal menunggu waktu saja dunia ini akan tenggelam. Laporan *The Economist* tanggal 24 Juni 2021 mencatat bahwa apabila pemanasan global mengalami kenaikan hingga 3°C, maka dunia ini tidak lagi memiliki tempat yang nyaman untuk tempat hidup akibat

mencairnya es di kutub (<https://www.economist.com/weeklyedition/2021>). Maka mau tidak mau, pilihannya adalah mesti mengembangkan perspektif *sustainable* di semua aspek kehidupan umat manusia.

Modal pendekatan Hererodoks dan modal jadi diri dengan pendekatan yang membumi ala Nusantaranomics mesti dielaborasi lebih jauh untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Juga mengadopsi pendekatan-pendekatan lain yang berkembang dan dilakukan berbagai pihak di dunia. Contohnya, terkait keberlanjutan berkembang pemikiran tentang *circular economy*. Apa *circular economy*? *Circular economy* merupakan sebuah alternatif bagi ekonomi linier tradisional. Dalam pemikiran ini pelaku ekonomi menjaga agar sumberdaya dapat dimanfaatkan selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaannya. Lalu memulihkan dan meregenerasi produk dan bahannya di setiap akhir umur layanan. *Circular economy* adalah sistem industri restoratif dan regeneratif yang didesain untuk menggantikan konsep “akhir hidup” produk. *Circular economy* mengarahkan penggunaan energi yang terbarukan, menghilangkan penggunaan bahan kimia beracun, dan bertujuan menghilangkan limbah lewat keunggulan desain bahan, produk, sistem, dan model bisnis. Dalam *circular economy* meminimalisasi penggunaan sumberdaya, sampah, emisi, dan energi terbuang lewat penutupan siklus produksi dan konsumsi sehingga memperpanjang umur produk, inovasi desain, pemeliharaan (*maintenance*), penggunaan kembali (*re-use*), remanufaktur (*remanufacturing*), mendaur ulang ke produk semula (*recycling*), dan mendaurulang jadi produk lain (*upcycling*).

Secara konsesipnal, pemikiran memandang bahwa ekonomi itu bukan hanya *end to end* yaitu diproduksi dan dikonsumsi (*to product and to consume*). Melainkan ekonomi mesti berputar kembali (*re-cycle*) dan digunakan kembali (*re-use*). Inilah pentingnya mengelaborasi Ekonomi Heterodox dan Nusantaranomics dengan satu tujuan untuk membuat kehidupan ekonomi lebih manusiawi dan memastikan kesejahteraan sosial lebih baik.

Isu lain yang juga menyertai pembangunan ekonomi dewasa ini adalah kemajuan teknologi informasi berbasis digital. Menurut Prasetyantoko (2021), gagasan Nusantaranomics di era digital ini mesti memakai “baju baru”. Gagasan Nusantaranomics diupayakan untuk didekatkan dengan

generasi milenial terutama mahasiswa. Perspektif Nusantaranomics juga mesti disuarakan dan didampingi untuk kalangan milenial sehingga mampu mempengaruhi kebijakan publik. Salah satunya adalah bagaimana memaknai teknologi digital dalam perspektif Nusantaranomics. Peralpnya, kalangan milenial sangat akrab dari aspek sosial dan familiar dengan bisnis berbasis teknologi sehingga membutuhkan proses transformasi berpikir ala Nusantaranomics. Kaum milenial lazim mengembangkan model bisnis yang menggambarkan cara berpikir inisiatif/rintisn (*start up*). Salah satu tawaran buat kaum milenial adalah gagasan mengembangkan koperasi *Socio-entrepreneurship*. Dalam implementasinya dimungkinkan penamaannya berbeda, akan tetapi semangat dan warisan nilai-nilainya tetap dipertahankan dengan cara: (1) mengkatalisasi pengembangan *e-cooperative* yaitu koperasi berbasis digital sebagai model implementasi baru, dan; (2) mengelaborasi dan menginklusi koperasi dengan situasi kotemporer kekinian.

Kata kunci keberhasilan mendekati Nusantaranomics dengan kalangan milenial adalah mampu mengelaborasi ekosistem praktik-praktik terbaik dari model Nusantaranomics, aspek sosial, dan kebijakan publik yang telah diinisiasi berbasiskan teknologi digital. Dalam konteks ini, membangun sebuah ekosistem Nusantaranomics berbasis teknologi digital jadi keniscayaan. Nusantaranomics juga mesti didiskusikan dengan legislator dan pemerintah daerah. Salah satu upaya mengimplementasikan Nusantaranomics adalah menyelenggarakan Kursus Kebijakan Publik tentang Nusantaranomics yang melibatkan aparat pemerintah daerah.

Kesimpulan bab ini adalah gagasan konkret untuk membumikan dan mengimplementasikan Nusantaranomics lewat pendekatan heterodoks adalah: **pertama**, mensosialisasikan dan menyelenggarakan pelatihan praktik-praktik Nusantaranomic bagi aparat pemerintah daerah (*government officer*), supaya memiliki *frame work* yang solid.

Kedua, mengembangkan model praktik Nusantaranomic berbasis digital. Bentuknya adalah mendigitalisasi praktik-praktik ekonomi lokal yang sudah berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Ketiga, mengembangkan dan mengkonstruksi aspek filosofis gagasan Nusantaranomics secara ontologi, epistemologi hingga aksiologinya sebagai model alternatif ekonomi dengan mazhab baru pemikiran tersendiri (*heterodox*).

Keempat, mendiseminasikan gagasan Nusantaranomics di kalangan parlemen (*legislatif*) sehingga mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam bidang ekonomi maupun politik, umpamanya politik anggaran, moneter dan fiskal di pusat maupun daerah.



LANDASAN TEORI NUSANTARANOMICS

2.1 Teori Heterodoks: Muhamad Karim

Mazhab ekonomi politik heterodoks merupakan suatu pendekatan ekonomi politik dan pembangunan yang menyempal dari teori kapitalisme maupun sosialisme. Prasetyantoko (2008), Damanhuri (2010) mengatakan pendekatan heterodoks dalam ilmu ekonomi sangat luas dan bervariasi. Pendekatan ini mencakup antara lain Teori Regulasi, Neo-institusionalisme, feminisme, Dual and Plural Economy, Environmentalisme, Basic Needs Theory hingga Japan Incorporated. Kelemahan utama pendekatan ekonomi heterodoks belum dianggap sebagai teori besar (*grand theory*). Prasetyantoko dan Damanhuri berpandangan bahwa pendekatan heterodoks belum mapan dan solid. Salah satu argumentasi yang menyatukan para pemikiran mazhab heterodoks adalah menolak cara pandang klasik dan neo-klasik serta di luar kerangka Sosialisme Demokrat apalagi model Komunisme. Mereka tidak berdiam diri tetapi membentuk sebuah organisasi yakni *Association for Heterodox Economisc* (AHE) tahun 1999. Organisasi ini menyelenggarakan konferensi tentang pemikiran heterodoks setiap tahunnya³.

Menurut Damanhuri (2010, 2012, 2014), dalam perspektif Ekonomi Politik dan Pembangunan, Teori Heterodox dibangun atas realitas Negara Sedang Berkembang sendiri. Pembangunan merupakan fenomena kualitatif dan perkembangan (*development*), bukan semata-mata kuantitatif dan pertumbuhan (*growth*). Misalnya dalam teori Dualisme Fracois Feroux, bahwa di Negara-Negara Sedang Berkebang (NSB) terjadi dualisme sosial, ekonomi,

3 Lihat Prasetyantoko, hal 44-46).

teknologi, dan budaya, akibat penguasaan struktur dominasi. Misalnya dominasi perusahaan modern atas pasar, sektor formal/modern atas sektor informal/tradisional, negara industri atas negara berkembang. Dengan begitu, keterbelakangan yang dialami NSB gak bisa dilihat semata mereka tidak efisien dari sektor tradisional dan informal yang mendominasi struktur ekonominya. Tapi harus dilihat ada dualisme ekonomi di mana Negara Maju dan kalangan Perusahaan Mancanegara (MNC) bias dalam transfer Ipteknya hanya kepada sektor modern dan formal. Kemudian Negara NSB pun tak sadar bisa juga terhadap sektor modern dan formal tersebut, karena orientasinya yang semata kepada pertumbuhan yang tinggi⁴.

Dalam *benchmark* pembangunan yang Heterodox, Damanhuri menyarankan agar NSB khususnya di negara-negara Asia, agar lebih mengacu kepada “Model Jepang” di mana peran nilai-nilai Tradisional dan Agama diberdayakan justru ketika industrialisasi secara intensif dilaksanakan. Kemudian yang mengemuka bukan hanya ekonomi berdasarkan dorongan efisiensi, tapi juga tercipta karena adanya Konsensus antara Negara, Parlemen, Pasar, Pelaku swasta, dan seterusnya (*Japan Incorporated*). Dus, ada keseimbangan antara *competition* dan *Cooperation*. Hal itu dalam rangka untuk menghadapi pasar global di satu pihak dan mewujudkan kesejahteraan sebesar-besar rakyatnya di lain pihak. Sementara dalam kaitan dengan keberadaan serikat buruh, tidak merupakan isu makro dengan manajemen konflik antara Serikat Buruh versus Pemilik Modal ala Eropa Barat. Tapi lebih merupakan isu Mikro-Usaha. Yakni dengan mengupayakan dialog harian, mingguan dan bulanan antara Manajemen dan Karyawan dalam mencapai kesejahteraan buruh perusahaan⁵. Dengan konteks tersebut, berdasarkan model pengembangan Nusantaranomics, menurut Damanhuri, lebih dekat kepada *Asian Ways* dan Model Jepang.

Selanjutnya, menurut Lee (2010), ekonomi heterodoks merupakan multilevel istilah yang merujuk pada: *pertama*, sekumpulan teori ekonomi yang sepadan dan berkembang luas secara spesifik meliputi: Post Keynesian-Sraffian; Marxis-Radikal, Evolusi Institusional, new-sosialist latino-

4 Didin S Damanhuri: Ekonomi Politik dan Pembangunan, IPB Press, hal. 63 s/d 75.

5 Ibid. hal 73 s/d 75.

americaine, feminis, Austrian, Ekologi Ekonomi yang masing-masing berpegang pada suatu posisi yang tidak sepadanan/berlawanan (*vis a vis*) dengan ekonomi arus utama (*mainstream economic theory*).

Kedua, komunitas ekonomi yang terlibat dan berkaitan dengan satu atau lebih pendekatan ekonomi yang bermazhab heterodox.

Ketiga, suatu koherensi (pertautan), berbeda/bertentangan, dan mengembangkan suatu teori ekonomi yang menjelaskan kontribusi pelbagai ragam teori melalui pendekatan heterodoks dan menjelaskan rekomendasi model kebijakan-kebijakannya. Makanya, dalam ekonomi heterodoks merujuk berbagai pendekatan dan berkomitmen untuk membangun suatu “komunitas ekonom heterodoks: (*heterodox economy communities*) yang mengintegrasikan teori dan profesionalisme (Lee, 2010).

Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa pendekatan ekonomi heterodoks merupakan aliran di luar pemikiran ekonomi klasik (*orthodox economics*). Pemikiran ekonomi ortodoks merupakan ilmu ekonomi berbasis model Walrasian yang dipandang sebagai aliran arus utama (*mainstream*). Pemikiran ekonomi ortodoks menghegemoni seluruh Departemen Ilmu Ekonomi di semua universitas di Indonesia dan dunia. Sudah menjadi fatsun bahwa tak sah dalam menyusun sebuah skripsi, tesis dan disertasi tanpa menggunakan model matematika (kuantitatif). Mengapa fenomena semacam ini terjadi? Prasetyantoko (2008) menemukan jawabannya bahwa cara pandang ortodoks ini bersumber dari ideologi besar paradigma ekonomi neo-klasik yaitu ***rasional-individual-keseimbangan***. Paradigma ini berbeda dengan pendekatan heterodoks yaitu menawarkan pertautan antara “***institution-history-sosial structure***”.

Pemikiran heterodoks lahir menurut Lawson (2006) karena aliran pemikiran ekonomi arus utama tidak mampu menjawab persoalan di negara-negara sedang berkembang. Lawson berpandangan bahwa aliran neoklasik dinilai gagal menjawab permasalahan ekonomi dan proses pembangunan di negara sedang berkembang. Teori pemikiran heterodoks “menolak” pendekatan neo-klasik yang dianggap mereduksi keadaan dunia nyata dalam ekonomi.

Logika ekonomi yang dibangun dalam paradigma yang berorientasi “pertumbuhan ekonomi” (*growth oriented*) untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi suatu bangsa sebetulnya tak lepas dari cara pandang ekonomi neo-klasik. Suatu cara pandang yang mengedepankan metode pendekatan deduksi matematis dan model ekonometrik. Logika inilah yang dibangun dengan teori keseimbangan pasar yang mengabaikan aspek sosial, relasi masyarakat, perilaku manusia dan politik. Dalam pendekatan ekonomi neoklasik yang bersifat matematis aksioma (Lawson 2006):

1. Setiap individu bersifat rasional dalam melakukan pilihan (optimisasi);
2. Kondisi keseimbangan (ekulibrium) terjadi ketika mekanisme pasar (*laissez-faire*) bekerja.

Secara kritis Lawson (2006) menyatakan bahwa aksioma-aksioma dalam ekonomi neo-klasik hakikatnya mereduksi perilaku manusia (*human behavior*). Pasalnya perilaku manusia amat sulit dikuantifikasi menjadi suatu optimisasi keadaan mekanistik. Teori neo-klasik sangat mengeneralisasi keadaan yang menganggap optimalisasi akan tercapai pada semua kondisi. Makanya, Lawson (2006) berpendapat bahwa teori yang dibangun berdasarkan aksioma-aksioma tersebut amat sulit diterapkan di dunia nyata karena:

Pertama, sejatinya situasi dan kondisi yang dihadapi oleh satu individu (atau negara) dalam perekonomian belum tentu sama dengan individu (atau negara) lain.

Kedua, teori ekonomi arus utama lebih mengedepankan metode pendekatan matematis sehingga sangat terbatas untuk menjelaskan kondisi dunia nyata. Bukti keterbatasan teori arus utama ini adalah reduksi matematika dalam pertumbuhan ekonomi menggunakan parameter GDP tak sepenuhnya mampu menjelaskan problem ketimpangan, kemiskinan struktural dan kemanusiaan. Pertanyaannya adalah apakah meningkatnya GDP per kapita penduduk Indonesia otomatis mengurangi kemiskinan, menciptakan keadilan sosial dan pemerataan distribusi pendapatan? Jawabannya pastinya belum tentu. Inilah kelemahan reduksi matematis. Apalagi problem kultural yang menyertainya tak bisa direduksi secara matematis belaka.

Ketiga, teori arus utama juga mengedepankan keadaan universal (penyeragaman) di dalam suatu negara, sehingga dianggap semua pelaku ekonomi berperilaku rasional. Anggapan ini sangat berkebalikan dengan keadaan yang dihadapi negara dunia ketiga seperti Indonesia yang memiliki keragaman penduduk, bahasa, budaya, hingga agamanya. Makanya, teori arus utama dalam ekonomi (neoklasik dan/atau neoliberal) tidak relevan sebagai acuan dalam pembangunan ekonomi negara dunia ketiga.

Kegagalan mazhab pemikiran ekonomi neo-klasik dan/atau neo-liberal (fundamentalisme pasar) dalam menjawab problem pembangunan ekonomi di negara berkembang (dunia ketiga) menyebabkan lahirnya mazhab pemikiran heterodoks sebagai anti tesisnya. Teori heterodoks menolak pendekatan metodologi yang dibangun teori ekonomi arus utama. Pasalnya metodologi ekonomi arus utama dinilai terlalu mereduksi keadaan dunia nyata (empiris) (Lawson, 2006). Kritik, teori heterodoks terhadap teori neoklasik (*mainstream economics*) yang dibangun atas fondasi aksioma-aksioma:

- a. *Kritik terhadap model individual neoklasik.* Teori heterodoks mengkritik prinsip neoklasik yang mengasumsikan bahwa setiap individu bersifat rasional dan bertujuan memaksimalkan utilitasnya sewaktu melakukan pilihan (*rational choice theory*). Argumentasinya adalah manusia bukanlah mesin pencari kesenangan (*pleasure seeking machines*) yang bertujuan mencari utilitas maksimum semata. Teori heterodoks memegang teguh prinsip bahwa perilaku manusia sebagai subjek dalam ilmu ekonomi sulit diprediksi (*unpredictable*), sehingga argumentasi yang mengasumsikan asumsi setiap individu pasti berperilaku rasional tidak dapat diterima.
- b. *Kritik terhadap model keseimbangan pasar neo-klasik.* Teori neo-klasik menegaskan bahwa keseimbangan pasar terjadi apabila terjadi interaksi murni antara penawaran dengan permintaan (*market clearing*). Makanya, harga yang terbentuk di pasar adalah harga yang hanya dihasilkan oleh interaksi antara penawaran dengan permintaan. Teori heterodoks “menolak” postulat tersebut karena dianggap gagal menjelaskan keadaan empiris. Pasalnya dalam pandangan heterodoks terdapat beragam komponen lain yang menentukan harga.

- c. *Kritik terhadap model pasar tenaga kerja neo klasik.* Teori heterodoks juga menolak teori neo-klasik ketika menjelaskan pasar tenaga kerja. Pasalnya teori neo-klasik merasionalkan eksploitasi buruh (*labor*) oleh pemilik modal (kapitalis). Fenomena ini juga berlangsung di Indonesia dalam berbagai kasus eksploitasi buruh oleh pemilik modal dalam hubungan *industrial*. Salah satu contohnya adalah kebijakan alih daya (*outsourcing*) yang memosisikan buruh sebagai faktor produksi semata tanpa jaminan sosial memadai.

Selain Lavoie (2006), Boyer (2004) juga mengkritik teori neo-klasik menggunakan teori *Regulation* yang merupakan varian dari heterodoks. Kritik Boyer terhadap teori neo-klasik disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1 Kritik Boyer terhadap Teori Neo-Klasik

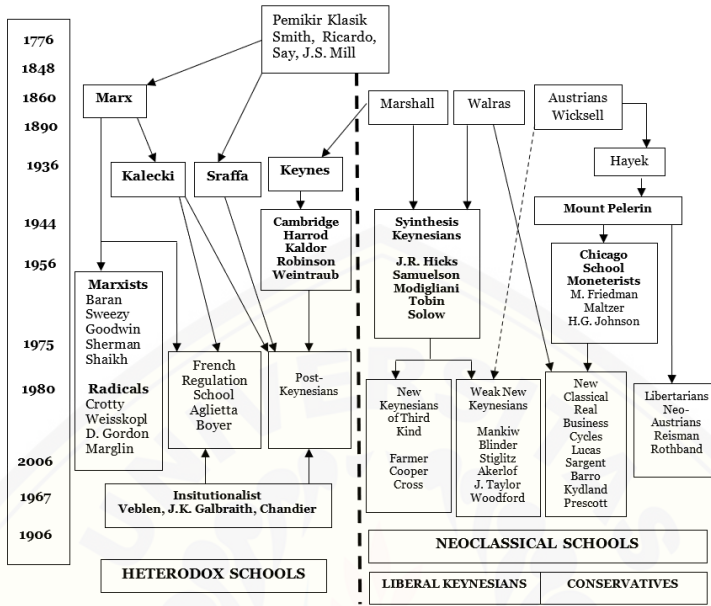
| No | Bentuk Institusi | Prediksi | Hasil |
|----|--------------------------|--|---|
| 1. | Relasi kapital-kerja | Deregulasi akan menyebabkan kesempatan kerja penuh | Tidak ada hasil yang jelas |
| 2. | Bentuk-bentuk persaingan | Deregulasi akan menyebabkan lebih efisien dengan masuknya produsen baru | Produsen semakin kurang dengan berpindahnya bentuk kompetisi oligopolistik nasional menjadi internasional |
| 3. | Rezim moneter | Kontrol moneter mungkin, stabilitas harga dan kesempatan kerja penuh | Inovasi moneter mengurangi kontrol, stabilitas harga, tetapi kesempatan kerja massal |
| 4. | Negara | Peran negara minimal akan menyebabkan pertumbuhan dan produktivitas | Invesasi minimal, produktivitas swasta lemah dan minimnya infrastruktur |
| 5. | Integrasi internasional | Nilai pertukaran mata uang yang stabil, ketidakseimbangan eksternal tidak lagi ada Kebijakan ekonomi nasional yang otonom | Pertukaran yang fluktuatif Polarisasi negara yang defisit dan surplus stabil dan tak terduga Hambatan yang semakin tinggi pada tingkat kebijakan ekonomi nasional |

Sumber: Boyer (2004) dalam Nofrian (2009)

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi, peta pemikiran ekonomi heterodoks dapat dianalisis dari perkembangan ilmu ekonomi itu sendiri. Secara garis besar, pendekatan ilmu ekonomi dikelompokkan dalam aliran heterodoks maupun ortodoks mulai sejak era pemikiran klasik hingga kontemporer. Lavoie (2006) dalam bukunya berjudul “*Introduction to Post-Keynesian Economics*” membuat pemetaan pendekatan ekonomi heterodoks. Menurutnya ekonomi heterodoks dipengaruhi tiga mazhab yaitu (i) Marxis dengan tokohnya Dumenil dan Levy; (ii) *Regulation* yang berkembang di Prancis dengan tokohnya Michel Aglietta dan Robert Boyer, dan (iii) Aliran *Post-Keynesian*.

Sementara, pemikiran ortodoks juga dipengaruhi mazhab (i) *Keynesian disequilibrium* dengan tokohnya Benassy dan Mahvaud; (ii) Neo-Keynesian dengan tokohnya Stiglitz, Blanchard dan Mankiw dan (iii) Neo-Klasik dengan tokohnya Lucas, Barro dan Kidland.

Nofrian (2009) menambahkan bahwa Ha-Joon Chang juga termasuk dalam aliran pemikir ekonomi heterodoks bermazhab *Post-Keynesian*. Secara skematik pemetaan pemikiran heterodoks dan ortodoks ala Lavoie (2006) disajikan dalam Gambar berikut.



Gambar 2.1 Peta Pemikiran Heterodoks dalam Makro Ekonomi

Nofrian (2009) menambahkan bahwa setiap mazhab pemikiran berkembang secara berbeda-beda. Dumenil dan Levy mengembangkan aliran pemikiran heterodoks *ala Marxian* yang bersumber dari paradigma klasik. Kedua pemikir ini konsisten dengan tradisi Marxis klasik dan mengaktualisasikannya dalam kondisi kontemporer. Pemikiran keduanya menarik karena membaca kondisi kontemporer dengan kaca mata Marxis klasik.

Teori *regulation* yang berkembang di Prancis sangat dipengaruhi aliran Marxis dan Kalecki. Prasetyantoko (2008) menuliskan sejarah singkat lahirnya pemikiran *regulation*. Prasetyantoko menjelaskan bahwa buku Michel Aglietta berjudul *Crisis et Regulation du Capitalisme* (1976) dianggap sebagai buku pertama yang mengupas “*Mazhab regulation*”. Para pendiri *mazhab regulation* umumnya berlatar belakang sebagai aktivis ideologis. Tokoh penting dari kaum Marxis yang menggagasnya adalah Michel Aglietta. Ia berasal dari Partai Komunis Prancis, dan Lipietz beraliran Maois. *Mazhab regulation* juga mendapatkan dukungan dari alumni *Ecole Polytechnique* yang merupakan sekolah elite di Prancis. Salah satu alumni sekolah ini yang menonjol dalam

mazhab regulation adalah Robert Boyer. Boyer amat berperan sebagai ekonom pemerintah karena bekerja pada badan-badan pemerintahan Prancis. Ia pun bukan berasal dari akademisi universitas.

Jika merujuk sejarah singkat para pendiri teori *regulation*, maka dibagi dua kelompok yaitu (i) aktivis politik yang ideologis dan (ii) pegawai pemerintah yang pragmatis. Secara substansi aliran pemikiran *regulation* berdimensi praksis berangkat dari asumsi-asumsi Marxis. Namun, dalam perkembangannya teori *regulation* mengalami inovasi dan kontekstualisasi secara radikal terhadap pemikiran Marxis, utamanya dalam metodologi. Teori *Regulation* acapkali disebut sebagai “*une aller sans retour*” (berangkat dan tak pernah kembali pada pemikiran Marx) (Agusalim, dkk 2014).

Secara pribadi, Boyer awalnya bekerja di kementerian keuangan Prancis (*Direction de la Prevision du Ministere des Finances*). Pemikirannya juga sangat dipengaruhi dua ekonom Polandia yang berkarier di Inggris. Mereka adalah Michael Kalecki dan Joan Robinson (ekonomi mazhab Cambridge). Sementara, Lipietz yang menjadi mitra Boyer yang beraliran Maois sangat dipengaruhi pemikiran Althusser. Ia seorang sosiolog marxis dari *Ecole Normale Superieure*, Prancis. Prasetyantoko (2008) menjelaskan bahwa teori regulasi sejatinya merupakan “sintesis” dari pemikiran *Marx* dan aliran *Post-Keynesian* yang berkembang di Cambridge. Prasetyantoko merujuk faktanya berupa tulisan Boyer tahun 1979 yang mengupas soal krisis ekonomi baik krisis besar dan kecil dalam konjungtur ekonomi jangka panjang ala Kondratieff. Itulah sekelumit singkat sejarah perkembangan teori heterodoks dari mazhab *regulation* (Agusalim, dkk 2014).

Lavoie (2006), juga telah membedakan pendekatan neo-klasik dan heterodoks (termasuk post-keynesian) lewat empat kategori metodologis dan ditambahkan elemen politik. Dalam metodologis klasik maupun neo-klasik yaitu (i) epistemologis yang dibangun bersifat instrumental, (ii) ontologisnya dikembangkan menggunakan metode individualisme (iii) rasionalitasnya tanpa batas (bersifat substantif) (*unbounded rationality*) dan (iv) pertukaran ekonomi berdasarkan kelangkaan barang (*scarcity goods*). Sementara metodologis pemikiran ekonomi heterodoks lebih menekankan pada (i) epistemologi yang bersifat realisme (fakta empiris); (ii) ontologis

dalam metodologinya dibangun secara organis (holisme); (iii) rasionalitasnya bersifat prosedural (*rationality procedural*). Jadi, tidak bersifat tanpa batas; dan (iv) analisisnya menitikberatkan pada ekonomi produksi dan pertumbuhan. Walaupun dewasa ini berkembang teori versi heterodoks yang mengkritik teori pertumbuhan dengan mengembangkan anti tesisnya yaitu *degrowth*. Perbedaan pendekatan neo-klasik dan heterodoks diringkas secara jelas oleh Gerber and Steppacher (2012) sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.2 Perbedaan pendekatan ekonomi heterodoks dengan konvensional

| Pendekatan Ekonomi Heterodoks yang Terintegrasi | Pendekatan Ekonomi Neo-Klasik |
|--|---|
| Epistemologinya bersifat realisme artinya berdasarkan fakta empiris | Epistemologi yang dibangun bersifat instrumentalisme |
| Ontologisnya dikembangkan secara organis (holisme) | Ontologisnya dikembangkan dengan paham individualisme |
| Rasionalitasnya dibangun secara prosedural terutama terkait caranya. Artinya batasan-batasan | Rasionalitas dibangun bersifat substantif tanpa adanya batasan |
| Fokus analisis: pada aspek produksi | Fokus analisis: pada aspek pertukaran, dan kelangkaan |
| Orientasi politiknya: membutuhkan intervensi negara | Orientasi politiknya: pasar bebas tanpa adanya intervensi negara |
| Pendekatannya adalah menggunakan sistem yang terbuka | Pendekatannya menggunakan sistem yang tertutup |
| Memandang ekonomi sebagai “konstruksi sosial” dengan latar belakang sejarah dan spesifikasinya | Memandang ekonomi sebagai “reduksi struktur” yang berdasarkan sekumpulan aksioma (yang bersifat matematika) |
| Ekonomi heterodoks sifatnya heterogen (majemuk), dan kondisi sosio-ekologi melekat (<i>embedded</i>) di dalamnya, agensi yang berperan telah dikondisikan secara kelembagaan | Ekonomi neo-klasik bersifat universal, berpusat pada prinsip individualisme, memaksimalkan pemanfaatan (utilitas), agensinya bersifat rasional dalam mendapatkan informasi yang baik dan disertai keinginan yang tak terbatas |

Tabel 2.2 Perbedaan Pendekatan ekonomi heterodoks dengan konvensional (lanjutan)

| Pendekatan Ekonomi Heterodoks yang Terintegrasi | Pendekatan Ekonomi Neo-Klasik |
|--|--|
| <p>Menerapkan etika sosial dan lingkungan termasuk pemenuhan kebutuhan, distribusi pendapatan yang merata dan berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Ko-) evolusi artinya perubahan yang evolusioner dan bersifat timbal balik • Pandangan yang bersifat metabolis terhadap masyarakat | <p>Menerapkan etika pemanfaatan (utilitarianisme) termasuk dalam pencapaian kesejahteraan yang optimal, dengan menerapkan prinsip pareto efisiensi, dan eksternalitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan optimalisasi • Pandangan yang bersifat marjinalitas terhadap masyarakat |
| <p>Mengutamakan kemajemukan (pluralisme) dalam metodologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan pengalaman dan pengetahuan secara logis (algoritma) yang tak diformalkan secara matematika • Adanya nilai kemajemukan (termasuk yang tidak sederajat) | <p>Mengutamakan prinsip individualisme dalam metodologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan yang logis ditonjolkan dan diformalkan secara matematika • Sistem moneter yang bersifat sederajat |
| <p>Sebab Akibat ekonomi sirkular dan kumulatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan virtual, nyata, dan level aktivitas ekonomi riil • Mendorong pencapaian <i>steady-state</i> dan <i>degrowth</i> yang bersifat selektif • Adanya properti dan kepemilikan (pribadi, negara dan masyarakat) • Pendanaan/jasa, stok maupun aliran dan ada mekanisme kontrolnya | <p>Model keseimbangan yang kompetitif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan ekonomi pada level mikro dan makro • Mengedepankan pertumbuhan konvensional • Mengutamakan kepemilikan pribadi • Modal ekonominya bersifat alamiah (<i>capital natural</i>) |

Tabel 2.2 Perbedaan pendekatan ekonomi heterodoks dengan konvensional (lanjutan)

| Pendekatan Ekonomi Heterodoks yang Terintegrasi | Pendekatan Ekonomi Neo-Klasik |
|---|--|
| Indikatornya biofisik dan sosial yang bersifat analisis multi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan masyarakat dalam lingkungan biosfer • Mengutamakan kelompok sosial dan kelas masyarakat yang kurang beruntung | Indikator lebih menekankan aspek moneter sehingga metodenya adalah analisis biaya manfaat (<i>cost-benefit analysis</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan paham individualisme dalam lingkup negara bangsa • Mengutamakan pemilik modal dan manajer |

Sumber: Lavoie (2006) dan Gerber and Steppacher (2012)

Sebelum Gerber and Steppacher (2012), merumuskan perbedaan pendekatan ini, Cohn (2007)⁶ telah lebih dulu menjelaskan perbedaan cara pandang neoklasik dan heterodoks. Menurut Cohn (2007) perbedaannya yakni; *pertama*, secara epistemologi ekonomi neoklasik berpegang teguh pada prinsip ilmu pengetahuan alam (*natural science*). Pemikiran ekonomi neoklasik mengklaim bahwa teori ilmiah memiliki keyakinan (*belief*) yang sama dengan fisika modern. Bedanya dengan pendekatan heterodoks yang menekankan analisis ekonomi secara paradigmatik serta mengandung beragam subjek (*subjectives*).

Kedua, secara ontologi dalam prinsip neoklasik memandang alam sebagai sesuatu yang ada (*the nature of being*). Dalam neoklasik tak mengenali entitas independen yang dinamakan masyarakat (*society*), melainkan hanya mengenali individu. Kajian ekonomi neoklasik lebih membutuhkan bagaimana individu membuat pilihan dan berbagai kelembagaan khususnya pasar. Secara ontologi dalam prinsip heterodoks menekankan bahwa analisis ekonomi tidak dibatasi kajian perilaku individu semata melainkan terdapat logika dari perilaku individu yang dihasilkan di level masyarakat.

6 Cohn, Steven Mark, 2007. Reintroducing Macroeconomics. A Critical Approach. ME Sharpe. Armonk. New York, London. England.

Ketiga, sifat alamiah manusia (*human nature*). Dalam ekonomi neo-klasik, manusia dipandang sebagai konsumen yang memiliki selera dan tak pernah merasa puas. Hal ini menggambarkan sifat alamiah manusia. Dalam pandangan ini, pasar membolehkan penggunaan kepentingan pribadi dalam pelayanan barang publik. Dampaknya, kapitalisme sukses dalam aspek ini karena menawarkan sistem insentif yang dibangun berdasarkan sifat alamiah manusia (*human nature*). Dalam ekonomi heterodoks terdapat perilaku individu yang kurang bersifat alamiah. Perilaku tersebut lahir secara sosial yang dibangun dan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Inilah perbedaan perilaku manusia dalam ekonomi neo-klasik dan heterodoks.

Keempat, dari aspek kontribusi ekonomi. Jika dilihat dari teori kesejahteraan manusia, dalam ekonomi neo-klasik, tujuannya adalah mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kebahagiaan bagi manusia dan solusi dari permasalahan sosial. Ekonomi neo-klasik juga menyatakan bahwa berbagai aspek-aspek kesalahan dari *output* pasar seperti kesenjangan (*inequality*) atau terkonsentrasinya kekuatan ekonomi dapat ditoleransi karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi heterodoks kaitan kontribusi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan manusia sifatnya lebih kompleks dibandingkan dengan tulisan dalam *text book* neo-klasik. Pasalnya, keterkaitan malah mengakibatkan terjadinya pelemahan kemajuan ekonomi.

Kelima, dari aspek pasar. Dalam ekonomi neoklasik *outcome* dari pasar merefleksikan pilihan bebas. Hasil *outcome*-nya mengakibatkan semua bagian dalam proses pertukaran sebaiknya dihentikan karena mekanisme pasar mampu mengatur dirinya sendiri (*self regulation*). Pasar secara otomatis akan menemukan harga yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Pasar juga akan mendorong inovasi kelembagaan pada saat terjadi perubahan sosial yang dibutuhkan dalam ekspansi ekonomi. Dalam ekonomi heterodoks secara ekstrem, memandang bahwa pemanfaatan kelembagaan sosial, pasar tak bisa bertemu sepenuhnya dalam kebutuhan manusia. Pasar yang menawarkan kebebasan (*free*) maupun pilihan terpaksa (*coerced*) akan mengalami “disfungsional” yang sama kuatnya dengan prinsip mengatur dirinya sendiri. Masyarakat akan membutuhkan refleksi secara berhati-hati dalam wilayah

pasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu apakah pasar harus dan tidak diorganisasi oleh kegiatan manusia apabila dibandingkan dengan teori yang umumnya ditemukan dalam buku teks ekonomi.

Keenam, pilihan sosioekonomi. Dalam pemikiran ekonomi neo-klasik, memandang bahwa tidak ada alternatif selain kapitalisme. Kegagalan model Uni Soviet secara tak langsung menyatakan bahwa sosialisme, totalitarianisme atau demokrasi maupun model lainnya yang lebih egalitarian dengan sistem ekonomi terencana (*centralized economy*) tidak dapat bekerja. Pesan yang diusung adalah abad 21 ini merupakan abad kapitalisme karena menyebabkan pasar dapat bekerja. Kesulitannya adalah pemerintah menjustifikasi adanya intervensi pasar.

Dalam ekonomi heterodoks memandang bahwa ekonomi kapitalis membutuhkan kelekatan (*embedded*) dalam tata kelola sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Makanya, untuk menyusun teori-teori heterodoks membutuhkan pemikiran bersifat alternatif dari kapitalisme untuk dieksplorasi lagi secara lebih jauh lagi. Salah satunya, adalah dengan konstruksi pemikiran Nusantaranomics.

2.2 Teori Ekonomi Heterodoks: Fachru Nofrian

Nofrian (2021) yang juga menggeluti pemikiran ekonomi heterodoks menganggap bahwa ilmu ekonomi itu sederhana sebagai ilmu sosial. Namun kenyataannya berdasarkan hasil studi-studi di perguruan tinggi ternyata ilmu ekonomi itu kompleks dan rumit. Faktanya saat ini dalam ilmu ekonomi terlalu banyak paradoks-paradoks yang mencuat dengan segala aplikasinya. Paradoks-paradoks dengan segala aplikasinya itu semua bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Di sinilah paradoksnya. Tabel berikut ini menyajikan paradoks-paradoks dalam ekonomi.

Tabel 2.3 Paradoks-paradoks dalam ekonomi

| No. | Fakta Kebijakan | Implementasi |
|-----|--|--|
| 1. | Menerapkan subsidi | Laju pertumbuhan ekonomi rendah |
| 2. | Mengurangi subsidi | Laju pertumbuhan ekonomi rendah |
| 3. | Menerapkan proteksi | Laju pertumbuhan ekonomi rendah |
| 4. | Masuk dalam pasar bebas | Laju pertumbuhan ekonomi rendah |
| 5. | Menerapkan kebijakan anggaran defisit | Praktiknya menerapkan pembiayaan moneter |
| 6. | Mengurangi defisit anggaran | Praktiknya dengan pembiayaan utang |
| 7. | Orientasi Perusahaan Negara | Praktiknya berorientasi mencari keuntungan (profit) |
| 8. | Kelembagaan negara (<i>state rule</i>) | Praktiknya beroperasi sebagai swasta |
| 9. | Kebijakan fiskal | Praktiknya moneter |
| 10. | Industrialisasi | Implementasinya infrastruktur yang tidak berdampak signifikan terhadap industrialisasi |

Sumber: Nofrian (2021)

Menurut Nofrian (2021), semua paradoks ini berlangsung dalam skala yang luas dan global secara empiris karena sebelumnya tidak diantisipasi dan fenomenanya aneh. Apalagi saat ini ditambah dengan aneka ragam tantangan dan implementasinya di tingkat global yang membutuhkan pendekatan tepat dalam mengantisipasi serta mengatasinya. Tantangan-tantangan tersebut disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.4 Tantangan dan di tingkat global

| No. | Aspek | Output |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | Teknologi | Masifnya teknologi internet |
| 2. | Alamiah (<i>Nature</i>) | Perubahan iklim (<i>Climate change</i>) |
| 3. | Sosial | Migrasi dan mobilitas penduduk, kelaparan, stunting dan homeless |
| 4. | Politik | Pasca kemenangan Taliban, sebelumnya <i>Arab Spring</i> di Timur Tengah |
| 5. | Ekonomi | Perkembangan Kapitalisme di Cina dan India, adanya pembagian kerja, dan polarisasi |

Tabel 2.4 Tantangan dan di Tingkat Global (lanjutan)

| No. | Aspek | Output |
|-----|--|---|
| 6. | Kesehatan | Pandemi Covid-19 |
| 7. | Internasional | Masalah logistik |
| 8. | Kebutuhan dasar (<i>basic needs</i>) | Kesenjangan dan kemiskinan |
| 9. | Krisis | Krisis keuangan, –yang terjadi sebelum dan setelah tahun 1997 |

Sumber: Nofrian (2021)

Menurut Nofrian (2021), paradoks-paradoks tersebut mesti diabaikan dan memfokuskan pada upaya menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks dan aneh secara global. Untuk itu diperlukan suatu model pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi yang salah satunya adalah pendekatan heterodoks. Pendekatan heterodoks adalah suatu pendekatan yang berada di luar arus utama ekonomi (*mainstream*) yang bersifat klasik maupun neo-klasik. Perbedaan pendekatan ekonomi heterodoks dan arus utama disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Perbedaan Pendekatan Ekonomi Heterodoks dan Arus Utama

| No. | Ekonomi Arus Utama | Ekonomi Heterodoks |
|-----|---|---|
| 1. | Keseimbangan sifatnya terbatas (<i>limited equilibrium</i>) pada penawaran (<i>supply</i>) dan permintaan (<i>demand</i>) | Keseimbangan sebagai sesuatu yang melekat (<i>Embedded equilibrium</i>), bukan sekadar <i>supply demand</i> . Keseimbangan ekonomi kesejahteraan tercapai jika ada keseimbangan antara ekonomi, politik, dan demokrasi. |
| 2. | Logika yang digunakan bersifat deduktif (<i>deductive reasoning</i>) yang berorientasi <i>logic of mind</i> | Logika yang digunakan bersifat induktif (<i>inductive reasoning</i>) memiliki logika sendiri yang berorientasi pada realitas (<i>logic of reality</i>). Faktanya: India dan Cina berhasil dalam pembangunan ekonominya bukan menerapkan <i>logic of mind</i> , melainkan mempunyai realitas dan logika sendiri yang didorong sebagai sumber akumulasi |

Tabel 2.5 Perbedaan pendekatan ekonomi heterodoks dan arus utama (lanjutan)

| No. | Ekonomi Arus Utama | Ekonomi Heterodoks |
|-----|--|---|
| 3. | Ekonomi arus utama berdasarkan hukum pasar universal (<i>universal law</i>) yaitu <i>supply-demand</i> sehingga terbatas secara ekonomi (<i>limited economics</i>). Negara sukses menerapkan dan mempromosikan pasar yang bersifat ekonomi politik (<i>market political economy</i>) | Ekonomi heterodoks memandang setiap negara relative berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan dengan hukum pasar yang universal (<i>Relativity instead of universal law</i>) |
| 4. | Ada koherensi tapi berdasarkan <i>deductive reasoning</i> sehingga pasarnya spekulatif karena mengabaikan realitas | Ekonomi heterodoks berdasarkan kenyataan empiris (<i>Empirical evident</i>) |
| 5. | Definisi pasar bersifat terbatas (<i>Limited definition of market</i>) | Pasar terjadi dalam beragam bentuk (<i>Market in various forms</i>) |
| 6. | Pemahaman yang terbatas tentang realitas (<i>Limited understanding of reality</i>) | Pemahaman yang lebih luas terhadap realitas. |
| 7. | Terlalu banyak menggunakan asumsi (<i>Too much assumptions</i>) | Ekonomi heterodoks menggunakan representasi bukan asumsi (<i>Representations instead of assumption</i>) |
| 8. | Generalisasi efisiensi (<i>Efficiency generalization</i>) | Heterodoks tidak hanya direduksi berdasarkan efisiensi melainkan berbagai hal, misalnya industri tak hanya efisiensi melainkan juga <i>passion</i> (<i>Efficiency yes but many other thing</i>). Akibatnya, Jepang dan Jepang berkembang pesat industrinya. |

Sumber: Nofrian (2021)

Nofrian (2009) juga telah memetakan perbedan antara ekonomi neo-klasik dan regulasi yang merupakan varian dari heterodoks. Pemetaan perbedaan tersebut disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.6 Perbedaan ekonomi neo-klasik dan *Regulation* (Heterodoks)

| No | Tingkatan | Neo-Klasik (Ortodoks) | Regulation (Heterodoks) |
|----|---------------------|--------------------------------|---|
| 1. | Ontologi | Individualisme | Holisme |
| 2. | Epistemologi | Instrumentalisme/linier | Realisme |
| 3. | Bentuk rasionalitas | Hiper rasionalitas | Aneka ragam rasionalitas |
| 4. | Metodologi | Analitik-deduktif-generalisasi | Induksi-historis-empirik, generalisasi terbatas, komparatif |

Tabel 2.6 Perbedaan ekonomi neo-klasik dan *Regulation* (Heterodoks)
(lanjutan)

| No | Tingkatan | Neo-Klasik (Ortodoks) | Regulation (Heterodoks) |
|-----|-----------------------------|---|---|
| 5. | Logika aksi | Pikiran rasional | Determinasi sosial/interaksi habitus dan ranah (Bourdeu) |
| 6. | Hubungan ekonomi dan sosial | Ekonomi dominan terhadap sosial | Ekonomi bagian dari sosial |
| 7. | Hubungan antar agen | Egaliter (setara) | Kelas dominan dan terdominasi (ketidaksetaraan) |
| 8. | Karakteristik agen | Setiap agen memiliki preferensi yang sama <i>indifferent</i> | Heterogen berdasarkan konstruksi sosial dan historis/ <i>different</i> |
| 9. | Aturan | Pasar/persaingan bebas | Pasar, institusi sosial (resiprositas), institusi politik (redistribusi) |
| 10. | Objek analisis | Kelangkaan, pertukaran | Produktivitas, akumulasi dan krisis |
| 11. | Konsepsi ekonomi | Alokasi sumberdaya terbatas dan maksimalisasi sarana | Alokasi organisasi produksi dan kerja |
| 12. | Konsepsi pasar | <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme harga dan mekanisme penawaran dan permintaan • Ruang kosong matematis • Kompetisi murni dan sempurna • Eksklusif ekonomik • Secara alami stabil | <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi sosial dan strategi kontrol kelas dominan • Interaksi politik, ekonomi dan sosial • Bukan kompetisi murni dan sempurna • Tidak eksklusif ekonomik • Cenderung tidak stabil, krisis dan pembentukan serta perubahan institusi |
| 13. | Hubungan makro/meso/mikro | Tidak ada/terpisah | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya institusi makro (rezim akumulasi dan bentuk regulasi) • Komplementaris/hierarkis |
| 14. | Konsep politik | | Politik tidak hanya sebagai akumulasi kapital, tetapi juga sebagai vektor penentu arah |

Tabel 2.6 Perbedaan ekonomi neo-klasik dan *Regulation* (Heterodoks) (lanjutan)

| No | Tingkatan | Neo-Klasik (Ortodoks) | Regulation (Heterodoks) |
|-----|---------------|---|---|
| 15. | Peran negara | <ul style="list-style-type: none"> Negara secara fundamental dianggap sebagai pengganggu terhadap kalkulasi ekonomi individual/private Peran negara minimal | Negara sebagai instruktur terhadap pasar dan mengatur ekonomi yang mendasar |
| 16. | Tokoh pemikir | FA Hayek, Milton Friedman | Robert Boyer, Michel Aglietta |

Sumber: Nofrian (2009)

Menurut Nofrian (2009), secara umum konsep Utama Teori regulasi adalah habitus. Teori regulasi memiliki dua aliran: *pertama*, aliran Grenoble dengan tokohnya Paul Boccara. Awalnya aliran Grenoble mengembangkan pemikiran Marxis alternatif yang menjelaskan tentang transformasi struktural sebagai bentuk regulasi dalam jangka panjang yang belum dijelaskan kapital Karl Marx. Aliran ini juga mengkritisi teori keseimbangan umum yang digunakan sebagai dasar memahami kapitalisme. Teori keseimbangan umum dianggap berada di luar ruang dan waktu. Oleh karena itu, aliran Grenoble menganalisis peran regulasi prosedur sosial dalam ekspansi kapitalisme dalam suatu massa dan tempat/lokasi berdasarkan karakteristik sistem produktif yang berbeda-beda. Aliran Grenoble juga fokus terhadap pendapatan sebagai objek penelitian. Menurut aliran ini teori pendapatan mengandung dua kenderungan umum; (1) kecenderungan tingkat pendapatan rata-rata yang semakin menurun dan mobilisasi usaha untuk melawan penurunan tersebut; (2) Kecenderungan tingkat pendapatan rata-rata setiap bagian dalam ekonomi untuk menjadi sama. Kecenderungan pertama pertama melalui pertarungan antar kelas sedangkan kecenderungan kedua melalui proses kompetisi. Aliran Grenoble juga menemukan tiga tahapan kapitalisme (1) kapitalisme liberal/kompetitif; (2) kapitalisme monopoli sederhana; dan (3) Kapitalisme monopoli negara.

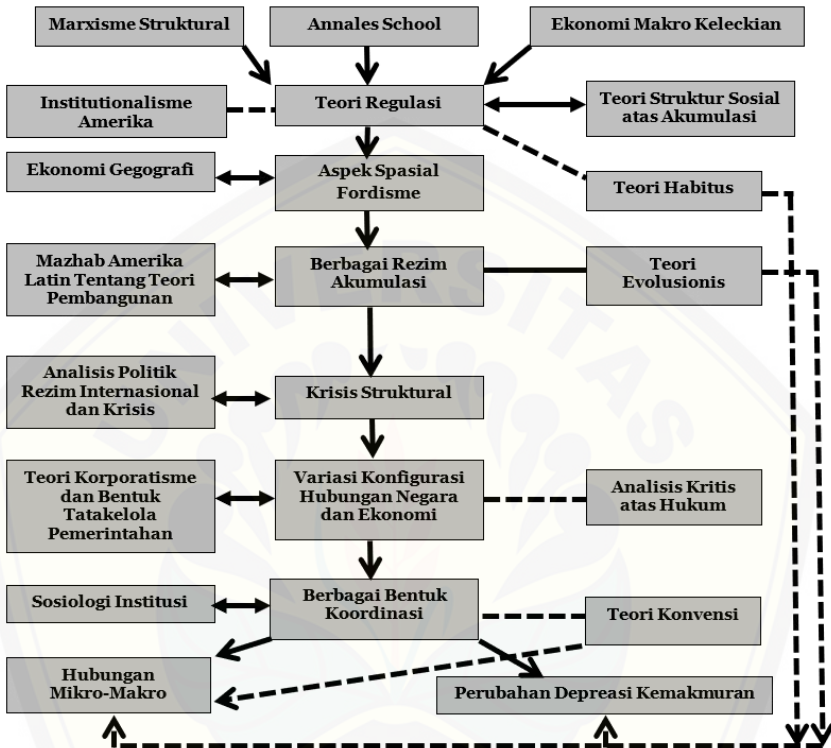
Kedua, aliran Paris dengan tokohnya Michel Aglietta dan Robert Boyer. Aliran ini kerap disebut sebagai Parisian. Aliran Parisian memfokuskan analisisnya pada akumulasi/fordisme yang merupakan anomali dalam perspektif Neo-Klasik dan Keynesian, Neo-Fordisme serta Post Fordisme. Aliran ini juga mengkritik teori keseimbangan umum dan Teori Kebijakan Negara secara tidak langsung. Aliran Parisian tidak menyetujui tentang reduksi terhadap ekonomi (ekonomisme) dan strukturalisme ala Louis Althusser dan Etienne Bailibar) yang mengatakan bahwa struktur bekerja secara semi otomatis.

Di awal kelahirannya aliran Parisian memfokuskan pada dua hal, yaitu: (1) Rezim akumulasi (2) sistem kapitalisme. Rezim akumulasi ekstensif yang bersifat ekspansif terhadap akumulasi kapital diperoleh melalui penyebaran aktivitas akumulasi kepada wilayah-wilayah yang baru. Sementara, rezim akumulasi intensif yaitu akumulasi kapital diperoleh melalui intensifikasi aktivitas dalam proses produksi.

Aliran Parisian merumuskan “Teori *Regulation*” dalam lima bentuk institusi/kelembagaan yaitu:

1. *Institusi pengupahan* meliputi pasar tenaga kerja, upah individual dan sosial serta gaya hidup
2. *Institusi kompetisi* (persaingan) mencakup: bentuk perusahaan, model persaingan, sumber pendapatan, bentuk organisasi internal, dan hubungan dengan perbankan
3. *Institusi uang* meliputi: organisasi perbankan, sirkulasi dan artikulasi uang nasional, alokasi kapital uang kepada produksi, dan fitur dasar institusi rezim moneter
4. *Institusi Negara* yaitu: institusional kompromi kapital kerja dan bentuk intervensi negara
5. Integrasi internasional yaitu perdagangan, investasi, moneter, ekonomi nasional dan hubungan antar negara dalam sistem dunia (*world system*)

Berbagai teori yang mempengaruhi *Regulation* disajikan dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 2.2 Teori-teori yang Mempengaruhi *Regulation* (Boyer 1995)

Nofrian (2021) mengatakan bahwa pendekatan heterodoks dibutuhkan karena: (i) kita membutuhkan narasi baru (*We need new narration*), karena ekonomi arus utama terlalu banyak paradoks dan kompleks; (ii) hendak menyelamatkan masa depan dengan segala implikasinya (*We need to save our future*); (iii) Lebih siap menghadapi permasalahan (*Preparedness*). Dalam bidang kesehatan, umpamnya Covid-19. Negara-negara lain lebih siap menghadapi wabah Covid-19 di antaranya Eropa, Cina dan Cuba. Akan tetapi ada negara yang tak siap seperti Indonesia; (iv) berguna untuk menghadapi tantangan di berbagai bidang (*To tackle current challenges in many fields*); (v) hendak menyelamatkan sejarah (*We need so save our history*); (vi) hendak menyelamatkan cara berpikir kita (*We need to save our mind*)

agat tak selamanya dibingungkan oleh paradoks-paradoks dalam ekonomi; (vii) memperkaya eksistensi teori yang ada, bukan menggantinya (*Enrich existing theory, not to replace*), dan; (viii) menyelamatkan teori karena acapkali menyalahkan teori dan menganggapnya tidak penting. Padahal teori bukanlah tanggung jawab utama kegagalan saat ini yang terjadi saat ini. Kegagalan yang terjadi tergantung teori apa yang digunakan sehingga tak bisa digeneralisasi (*Theory is not the main responsible of current failure but what theory*). Tokoh-tokoh pemikir ekonomi heterodoks adalah: Joseph Schumpeter, Karl Marx, kalangan ekonometrian (*Econometrician/physiocrats*), Joan Robinson, Sraffa, Ha-Joon Chang, 2nd Joseph E. Stiglitz (fase kedua/*second*), Thomas Piketty dan Minsky.

Pendekatan heterodoks secara konsepsional memiliki kedekatan dengan Ekonomi Pancasila (*Pancasilanomics*) yaitu sebagai model pembangunan negara kesejahteraan. Karakteristik model negara kesejahteraan: (1) sistem perpajakan progresif bersamaan dengan sistem jaminan sosial yang efektif untuk melindungi lapisan sosial yang lemah. Semuanya bersumber dari hasil regulasi sosial; (2) aktor swasta berperan sebagai agen pertumbuhan ekonomi yang efisien. Dalam konteks ini mekanisme pasar sepenuhnya memberikan sinyal-sinyal yang mengarahkan agar pengambilan keputusan bagi kalangan swasta, tanpa mengalami ruang distorsi akibat perilaku birokrasi; (3) kekuatan politik serikat buruh sangat menentukan. Kekuatan mereka berdampingan dengan sistem demokrasi parlementer yang efektif. Dalam sistem politik terdapat partai pemerintah (*governing party*) dan partai oposisi (*opposition party*). Keberadaannya akan menjamin berlangsung proses *check and balance* untuk merealisasikan hak-hak politik dan kepastian hukum bagi setiap negara (Damanhuri, 2010).

Model negara kesejahteraan yang diuraikan Damanhuri (2010) memiliki kesamaan dengan pemikiran Robert dan Yamada (2000) yang memetakan model-model ekonomi menggunakan Teori *Regulation (Heterodox)*. Analisis model-model ekonomi berdasarkan Teori *Regulation* disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.7 Model-model ekonomi berdasarkan Teori Regulasi

| Komponan | Ekonomi Pasar | Negara Kapitalis (Japan in Corporate) | Sosialis Demokrat | Negara Sosialis |
|---|--|--|--|---|
| Prinsip Umum | Koordinasi ditentukan pasar yang kontrol otoritas publik | Aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial ditentukan oleh perusahaan besar | Posisi tawar dan negosiasi terinstitusionalisasi dengan kompromi di antara mitra-mitra sosial | Negara secara langsung maupun tidak langsung mengintervensi kewenangan publik dalam bentuk struktur kelembagaan |
| Bentuk kelembagaan yang paling berperan | Dalam ekonomi kontemporer rezim finansial | Masa keemasan, bentuknya kompetisi | Upah buruh dan kelembagaan diatur negara | Negara/warga negara terkait |
| Bentuk kelembagaan sub ordinat | Upah buruh ditentukan oleh pasar (melalui kompetisi) dan sebagian masih ada peran negara/warga negara terkait | Upah buruh, rezim finansial, negara/warga negara terkait | Rezim finansial umumnya, model persaingan dibangun dengan cara memasukannya dalam sistem internasional | Semua bentuk kelembagaan: persaingan, upah buruh, finansial dan rezim moneter dimasukkan dalam sistem internasional |
| Model-Model Regulasi dalam Kepemilikan | | | | |
| Kekuatan | <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menyesuaikan terhadap gonjangan dan kekacauan • Kemampuan menciptakan inovasi dan solusi secara radikal | <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas sosial dan ekonomi bersifat jangka menengah • Mudah menerima teknologi baru dan pengembangan inovasi | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kompatibel antara solidaritas domestik dan persaingan eksternal • Mampu menciptakan inovasi bagi negara, kesejahteraan dan perlindungan warga negara | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kompatibel antara warna negara dan penerimaan terhadap logika kapitalisme • Mudah menerima tehnik produksi massa rakyat |

Tabel 2.7 Model-model ekonomi berdasarkan Teori Regulasi (lanjutan)

| Komponan | Ekonomi Pasar | Negara Kapitalis (Japan in Corporate) | Sosialis Demokrat | Negara Sosialis |
|---------------------------|--|--|--|---|
| Kelemahan | <ul style="list-style-type: none"> Kecenderungan pasar mengarah pada spekulasi dan instabilitas finansial Lahirnya kesenjangan dalam pendapatan, lemahnya kepemilikan aset dan akses terhadap kekuatan politik | <ul style="list-style-type: none"> Reaksi yang lambat terhadap goncangan yang tidak dapat diprediksi dan lemahnya inovasi radikal Adanya heterogenitas dalam pengupahan dengan sistem kontrak dan status produktif (termasuk gender) | <ul style="list-style-type: none"> Intervensi publik yang luas diperlukan agar tercipta kompromi/konsensus sosial Kemungkinan tidak kompatibel dengan kecenderungan ekonomi dan keuangan dunia | <ul style="list-style-type: none"> Koalisi politik dan ekonomi sebagai fenomena yang menentukan Kesulitan dalam mereformasi kelembagaan apabila terjadi "mode" krisis regulasi berakhir |
| Krisis struktural alamiah | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan instabilitas finansial Ketidakmampuan mengatasi stagnasi produktivitas lewat fleksibilitas upah yang tinggi | <ul style="list-style-type: none"> Ketidakmampuan mengatasi dampak internasional secara luas Kesulitan mereformasi institusi yang sebelumnya sukses | <ul style="list-style-type: none"> Inflasi sebagai solusi konflik bagi distribusi pendapatan Adanya kompromi dampak deregulasi finansial terhadap keberlangsungan produktivitas domestik | <ul style="list-style-type: none"> Tidak kompatibel dengan hambatan dan peluang yang mengalami internasionalisasi Kesulitan mengatasi emergensi paradigma produktif |
| Tipe Negara | Amerika Serikat dan Inggris | Jepang | Swedia dan Australia | Prancis |

Sumber: Boyer dan Yamada (2000); Agusalim dkk (2014)

Dari Tabel 2.7 menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila dalam pandangan Damanhuri (2010) menggunakan model-model ekonomi berdasarkan Teori *Regulation* memiliki kesamaan dengan Model Kapitalis (*Japan in Corporation*) dan Sosialis Demokrat. Hal ini membuktikan bahwa pemikiran Ekonomi Pancasila lebih dekat dengan Model Sosialis Demokrat dan Model *Japan in Corporation*. Jika dikaitkan dengan gagasan Nusantaranomics yang disinergikan dengan tradisi ekonomi lokal, nilai-nilai budaya/tradisi dan agama, maka membentuk suatu model baru pendekatan ekonomi heterodoks ala Indonesia. Model ekonomi heterodoks ala Indonesia ini juga memiliki

karakteristik yang mirip konsep ekonomi solidaritas (*The Solidarity Economy*). Ekonomi solidaritas ini berorientasi: (1) mampu berkontribusi terhadap keberlanjutan hidup (*sustainability of life*); (2) kemandirian, yang bermakna ada kepemilikan faktor produksi secara kolektif, dan 3) dibangun dengan prinsip kebersamaan (*cooperative*). Artinya segala pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif (demokrasi delilberatif), dan, (4) hubungan antar masyarakat berpedoman pada prinsip solidaritas yang diimplementasikan dalam bentuk organisasi koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (Future Dossier, 2012).

Sebagai dijelaskan di bagian awal bahwa teori ekonomi heterodoks belum menjadi teori besar. Menurut Damanhuri (2010), teori heterodoks memiliki kekuatan dan kelemahan. Kelebihannya adalah (i) telah dipraktikkan dengan cukup banyak kesuksesan di negara sedang berkembang (NSB) Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia dan Cina, termasuk Indonesia; (ii) sangat mempertimbangkan nilai lokal, agama dan kondisi struktural dan kultural negara sedang berkembang, bahkan direaktualisasi dalam proses pembangunan; (iii) mampu memadukan modernisme (industrialisasi dan pembangunan) dengan nilai-nilai lokal. Tradisional dan agama; (iv) sangat memberi ruang aktualisasi kepada gerakan masyarakat sipil (LSM) lokal maupun lokal dengan mendorong pemberdayaan konkret di tingkat mikro akar rumput. Kelemahan teori heterodoks dalam pandangan kritis Damanhuri (2010) adalah (i) belum menjadi teori besar (*grand theory*) yang menjadi rujukan negara-negara sedang berkembang (NSB); (ii) belum bisa menjadi solusi komprehensif dan universal secara makro; (iii) belum menjadi rujukan umum bagi para pengambil keputusan di negara sedang berkembang (NSB) dan (iv) belum menjadi rujukan dalam *counter-balancing* yang berwibawa dalam mengatasi problem globalisasi, kapitalisme dan neo-kapitalisme umumnya (neoliberalisme).

Dalam pandangan Nofrian (2021), memberikan beberapa rekomendasi terkait gagasan Nusantaranomics yang menggunakan pendekatan heterodoks, *pertama*, pendekatan heterodoks tidak berpikir solusi terhadap situasi ekonomi kekinian (*mainstream*). Jika pandangan heterodoks demikian, maka akan menjadi “naif” karena dunia tak bergerak semacam itu. Pasalnya di tengah

perkembangan arus globalisasi yang kian pesat, dalam pandangan heterodoks mendorong ada upaya untuk yang mampu menciptakan akumulasi, bukan akumulasi kapital.

Kedua, mesti mengusulkan sesuatu yang dapat dilakukan. Nusantaranomics merupakan sesuatu yang dapat dilakukan tetapi ia harus ditingkatkan supaya lebih relevan, kuat dan menarik dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Ketiga, memperluas gagasan Nusantaranomics dengan menggunakan instrumen ekonometrik yang bertujuan melakukan regresi dari berbagai praktiknya di seluruh daerah di Indonesia. Nantinya akan menghasilkan Nusantaranomics Dashboard.

Keempat, mulai membangun konsorsium pemikiran Nusantaranomics lewat kelembagaan pendidikan tinggi yaitu lahirnya Nusantara *School of Economics* yang melibatkan berbagai universitas. Di dunia yang telah mengembangkan model semacam ini adalah Paris *School of Economics*, London *School of Economics*, dan Malaysia *Royal Academy*.

Kelima, mendukung dan mengembangkan industrialisasi yang berbasiskan ekonomi riil, ketimbang terjebak kecenderungan paradoks internasional yang diusung oleh ekonomi arus utama.

2.3 Teori Ekonomi Kelembagaan: Ahmad Erani Yustika

Menurut Ahmad Erani Yustika (2021), ilmu ekonomi arus utama di dunia faktualnya dipraktikkan sempurna di Indonesia. Padahal dalam perspektif ekonomi kelembagaan tidak demikian. Ada problem mendasar dalam pembangunan ekonomi yang acapkali terabaikan. Problemnya adalah struktur masyarakat nyaris diabaikan sebagai variabel dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Mengapa demikian? Soalnya struktur masyarakat dalam ekonomi arus utama dinilai tidak penting dan dianggap telah *given*. Padahal sejatinya struktur masyarakat berbeda-beda akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan pembangunan ekonomi. Struktur masyarakat bisa berdasarkan kelompok pendapatan (dalam pengertian ekonomi), pandangan

ideologi (dalam pemaknaan ideologi), dan identitas kelompok (dalam cara pandang sosiologi dan antropologi). Cikalanya, struktur masyarakat tersebut dibenamkan dalam ekonomi arus utama karena dianggap tidak penting dalam pengambilan keputusan. Sementara dalam mendesain keputusan-keputusan ekonomi, individu dengan basis cara pandang dan perilaku individu dengan istilah dalam ekonomi sebagai “*material rationality*” lebih berpengaruh. Padahal cara pandang tersebut selalu berorientasi mencari keuntungan (*self seeking behavior*). Kenyataannya preferensi individu maupun kelompok dalam beraktivitas dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, tak selamanya dituntun aspek-aspek yang bersifat material semata. Individu maupun kelompok dituntun juga aspek non-material berupa kesadaran moral seperti solidaritas, kerdermawanan dan kepercayaan. Faktor non-ekonomi ini sangat berpengaruh dalam struktur masyarakat dan menjadi penyebab kegagalan pembangunan ekonomi. Kegagalan pembangunan ekonomi tersebut disebabkan oleh keteledoran para ekonomi yang tidak melihat hubungan ekonomi dengan faktor-faktor non-ekonomi (Storaey 1999).

Selain struktur masyarakat dimensi lain yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan ekonomi adalah etnisitas. Terkait kebijakan etnisitas merujuk praktik-praktik budaya yang aktual dan mempengaruhi dan memproduksi sistem nilai (*values*). Umpamanya, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Jepang memiliki identitas ekonomi masing-masing karena di dalamnya secara implisit dan eksplisit mengandung unsur budaya yang berperan sebagai sumber nilai, pelaku-pelaku kebudayaan berbasis etnis (Yustika, 2021).

Dalam kenyataannya, identitas kelompok (struktur masyarakat dalam pengertian sosiologis), tidaklah homogen dan *taken for granted*, tetapi heterogen dan syarat rekayasa. Apabila pengambilan kebijakan tidak mampu mempertimbangkan heterogenitas etnis (termasuk aspirasi) dengan segala implikasinya, maka yang muncul adalah kegagalan dalam mendesain kebijakan dan memitigasi masalahnya dalam pembangunan (konflik). Makanya, konsep etnis dan etnisitas sangat penting dan relevan untuk menjelaskan sebagian dari kegagalan pembangunan, termasuk munculnya konflik-konflik antar etnis yang tak terpecahkan. Secara definitif etnis atau *ethnos* (dalam Bahasa

Yunani) dapat dimaknai sebagai suatu pengertian geografis dalam satu batas-batas wilayah dengan sistem politik tertentu (Rudolf 1986 dalam Abdullah 2002) dalam Yustika (2021).

Etnisitas selalu berkaitan dengan penampilan fisik (tubuh) seseorang seperti warna kulit atau bentuk rambut. Pada identifikasi yang mendalam ciri fisik tersebut juga kerap diasosiasikan dengan konsep ras. Etnisitas juga merujuk pada praktik-praktik budaya dan cara pandang alami sebuah komunitas yang memisahkan mereka dengan (komunitas) lainnya. Budaya menjadi sumber dan sistem nilai yang mengatur segala perikehidupan dari sosial ekonomi, hukum dan politik dan lainnya. Etnisitas akan memproduksi norma dan individu yang berada di dalamnya dan mematuhi norma tersebut. Jika dikaitkan dengan perilaku ekonomi, maka norma akan membentuk identitas ekonomi (*identity economics*) (Akerlof dan Kranton, 2010) dalam Yustika (2021).

Dalam perkembangan masyarakat Ferdinand Tonnies membagi perkembangan masyarakat dalam dua kategori yang populer dikenal sebagai *Gemeinschaft* (*community*) dan *Gessellschaft* (*society*). Dalam menjalankan kehidupannya, masyarakat tradisional (“Patembayan”) yang bersifat “guyup” memiliki karakter berbeda dibandingkan masyarakat yang berdasarkan hukum dan regulasi formal.

Gemeinschaft dicirikan pada tipikal masyarakat petani Eropa pra modern yang memiliki jaringan hubungan persoalan yang sangat dekat berdasarkan relasi kekerabatan yang pekat dan langsung, serta kontak langsung yang terjadi pada wilayah/kampung yang kecil. Dalam masyarakat *Gessellschaft* adalah kelompok masyarakat yang berikhtiar berdasarkan kerangka hukum dan regulasi formal yang dicirikan oleh masyarakat perkotaan, industrial dan bebas. Relasi sosial dikarakteristikan lebih formal dan impersonal. Individu tidak tergantung satu dengan lainnya sehingga secara moral sebuah jaminan/kepercayaan menjadi berkurang. Perkembangan setiap masyarakat dengan norma yang sama meskipun dengan etnis yang homogen menimbulkan konsekuensi berbeda. Aturan main yang diciptakan dalam masyarakat misalnya kelembagaan formal dan informal akan memiliki *output* yang berbeda.

Dalam masyarakat *Gemeinschaft* aturan informal lebih efektif untuk mengelola hubungan antar masyarakat. Sebaliknya dalam *Gessellschaft* (masyarakat urban), aturan main formal lebih efektif dalam praktik pengelolaan masyarakat. Hal ini penting karena “struktur masyarakat” sifatnya tidak statis, sehingga tidak boleh dianggap *given*. Namun di era kekinian atau dua dekade silam tatkala mengontruksi struktur masyarakat tak berarti bahan strukturnya abadi. Pasalnya, struktur masyarakat mengalami perkembangan yang salah satunya ditunjukkan oleh masyarakat “patembayan” dan urban (Yustika, 2021).

Terkait dengan etnisitas timbul pertanyaan pokok adalah mengapa sebuah negara yang homogen secara etnis lebih makmur dibandingkan bangsa lainnya yang multietnis? Untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan riset empiris mendalam sehingga menemukan jawaban yang memadai. Padahal kenyataan selama ini bahwa sekitar 40% negara di dunia memiliki lebih dari 5 etnis dalam struktur masyarakatnya. Terkecuali Amerika Serikat, nyaris semua negara kaya di dunia adalah negara bangsa dengan struktur masyarakatnya homogen. Umpamanya di Eropa, struktur masyarakatnya didominasi oleh ras kulit putih yang tidak terbagi-bagi dalam banyak etnis. Demikian pula dengan negara Asia yang diidentifikasi sebagai “kelompok kaya baru” yakni Korea Selatan, Hongkong, Singapura, Taiwan dan Tiongkok. Mereka adalah negara-negara yang dihuni satu etnis mayoritas. Studi yang lebih mendalam menyebutkan bahwa kemakmuran ekonomi yang diraih Amerika Serikat hanya dinikmati oleh etnis mayoritas yaitu masyarakat kulit putih (Yustika, 2021).

Dalam memahami hubungan keragaman etnis dan keterbelakangan, kita dapat menggunakan dua pendekatan (Yustika, 2021). **Pertama**, dalam konteks ekonomi perbedaan etnis melahirkan keragaman kemampuan dari masing-masing etnis dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Pasalnya setiap etnis memiliki budaya, etos yang berbeda. Dengan perbedaan itu menimbulkan perbedaan kapasitas sehingga menciptakan *output* ekonomi yang berbeda pula. Imbasnya, titik optimal atau maksimal dalam aspek perekonomian tidak tercapai.

Kedua, pemerintah memiliki kemampuan terbatas dalam mengenali kemampuan beragam etnik, khususnya nilai-nilai spesifik yang dimiliki setiap etnis yang dapat berimplikasi positif terhadap pembangunan ekonomi. Akibatnya, menimbulkan perspektif bahwa struktur masyarakat dengan beragam etnis dianggap *given* dan produksinya seragam. Dampak selanjutnya adalah apabila lahir kebijakan dalam pembangunan ekonomi, maka hanya cocok bagi etnis tertentu saja dan memungguni etnik lainnya. Imbasnya, *output* perkonomian juga tidak terwujud. Pandangan lain menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan atau pertukaran ekonomi sangat ditentukan oleh kepercayaan yang saling menguntungkan (*mutual trust*). Kepercayaan ini bersumber dari norma-norma yang bersifat eksplisit maupun implisit (Sen, 1999). Implikasinya adalah tatkala pemerintah mengambil keputusan di tengah keragaman etnis dibarengi pudarnya derajat kepercayaan masyarakat otomatis membutuhkan waktu yang lama sehingga berakibat inefisiensi dalam kinerja ekonomi. Terkait pentingnya “kepercayaan” dalam keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi telah banyak dibahas para pakar melalui teori modal sosial.

Salah satu fakta kebijakan yang menggambarkan hubungan antara keragaman etnis dan keterbelakangan adalah pengelolaan irigasi di suatu daerah yang menggunakan manajemen pemerintahan lokal yang diyakini sebagai penyebab pudarnya kepercayaan (*trust*) antar petani. Padahal, jika pengelolaan irigasi tersebut diserahkan kepada masyarakat malah hasilnya lebih optimal karena mereka diikat oleh nilai-nilai adat. Studi Douglas J. Merrey di beberapa negara (Nepal, Srilangka dan Indonesia) menunjukkan bahwa sistem irigasi yang tunggal yang dikelola organisasi spesifik bersifat otonom memiliki kinerja lebih baik dibandingkan sistem irigasi yang dikelola badan yang bergantung pada pemerintah maupun kepada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab kepada berbagai sistem berbeda (Yustika, 2021).

Menurut Yustika (2021), struktur masyarakat beragam etnis akan melahirkan nilai-nilai budaya yang menuntun tindakan, pikiran, dan interaksi antar sesama manusia. Dalam hal ini kelembagaan informal dapat diadopsi sebagai *code of conduct*, budaya dan keyakinan ketimbang langsung melompat kepada kelembagaan formal. Jadi tugas membangun aturan main

(*rule of the game*) dalam konteks keberagaman ekonomi/ekonomi Nusantara lewat kelembagaan informal berpeluang sebagai instrumen perantara untuk menjembatani struktur masyarakat dengan nilai-nilai, tindakan, maupun pikiran dalam aktivitas ekonomi. Maka, pada titik inilah pemerintah sebagai pengambil kebijakan mesti mengadopsi kelembagaan informal (*informal institutions*), dalam setiap formulasi konsep pembangunan. Dengan basis semacam ini efektivitas kelembagaan informal relatif lebih baik ketimbang formal.

Secara konsepsional, kelembagaan memiliki tiga komponen yaitu regulasi formal, aturan informal, dan mekanisme penegakan (*enforcement mechanism*) (North 1994). Problemnya, selama ini adalah kelembagaan yang disusun pengambil acapkali kebijakan kurang menyentuh aspek kelembagaan informal yang sejatinya berkontribusi positif terhadap proses pembangunan ekonomi. Apalagi dalam konteks negara berkembang, kelembagaan formal biasanya berperan sangat terbatas karena pengadministrasian yang jelek, pengaruh korupsi dan sulit diterapkan di daerah terasing (*remote area*) (Vandenberg, 2003).

Dari pemikiran ini menunjukkan bahwa kelembagaan informal penting untuk diinternalisasikan dalam konsep pembangunan. Menurut Yustika (2021), memasukkan kelembagaan informal dalam konsep pembangunan melalui tiga level:

Pertama, menyerap nilai-nilai (budaya) dan norma lokal sebagai dasar dari penyusunan konsep. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat paternalistik, sikap umum yang biasa diambil oleh masyarakat adalah kesanggupannya untuk pasrah kepada patron. Misalnya di Indonesia dalam Undang-Undang Desa mengakui asas rekognisi.

Kedua, meletakkan struktur operasionalisasi pembangunan sebangun dengan struktur yang hidup di masyarakat, misalnya pada kasus pengelolaan irigasi.

Ketiga, konsep pembangunan membutuhkan partisipasi dalam pelaksanaannya (kesukarelawanan). Pasalnya konsep pembangunan yang baik membutuhkan *public hearing*. Modal sosial menjadi titik tumpu yang bersumber dari nilai di masyarakat.

Jadi, melihat rancang bangun tersebut, maka ketimpangan di negara berkembang dalam pandangan *Marxian Economist* disebabkan adanya hubungan ketergantungan antara negara pusat dengan pinggiran bisa dikoreksi secara kritis. Amat mungkin ketimpangan tersebut terjadi akibat kealpaan negara berkembang dalam menyusun kebijakan pembangunan yang mengabaikan struktur masyarakat dibarengi anggapannya yang telah *given*. Jika struktur masyarakat diadopsi dan tak dianggap *given* dalam penyusunan kebijakan pembangunan, maka kemajuan-kemajuan yang dicita-citakan dapat terwujud dengan pemahaman yang utuh. Hal ini dibenarkan Baran (1971) yang mengatakan bahwa struktur keterbelakangan negara-negara miskin di dunia tidak bisa direduksi sekadar sebagai ketimpangan relasi antar negara kapitalis dan pinggiran (*periphery*) ala postulat *Marxian Economist*. Atau, akibat struktur produksi yang tidak kompetitif di negara berkembang sebagaimana tuduhan kaum *neoclassical economist* (Jeffe, 1988). Namun, keterbelakangan di banyak negara berkembang disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah memformulasikan konsep pembangunan yang bersandarkan kepada nilai-nilai masyarakatnya. Nilai dan norma tersebut, salah satunya bisa digali dari eksistensi etnis yang hidup di negara tersebut (Yustika, 2021).

Dari segenap uraian di atas, maka karakteristik analisis kelembagaan dapat digunakan untuk mengonstruksi ontologi dan epistemologi hingga teori yang melandasi Nusantaranomics. Karakteristik ekonomi kelembagaan adalah (Yustika, 2021):

1. Adanya penekanan terhadap faktor-faktor budaya yang tidak ditemukan dalam teori ekonomi.
2. Bersifat interdisipliner khususnya dalam mengenali tujuan politik, sosiologi, psikologi dan ilmu-ilmu yang lain.
3. Tidak ada sumber-sumber untuk penyusunan model agen/pelaku rasional yang memaksimalkan kegunaan.
4. Teknis matematis dan statistik dianggap sebagai pelayan teori ekonomi ketimbang esensi dari teori ekonomi sendiri.

5. Analisis tersebut tidak dimulai dengan membangun model-model matematis, namun diawali dari fakta dan dugaan teoritis mengenai mekanisme sebab-akibat.
6. Pemanfaatan harus dibuat dari bahan empiris historis dan komparatif mengenai kelembagaan sosioekonomi.

Berebak karakteristik analisis ekonomi kelembagaan ini terkait Nusantaranomis, maka akan melahirkan titik temu bahwa peristiwa ekonomi tidak pernah steril dari pengaruh aspek dan struktur sosial, budaya, politik dan sebagainya. Pasalnya, aspek dan struktur masyarakat yang berbeda-beda di setiap komunitas dengan situasi latar belakang sosial budaya spesifik adalah keniscayaan. Keragaman dan struktur masyarakat semacam itulah yang membentuk identitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia bisa dikatakan sebagai gagasan ekonomi Nusantara (Nusantaranomics). Gagasan Nusantaranomics mesti sepadan dengan kebutuhan pembangunan inklusif yang memadukan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi kelembagaan merupakan salah satu teori relevan digunakan sebagai pendekatan analisis dalam memahami Nusantaranomics karena sifatnya interdisipliner dan utuh (Yustika, 2021).

2.4 Teori Ilmu Sosial: Arya Hadi Darmawan

Menurut Arya Hadi Dharmawan (2021), mengutip pandangan Nofrian bahwa ekonomi heterodoks menemukan tiga frasa penting yaitu bekerja di tataran meso, resiprositas dan apa yang dapat dilakukan di suatu tempat. Sementara, frasa menarik dari Yustika (2021) yang dalam catatan Darmawan (2021) adalah etnisitas dan struktur masyarakat yang tidak pernah diperhitungkan dalam ekonomi arus utama. Pandangan ini sesungguhnya kritik atas pemikiran Max Webber yang kemudian ditulis oleh Granovetter sebagai *embedded economy*. Jadi, ekonomis itu mestinya *embedded* dalam struktur sosial dan etnisitas. Pemikiran menarik lainnya dari Yustika (2021) yaitu kedermawanan sosial dan moral.

Fakta ekonomi dunia saat ini adalah amat *divided*, dan bersifat ekonomi pasar (ekonomi arus utama). Walaupun *divided*, tapi di tataran meso dan masyarakat terjadi proses yang saling mengisi/komplementer. Pasalnya angka-angka ekonomi yang bersifat statistik acapkali tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Secara objektif bahwa umat manusia di dunia ini berada dalam situasi ekonomi yang bersifat mengkutub. Dari data World Bank (2020) menggambarkan bahwa dari jumlah penduduk dunia mencapai 7,72 miliar jiwa ternyata mereka yang berpendapatan sangat tinggi berjumlah 1,2 miliar jiwa dan tak selalu kapitalisme. Pasalnya negara-negara Skandinavia yang menerapkan model sosialisme demokrat masuk kelompok 1,2 miliar jiwa tersebut.

Merujuk publikasi World Bank (2020) menunjukkan bahwa di dunia ini memang terjadi situasi ekonomi yang mengkutub. Faktanya: (i) berpendapatan tinggi berjumlah 1,21 miliar jiwa termasuk negara-negara Skandinavia dan Amerika Serikat; (ii) berpendapatan menengah ke atas 2,51 miliar jiwa, (iii) berpendapatan menengah ke bawah 3,33 miliar jiwa dan (iv) berpendapatan rendah berjumlah 665,15 juta jiwa. Data ini juga menggambarkan bahwa jumlah penduduk berpendapatan rendah (relatif miskin) masih tinggi.

Posisi Indonesia sendiri menurut Darmawan (2021) berada di antara berpendapatan menengah ke atas dan berpendapatan menengah ke bawah dengan penopang struktur perekonomiannya 75% adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Fakta ini juga menjustifikasi bahwa 75% lapangan kerja di Indonesia adalah sektor UMKM. Sektor UMKM umumnya memiliki karakteristik yaitu ekonomi skala kecil dan industri kecil di pedesaan yang bersifat ekonomi rumah tangga, industri *cottage*, kemitraan (*partnership*), ekonomi yang stabil (*stability economy*), ekonomi yang berdaya tahan (*economic resilience*) dan padat karya (Darmawan 2021).

Dalam konteks posisi Indonesia dalam situasi ekonomi yang mengkutub menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduknya saat ini termasuk kategori berpendapatan menengah ke bawah yang nilainya sebesar US\$ 3.868. Jika menggunakan indikator *purchasing power parity* (PPP), maka akan berada pada rentang US\$ 11.000 –12.000 per kapita.

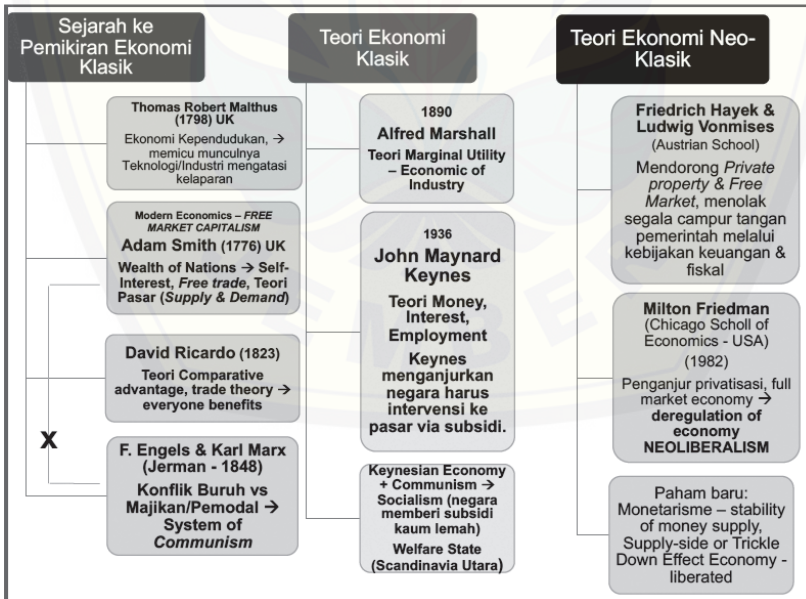
Fakta sosial di Indonesia menunjukkan bahwa perekonomiannya didorong (*drive*) oleh ekonomi pasar bebas (*free market economy*). Apapun bisa menjadi problem apabila bunga bank melonjak naik, harga saham terjun bebas, nilai tukar rupiah turun dan munculnya Crypto currency. Jadi, ekonomi uang itu sangat tinggi. Darmawan (2021) mempertanyakan bahwa apakah benar ekonomi uang itu men-*drive* segalanya. Kenyataannya, di daerah terutama pada tataran etnisitas menunjukkan bahwa ekonomi uang tak selamanya bekerja demikian.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa *divided* ekonomi terjadi secara global. Hal ini ditunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar di dunia men-*drive* kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Dalam sistem ekonomi pasar bebas mencakup ekonomi pasar, perdagangan bebas, kepenetngan individu (*self interest*), memaksimalkan *utility* dan ekonomi uang. Akibatnya, dalam sistem ekonomi global (*globalization of economy*) didominasi oleh *transnational corporation* (TNCs) di berbagai aktivitas ekonomi. Di antaranya mencakup perdagangan internasional (*international trade*), arus tenaga kerja antar negara (*labor migration*), aliran modal dari negara maju ke negara berkembang (*capital flows*) dan produk-produk menjadi simbol global (*internalization of product*) (Darmawan, 2021).

Dalam pandangan Darmawan (2021) bahwa heterodoks ekonomi sejatinya ingin melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi. Kritik dari Paul Baran, John Galtung dan Samir Amin dan kalangan *Marxian economist* agar tidak tergantung dari ekonomi berbasis multinational korporasi besar tersebut. Akibatnya, apabila selalu mengalami ketergantungan, maka akan mudah runtuh secara bersama. Secara empiris di Indonesia yang terjadi bukanlah ekonomi berbasis TNCs walaupun berkembang juga. Namun, kenyataannya ekonomi yang bekerja di Indonesia dan banyak menghidupi rakyat Indonesia adalah UMKM. Menurut Darmawan (2021), di sektor UMKM inilah sejatinya heterodoks ekonomi bekerja. Pasalnya, UKM sifatnya padat karya, pasarnya lokal dan terbatas, tekno-manajemennya masih tradisional, akses permodalan lemah dan masuk kategori ekonomi bazaar (*Bazaar economy*).

Contohnya soto Lamongan bekerja bukan berdasarkan mencari ekonomi melainkan menggunakan modal sosial (*sosial capital*). Sate Madura bekerja menggunakan ekonomi kelembagaan yang didesain oleh mereka. Aturannya, dalam radius 1 km dari penjual sate Madura, tidak boleh ada sate Madura lain yang beroperasi. Sebuah kesepakatan yang tak tertulis dan tak bisa dipahami jika menggunakan teori-teori ekonomi arus utama. Bebek Slamet dan Rumah Makan Padang/Minang dijalankan menggunakan model-model modal sosial yang tinggi, termasuk kerajinan kasongan DIY, model kemitraan tradisi, dan industri ukiran/furnitur Jepara.

Kini berkembang pemikiran tentang gagasan Nusantaranomics. Menggunakan metode deduktif, Darmawan (2021) berhasil memetakan teori sosial yang relevan dengan gagasan Nusantaranomics. Jika memetakan peta pemikiran ekonomi dunia, Indonesia sesungguhnya dengan pemikiran Ekonomi Pancasilanya lebih banyak terinspirasi dengan teorinya Keynesian. Pemetaan tersebut disajikan seperti gambar di bawah ini.



Gambar 2.3 Peta sejarah pemikiran dan Teori Ekonomi

Menurut Darmawan (2021) teori besar Keynes yang berpengaruh dalam masa depresi besar tahun 1930-an. Ia menganjurkan negara untuk mengintervensi pasar melalui subsidi. Tesis subsidi adalah orang miskin tidak bisa dilepaskan dalam kompetisi ekonomi, sehingga dibutuhkan intervensi negara untuk mengendalikan pasar. Tujuannya membantu orang miskin maupun mereka yang ekonominya terbelakang. Model negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut negara-negara Skandinavia tak lepas dari pemikiran ekonomi Keynesian yang memosisikan pentingnya peran negara (*power state*). Pemikiran Keynes menegaskan teorinya Adam Smith, David Ricardo dan Marx yang sangat ekstrem sehingga tak juga bekerja karena konflikual. Kemudian teori ini dihantam oleh Milton Friedman yang bekerja dengan teori-teori neoliberalismenya.

Di dalam perspektif relasi kuasa sejatinya pemikiran Keynes menginspirasi ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan beragam intervensi negara dalam pasar berbentuk subsidi. Di antaranya: kebijakan subsidi energi, beras miskin, dan bantuan langsung tunai untuk warga miskin dari pemerintah (negara).

Heterodoks ekonomi maupun Nusantaranomics secara relasi kuasa menurut Darmawan lebih dekat dengan pemikiran Keynes karena studi-studi S-3 yang dibimbing Prof. Dr. Arya H. Darmawan dan Prof. Didin S. Damanhuri menunjukkan bahwa pasar bisa menghempaskan orang-orang yang bersaing. Salah satu penyelamatnya adalah modal sosial, solidaritas sosial dan kedermawanan sosial yang bekerja pada tataran substantif bukan formalistik. Ekonomi formal bisa mematikan, tetapi jaringan pengamannya adalah ekonomi substantif (contoh desertasi bimbingan).

Pemikiran Keynesian sangat menginspirasi dan Indonesia menerapkannya dalam bentuk pemberian subsidi. Pemberian subsidi menjadi bahan kritik dari kalangan neoliberal karena dianggap mengacaukan harga dan pasar. Menurut Darmawan (2021) pemikiran Keynes relevan dengan Nusantaranomics maupun pemikiran ekonomi heterodoks.

Kedua, perspektif *moral economy* Bentham. Ia hidup semasa dengan Adam Smith. Ia mengatakan bahwa moral ekonomi dikendalikan (*driver*) oleh dua moral yaitu *good for individual* dan *good for collectivity*. Jika mencermati ekonomi pasar bebas yang berlangsung saat ini, maka ia berada dalam domain

hedonism. *Good for individual* tak memiliki kepedulian terhadap kolektivisme (*collectivity*). Dikatakan bahwa antara hedonisme dan *aggregation* amatlah berbeda. Lalu dijelaskan pula bahwa dalam teori moralnya Bentham mengandung *consequentialism*.

Jika bicara Nusantaranomics, ia tidak bicara pada moral hedonisme melainkan ekonomi yang substantif di Indonesia sangat lekat dengan struktur sosial. Hasil berbagai studi Darmawan di Sumatra Barat dan Jawa Barat, Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ekonomi substantif yang *embedded* dengan agregasi dalam teori moralnya Bentham bekerja dengan baik (*good for collectivity*).

Sementara, *consequentialism* merupakan cara untuk mencapai *good for whom*. Contohnya penerapan 3M dalam penanganan Covid-19. Sebetulnya, kita sedikit menekan *pleasure* dan *happiness* di tingkat *hedonism* dan mengedepankan *collectivity* supaya tetap bertahan hidup (*survive*) ke depan. Jadi, sejatinya ekonomi juga berjalan di antara *good for the individual* atau *good for the collectivity* dan mau tidak mau umat manusia mesti bernegosiasi. Contohnya ekonomi Covid-19 yang jumlahnya mencapai ribuan triliun di seluruh dunia diinvestasikan buat membeli vaksin dan mengatasi pasien. Fakta ini merupakan bagian dari *good for the collectivity*. Jadi, umat manusia di dunia saat ini sedang mengorbankan *good for individual*-dalam kasus Covid-19, tapi mengedepankan *good for collectivity*. Menurut Darmawan (2021) ekonomi moral di Indonesia bekerja di tataran Nusantaranomics yang ada di lokus-lokus yang ditemukan di Sumatra Barat dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan. Sejalan dengan pemikiran Nofrian (2021), Darmawan (2021) menyatakan bahwa temuan model-model Nusantaranomics ternyata bekerja di tataran meso dan bukan makro. Sejalan pula dengan pemikiran Yustika (2021) bahwa temuan Nusantaranomics ini bekerja menggunakan moral. Jadi, ekonomi Indonesia pada tataran praksisnya adalah ekonomi moral sebagaimana ditunjukkan Betham dan tinggal bagaimana kita memanfaatkannya.

Ketiga, perspektif keterlekatan ekonomi (Granovetter), ternyata bekerja untuk menjelaskan relevansinya dengan Nusantaranomics. Granovetter mengatakan bahwa ekonomi harus dapat dijelaskan oleh struktur sosial (Baca: Yustika), dan ekonomi *embedded* dengan *setting* budaya lokal (*cultural setting*).

Gagasan Nusantaranomics merupakan suatu proses kristalisasi pemikiran dari hasil-hasil riset penelitian disertasi mahasiswa di IPB *University*. Disertasi-disertasi tersebut dibimbing oleh Prof. Dr. Arya Hadi Darmawan dan juga Prof. Dr. Didin S. Damanhuri. Menurut Darmawan (2021), beberapa disertasi yang memiliki *sense* dari Nusantaranomics adalah:

Pertama, disertasi Dr. P. Setia Lenggono (2011). Temuannya adalah keterlekatan (*embededdness*) yang ditunjukkan Lenggono terkait teori Ekonomi Solidaritas Sosial di kalangan masyarakat Ponggawa dan Patronase pertambakan di Delta Mahakam, Kalimantan Timur. Jika, model aktivitas ekonomi ini menggunakan kerangka rasionalitas-instrumentalnya Max Webber, maka temuan ini tidak masuk akal. Pasalnya, bagaimana mungkin seorang ponggawa mengeluarkan uang dan membiayai para kliennya yang berprofesi sebagai buruh nelayan untuk naik haji dan keluar daerah sebagai bentuk “*pleasure*” (Bentham). Di sini menunjukkan bahwa terbentuknya *pleasure individual* sebagai bagian dari *pleasure collectivity*. Fenomena ini otomatis tidak dapat dijelaskan dengan ekonomi arus utama sebagaimana dikatakan Yustika (2021).

Kedua, Dr. Mohammad Syukur (2013) tentang Teori Ekonomi Skala Kecil di Sulawesi Selatan. Dari disertasi ini Syukur (2013) menjelaskan tentang teori *mix rationality*. Intinya bahwa betapa dalam tubuh seseorang terdapat pikiran yang menyatu antara rasionalitas instrumental dengan rasionalitas moral.

Ketiga disertasi Dr. Johatorul Jamilah (2016) membuktikan bahwa ekonomi bordir di Tasikmalaya omsetnya triliun rupiah ternyata tidak bisa direplikasi dan dicangkokkan di tempat lain. Mencermati fenomena ini praktis akan membingungkan para ahli ekonomi pembangunan karena suatu aktivitas ekonomi akan hendak direplikasi dan dicangkokkan di tempat lain ternyata tidak bisa berjalan. Penyebabnya, adalah adanya keterlekatan (*embedded*) dengan sosio budaya lokal dan nilai-nilai yang terkandung dalam

tradisi sunda. Intinya adalah ketika sistem ekonomi bordir beromset triliunan dengan jaringan pasarnya hingga manca negara ternyata bersifat spesifik lokal (*Local specific*). Fakta ini membuktikan bahwa Nusantaranomic yang bersifat heterodoks ternyata bersifat spesifik lokal.

Keempat, disertasi Dr. Elvawati (2020) yang kasusnya di Sumatra Barat. Di tubuh masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat ternyata mengalami neo-dualism. Teori Boeke di zaman kolonial Belanda menyebutkan adanya dua entitas ekonomi yaitu (1) berjiwa amat kapitalistik dan berorientasi profit yakni menciptakan uang (*money making*) atau menghasilkan keuntungan (*profit making*); dan (2) pra-kapitalis yang sangat subsisten dan memiliki solidaritas sosial tinggi. Ternyata, di Sumatra Barat ditemukan bahwa dualisme ekonomi bukan menjelma pada intentitas manusia berbeda melainkan dalam jiwa manusia yang sama. Temuan ini persis dengan disertasi Dr. Undang Fajar yang menyebutnya sebagai “*amphibian economy*”. Ia mengatakan bahwa petani Kakao di Sulawesi Tengah memiliki perilaku dualisme dalam ekonomi. Dia pagi hari ia berperilaku sangat sosialistik, sementara ketika siang hari ia berubah menjadi sangat kapitalistik. Penyebabnya perbedaan aktivitas dalam kegiatan pertanian yang dilakukan seorang petani. Aktivitas tanaman pertanian berbasis sawah merepresentasikan perilaku sosialisme dan tanaman perkebunan kakaonya yang menjangkau pasar ekspor hingga ke Belgia merepresentasikan kapitalisme. Jadi, jiwanya mendua akan tetapi berlangsung dalam tubuh seorang petani yang sama.

Apabila Nusantaranomics dianggap bersifat meso dan lekat (*embedded*) dalam budaya, struktur sosial, etnisitas dan bekerja pada tataran lokalistik, maka fakta empirisnya ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari sistem ini kian menjelaskan bahwa ekonomi pasar tidak bekerja dengan baik dan terdistorsi ketika berada di tataran lokal. Semua fakta empiris tersebut adalah artefak-artefak (antropologi) yang digali Prof. Didin Damanhuri. Pada gilirannya bakal dirajut menjadi sebuah *purzzle* dan *mosaic* yang menarik tentang kesejatan Indonesia. Darmawan (2021) juga sepakat dengan Prof Erani bahwa ekonomi yang bekerja pada suatu etnisitas homogen akan lebih efisien dibandingkan multietnis. Sebaliknya, ekonomi yang bekerja pada multietnis adalah ekonomi arus utama (*mainstream*) karena ia bisa bekerja di tataran lokalistik.

KEWIRAUSAHAAN LOKAL DAN ETNIK DALAM MEMBANGUN EKONOMI DAERAH DAN PEDESAAN

Endriatmo Sutarto

Menyandingkan kewirausahaan lokal dan etnik dalam praktik ekonomi daerah dan pedesaan sebagaimana judul yang diterima dari komite penyelenggara bak suatu pasangan dan boleh dikatakan pleonasme, jika kita membacanya dari gaya bahasa dan tindak tutur bahasa, *speech act*. Mengapa? Karena praktik ekonomi daerah dan pedesaan suatu sejak lama digeluti para petani-pedagang desa (wirausahawan) lokal dan etnik dan sebaliknya; wajah petani-pedagang desa (wirausaha) lokal dan etnik sangat diwarnai dan didominasi oleh pasang surutnya ekonomi daerah dan pedesaan itu sendiri.

Pertanyaannya ada apa di balik gejala itu semua? Salah satu *argument* penting yang banyak diajukan adalah karena sektor pertanian pangan (di Jawa) yang sebelumnya menjadi sandaran kebutuhan ekonomi rumah tangga petani tak mampu lagi mencukupinya. Dalam hal ini yang tersangkut adalah rumah tangga petani strata sosial menengah-bawah khususnya, yang banyak didera oleh problematika kemiskinan dari waktu ke waktu. Pemicunya adalah kepemilikan lahan sawah mereka yang semakin menyusut, sempitnya lapangan kerja yang tersedia di daerah dan pedesaan serta rendahnya pendapatan dari pertanian bila dibandingkan rata-rata nasional. Apalagi pendapatan dari sektor industri dan jasa. Para petani pekerja pedesaan inilah (wirausaha) yang

mau tidak mau harus bekerja ganda, pertanian (*on farm activities*) dan non-pertanian (*off farm activities*), dalam waktu yang bersamaan atau dengan pembagian kerja antar anggota rumah tangga.

Sementara di luar Jawa gambarannya tentu tidak sama. Namun yang banyak ditemukan adalah wirausaha yang berperan dalam praktik ekonomi daerah dan pedesaan adalah mereka yang datang dari etnik-etnik besar yang dalam hal ini mendapat “penyuburan budaya” berkat terpaan gelombang budaya-budaya luar yang datang silih berganti dari budaya Budha, Hindu, Islam dan Barat lewat politik kolonialismenya. Jadi mereka ini tampil ke panggung kehidupan luar justru berkat surplus yang diterima dari usaha sektor pertanian-perkebunan sehingga mampu melebarkan sayap ke *nonfarm activities* dalam aneka usaha kelompok masyarakat dengan strategi rumah tangga akumulasi. Dengan demikian etnik Jawa, Bugis, Aceh dan Minang adalah contoh etnik yang mendapatkan penyuburan silang budaya (*cross culture fertilization*) Islam khususnya yang datang ke Nusantara diperantarai para saudagar Gujarat India, dan Muslim Cina asal Guangzhou yang dipimpin Laksamana Cheng Ho lewat armada besarnya ke kepulauan Nusantara dan sempat memperkuat gilda-gilda perdagangan kaum muslimin yang ada di bandar-bandar. Dengan demikian kita dapat mengenal penyuburan silang budaya itu, dari unsur-unsur kosmopolit dan universal dalam segi budaya umum pada etnik-etnik besar tersebut. Mereka inilah yang kemudian banyak mewarnai praktik-praktik ekonomi daerah dan pedesaan di kepulauan Nusantara dalam besaran usaha yang banyak berskala kecil menengah dibandingkan kecil-mikro yang banyak mewarnai wirausahawan di pedesaan Jawa (Madjid 2004).

3.1 Peluruhan “Etos Kolektif Resiprokal” dan Senjakala Sosial Safety Net bagi Masyarakat Desa dan Daerah.

Sejak jatuhnya rezim Soeharto yang selanjutnya disebut era reformasi, tata nilai, norma dan kebudayaan (baca: pranata sosial), cenderung mengalami keretakan yang cukup menganga dalam arti muncul berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi yang membayangi kehidupan sebagian (besar)

warga masyarakat kita. Lihat saja dari wajah lalu lintas kendaraan bermotor kita, gejala melawan arah/ arus yang membahayakan pengguna jalan, mudah berbuat amuk dan melakukan tindakan anarki, korupsi yang merajalela tanpa menimbulkan rasa malu bagi pelaku yang ditangkap, pecahnya konflik dan kekerasan yang bernuansa ikatan primordialistik, meluasnya pemakaian narkoba dan penyakit-penyakit sosial lainnya.

Disorientasi, dislokasi dan krisis budaya ini semakin bertambah dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi kapitalisme global yang membawa serta berbagai ekspresi sosial budaya yang tidak selalu positif, seperti semakin merembaknya industri makana instan, tayangan film, youtube dan/atau lewat berbagai media sosial lainnya yang mendorong “gaya hidup” baru di kehidupan masyarakat seperti sikap hedonisme, permisivme, kekerasan dan lain-lain. Dengan kata lain dari berbagai kecenderungan tersebut maka kita bisa menyaksikan kemunculan kultur “*pasca hybrid*” di Indonesia dewasa ini. Pada suatu sisi kemunculan budaya *pasca hybrid* tanpaknya tidak terelakkan khususnya karena proses globalisasi semakin sulit dihindari. Namun pada sisi yang lain budaya pasca hibrid ini, apalagi yang bersumber dari dan didominasi budaya luar karena kuatnya sumberdaya ekonomi dan jaringan informasi mereka, dapatlah mengakibatkan krisis budaya nasional dan lokal lebih jauh. Lebih dari itu budaya neo-hibrid dapat mengakibatkan lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Padahal indentitas lokal dan nasional tersebut sangat krusial bagi integrasi sosial, kultural dan politik, masyarakat serta negara bangsa.

Berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya mempertahankan kemerdekaan tetapi juga eksistensi negara bangsa (*nation building*) yang mengandung keragaman, para penguasa negara-negara baru termasuk Indonesia, memilliki kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik “keseragaman budaya” monokulturalisme. Pengalaman kita sejak masa awal kemerdekaan, khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde baru Presiden Soeharto memperlihatkan secara kuat pada politik “monokulturalisme (Azra, 2004).

3.2 “Korporatisme Negara dan Korporatisme Masyarakat” dan Dampak Eksesifnya pada Sendi-Sendi Kehidupan Sosial

Politik monokulturalisme lebih jauh memunculkan gejala negara korporatisme. Korporatisme negara adalah hasil penegeraan berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan. Di masa rezim Soeharto, gejala menjadikan Indonesia sebagai negara korporatisme sangat kuat. Di sini corak perwakilan kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat dihubungkan secara ketat dengan kekuasaan negara dalam suatu hubungan patronase. Negara secara aktif ikut campur dalam pengorganisasian berbagai kelompok kepentingan sehingga kelompok kepentingan tersebut tak bisa lain kecuali hanya tunduk pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan negara tanpa kemampuan bersikap kritis. Alasan sebuah negara menganut sistem korporatisme adalah untuk mengendalikan perilaku masyarakat sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial apalagi jika menjurus sampai pada kerusuhan massa yang bisa menimbulkan suasana *chaos*. Contoh paling mencolok dari perilaku negara korporatis antara lain dalam program Keluarga Berencana (KB) yang digagas oleh Presiden Soeharto kala memimpin rezim Orde Baru. Program tersebut berkembang di bawah naungan negara lewat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tujuan dari program KB adalah menekan tingginya angka kelahiran dan esensinya ini adalah benar-benar menjadi urusan dan keputusan dari pasangan suami istri bersangkutan atau paling jauh mengenai keluarga besar untuk menentukan keterlibatannya sebagai akseptor atau tidak. Demikian pula di bidang usaha tani, koperasi, pendidikan, dan kelompok-kelompok fungsional lainnya, negara terlibat dan ikut campur tangan secara intens hingga masuk ke ranah ruang-ruang pribadi. Negeraisasi masuk sampai ke ranah kehidupan yang sangat privat.

Sebaliknya korporatisme masyarakat (neoliberalisme) yang sekarang dirasakan semakin gencar adalah hasil penswastaaan (privatisasi) beberapa urusan kenegaraan. Korporatisme masyarakat terjadi pada sektor ekonomi dan pengadaan pelayanan publik seiring berubahnya konsep bernegara

yang semakin terlucuti otoritas dan dalam banyak perannya. Akibatnya banyak urusan pelayan publik seperti transportasi, perubahan, pendidikan, kesehatan, pasar, dan bahkan pembangunan perkotaan (mandiri) yang diinisiasi dan difasilitasi penuh oleh swasta dan lain sebagainya. Yang terkini adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No. 11 Tahun 2021. Dengan UU ini nyaris semua sendi-sendi kehidupan pokok masyarakat, termasuk dalam bidang agrarian/pertanahan ada dalam cakupan urusan “Lembaga Swasta” (Badan Bank Tanah). Badan yang disebut terakhir ini akan segera direalisasikan pembentukannya baik di aras pusat maupun daerah. Bahkan dengan UUCK ini praktik-praktik agraria kolonial yaitu “domain: negara dijalankan secara terang-terangan. Dampaknya relasi manusia dan tanah yang oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebut “abadi” sirna sudah, dan “Hak Menguasai Negara” dalam bidang agrarian/pertanahan bertransformasi menjadi “Hak Milik Negara” (Hal yang ditolak UUPA).

Pilihan ekstrem antara menjalankan bandul politik “korporatis negara” di satu segi dengan bandul politik “korporatisme masyarakat” di segi yang lain. Tentu memberikan dampak eksekutif tersendiri pada kehidupan masyarakat. Apalagi yang disebutkan terakhir ini, dimotori kapitalisme global yang mendesakkan neoliberalisme di semua aspek kehidupan. Maka bisa diduga ia akan mendera kemiskinan makin dalam bagi golongan masyarakat akar rumput (pedesaan) sampai pada urusan pemenuhan hak-hak dasarnya. Lebih dari itu yang paling memprihatinkan adalah keduanya, baik korporatisme negara maupun korporatisme masyarakat telah turut meluluhlantakkan secara signifikan etos kolektif resiprositas masyarakat pedesaan. Hal terakhir ini tak lain adalah jalinan tenun masyarakat (*fabric of society*) yang semakin hari semakin menemui hari senjakalanya. Di masa-masa yang sangat panjang etos sosial resiprokal ini telah memainkan peran sangat penting di kehidupan masyarakat sehingga menyelamatkan warga golongan lemah desa masuk ke tubir jurang kemiskinan yang lebih dalam (Soetarto, 1998).

Dengan kata lain secara restrospektif, politik monokulturalisme Orde Baru atas nama stabilitas untuk developmentalisme maupun yang kini dilanjutkan dengan (neo)-liberalisme bidang-bidang kehidupan sosio ekonomi masyarakat luas telah dan akan terus menghancurkan lebih telak

sampai kepada pranata-pranata sosial-*local cultural genius* yang sejak lama dikenal dan hidup dalam tradisi kehidupan masyarakat daerah. Tradisi Pela Gendong di Ambon, Republik Nagari di Sumatra Barat, Mapalus di Sulawesi Utara, Sambatan di Sumatra Selatan, Gugur Gunung di Jawa Tengah dan sebagainya. Pranata yang lebih spesifik lagi misalnya di bidang pertanian pangan seperti Sistem Ceblokan yang dikenal di pedesaan Jawa, di mana warga miskin mendapatkan jatah mengolah sebagian bidang tanah sawah milik petani kaya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dilakukan secara bergilir serta banyak lagi yang disebut. Padahal sistem tradisi dan sosio kultural seperti ini merupakan kekayaan kultural tiada tara bukan hanya untuk warga (desa/daerah)-nya sendiri, tetapi juga tersedia untuk warga masyarakat luar lainnya. Jadi *local genius* juga berfungsi semacam *early warning system* yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan masyarakat yang bersangkutan dan bahkan bersifat lintas batas (*cross border community*). Konflik dan kekerasan bernuansa etnik yang marak di beberapa daerah sejak 1996 tak lepas dari hancurnya *local genius* (Azra, 2004).

3.3 Bagaimana Memposisikan Wirausahawan Lokal dalam Konteks Transformasi Kultural-Struktural Pedesaan

Desa-desakini telah bergeser drastis dari semula desa pertanian pangan dan/atau kehutanan kini telah berubah menjadi desa perkebunan, pertambangan atau berubah menjadi desa tanpa wajah “pemilik” alias tanah-tanah guntai, dan tanah *absentee*. Perubahan ini menghiasi desa-desa suburban di tepian kota. Kondisi ini telah membuat perupaan pedesaan kita semakin berwujud bagai bidang kaca yang retak. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan penggambaran (*profile*)-nya menjadi tidak mudah. Sebagian besar pranata sosial bangunan tradisinya telah beringsut lemah, hingga nyaris sulit dijumpai *sosial safety net* yang benar-benar efektif yang menjadi sasaran kebutuhan bagi rumah tangga petani pedesaan yang miskin. Mereka termasuk dalam kategori “**rumah tangga dengan strategi survival**” (miskin) dan menyebabkan sebagian besar dari mereka kini harus berstatus sebagai “pengungsi agraria” Hal ini

dikarenakan tanah-tanah pertanian mereka beralih fungsi dalam arti luas. Ini dikenal sebagai bekerjanya faktor *land grab* (perampasan tanah) yang diinisiasi oleh negara dan/atau bersama investor besar dalam kemasan “**pembangunan**” atau “**pertumbuhan ekonomi**”. Sementara di luar Jawa alih fungsi wilayah atau desa-desa adat menjadi kawasan hutan menjadi cerita tersendiri bagi terjadinya gejala pengungsi agraria yang menimpa masyarakat bersangkutan. Pemicu utamanya adalah terjadinya penetrasi kapitalisme perkebunan besar dengan komoditas kelapa sawitnya dan penetrasi industri pertambangan yang masuk sampai ke jantung “**kelompok-kelompok masyarakat hutan adat**” (MHA). Masuknya pemodal besar ini telah mendesak kehidupan masyarakat lokal/adat yang hidup dalam “**kawasan hutan**” sehingga mereka terdesak untuk beralih status menjadi kuli/buruh perkebunan. Akibat status baru tersebut, mereka (masyarakat adat/lokal) berubah menjadi bagian penyandang “pengungsi agraria” lainnya.

Tanpa pernah meragukan sedikit pun usaha kerja individual warga masyarakat desa kita, tapi menjadi penting untuk menggarisbawahi dan menghubungkan rumah tangga-rumah tangga di pedesaan yang bertipe “*household with survival strategy, household with consolidation strategy, dan household with accumulation strategy*” (miskin, menengah dan kaya) baik dalam jumlah maupun kiprah dinamikanya. Mengapa demikian? Pasalnya sebagaimana kita mengetahui bahwa beberapa dasawarsa terakhir terutama dimulai semenjak Orde Baru hingga kini telah terjadi perubahan aliansi kekuatan baru di dalam hubungan-hubungan kekuasaan (*power relation*). Keluarga-keluarga bisnis dan politik serta perusahaan-perusahaan konglomerat besar banyak lahir aparat negara itu sendiri. Mereka otomatis memiliki kemampuan merambah pasar modal, industri dan jasa. Dengan mengambil kepemilikan negara (dalam hal tanah), oligarki-oligarki publik dan swasta baru tersebut secara efektif menciptakan suatu “sistem ekonomi yangn dibebani pinjaman (*over borrowed*), investasi berlebihan (*over invested*), dan nyaris tanpa dibatasi hukum. Aliansi di atas dengan yang disebut oligarki dengan subunit dengan subunit di bawahnya menjadi kekuatan yang bertahan dengan kemampuan resiliensi tinggi karena menguasai “modal finansial, modal industri dan dalam kaitan ini termasuk modal sosial.

Menarik saat ini untuk memberikan sedikit gambaran anatomi wirausaha di pedesaan/daerah di negeri ini. Pertama, ada penilaian pembentuk kelompok wirausaha tersebut tidak bisa terlalu diharapkan banyak sebagaimana kehadiran kaum borjuis yang ada di daratan Eropa, sinyalemn Kuno (1990). Kaum borjuis ini begitu rupa sehingga mempunyai kemampuan menggoyahkan kekuasaan kaum feodal sewaktu terjadi revolusi di daratan Eropa di tahun penghujung abad 19, yang berujung melahirkan kebijakan Reforma Agraria. Lebih jauh Kuno menengarai bahwa yang terbentuk di negeri ini adalah kapitalisme ersatz (pengganti yang lebih inferior) akibat campur tangan pemerintah yangn berlebihan sehingga mengganggu prinsip-prinsip persaingan bebas sehingga kapitalisme tidak berjalan dinamis.

Dari berbagai studi tentang kemunculan pengusaha/kelas menengah di Indonesia umumnya menyimpulkan bahwa kapitalisme di Indonesia ditandai dominasi kapitalisme negara, kapitalisme birokrasi dan kapitalisme klien, yang amat bergantung penguasa untuk berbisnis atau melakukan peran ekonominya. Antlov (2003) menggarisbawahi bahwa elit pedesaan bukanlah semata-mata kelas kapitalisme murni, tetapi lebih merupakan anak emas para oligarki dan negara yang berkesempatan mengumpulkan kekayaan dan memimpin tergantung jalinan hubungan mereka dengan para konglomerat dan pemerintah. Jika mendasarkan pada diagnosis tersebut, layakkah jika kapitalisme yang menggejala di Indonesia dikategorikan sebagai kapitalisme ersatz? Mungkinkah dalam masyarakat Indonesia yang patrimonial sebagai diklaim Liddle (1993) dan Mackie (1993) akan mewujudkan kapitalisme rasional? Bagaimana pun *stereo type* sebagai masyarakat dengan sistem sosial asli (pra kapitalis) harus berhadapan dengan masyarakat dengan sistem sosial impor (kapitalisme tinggi), sebagaimana dikatakan Boeke dalam “teori ekonomi ganda”-nya, tampaknya masih begitu mendalam pengaruhnya dalam berbagai kajian terhadap pertumbuhan golongan pengusaha/kelas menengah di Indonesia. Akibatnya, timbul aliran pemikiran yang menganggap proses sejarah di negara-negara Asia Tenggara telah gagal menumbuhkan kelas menengah “**dalam arti yang sesungguhnya**”.

Meskipun umumnya diketahui bahwa kapitalisme berkembang berbeda-beda di sepanjang sejarah akibat persoalan yang dihadapinya juga berbeda. Kesamaannya hanyalah bentuk dasarnya yaitu pemilikan pribadi alat-alat produksi, sistem pasar sebagai sistem dasar pertukaran barang dan jasa serta tenaga kerja merupakan komoditas yang diperjualbelikan. Oleh karena itu menjadi penting secara teoritis, menemuknenali ulang kemunculan pengusaha lokal di Indonesia. Mesti melihat lebih jernih pembentukan lokal yang menggejala di Indonesia saat ini, sehingga secara konseptual menjadi kontekstual dan historis (Lenggono 2011).

3.4 Penutup

Kita perlu membuka dan menata ulang politik pembangunan dan otonomi daerah sehingga memastikan semua usaha itu tak berjalan berbarengan dengan adanya kemelaratan dan kemiskikan. Para bapak pendiri bangsa telah menetapkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah wajib berusaha membagi kekayaan nasional (*redistribution of nation's wealth*) secara adil dan merata. Serentak dengan itu, kita mesti mengembangkan aktivitas ekonomi yang menekankan untuk mendorong prakarsa usaha dari bawah. Sekalipun kita tak menganut paham *laissez faire lessz passer*, namun bentuk kewirausahaan dan keswadayaan dalam bidang ekonomi, dengan distribusi beban tanggung jawab kepada seluruh warga negara (termasuk warga desa dan daerah) dibutuhkan tidak hanya menyehatkan bangunan ekonomi itu sendiri. Melainkan juga, kemantapan demokrasi dan keadilan (Madjid, 2004).

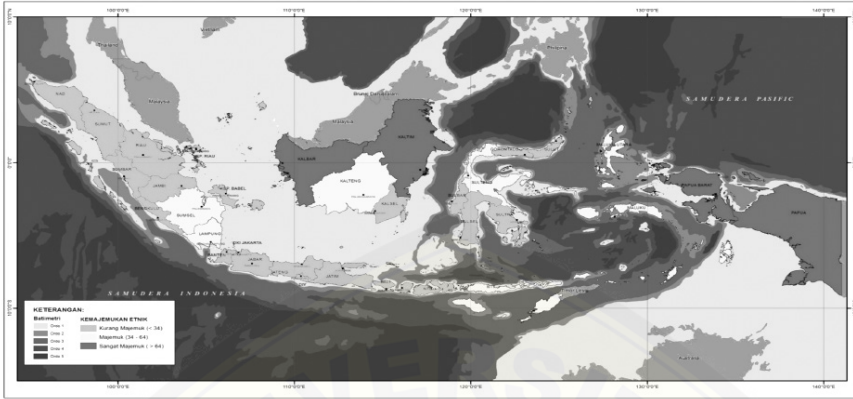


4

TANTANGAN POLITIK ETNIK DI ERA DIGITAL: PENGALAMAN EMPIRIS DALAM PEMBANGUNAN REGIONAL SULAWESI TENGGARA

Sofyan Sjaf

Apakah etnisitas berdampak positif terhadap pembangunan desa di Indonesia? Tentu pertanyaan tersebut harus dilihat dari 2 sudut pandang yaitu objektivitas dan subjektivitas etnis. Dari sudut pandang objektivitas Indonesia adalah Negara yang sangat heterogen, di mana Indonesia memiliki 761 etnis dan subetnis bahkan ribuan dalam kategori klan subetnis. Dari sisi spasial daerah, etnis yang sangat majemuk adalah Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Sementara, daerah yang kurang majemuk adalah Pulau Jawa, Sumatra, Bali, Nusa Tenggara dan sebagian Sulawesi (Utara, Barat, Selatan dan Tenggara). Kondisi Objektif tersebut dimiliki dan kerap direproduksi oleh setiap etnis dengan berbagai ragam pencirian identitas baik aspek historis seperti asal-usul kerajaan lokalnya, maupun stigmatisasi yang dibangun berdasarkan pola sikap seumpama etnis berkarakter keras dan amat lembut.



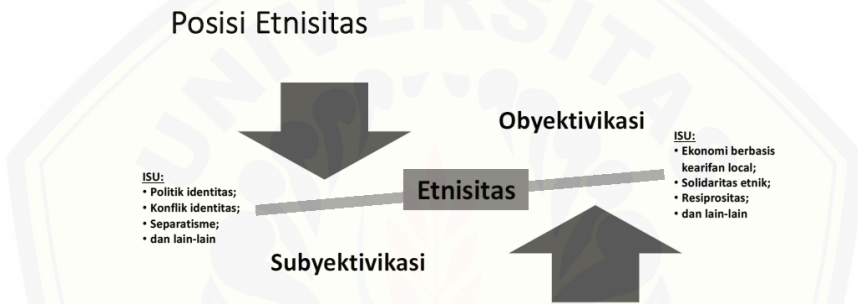
Gambar 4.1 Peta sebaran etnik di Indonesia

Sumber: Diolah dari data Podes 2011 dalam Sofyan Sjaif (2014)

Aspek tersebut dalam ruang pertarungan politik lokal lazim disebut sebagai kekuatan demografi, di mana menimbulkan adanya kecenderungan populasi menentukan kelayakan menjadi kepala daerah. Potret tersebut tercermin tatkala berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah dan musim pilkada. Kala itu kerap terjadi benturan etnisitas yang diyakini secara objektif oleh setiap entitas etnis diidentifikasi sebagai proses politik identitas. Hal tersebut sejalan dengan tesis Kartohadiekosomoe (2014) yang menyatakan bahwa secara genealogi desa-desa dibangun berdasarkan suatu dominasi etnik tertentu atau memiliki persamaan keturunan dan kekerabatan. Secara umum etnisitas direpresantasikan secara objektif melalui budaya atau kearifan lokal yang membangun sistem nilai suatu etnis sebagai entitas seperti pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat desa melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis kearifan lokal dan Pancasila.

Etnisitas sebagai subjektivitas memiliki resistensi yang sangat besar, sebagaimana dikemukakan Furnivall (2009) bahwa “nasionalisme akan berakhir dengan mempertentangkan satu komunitas etnis melawan komunitas etnis lainnya, hingga semakin memperparah keterpecah-belahan masyarakat. Terkecuali suatu formula bagi federasi pluralis bias yang diciptakan. Pluralis di Asia Tenggara rupanya telah ditakdirkan menghadapi anarki yang mengerikan. Tesis tersebut disampaikan *Furnivall* dengan memotret Indonesia sebagai Hindia Belanda dan berlanjut hingga pasca Indonesia merdeka. Hal ini

dipertegas Klinken (2007) yang mencontohkan bahwa “kekerasan komunal yang terjadi antara Etnis Dayak dan Madura di Sambas merupakan suatu bentuk konflik etnis, serta pengusiran etnis Bugis, Buton dan Makassar di Ambon tahun 2000-an sebagai bentuk konflik Etno-religi”. Benturan etnis sebagai subjektivitas juga bias dari aspek politik di Indonesia yang mana etnisitas dan politik kekerabatan (klan-klan politik) selalu bermuara dalam entitas etnis. Umpamanya, di Kota Kendari, struktur politik dan birokrasi merupakan suatu aliansi etnis yang mengorkestrasi jalannya pemerintahan dengan ciri khasnya yaitu mengakomodasi kepentingan etnis dari elit politik.



Gambar 4.2 Posisi etnisitas -subjektivitas dan objektivikasi

Sumber : Sofyan Sjaf (2014)

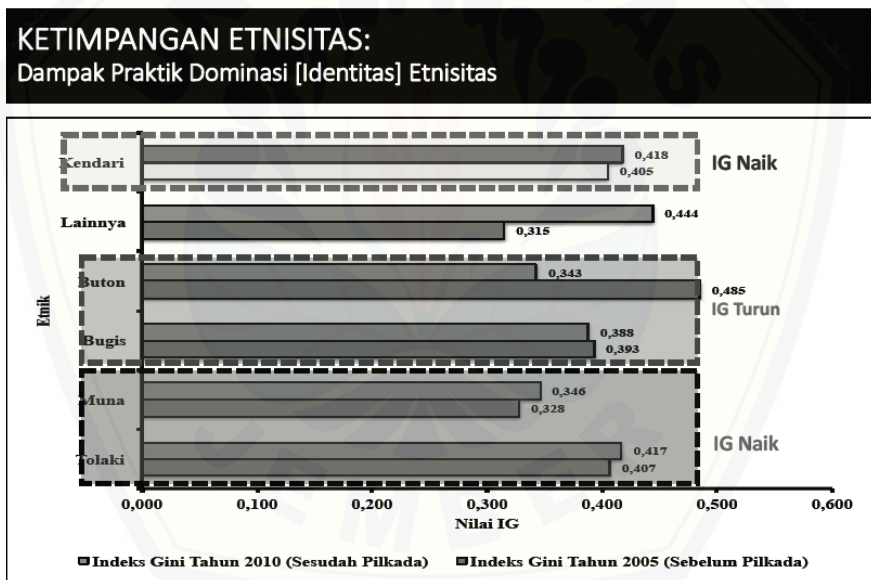
Fakta dan pandangan yang tidak lazim dipisahkan bahwa etnisitas merupakan bagian dan rangkaian dari objektivikasi dan subjektivikasi di masyarakat (Bourdieu dan Wacquant, 1992). Jika posisi subjektivikasi meningkat dalam ruang etnisitas, maka menimbulkan politik identitas, konflik identitas dan separatisme akibat subordinasi dan dominasi etnis. Namun, jika sudut objektivikasi yang diutamakan, maka menimbulkan penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal (Nusantaranomics), solidaritas etnis dan resiprositas. Makanya, amat penting memandang dan memosisikan kedua pendulum etnisitas di atas dengan menganalisis dampaknya terhadap pembangunan masyarakat dan aktor yang mereproduksi isu-isu etnis buat kepentingan politik.

Kendari memiliki arti penting dalam menggambarkan pembentukan identitas etnik dalam arena ekonomi politik lokal di era desentralisasi karenanya kota ini mendapatkan julukan kota dagang. Amandemen UUD

1945 (khususnya pasal 18 ayat 5) memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya yang ditopang struktur masyarakat majemuk (terdiri dari 28 etnik dan terdapat 4 etnik mayoritas, seperti: Tolaki, Muna, Buton, dan Bugis). Hal ini memberikan arti tersendiri tentang pentingnya memahami dan menemukan distingsi identitas etnik pada masyarakat majemuknya. Pemahaman yang tidak utuh akan menimbulkan dampak akibat pendekatan yang keliru dalam mengartikulasikan praktik-praktik yang berhubungan dengan identitas etnik dalam arena ekonomi politik lokal. Akibat kealpaan mempertimbangkan “variabel” etnik dalam otonomi daerah menyebabkan tersubordinasinya etnik minoritas (pendatang) terhadap etnik mayoritas (lokal) dalam praktik-praktik demokrasi liberal. Jika demikian halnya, maka pilihan demokrasi liberal justru menjauhkan tujuan negara ini berdiri, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Secara khusus, studi yang menempatkan perspektif “aktor-struktur” ini memberikan gambaran bahwa etnisitas memberikan kontribusi terhadap dominasi aktor bias etnik dalam arena ekonomi politik lokal. Meski aktor tidak bisa menghindari tekanan struktur (identitas etnik), tetapi aktor mampu mengkonstruksi kondisinya sesuai konteks kepentingannya. Konteks tersebut tercermin dari “bayang-bayang” identitas etnik yang tak dapat dilepaskan dari kota kondisi riil kota Kendari. Akan tetapi, aktor-aktor di dalamnya (beragam latar belakang etnik dan profesi) –lebih khusus aktor politisi dan birokrat– berhasil keluar dari tekanan struktural dan mengkonstruksi pengalaman yang dialami dan dirasakannya selama ini. Ini tergambar dari dominannya posisi aktor (dibandingkan massa) etnik dalam arena ekonomi politik lokal yang dicerminkan lewat dominasi etnik pada struktur politik maupun ekonomi di Kota Kendari. Di antaranya: posisi aktor bias etnik dalam struktur politik (baik partai politik maupun legislator), birokrasi, alokasi pengeluaran (belanja) APBD, relasi aktor bias etnik dengan kemiskinan etnik, dan pelaku usaha berbasis etnik yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kota Kendari.

Fenomena di atas, tercatat sebelum pilkada pertama digelar sebagai pintu masuk “kebangkitan [identitas] etnik” melalui pilihan demokrasi liberatif pada tahun 2005. Indeks Gini (IG) rasio masyarakat Kendari sebesar 0,405 yang dikategorikan sebagai pendapatan masyarakat yang timpang. Lima tahun kemudian pasca pilkada berlangsung, desentralisasi yang diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat Kendari, ternyata jauh dari harapan. Rupanya desentralisasi menyebabkan distribusi pendapatan semakin meningkat, meski tetap pada level agak timpang dengan IG Kota Kendari sebesar 0,418. Fakta ini menggambarkan bahwa pertarungan antar elit (kelompok) etnik mayoritas dalam arena ekonomi politik lokal mempengaruhi kenaikan dan penurunan IG pada setiap kelompok etnik.



Gambar 4.3 Indeks gini rasio di Kota Kendari sebelum dan sesudah Pilkada 2010

Sumber : Sofyan Sjaif, (2014)

Dari empat kelompok etnik mayoritas di Kendari, ternyata etnik Tolaki dan Muna memiliki gambaran peningkatan IG sebagai berikut: (a) pada tahun 2005 IG kelompok etnik Tolaki sebesar 0,407 meningkat menjadi 0,417 pada tahun 2010 atau naik pada level yang sama, yaitu agak timpang; dan

(b) kelompok etnik Muna pada tahun 2005, IG-nya sebesar 0,328 naik menjadi 0,346 atau naik pada level masih merata pada tahun 2010. Berbeda dengan kedua kelompok etnik sebelumnya, Bugis dan Buton merupakan kelompok etnik yang IG-nya menurun, yakni: (1) pada tahun 2005 IG kelompok etnik Bugis sebesar 0,393 turun menjadi 0,388 pada tahun 2010 atau mengalami penurunan pada level yang sama (agak timpang); dan (2) kelompok etnik Buton pada tahun 2005, IG sebesar 0,485 turun menjadi 0,343 pada tahun 2010 atau mengalami penurunan dari level agak timpang menjadi merata.

Kenyataan ini secara sosiologis menunjukkan bahwa “kebangkitan [identitas] etnik” di era desentralisasi di satu sisi, dan sifat konvergensi (memusat pada satu titik) pada sisi lain, menunjukkan bahwa elitisme aktor politisi dan birokrat terjadi dari kelompok etnik Tolaki dan Muna. Akibatnya kondisi sosio-ekonomi kelompok etnik ini semakin “memburuk”. Untuk itu, tidak mengherankan apabila *money politic* dalam praktik pilkada sangat terbuka di kedua kelompok etnisitas tersebut. Kondisi ini berkebalikan dengan kelompok etnik Bugis dan Buton, di mana sifat divergen (menyebar di berbagai titik) menunjukkan kesan “merakyatnya” para aktor politisi dan birokrat dari kedua etnik tersebut. Dampaknya adalah terjalannya “kohesivitas” antar aktor (elit) dengan massa (rakyat) yang berimbas pada kondisi sosio-ekonomi keduanya menuju ke arah yang membaik.

Fenomena di atas berlangsung akibat prinsip hierarki ganda di dalam arena ekonomi politik lokal, yaitu prinsip heteronom (ditentukan modal ekonomi) dan prinsip otonom (ditentukan modal simbolik). Kedua prinsip ini, menentukan terjadinya mobilisasi [identitas] etnik baik yang bersifat positif maupun negatif. Mobilisasi [identitas] etnik bersifat negatif, terjadi apabila aktor dengan modal ekonomi yang dimilikinya melakukan upaya mobilisasi [identitas] etnik. Sedangkan, mobilisasi [identitas] etnik bersifat positif, terjadi apabila aktor mendukung (menjaga) sepenuhnya modal simbolik yang telah melekat dalam diri massa. Atas realitas objektif-subjektif tersebut, kemudian terjadi pembentukan identitas etnik di Kota Kendari. Pembentukan identitas etnik di kota Kendari terjadi pada ruang yang dimaksudkan sebagai struktur pembentukan identitas etnik (*habitus*). Oleh karena

itu, habitus dalam arena ekonomi politik lokal dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) pembentukan identitas etnik skala besar, yaitu pembentukan identitas etnik yang mempertemukan sejarah kelompok etnik dengan pengalaman aktornya.

Tabel 4.1 Identifikasi praktik dalam arena ekonomi politik lokal di Kota Kendari

| Praktik | Prinsip Hierarki | | Mobilisasi [Identitas] Etnik | | Struktur Pembentukan Identitas Etnik | |
|------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | Otonom | Heteronom | Positif | Negatif | Skala Besar | Terbatas |
| 1. Kekuasaan Simbolis | Aktor memiliki modal simbolik dan budaya. | | | Afiliasi dan deafiliasi antar etnik | <ul style="list-style-type: none"> Aktor melakukan <i>orthodoxy</i> afiliasi etnik melalui sejarah etnisitas; Aktor mempertemukan sejarah etnik dan pengalaman aktor. | |
| 2. Kekuasaan Ekonomi | | Aktor memiliki kekuatan modal ekonomi dan berorientasi keuntungan. | <ul style="list-style-type: none"> Membangun <i>doxa</i> "Bugis-Buton" sebagai penguasa ekonomi perdagangan, sebagai kebanggaan simbolik massa; <i>Doxa</i> bagi etnik Muna dan Tolaki sebagai buruh dan pekerja. | <ul style="list-style-type: none"> Menarik dukungan simbolik melalui relasi patron-klien; Relasi transaksional antar pengusaha dengan politisi. | | Aktor dengan modal ekonomi yang dimilikinya memperkerjakan massa baik yang memiliki basis etnik sama maupun tidak untuk memperoleh dukungan simbolik. |
| 3. Kekuasaan Politik | Modal simbolik dan ekonomi digunakan aktor untuk melakukan relasi transaksional dengan massa. | | Aktor menggunakan modal simbolik dan ekonomi untuk menarik dukungan massa. | | Aktor melakukan pembentukan etnik skala besar dan terbatas untuk memenangkan pertarungan kekuasaan politik. | |

Sumber : Sofyan Sjaif (2014)

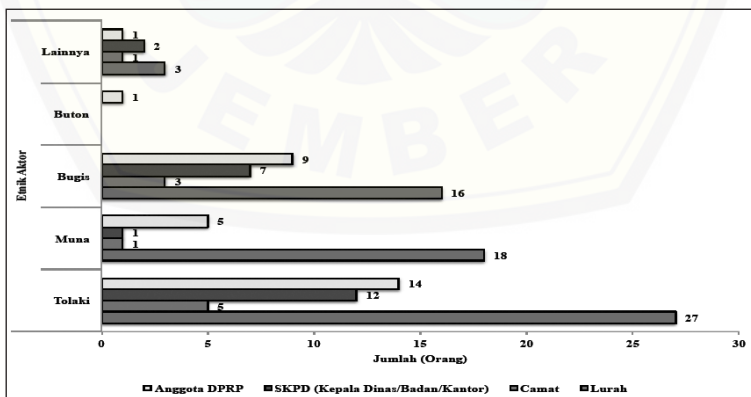
Struktur pembentukan identitas ini terjadi di inter dan antar kelompok etnik; dan (2) pembentukan identitas etnik terbatas, yaitu pembentukan identitas etnik berdasarkan pengalaman atau disposisi-disposisi yang terjadi di dalam diri aktor. Sebelum aktor memanfaatkan sentimen (emosional) massa berbasis etnik dan jejaring yang dimilikinya, maka aktor terlebih dahulu mengakumulasi modal ekonomi sesuai dengan kepentingannya. Kedua habitus di atas berpengaruh terhadap praktik-praktik dalam arena ekonomi politik lokal. Terdapat tiga praktik dalam arena ekonomi politik lokal, yaitu: (1) praktik kekuasaan simbolis; (2) praktik kekuasaan ekonomi; dan (3) praktik kekuasaan politik. Untuk praktik kekuasaan simbolis, umumnya aktor yang terlibat adalah aktor yang memiliki modal simbolik dan modal budaya dari setiap basis etnisitas. Dari kedua modal tersebut, maka aktor seolah-olah memiliki otoritas dan berorientasi menegakkan prinsip hierarki otonom, yaitu menjaga eksistensi etnisitasnya dalam arena ekonomi politik lokal. Sementara itu, relasi antar aktor dalam bentuk penyatuan (afiliasi) dan pemisahan (deafiliasi) yang tidak jarang melibatkan massa berbasis etnisitas.

Sebagai misal, aktor [kelompok] etnik Buton cenderung berafiliasi dengan aktor [kelompok] etnik Bugis, sedangkan aktor [kelompok] etnik Tolaki cenderung berafiliasi dengan aktor [kelompok] etnik Muna. Hal yang menarik dari praktik tersebut, ditemukannya dua kategori aktor. *Pertama*, aktor dalam (*in-aktors*), yaitu aktor yang lahir dan besar di Kendari atau Sulawesi Tenggara, serta mengalami berbagai peristiwa gesekan bahkan benturan antar etnik di arena ekonomi politik lokal. *Kedua*, aktor luar (*out-aktors*), yaitu aktor yang lahir di Kendari (Sulawesi Tenggara), tetapi besar di luar daerah ini. Hasil interaksinya dengan pengalaman di luar Kendari (Sulawesi Tenggara) menyebabkan aktor tersebut memiliki persepsi sendiri tentang distingsi identitas etnik. Kedua kategori aktor tersebut menentukan posisi aktor dalam formasi identitas etnik yang tidak lain adalah formasi kekuasaan. Kemudian untuk praktik kekuasaan ekonomi, umumnya aktor yang terlibat memiliki kekuatan modal ekonomi. Berbeda dengan sebelumnya yaitu terbagi berdasarkan etnisitasnya. Aktor kelompok etnik Bugis dan Buton adalah aktor dominan yang menempati posisi sebagai pemilik usaha ekonomi.

Sebaliknya orang Muna dan Tolaki merupakan aktor terdominasi yang menempati posisi sebagai penyedia jasa tenaga kerja. Dengan demikian, relasi antar etnik (aktor) cenderung relasi dominasi dan terdominasi. Sebagai misal, kelompok etnik Bugis dan Buton merupakan entitas sosial yang mendominasi sektor ekonomi perdagangan. Sedangkan kelompok etnik Muna dan Tolaki yang cenderung di-doxa-kan sebagai kelompok etnik yang terdominasi di sektor ini karena sebagai pekerja atau buruh. Selanjutnya dalam praktik kekuasaan politik, berbeda dengan dua praktik sebelumnya. Praktik ini menitikberatkan modal simbolik dan modal ekonomi yang dimiliki aktor sebagai kekuatan praktik aktor. Sedangkan relasi antar aktor (kelompok etnik) lebih bersifat transaksional yang memberikan keuntungan bagi aktor dengan pihak yang diajak melakukan transaksi. Hal tersebut disebabkan praktik ini diorientasikan aktor untuk merebut kekuasaan politik. Agar orientasi tersebut tercapai, aktor menggunakan sepenuhnya modal simbolik dan ekonomi untuk menarik dukungan massa pada saat momentum politik (seperti: pilkada, suksesi parpol, dan lain sebagainya). Jika aktor berhasil memosisikan diri dalam kekuasaan politik, maka aktor perlahan-lahan akan mudah mempraktikkan *rent-seeking*

(khususnya proyek-proyek pemerintah) sesuai dengan kekuasaan politik yang dimilikinya. Di sini, aktor berorientasi mengakumulasi modal ekonomi agar memiliki pengaruh luas dan “memelihara” dukungan massa kepadanya.

Hal menarik lainnya dari artikulasi praktik ini adalah terjadinya pemetaan relasi profesi-etnisitas aktor. Relasi profesi-etnisitas aktornya adalah: (1) aktor pengusaha didominasi etnik Bugis dan Buton, serta beroperasi dalam praktik kekuasaan ekonomi; (2) aktor birokrat didominasi etnik Tolaki yang beroperasi dalam praktik kekuasaan politik; dan (3) aktor politik, NGO/LSM, dan kampus hampir ditemukan di setiap basis etnik. Meski demikian, aktor politik lebih berorientasi kekuasaan politik, sedangkan aktor NGO/LSM dan kampus lebih berorientasi pada praktik kekuasaan simbolis. Terpetaknya relasi profesi-etnisitas aktor di atas menunjukkan adanya pola relasi transaksi antar aktor. Apabila aktor merasa memiliki kuasa atas praktik yang dilakukannya maka ia membutuhkan strategi mempertahankan dan melanggengkan kuasa praktik-praktiknya di arena ekonomi politik lokal. Namun terdapat aktor yang memiliki keinginan untuk memperluas kekuasaan ke praktik lainnya. Jika hal ini terjadi, maka aktor tersebut melakukan transaksi agar memiliki kuasa terhadap praktiknya. Akibat pola ini dilakukan setiap aktor dengan distingsi etnisitas dan kepentingan yang sama, akibatnya terjadi pertarungan antar aktor untuk memperebutkan kuasa.



Gambar 4.4 Posisi atau kedudukan pejabat berdasarkan etnis di pemerintahan Kota Kendari

Sumber: Sofyan Sjaf (2014)

Ruang pertarungan di arena ekonomi politik lokal; (1) ruang pertarungan kekuasaan ekonomi, yaitu ruang pertarungan aktor yang terjadi antara praktik kultur kekuasaan etnik dengan praktik pengorganisasian ekonomi identitas; (2) ruang pertarungan kekuasaan politik, yaitu ruang pertarungan aktor yang terjadi di antara praktik kultur kekuasaan etnik dengan praktik politik identitas; dan (3) ruang pertarungan kekuasaan ekonomi-politik, yaitu ruang pertarungan aktor yang terjadi di antara praktik pengorganisasian ekonomi identitas dengan praktik politik identitas. Di ruang ini, terjadi transaksi antar politisi atau birokrat dengan pengusaha. Kemudian agar aktor memenangkan ruang pertarungan tersebut, maka diperlukan strategi yang dapat dilakukan aktor. Adapun *strategi* yang dimaksud dapat dilacak dari modus ruang pertarungan aktor yang berlangsung di arena ekonomi politik lokal.

Dengan demikian terdapat empat strategi yang diproduksi dari relasi antar aktor, yaitu: (1) strategi yang diproduksi dari relasi aktor kampus–NGO/LSM, seperti: strategi reproduksi simbolik, investasi simbolik, reproduksi wacana, membangun aliansi; dan edukatif; (2) strategi yang diproduksi dari relasi aktor kampus–politisi/birokrat–pengusaha, seperti: strategi reproduksi simbolik, investasi simbolik, invasi ekonomi, dukungan wacana, penyusunan simbolik, dan perlawanan; (3) strategi yang diproduksi dari relasi aktor NGO/LSM–pengusaha–politisi/birokrat, seperti: strategi reproduksi simbolik, invasi kekuasaan, invasi ekonomi, dukungan simbolik, reproduksi wacana, dan perlawanan; dan (4) strategi yang diproduksi dari relasi aktor politisi/birokrat–pengusaha, seperti: strategi invasi kekuasaan, invasi ekonomi, dan dukungan simbolik. Berangkat dari uraian di atas, maka formasi identitas etnik merupakan formasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi transaksional antar aktor dengan massa. Kondisi objektif identitas etnik yang melekat dalam diri aktor dan kelompok etnik di(re)produksi sebagai modal simbolik yang memberikan keuntungan pada aktor yang bertarung dalam arena tersebut. Tampilnya formasi tersebut, semakin mempertegas bahwa muara dari pertarungan antar aktor dalam arena ekonomi politik lokal adalah merebut atau mempertahankan kekuasaan politik. Konteks ini sekaligus memberikan jawaban bahwa banyaknya aktor yang tertarik masuk ke dalam kekuasaan politik disebabkan kekuasaan ini merupakan bentuk legitimasi aktor yang tertinggi dibandingkan dengan kekuasaan ekonomi

maupun simbolis. Formasi kekuasaan di atas, membentuk dua pola yaitu: *pertama*, formasi dominasi (*domination formation*), yaitu formasi kekuasaan politik identitas yang dibangun sebagian besar aktor berdasarkan struktur pembentukan identitas etnik skala besar. Formasi ini menekankan bahwa aktor me(re)produksi distingsi identitas etnik dengan kekuatan modal simbolik dan ekonomi yang dimilikinya. Supaya kekuasaan politik aktor terus bertahan, maka aktor menggunakan strategi: reproduksi simbolik, investasi simbolik, invasi ekonomi, dukungan wacana, invasi kekuasaan, dan dukungan simbolik.

Kedua, formasi terdominasi (*dominated formation*), yaitu formasi kekuasaan politik identitas yang dibangun aktor berdasarkan struktur pembentukan identitas etnik skala terbatas. Pada formasi ini, aktor tidak menempatkan distingsi identitas etnik sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan politik, tetapi para aktor me(re)produksi wacana lain, seperti: ketimpangan, diskriminatif, ketidakadilan, dan lain-lain dengan modal budaya dan sosial yang mereka miliki. Strategi yang digunakan adalah penyusupan simbolik, perlawanan, reproduksi wacana, aliansi strategis, dan edukatif. Idealnya dua pola formasi kekuasaan tersebut membentuk “wajah desentralisasi” di Indonesia. Apabila formasi dominasi lebih eksis, maka akan terjadinya kegagalan transformasi yang tidak diharapkan dari cita-cita desentralisasi. Sebagaimana ditunjukkan fenomena golongan muda yang terbelah dan ancaman masa depan pedesaan, serta mandulnya (re)produksi kepemimpinan nasional.

Untuk itu, seyogianya pemimpin di negeri ini kembali memikirkan untuk mengembalikan sistem demokrasi Pancasila (bukan demokrasi liberatif) sebagai pilihan “tunggal” dalam berbangsa dan bernegara. Dampak etnisitas terhadap suatu agenda pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh peran atau kontruksi aktor, dominasi aktor terhadap posisi subjektivikasi akan berdampak negatif karena lebih menitikberatkan kepada politik identitas etnis. Sedangkan jika dominasi aktor lebih menekankan pada sudut objektivikasi tentu akan berpengaruh positif terhadap pembangunan dengan pendekatan *Etnodevelopment* yaitu suatu paradigma pembangunan berbasis komunitas etnis melalui indignisasi pemikiran dan pembangunan etnis yang mengarustamakan tradisi, pengetahuan lokal, kearifan lokal dan kebutuhan komunitas etnis itu sendiri (Nusantaranomics).



PRAKISIS SISTEM EKONOMI PANCASILA ALA “WIRAUSAHA ETNIK BUGIS” DI KALIMANTAN TIMUR: PENGALAMAN PERIKANAN UDANG DI DELTA MAHAKAM

P. Setia Lenggono

Indonesia bukanlah suatu Negara yang memiliki pendapatan per kapita (*Income per Capita*) tertinggi di dunia namun menjadi salah satu (*Top Level*) Negara dermawan di dunia (CAF World Giving Indeks, 2021).

5.1 Pembentukan Ekonomi Lokal

Terbentuknya ekonomi lokal dalam masyarakat Bugis perantauan di Delta Mahakam yang ditandai oleh kemunculan golongan sosial pengusaha perikanan lokal (pongawa) yang dirumuskan dalam dua pokok alasan. *Pertama*, mengenai asal-usul sosialnya, yang disimpulkan bahwa golongan pengusaha perikanan dalam masyarakat Bugis perantauan di Delta Mahakam umumnya berasal dari kelompok non elit/kelas bawah/masyarakat ekonomi marginal, terutama dari kalangan orang kebanyakan (*to-maradeka*) dalam struktur feodal Bugis. Sebagian besar mereka sebelumnya adalah petani kelapa (perkebunan)-nelayan tradisional yang dalam perjalanannya berhasil tampil sebagai elit ekonomi lokal dengan basis usaha perdagangan/jasa pengumpul

produk perikanan hingga eksportir. Karena itu suatu kesimpulan yang lebih umum atau penteorian tentang asal-usul sosial golongan pengusaha lokal dirumuskan secara berbeda dengan teori yang telah dibangun sebelumnya. Pengelompokan tersebut:

1. Golongan pengusaha kapitalis lokal terutama berasal dari golongan non elit atau masyarakat kelas bawah dalam struktur sosial-ekonomi tradisional yang terdapat dalam komunitas lokal bersangkutan.
2. Terkait dengan mekanisme kemunculannya, disimpulkan bahwa golongan pengusaha perikanan (pongawa) dalam masyarakat Bugis migran di Delta Mahakam, merupakan hasil beroperasinya kebijakan pembangunan yang membuka “ruang” bagi terciptanya “berkah terselubung”, akibat proses pembiaran negara dalam mengelola pembangunan (hutan negara).

Meskipun pemerintah memberikan kompensasi pembukaan area hutan mangrove untuk kegiatan pertambakan, serta berbagai bantuan dalam pengalihan kegiatan usaha perikanan trawl menjadi *non-trawl*, pasca pelarangan trawl secara total pada 1983, namun kenyataannya pemerintah tidak pernah melakukan rekayasa sosial dalam bentuk (teknis dan permodalan), khususnya terhadap golongan pengusaha (pongawa) yang kemudian berhasil tampil sebagai elit ekonomi lokal. Akibatnya yang terjadi adalah kontraksi kebijakan yang ditandai kesan bahwa pemerintah melakukan “pembiaran” atas penguasaan tanah-tanah negara oleh para petambak hingga akumulasi penguasaan alat produksi oleh sejumlah pongawa. Proses penguasaan alat produksi tersebut –meskipun “ilegal” menurut perspektif otoritas berwenang– namun memberikan hasil nyata dalam proses pembentukan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Mengingat dalam masyarakat Bugis perantauan di Delta Mahakam sendiri telah mengalami prakondisi kapitalis.

Pertama, unsur pembentukan modal uang oleh golongan patron (pongawa perintis, pengikut dan penerus) melalui 300 usaha perikanan khususnya budidaya udang yang bersifat komersial.

Kedua, unsur pembentukan golongan klien yang secara potensial muncul dalam hubungan produksi patronase pada kegiatan perikanan tangkap dan kemudian diadopsi dalam kegiatan pertambakan. Hal ini ditandai munculnya

golongan penjaga empang dan petambak terikat. Pada awalnya, pembentukan golongan klien berasal dari jalur keluarga, namun seiring dengan semakin meluasnya hamparan tambak yang dimiliki seorang ponggawa, mendorong perekrutan tenaga “buruh upahan” dari luar jalur keluarga.

Ketiga, secara nyata unsur pembentukan modal uang dan unsur pembentukan golongan buruh upahan muncul dari sektor industri perikanan yang mulai beroperasi sejak 1974 hingga saat ini. Berdasarkan temuan empiris tersebut, kesimpulan yang lebih umum tentang mekanisme sosial kemunculan golongan pengusaha lokal dapat dirumuskan berikut. “Kemunculan golongan pengusaha kapitalis lokal yang menggerakkan pembentukan ekonomi lokal merupakan hasil dari beroperasinya, *pertama* terpenuhinya prakondisi produksi kapitalis berupa pembentukan modal uang pada golongan patron (elit ekonomi lokal) dan pembentukan golongan klien (buruh upahan) dalam komunitas lokal yang bersangkutan.

Kedua, adanya “berkah terselubung” atas pembiaran negara dalam proses mengelola pembangunan, yang berhasil digunakan elit ekonomi lokal untuk mengambil manfaat dari keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai.

Kelangsungan sosial golongan pengusaha lokal mencakup dua dimensi sekaligus. *Pertama*, berdasarkan dimensi status/peranan sosial golongan pengusaha lokal di Delta Mahakam, yang dapat disimpulkan bahwa golongan pengusaha lokal tersebut hadir dan berkembang dalam konteks dan sebagai pendukung ekonomi lokal, dengan ciri-ciri formasi sosial kapitalis yang khas. Dalam konteks tersebut, golongan pengusaha perikanan lokal mendapatkan statusnya sebagai kelas menengah, suatu kelas “menengah baru” dalam struktur sosial Bugis yang aslinya hanya mengenal kelas Anakarung dan To-Maradeka.

Para pengusaha lokal mampu bangkit dan berkembang (*survive*) tanpa campur tangan negara, mereka bahkan tumbuh secara progresif melakukan *take over* atas perusahaan asing (PMA) dan ikut menopang kertepurukan ekonomi bangsa ketika tertimpa krisis ekonomi 1997/1998. Mereka tidak hanya menyumbang terhadap perkembangan pembangunan ekonomi lokal, namun juga menjadi penggerak transformasi sosial-ekonomi masyarakat Delta

Mahakam dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berdasarkan hal tersebut, status/peranan golongan pengusaha lokal dapat dirumuskan berikut ini. “Golongan pengusaha kapitalis lokal adalah kelas menengah mandiri yang mampu berperan sebagai perintis dan penggerak transformasi sosial dalam komunitas lokal bersangkutan yang kelangsungannya tidak bergantung pada pemerintah secara mutlak”.

Kedua, berkenaan dengan status perkembangan sosialnya dapat disimpulkan bahwa golongan pengusaha perikanan lokal dalam masyarakat Bugis migran di Delta Mahakam saat ini sedang mengalami kebangkitan. Analisis aras mikro menunjukkan bahwa gejala kebangkitan tersebut merupakan gejala “konsolidasi ekonomi lokal” yang berpangkal pada dua hal.

Pertama, terjadinya reproduksi kultural yang berhasil dikonstruksi oleh para ponggawa dengan menggariskan nilai dasar “bekerja adalah ibadah”, sehingga apapun hasilnya adalah pahala. Dengan keyakinan seperti itu, seorang ponggawa terbesar di Delta Mahakam misalnya menempatkan dirinya dalam posisi tidak pernah merasa rugi dengan apa yang telah ia kerjakan meskipun hasilnya nihil, baginya hasil dari pekerjaan di dunia ini hanyalah bonus dari pahala di akhirat. Konsepsi inilah yang kemudian melahirkan karakter pekerja keras yang pantang menyerah sekaligus ikhlas menerima apapun hasil dari jerih payahnya. Dari sinilah lahir niatan mengembangkan usaha, “semakin banyak mulut yang mampu diberinya makan semakin baik bagi kualitas kehidupan rohaninya”. Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan menginvestasikan kembali hampir semua profit yang mampu diraupnya ke dalam kegiatan usaha di sektor riil, sehingga mampu memberikan pekerjaan pada banyak orang.

Kedua, adalah terbangunnya “medan interaksi” yang menjadi wadah bagi terjadinya transformasi, legitimasi dan habituaisasi, sehingga menghasilkan wacana rasionalitas spiritual baru. Kunci sukses, meskipun dipercaya merupakan kehendak Tuhan, namun kehendak Tuhan dapat dicapai melalui upaya memperbaiki we “re” (nasib) tidak baik/tidak menguntungkan, dengan bekerja keras, sehingga dapat membangun simbol-simbol “peruntukan fitrah”. Di antaranya, melalui pembangunan masjid yang dimengerti sebagai “rumah Allah”, menunaikan ibadah haji untuk memenuhi panggilan suci sebagai “tamuh Allah”, serta berkorban dan menyantuni fakir-miskin yang

dipahami sebagai media untuk mensucikan diri dari dosa. Secara keseluruhan, membangun simbol-simbol peruntukan fitrah juga berarti mendapatkan legitimasi sebagai “orang yang dianggap saleh”, sehingga secara sosio-religiositas layak dikategorikan sebagai pemimpin. Akibatnya, transformasi kehidupan keagamaan yang lebih berporos pada agen (“orang yang dianggap saleh”) menjadi penting dalam “medan interaksi” yang dikembangkan masyarakat setempat. Kecendrungan tersebut kemudian menjadi penanda bahwa menjadi orang kaya itu penting, karena menjadi tolok ukur kehormatan sosial yang dapat memenuhi kepuasan duniawi, sedangkan bertingkah laku yang mengarah pada simbol-simbol agama secara sosial dianggap “taat beragama”, karena dapat memenuhi kepuasan *ukhrawi*.

Pada gilirannya transformasi kehidupan keagamaan yang berporos pada agen, semakin memperkuat pola hubungan vertikal dalam budaya patronase pada masyarakat Bugis perantauan di Delta Mahakam. 302 Analisis aras meso menunjukkan bahwa kebangkitan golongan pengusaha perikanan (pongawa) di Delta Mahakam, merupakan bagian dari keberhasilan golongan tersebut memainkan perannya, “meleburkan diri” dalam dinamika formasi sosial kapitalis yang begitu mendominasi. Pertama, keberhasilan para pongawa dalam memanfaatkan momentum “keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai” atas penguasaan tanah-tanah negara, hingga terjadinya akumulasi alat produksi pada sejumlah pongawa. Kedua, terjadinya konsentrasi *raw material* hanya pada satu orang pongawa besar, sementara pongawa yang lebih kecil hanya menjadi kepanjangan tangan dan penopang pongawa yang berada di atasnya. Proses selektif yang terjadi kemungkinan akan menjadi salah satu sebab, tidak munculnya lebih dari satu puncak hierarki dalam rantai produksi pertambakan di Delta Mahakam. Hal ini ditandai dengan kolapsnya dua perusahaan industri perikanan pioner (Nasional-Internasional) di Delta Mahakam, tergantikan oleh keberadaan perusahaan industri perikanan lokal.

Ketiga, keberhasilan golongan pengusaha lokal melakukan perekrutan tenaga terampil yang akan menggerakkan industri perikanan yang telah terbangun dan terjadinya alih teknologi dan adopsi manajemen profesional, berkat keberhailan kerja sama dengan pihak asing dalam mengembangkan

industri di ranah lokal. Analisis aras makro menunjukkan bahwa terintegrasinya sistem perekonomian lokal ke dalam sistem perekonomian nasional dan dunia dengan formasi sosial yang kapitalistik tidak dengan sendirinya menyebabkan gejala marginalisasi kapitalis lokal, seperti temuan Kahn, Castle dan Sitorus, sebaliknya menunjukkan gejala kebangkitan ekonomi lokal.

Gejala kebangkitan ekonomi lokal tersebut merupakan hasil dari beroperasinya keunggulan komparatif dan kompetitif produk yang diproduksi kapitalis lokal.

Pertama, adanya kecenderungan peningkatan permintaan produk udang windu di pasaran regional-global yang tidak mampu diproduksi oleh produsen lain yang telah beralih hanya memproduksi udang vaname secara massal. Kondisi ini juga tidak terlepas dari gaya konsumsi masyarakat negara maju yang cenderung lebih menyukai produk udang organik yang sebagian besar produksinya disumbang oleh usaha pertambakan tradisional seperti di Delta Mahakam. Selain itu tidak banyak produsen di negara lain yang bisa memproduksi udang windu yang hanya hidup di daerah tropis.

Kedua, para kapitalis lokal memiliki keunggulan kompetitif atas kebutuhan pasar yang sedikit demi sedikit dikumpulkan dari mitral lokal, akses khusus pada kelembagaan lokal (patronase) dan keluwesan berproduksi yang merupakan hasil negosiasi dalam jaringan yang tidak membutuhkan biaya tinggi.

Ketiga, kuatnya posisi tawar pengusaha lokal atas produk spesifik, seperti udang windu telah menempatkan mereka “tidak tunduk” terhadap tekanan kapitalis pusat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan kesimpulan berikut. “Keberlangsungan sosial golongan pengusaha kapitalis lokal yang mengalami kebangkitan merupakan keberhasilan reproduksi kultural yang menggariskan nilai tertentu, terbangunnya “medan interaksi” yang menghasilkan wacana rasionalitas spiritual baru, keberhasilan memanfaatkan momentum “keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai”, terjadinya konsentrasi *raw material*, keberhasilan perekrutan tenaga terampil, alih teknologi dan adopsi manajemen profesional, peningkatan permintaan produk spesifik di pasaran regional-global, keunggulan kompetitif produksi dengan biaya murah dan kuatnya posisi tawar pengusaha lokal di pasar global”.

5.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Lokal Terhadap Perubahan *Landscape* Ekologi

Pembentukan ekonomi lokal di kawasan Delta Mahakam yang digerakkan oleh kegiatan usaha pertambakan telah memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perubahan lanskap ekologi lokal. Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa momentum penting berikut ini; *pertama*, proses kapitalisasi dalam kegiatan pertambakan telah memicu terjadinya arus migrasi dari etnik Bugis, Makassar, Jawa dan etnik lainnya ke desa-desa yang berada di pulau-pulau dalam Kawasan Delta Mahakam, dipekerjakan oleh para petambak ataupun ponggawa untuk menjaga empang-empang yang yang tidak lagi bisa mereka kelola sendiri karena luasnya hamparan tambak yang mereka miliki. Selain membuka kesempatan kerja bagi buruh tambak, untuk membangun tambak-tambak baru ataupun memperbaiki konstruksi tambak secara tradisional. Pemusatan penguasaan area pertambakan, selain menciptakan jurang kesenjangan di antara para penjaga empang-petambak-ponggawa, juga mendorong dilakukannya ekspansi perluasan area tambak dengan cara meminjamkan modal usaha pada patronnya masing-masing untuk membuka hutan mangrove yang mereka kuasai.

Kedua, rendahnya produktivas tambak-tambak di kawasan Delta Mahakam, telah memaksa petambak untuk mencoba mengembangkan strategi dengan membangun hamparan tambak yang lebih luas, dengan asumsi akan dapat mempermudah pengelolaan dan meningkatkan produksi. Dalam kenyataannya produksi tambak mereka tetap saja tidak meningkat, praktis mereka hanya mengandalkan hasil panen dari udang bintik yang terperangkap masuk ke dalam tambak-tambak mereka. Kondisi ini mendorong sebagian petambak untuk kembali beralih profesi sebagai nelayan, serta mereka yang memiliki cukup modal dan tidak terikat utang pada para ponggawa untuk melakukan ekspansi di bidang usaha lain seperti kegiatan perkebunan kelapa sawit dan perdagangan atau mencoba peruntungan di dunia politik. Masyarakat lokal selanjutnya cenderung menjadi lebih apatis, individualis dan materialistik, sehingga menguatkan motivasi oknum petambak/ponggawa

untuk melakukan “spekulasi” dalam 304 pengembangan area tambak dengan harapan mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan oleh perusahaan migas jika terjadi pencemaran atau eksplorasi.

Ketiga, tekanan ekologis yang begitu hebat telah menyebabkan kawasan yang dulunya memiliki tegakan hutan mangrove yang sangat lebat dan luas ini, menjadi terdegradasi dengan cepat. Tingginya angka deforestasi mangrove berimplikasi pada permasalahan fisik, ekologi dan lingkungan, seperti kerusakan tekstur, dan struktur tanah, erosi, abrasi, sedimentasi, dan pencemaran air serta penurunan keanekaragaman hayati.

Degradasi ekosistem mangrove yang terjadi, selanjutnya membawa dampak atas terjadinya penurunan produktivitas tambak, munculnya berbagai wabah penyakit yang menyerang udang, semakin sulitnya bibit udang alam diperoleh, terjadinya abrasi pantai dan sedimentasi yang semakin meluas, serta hilangnya sumber-sumber mata air bersih. Akumulasi keadaan di atas di satu sisi telah menyebabkan perusahaan-perusahaan eksportir kesulitan memperoleh pasokan bahan baku (udang segar), sehingga terjadi pelumpuhan produksi, hingga memaksa mereka untuk “meninggalkan” kawasan Delta Mahakam karena kolaps, sehingga membuka peluang terjadinya *take over* atas perusahaan-perusahaan tersebut oleh ponggawa yang sebelumnya menjadi klien mereka. Sementara di sisi yang lain, keadaan tersebut juga berimbas pada kualitas dan kuantitas produksi yang cenderung menurun, sehingga menyebabkan banyak area pertambakan terlantar, karena tidak dikelola secara baik dan ditinggalkan pemiliknya.

5.3 Proses Reproduksi Ekonomi Lokal

Proses reproduksi pembentukan ekonomi lokal, yang terjadi secara eksternal tidak dapat dipisahkan dari proses akumulasi penguasaan alat produksi (dalam hal ini hutan mangrove yang dikonversi menjadi area pertambakan pribadi). Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dari; *pertama*, terjadinya kontraksi kebijakan pasca pelarangan *trawl* pada 1983 hingga pengabaian negara atas tanah-tanah negara yang berada di bawah otoritasnya. Akibatnya terjadi ketidakpastian regulasi pertanahan yang memungkinkan seorang penggarap memiliki belasan bahkan puluhan hektare lahan hutan

negara, kemungkinan tersebut menemukan momentumnya, ketika regulasi pertanahan yang sampai pada aparat pemerintah di aras lokal mengalami transformasi subjektif, sehingga ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan persepsi para pihak yang terbungkus kepentingan pragmatis. Pemahaman seperti itu terus direproduksi secara berulang, sepanjang dianggap “aman dan menguntungkan” mereka yang bertransaksi, sebagai bentuk pensiasatan ketidakpastian penyelenggaraan hukum atas tanah-tanah negara yang sangat potensial.

Kedua, terjalannya koalisi kepentingan antara aparat pemerintahan di aras lokal dengan para ponggawa yang memiliki pengaruh sosial-ekonomi kuat dalam penguasaan tanah-tanah negara, dengan dukungan kapital dari perusahaan eksportir perikanan. Peristiwa pelepasan tanah-tanah negara secara massal oleh kepala desa dalam kurun waktu 1991–1999 ini, telah menyebabkan terjadinya akumulasi penguasaan tanah-tanah negara pada pihak-pihak tertentu yang memiliki modal dan pengaruh kuat (khususnya pada para ponggawa).

Kebijakan lokal tersebut, muncul seiring dengan semakin besarnya kebutuhan lokasi-lokasi baru bagi perluasan tambak, sehingga memaksa otoritas lokal mensiasatinya dengan membuat “regulasi instan” atas penguasaan area hutan mangrove yang saat itu masih belum memiliki nilai intrinsik. Salah satunya dengan memberikan “konsesi” penguasaan sejumlah pulau dalam kawasan Delta Mahakam pada pihak-pihak tertentu dengan sejumlah kompensasi. Para pemilik “konsesi”, selanjutnya memiliki hak prerogatif dalam mengatur dan mengendalikan pulau/kawasan tertentu, bahkan memiliki otoritas dalam pelepasan hak penguasaan “lokasi” untuk area pertambakan pada orang lain. Kemampuan penetrasi kapital mereka, bahkan mampu mengakuisisi lokasi-lokasi baru di luar “konsesinya”, sehingga beberapa di antaranya menguasai hamparan tambak hingga ribuan hektare. Sementara proses reproduksi pembentukan ekonomi lokal yang terjadi secara internal, seperti halnya berlangsung tanpa disadari para pelakunya. Hal ini diketahui bahwa hampir semua pengusaha lokal (ponggawa) yang berhasil di Delta Mahakam memulai kehidupannya dari kegiatan usaha pertambakan.

Kehidupan menjadi petambak bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, kegiatan tersebut merupakan sebuah “ritual” yang menuntut totalitas diri petambak (tidak hanya secara fisik namun juga batin) untuk bisa menyatu dengan “roh semesta” (tambak-tambak) yang akan dikelolanya. Ada dimensi spiritual yang ikut menggerakkan kegiatan usaha pertambakan udang, dalam perspektif masyarakat lokal “kegiatan usaha pertambakan udang berbeda dengan kegiatan usaha lain seperti perkebunan kelapa sawit, di mana seorang pengusaha bermodal besar dari luar daerah/asing, dapat dengan mudah berhasil mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawitnya tanpa keterlibatan langsung dari sang pemodal. Di dalam kegiatan budidaya tambak di kawasan Delta Mahakam, hampir semua petambak yang kemudian kedudukannya berkembang menjadi ponggawa hingga eksportir yang berhasil, adalah mereka yang membangun tambak-tambaknya dari nol. Tidak ada satu pun dari mereka berangkat dari latar belakang pengusaha sukses yang memiliki modal besar. Mereka semua “merangkak” dari bawah, hanya mereka yang sabar, tekun dan mampu mendisiplinkan diri untuk secara total bekerja dan mendedikasikan dirinya dalam mengelola budidaya tambak udang miliknya yang akan berhasil menjadi “pemenang” dalam persaingan dan ketidakpastian produksi. 306 Kondisi inilah yang kemudian, menuntut setiap petambak untuk selalu waspada dan mendisiplinkan diri dalam mengelola tambaknya. Mereka harus “pandai membaca” tanda-tanda alam, jika ingin produksi tambaknya berhasil, dengan mendisiplinkan diri untuk selalu waspada dan sigap terhadap perubahan lingkungan di sekelilingnya.

Proses pendisiplinan diri tersebut, pada gilirannya mampu menyeret mereka yang telah “terformat”, untuk melakukan pendisiplinan diri dalam banyak hal di luar kegiatan pertambakan. Banyak di antara petambak yang kini telah berhasil menjadi ponggawa, bahkan eksportir yang berhasil, tampaknya telah dibentuk oleh keadaan tersebut, oleh ritual pertambakan yang menuntut pendisiplinan diri, disiplin pada waktu dan sigap terhadap perubahan. Hal ini tentu saja akan menjadi modal penting bagi yang bersangkutan, dalam menjalankan kegiatan bisnis perikanan yang sangat kompetitif dan penuh ketidakpastian. Proses reproduksi inilah yang menjadi struktur dasar dari

pembentukan ekonomi lokal di Delta Mahakam, tidak hanya berdaya guna dalam mengoperasionalkan kegiatan bisnis di sektor perikanan semata, namun juga di sektor ekonomi lainnya.

5.4 Pertumbuhan Ekonomi Lokal dalam Kelangkaan Sumberdaya Alam

Kelangkaan sumberdaya alam dan risiko dari kegiatan pertambangan yang dibangun di atas tanah-tanah negara telah memaksa para ponggawa untuk bersikap protektif terhadap segala kemungkinan yang dapat “mengganggu” kepentingan usaha yang membutuhkan biaya operasional sangat besar tersebut. Salah satu pilihan yang dianggap strategis adalah dengan melakukan koalisi dengan kekuasaan yang dianggap mampu memberikan jaminan bagi keberlanjutan kegiatan usahanya atau dengan membangun citra sebagai pengusaha yang “merakyat” dengan banyak pengikut, sehingga diperoleh “proteksi” dari sistem keamanan sosial yang terbangun. Jika tidak mereka harus menyiapkan diri untuk melakukan ekstensifikasi usaha di luar kegiatan pertambangan yang penuh dengan risiko. Pilihan-pilihan tersebut tampaknya disadari sepenuhnya oleh para aktor, sebagai konsekuensi logis atas operasi bisnis yang mereka kembangkan. Selain melakukan ekspansi kegiatan usaha di luar sektor perikanan, mengembangkan usaha pertambangan di luar kawasan Delta Mahakam juga menjadi pilihan *strategis*, selain terlibat dalam dunia politik praktis. Menariknya intensifikasi pertambangan tidak menjadi pilihan utama dalam pengembangan usaha pertambangan di Delta Mahakam yang telah mengalami kelangkaan sumberdaya alam, kondisi ini tidak terlepas dari pengalaman yang dialami beberapa ponggawa yang gagal melakukan intensifikasi pertambangan yang berbiaya mahal. Meskipun demikian, tidak sedikit di antara para ponggawa yang tetap fokus menggeluti kegiatan bisnis perikanan, dengan memantapkan citranya sebagai Ketua Organisasi yang terkait dengan kegiatan usahanya, seperti yang dilakukan ponggawa terbesar di Delta Mahakam. Tidak sedikit di antara mereka yang ikut bermanuver dalam masalah politik praktis, selain ingin menunjukkan eksistensi politiknya

juga untuk mendapatkan sokongan dan proteksi dari penguasa yang berhasil diusung, sehingga memberikan rasa aman bagi keberlangsungan usahanya, di tengah sentimen kedaerahan/kesukuan yang begitu memanas dewasa ini.

Mungkin Pelras benar, ketika menyatakan bahwa perantau Bugis berorientasi perdagangan cenderung memiliki implikasi politik dibandingkan perantauan berorientasi tanaman keras yang tidak memiliki implikasi politik. Namun peneliti melihat bahwa para ponggawa pertambakan yang mampu membangun kekuatan sosio-ekonominya secara mapan, ternyata juga cenderung berimplikasi politik, seiring perkembangan usaha bisnisnya yang membutuhkan sokongan kebijakan dari kekuasaan, walaupun secara praktis mereka tidak memerankannya secara langsung. Sistem Sosial Ekonomi Lokal Perkembangan ekonomi lokal, telah memposisikan para ponggawa sebagai elit ekonomi di kawasan Delta Mahakam, mereka menciptakan ketergantungan secara ekonomi maupun sosio-kultural terhadap kelompok (migan) yang lebih lemah dengan membangun mekanisme utang (meskipun lunak namun sangat mengikat) serta mengembangkan jalur perdagangan berlapis dengan menjadi pemasok kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok petambak penggarap dan penjaga empang. Bahkan, para pengusaha besarnya mampu melakukan eksploitasi terselubung melalui penciptaan struktur pasar yang monopolistis (penjual tunggal) atau monopsonistis (pembeli tunggal), sehingga terjadi penekanan melalui mekanisme penentuan harga dan penyediaan barang secara sepihak. Meskipun demikian, pola hubungannya masih menyisakan ruang resiprositas yang melekat pada tradisi *passe*, sehingga mereduksi pola hubungan pertambakan yang cenderung eksploitatif.

Pola hubungan patron-klien yang adaptif inilah yang mampu menopang keberlangsungan ekonomi lokal berbasis pertambakan yang sarat persaingan dan ketidakpastian. Hal inilah yang menjadikan biaya produksi tidak membutuhkan biaya tinggi, padahal produk yang ditawarkan (udang windu) adalah khas dan tidak banyak diproduksi oleh produsen lain, sehingga menjadikan produsen lokal memiliki posisi tawar yang cukup baik di pasar. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa proses pembentukan ekonomi lokal, terjadi sebagai akibat dari beroperasinya kegiatan industri perikanan ekspor pada 1974 yang membuka ruang bagi kehadiran pedagang perantara

pada area-area yang tidak mampu ditangani langsung oleh eksportir. Jika mendasarkan pada sistem ekonomi yang dikembangkan, tampaknya kegiatan usaha mereka dapat digolongkan ke dalam sistem ekonomi kapitalis, meskipun juga memiliki kesamaan dengan sejumlah sistem ekonomi pasar/komersialis, sehingga menunjukkan ciri-ciri sistem ekonomi hibrid (ekonomi lokal yang khas). Sementara berdasarkan kemunculannya, para pengusaha lokal tersebut, dapat dikelompokkan sebagai; *pertama*, kelompok ponggawa perintis; mereka yang menjadi ponggawa sebelum adanya kegiatan industri perikanan. *Kedua*, kelompok ponggawa pengikut, mereka yang menjadi ponggawa setelah adanya kegiatan industri perikanan; dan *ketiga*, kelompok ponggawa penerus, mereka yang menjadi ponggawa karena faktor keturunan/pewarisan usaha. Para ponggawa yang mampu bertahan dan berhasil mengembangkan usahanya adalah mereka yang tidak hanya berhasil melakukan hegemoni secara ekonomi dan sosio-kultural, namun juga adaptif dan visioner dalam melihat perubahan. Banyak di antaranya adalah para ponggawa pengikut yang berhasil melakukan ekstensifikasi usaha, dengan mengembangkan kegiatan usaha pertambakan, pasca pelarangan trawl pada 1983. Meskipun berdampak pada perubahan lanskap ekologi lokal, akibat “pembiaran negara” atas kawasan budidaya kehutanan (KBK), yang menjadi ajang konversi area pertambakan pribadi.

Ekonomi lokal konstitusional kapitalisme tampaknya berkembang secara berbeda-beda sepanjang sejarah, karena persoalan yang dihadapinya juga sangat berbeda. Derajat modernisasi masyarakat yang satu dengan yang lain pun bisa berbeda, karenanya rasionalisasi berlangsung secara dialektik sebagai *learning processes*. Nilai-nilai yang sama, bahkan dapat menghasilkan konsekuensi berbeda dalam keadaan yang berbeda. Karakteristik orang Bugis dalam berbagai bentuknya yang sekarang sebetulnya merupakan bentuk kapitalisme dan yang disebut kapitalisme lokal ternyata juga dibentuk oleh orang Bugis. Artinya kapitalisme global adalah *embedded* di dalam yang lokal, begitupun sebaliknya kapitalisme lokal adalah *embedded* di dalam yang global. Banyak ponggawa yang tetap eksis dalam ketidakpastian produksi dan tingkat persaingan yang sangat sengit, hingga ada yang mampu melakukan *take over* atas perusahaan multinasional, namun tidak sedikit pula ponggawa yang harus kolaps karena berbagai faktor.

Demikianlah, dalam ekonomi global sekarang ini hal-hal lokallah yang semakin penting dan pasti dalam menentukan mengapa sebuah perusahaan tertentu lebih kompetitif dan produktif dibandingkan yang berbasis di tempat lain. Artinya, sumber keunggulan kompetitif yang masih tersisa semakin lokal sifatnya, termasuk di dalamnya sebagai pemasok khusus (udang windu), kebutuhan pasar tersebut sedikit demi sedikit dikumpulkan dari mitra lokal, dengan akses khusus pada teknologi dan pengetahuan dari kelembagaan lokal atau keluwesan berproduksi yang merupakan hasil negosiasi dalam jaringan yang tidak membutuhkan biaya tinggi. Tidak heran jika kemudian banyak 309 perusahaan-perusahaan eksportir udang asing, tidak mampu bertahan menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan eksportir lokal yang memiliki “keunggulan komparatif” berupa jaringan patronase. Bentuk hubungan patronase yang banyak seginya dan mampu bertahan lama ini tampaknya lebih unggul dalam mengumpulkan keterangan tentang mutu dan jumlah produksi (udang), karena pelaksanaan transaksi-transaksi di masa lampau ternyata mengandung seperangkat data yang dapat dipercaya guna meramalkan pelaksanaannya di masa mendatang. Terlebih, kesempatan untuk melakukan transaksi-transaksi tidak jujur akan berkurang, karena biaya yang diperkirakan untuk melaksanakan tindakan tidak jujur akan berisiko besar, jika diketahui oleh pihak lain akan membahayakan keseluruhan perangkat transaksi yang telah terjalin.

Kelembagaan yang menguasai kekuatan ekonomi lokal yang lebih merupakan kebiasaan dan prinsip-prinsip moral daripada peraturan dan perjanjian resmi tersebut, bahkan dapat menjadi sarana yang sangat fungsional dan efektif dalam menyelesaikan konflik, dibandingkan dengan ketetapan-ketetapan dalam undang-undang/peraturan resmi. Demikianlah, ekonomi lokal merupakan hasil adaptasi dari beroperasinya sistem kapitalisme di aras lokal dengan wajah solidaritas, di mana nilai-nilai solidaritas yang dihayati oleh para pelaku dalam sistem ekonomi lokal, jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sebuah sistem ekonomi dengan etika solidaritas dan kebersamaan dengan basis hubungan produksi patronase yang mampu mendorong kesadaran kolektif bagi terbentuknya lumbung kesetiakawasan sosial dan seperti yang dapat menjembatani cita-cita ekonomi kolektif Weber yang tidak pernah mampu diwujudkan di era kapitalisme global. Meskipun

demikian temuan ini tidak ingin menyatakan bahwa sistem ini akan dapat menggantikan sistem ekonomi Indonesia *mainstream*. Setidaknya sistem ekonomi yang berkembang di kawasan Delta Mahakam dapat menjadi sebuah alternatif, ketika semangat kewirausahaan di negeri multikultural ini menjadi barang yang langka. Model ekonomi lokal yang terbangun di atas basis budaya seperti ini dapat diharapkan menjadi “pintu lain” untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi seperti diamanatkan pasal 33 UUD 1945.

Di sini ingin dikatakan, sebagai ekonomi konstitusional yang berakar pada kekuatan sosio-kultural bangsa, ekonomi lokal pada dasarnya merupakan “suatu bangunan ekonomi hibrid yang mampu menopang keberlangsungan perekonomian sebuah masyarakat pada suatu wilayah dengan memanfaatkan sistem sosio-kultural yang berkarakteristik khas, berikut semua komponen sumberdaya lokal secara efisien”. Dengan kata lain, yang dibutuhkan bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita ekonomi konstitusinya bukanlah sekadar universalisasi model ekonomi, tetapi partikularisasi atau indigenisasi model ekonomi. Sekaligus mengoreksi definisi yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 310 yang masih terkesan mendasarkan konsepnya pada pertumbuhan dan mengeneralisasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sekadar sebagai “usaha mengoptimalkan sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah”.

Padahal nyaris semua perkembangan ekonomi lokal di penjuru Nusantara menunjukkan gejala yang berbeda-beda, khas dan bersandar pada kekuatan budaya lokal. Bahkan, dalam kasus Delta Mahakam, dapat dikatakan perkembangan ekonomi lokal tidaklah berangkat dari inisiatif pemerintah (karena “pemerintah absen” dalam prosesnya), namun merupakan sebuah proses adaptasi yang panjang dari beroperasinya sistem ekonomi khas yang berbalut etika solidaritas dan mandiri. Konsepsi ekonomi lokal tampaknya dapat disetarakan dengan konsepsi *The New Traditional Economy* (NTE), yang menggabungkan unsur-unsur sosial budaya dan teknologi modern dalam mengantisipasi penetrasi ekonomi *mainstream*.

Di dalam buku *The Great Transformation* (2003), Polanyi menyebut ekonomi tradisional (*traditional economy*) sebagai ekonomi di mana dasar pengambilan keputusannya melekat (*embedded*) dalam suatu struktur atau sistem sosio-kultural yang lebih luas, pandangan yang juga diterima oleh ekonomi institusional. Mengacu pada konsep Polanyi, NTE dikembangkan dengan pengambilan keputusan ekonomi yang melekat dalam suatu kerangka sosio-kultural lebih luas, dengan berusaha menggunakan teknologi modern untuk menjadi sebuah ekonomi modern yang maju. Basis bagi keterlekatan (*embeddedness*) tersebut biasanya adalah agama tradisional. Munculnya NTE diasosiasikan dengan suatu agama tradisional pada ekonomi modern oleh suatu gerakan sosial-politik berbasis agama. Gerakan paling menonjol, yang sudah memiliki konsep sempurna tentang perilaku dan aturan main ekonomi tersebut di antaranya adalah Islam, di samping Konfusianisme (Rosser *et al.*, 1999). Di tengah persaingan antara kapitalisme pasar dan sosialisme komando, NTE sepertinya dapat menjadi “Jalan Ketiga” yang menawarkan solusi alternatif dengan menggabungkan unsur lama dan baru, individual dan kolektif, etis dan praktis. Patronase pertambangan yang menjadi penopang beroperasinya ekonomi lokal di kawasan Delta Mahakam tampaknya mengikuti pola NTE dalam perkembangannya, karena mendasarkan ekonomi pada ajaran Islam dengan tetap mengikuti perkembangan zaman, di antaranya melakukan penerapan teknologi modern dalam kegiatan industri perikanan lokal yang dikembangkan. Tidak hanya *embeddedness* pada agama, namun juga mendasarkan operasinya pada adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.

Didasarkan pada kekurangan dari ekonomi pasar yang kapitalistik dengan cita-cita “*the creation of wealth*”, tetapi pada saat bersamaan membuat sebagian besar umat manusia termarginalisasi, karenanya Blikololong (2010) mengusulkan apa yang dinamakan “ekonomi lokal” yang lebih menjamin keadilan. Setidaknya dapat menjadi “katalisator” bagi beroperasinya Ekonomi Pancasila yang “macet”, seperti digagas Mubyarto (1997) yang berusaha mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan mendasarkan konsepnya pada pemerataan dan keadilan ekonomi, sekaligus menentang tekanan pertumbuhan yang dianut ekonomi neoklasik. Di sini, negara dituntut untuk berperan lebih besar di level makro, dengan “mengamankan” perkembangan

ekonomi lokal yang tengah bangkit, tidak sekadar tunduk pada keinginan pasar yang dalam jangka panjang dapat merugikan keberlanjutan ekonomi lokal. Keberpihakan berbagai regulasi yang memberikan proteksi dan insentif pada keberadaan pengusaha lokal, tampaknya masih sangat dibutuhkan dalam memperebutkan akses yang lebih luas dan adil.

Dalam perdagangan komoditas udang ekspor misalnya, kelihaihan Singapura yang tidak memiliki potensi sumberdaya, namun berhasil mendapatkan keuntungan besar dalam perdagangan udang ekspor, karena posisinya yang strategis (meskipun hanya sebagai “pelabuhan transit”), serta mendapatkan kepercayaan berbagai lisensi dari negara-negara *buyer* patut diwaspadai. Juga berbagai keharusan standar mutu tertentu dari negara-negara konsumen yang sering merugikan produk udang lokal, selain sejumlah produk udang dari negara lain yang membanjiri pasar-pasar domestik dan lokal perlu mendapatkan perhatian serius, hingga proteksi lebih baik. Sedangkan, dalam tataran meso dan mikro, peran negara tampaknya harus didudukkan pada wilayah yang berbeda, mengingat kemampuan pengusaha lokal dengan “kearifan ekonomi lokalnya” yang terbukti mampu berdiri tegak di tengah persaingan dengan kapitalis global dan nasional, tampaknya perlu diberikan kesempatan luas untuk bisa lebih berkembang secara adil. Artinya, meskipun negara di satu sisi dituntut untuk “hadir” di tengah ketidakpastian regulasi atas tanah-tanah negara (hutan mangrove) yang telah dialihfungsikan menjadi area pertambakan pribadi, sehingga status tanah yang dikuasai masyarakat lokal menjadi lebih jelas.

Tentunya dengan menetapkan Rencana Detail Tata-Ruang (RDTR) Kawasan Delta Mahakam yang peruntukannya lebih berpihak pada kepentingan ekologis, dengan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi lokal. Diiringi dengan penerapan *low enforcement* secara ketat, serta penempatan aparat yang memadai dan tangguh. Sementara di sisi lain, negara tidak harus berperan secara dominan dalam “ruang inisiatif lokal” dengan membuat berbagai regulasi yang malah akan kontraproduktif bagi perkembangan ekonomi lokal yang telah berhasil berkembang secara mandiri. Secara bertahap negara dengan performa partisipatifnya, tampil dengan kebijakan *button up* dalam mengatasi “residu” dari beroperasinya sistem ekonomi lokal,

yang sejak awal kemunculannya berhasil mandiri tanpa campur tanpa negara. Di sini, pemerintah dituntut untuk mengawal keberlanjutan ekonomi lokal dengan mendorong berlangsungnya mekanisme insentif dan disinsentif secara adil yang sangat penting artinya bagi perkembangan aktivitas ekonomi lokal. Seperti pengenaan pajak atau redistribusi dalam kegiatan usaha pertambangan bagi meningkatkan pelayanan perbaikan atau pengadaan infrastruktur dan merangsang pengembangan *research development*. Selain mendorong hilirisasi industri perikanan yang bernilai tambah tinggi, serta penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan, misalnya mekanisasi dalam pensortiran *size* udang atau pengembangan produk ramah lingkungan dengan teknologi tinggi, yang saat ini menjadi pilihan utama konsumen negara maju. Ramah lingkungan juga berarti kemampuan memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan, sehingga mendorong keinginan baik dari segenap pihak yang terkait dengan aktivitas produksi pertambangan untuk melakukan perubahan secara gradual bagi kelestarian lingkungan yang menopang keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan.

Amanatkan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan diakomodasinya persoalan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia dan diadopsinya prinsip “pembangunan berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan”, maka dasar negara kita menurut Asshiddiqie (2009) dewasa ini telah bernuansa “*green constitution*”. Di dalamnya negara dituntut untuk bisa memberikan jaminan atas ancaman krisis daya dukung ekosistem dan lingkungan hidup yang dihadapi warganya, sehingga kerusakan ekologis tidak mematikan kebangkitan ekonomi lokal yang menyisakan harapan untuk mewujudkan “ekonomi kesejahteraan”. Pilihan untuk melakukan perbaikan secara parsial perlu dikemukakan. Di sini, mengingat kebangkitan ekonomi lokal yang berkembang di kawasan Delta Mahakam menunjukkan gejala sebagai sebuah sistem ekonomi hybrid, di mana dominasi ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis diperagakan secara bersamaan dengan sejumlah ciri dari sistem ekonomi pasar/komersialis. Artinya, sistem ekonomi lokal merupakan sebuah ekonomi adaptasi dari sistem ekonomi pasar/komersialis

yang masih dibawakan oleh struktur sosio-kultural bangsa ini, di tengah penetrasi ekonomi kapitalisme yang dengan begitu hegemoniknya menyusup dalam sendi-sendi kehidupan bangsa ini.

Sesuai dengan amanat konstitusi, di mana sistem ekonomi kesejahteraan yang ingin dicapai mendasarkan konsepnya pada ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pemerataan dan keadilan sosio-ekonomi sebagai “sistem ekonomi kapitalisme khas” harus diakui. Di sini bahwa ekonomi lokal tampaknya merupakan hasil perubahan kedua UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 2000 313 manifestasi dari salah satu kekuatan sistem kapitalisme yang sanggup memperbaiki dirinya sendiri dari dalam, ketika berjumpa dengan kekuatan struktur sosio-budaya lokal. Bukan berarti memperbaiki diri secara total, karena hal itu menurut Budiman (2006) mengubah dirinya, melainkan secara parsial. Mengingat menghilangkan kontradiksi yang ada pada sistem kapitalis tidak mungkin dilakukan oleh sistem kapitalis itu sendiri, karena perkembangan sistem kapitalisme didasarkan pada kontradiksi semacam itu. Menariknya, yang ditugaskan untuk melakukan perbaikan parsial untuk mengurangi akibat-akibat negatif dari kontradiksi tersebut supaya revolusi yang diramalkan Marx tidak kunjung terjadi ternyata tidak hanya negara, seperti dikemukakan Budiman (2006), namun juga “perkawinannya” dengan struktur sosio-budaya lokal.

Negara menurut Weber, selain merupakan sebuah institusi yang memiliki monopoli untuk menggunakan kekerasan, dengan penekanan pada aspek militer atau polisional, misalnya dalam menegakkan *low enforcement* atas tanah negara di Delta Mahakam. Negara juga memiliki fungsi ekonomi dan ideologi. Di bidang ekonomi, negara dapat memajaki orang kaya (elit ekonomi lokal berikut unit usahanya) dan memberikan sumbangan pada mereka yang masih miskin untuk menghapuskan kontradiksi mendasar yang masih ada. Meskipun eksploitasi atas nama kompetisi bebas (meski berat sebelah) masih dihalalkan negara. Sementara pada bidang ideologi, negara dapat menyebarkan kepercayaan melalui sekolah-sekolah, partai-partai politik dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, termasuk lembaga keagamaan, bahwa kebebasan individu (termasuk kebebasan menumpuk kekayaan pribadi) lebih baik daripada keadilan sosial. Selama ideologi ini masih bekerja

secara efektif, maka negara akan bisa memikul risiko dari berlangsungnya sebuah sistem demokrasi. Siapapun boleh berseberangan, melakukan protes, melakukan demonstrasi, tapi mereka tidak boleh mengutak-atik kesucian sistem kompetisi pasar bebas, beserta kebebasan individu untuk memiliki dan menumpuk kekayaan. Biasanya pemerintah akan memberikan kompensasi perbaikan kondisi hidup warga miskin yang berseberangan, untuk mengurangi kontradiksi. Namun, jika ideologi yang telah menciptakan struktur yang timpang tersebut tetap ingin diubah secara total, maka negara akan menggunakan kekerasan untuk menghancurkan mereka.

Kenyataan yang pernah muncul di Cile pada masa Allende, di Filipina pada masa Marcos, hingga yang mutakhir di Mesir pada masa Mubaraq, membuktikan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang prinsipil bagi kapitalisme, tapi hanya sekadar alat politik untuk membuat wajah mereka tampak politis. Menurut Budiman (2006), sangatlah sukar kalau tidak mau dikatakan tidak mungkin, bagi negara dengan sistem ekonomi kapitalisme untuk melaksanakan 314 kebijakan yang bertentangan dengan sistem tersebut tanpa melukai kalau tidak membunuh dirinya sendiri. Karenanya menjadi menarik, ketika sistem ekonomi kapitalisme yang begitu hegemonik mampu melakukan perbaikan parsial ketika bersentuhan dengan struktur sosio-kultural lokal yang diperankan dengan sangat akomodatif oleh institusi patronase pada sistem ekonomi lokal. Di mana sistem ekonomi kapitalisme tidak harus melukai ataupun membunuh dirinya sendiri, ketika harus melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan sistem tersebut (meskipun hanya berlangsung pada tataran lokal). Tampak terjadinya paradox, antara tujuan ekonomi di satu sisi dengan tenggang-rasa di sisi lainnya, sebagai manifestasi berlangsungnya proses adaptasi kultural yang kemudian membentuk rasionalitas ekonomi yang khas, tanpa harus menjadi suatu hambatan menuju suatu tata-cara pengelolaan perekonomian modern yang menuntut rasionalitas ekonomi tingkat tinggi. Atau pun mekanisme patronase yang menawarkan hubungan produksi yang lebih humanis, di mana komitmen atas hubungan yang terjalin dilakukan dengan semangat resiprositas dan sukarela, tanpa suatu ikatan perjanjian/kontrak tertulis, walaupun kedua belah pihak terlibat dalam suatu hubungan dengan titik berat ekonomi, namun unsur perasaan tetap memainkan peran mendasar.

Realitas ini sekaligus mengoreksi eksperimen Allende di Cile yang ingin mengubah masyarakat Cile dari sistem kapitalisme kepada sistem sosialisme, dengan melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kapitalisme, namun Cile malah mengalami krisis ekonomi hebat yang pada akhirnya harus dibayar mahal dengan hancurnya kaum revolusioner. Meskipun membutuhkan kesabaran untuk menyatukan keping-keping “ekonomi lokal” yang berserakan di seantero nusantara dan waktu yang tidak terbilang, pilihan untuk melakukan perubahan secara parsial atas hegemoni sistem ekonomi kapitalisme tampaknya menjadi lebih realistis, karena sesuai dengan amanat konstitusi. Sebagaimana termaktub dalam pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Apalagi jika dikaitkan pada kenyataan sebagai *archipelago state*, Indonesia juga tidak memiliki preseden yang layak untuk dirujuk, sehingga sistem ekonomi lokal yang juga merupakan wujud dari ekonomi maritim dapat diharapkan menjadi salah satu pilihan realistis dan kontekstual.

Jika mampu diadaptasi dengan bijak, perkembangan ekonomi lokal bisa diharapkan mampu mengatasi krisis ekonomi di negara-negara Dunia Ketiga, yang bersifat multidimensi dan kompleks. Di Indonesia terjadi pada tahun 1998 yang melahirkan era reformasi maupun krisis 2008 yang bukan saja menimbulkan masalah kesenjangan antara kaya dan miskin, namun juga berbagai benturan agama dan rasial. Selain masalah utang yang semakin membengkak, kesulitan ekonomi akibat angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, serta kegagalan untuk berperan secara berarti dalam persaingan ekonomi di pasar global. Mengapa ekonomi lokal bisa menjadi alternatif pilihan? Jawabannya (seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya) terletak pada kelenturan dan daya adaptasi dari sistem ekonomi lokal yang telah terbukti mampu bertahan di tengah gempuran sistem ekonomi kapitalisme global, melalui mekanisme hubungan produksi yang lebih humanis dan efisien, dengan menawarkan semangat resiprositas dan sukarela (kesetiakawanan sosial), meskipun berskala lokal.

Termasuk adanya mekanisme korektif atas karakteristik pengusaha lokal yang cenderung tidak ingin disaingi siapapun, hingga mendapatkan solusi komprehensif “maju untuk unggul bersama”. Tidak sampai di sini, konsepsi ekonomi lokal tampaknya juga bisa menjadi tawaran solutif atas perdebatan “kontra produktif” atas pilihan terhadap otonomi daerah, yang mengandung banyak permasalahan krusial, karena dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini terkait sistem demokrasi di era otonomi daerah, yang mendasarkan penyaluran frustasinya pada konflik-konflik politik yang semakin lama bertambah runcing dalam kelokalitas daerah masing-masing. Konflik-konflik tersebut memberikan akibat pada kelangsungan ekonomi masyarakat bersangkutan, karena sistem demokrasi yang ada membebaskan terjadinya unjuk rasa, demonstrasi, bahkan pemogokan massal yang dapat menciptakan ketidakstabilan keamanan dan mengganggu sistem produksi.

Tapi, nyatanya pada wilayah dengan penopang ekonomi lokal yang cukup mapan, masyarakatnya tidak hanya mampu *survive* dalam “ketidakpastian” otonomi daerah, tapi bahkan berhasil menggerakkan “pembangunan ekonomi wilayahnya” tanpa tergantung pada peran pemerintah. Kosmopolitnya sosio-kulturalnya multietnis yang menghuni kawasan pesisir, seperti migran Bugis di kawasan Delta Mahakam yang mampu keluar dengan wajah lokalnya yang khas, setelah melalui proses “pengeleminiran perdebatan identitas etnis” di dalam “ruang ekonomi lokal” (semacam ruang publiknya Habermas), tampaknya cukup menjanjikan untuk dicoba. *Local capital* akan menjadi berbeda jika dikapitalisasi, karena dapat diajukan sebagai terminologi baru, sebagai proses mengalir yang hendak menghindari peran negara maupun privatisasi di dalam konsepsinya. Dengan keyakinan yang masih perlu diuji, kosepsi kebangkitan *local capital* dengan sengaja ditawarkan peneliti untuk digunakan, sehingga tidak terjebak dengan konsepsi *social capital* yang begitu mendominasi berbagai kajian dan wacana pembangunan pedesaan di negara Dunia Ketiga dewasa ini. Yang diasumsikan peneliti memiliki kemungkinan untuk mendorong bangkitnya etno-sentrisme. Meskipun diakui Ostrom (1992), *social capital* merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek

pembangunan di Dunia Ketiga. Dalam konsep tersebut kelembagaan tradisional diletakkan menjadi sangat fungsional, sehingga menjadi sarana yang sangat efektif dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang (Woolcock dan Narayan, 2000). Namun dalam kenyataannya konsep *social capital* juga menyisakan konsekuensi negatif dengan adanya pembatasan peluang bagi pihak lain (eksklusivitas), pembatasan kebebasan individu, klaim berlebihan atas keanggotaan kelompok dan menyamaratakan norma pada semua anggota (konformitas). *Social capital* juga disebarkan pada masyarakat di luarnya dalam bentuk negatif, seperti ajaran untuk mencapai suatu kerekatan sosial internal dengan mengorbankan orang atau kelompok di luarnya, yang dilakukan dengan penuh kebencian serta prasangka buruk, sehingga terkesan sektarian, eksklusif dan kedaerahan/kesukuan.

Padahal umum diketahui, *economic capital* selalu bias dalam pengalokasiannya pada *physical capital*, *man-made capital* dan *human capital* tanpa melihat pentingnya struktur sosial dan budaya yang melekat (*embedded*) pada *social capital* dan *natural capital*. Dilihat dari dimensi temporal, kecendrungan demikian akan jauh dari kaidah yang dikehendaki dalam pembangunan berkelanjutan, karena proporsi *social capital* dan *natural capital* seharusnya senantiasa meningkat seiring dengan waktu (Seregeldin, 1996). Merujuk pada realitas tersebut, konsepsi *local capital* tampaknya bisa mengisi kekosongan berbagai konsekuensi negatif dari berlangsungnya pembangunan kawasan pedesaan di negara Dunia Ketiga yang cenderung etno-sentris dan mendasarkan pada konsepsi-konsepsi tertentu. *Local capital* diharapkan tidak hanya menjadi wadah alternatif, bagi pengejawantahan konsep *social capital* yang lebih mensejahterakan masyarakat sehingga mereduksi ketidakpastian, lebih dari itu bahkan meminimalisasi peluang konflik karena persaingan ekonomi (Noor, 2000). Namun diharapkan juga fungsional dalam mendorong kosepsi lainnya (*economic capital*, *physical capital*, *manmade capital*, *human capital* dan *natural capital*) dalam ikut membangun peradaban yang lebih adil dan manusiawi.

5.5 Implikasi Teoretis

Hasil temuan studi ini menunjukkan bahwa setiap sistem sosial serta sistem ekonomi pada dasarnya bersifat kontekstual, termasuk kapitalisme dengan sistem ekonomi kapitalismenya. Ekonomi lokal yang digagas dalam penelitian ini merupakan upaya akademis ke arah kontekstualisasi atau indigenisasi sistem perekonomian Indonesia yang sangat kapitalistik dan plural. Di dalam konteks tersebut peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini dirasakan cukup problematik, karena mencoba mengungkap suatu “ikhtiar akademik transisi” dengan mencoba mereduksi konsepsi-konsepsi yang begitu hegemonik dan bias pengetahuan Barat, namun studi ini pun memaksa peneliti untuk “berdiri di atas pundak-pundak raksasa” intelektual Barat yang konsepsinya belum tergantikan tersebut. Namun demikian, dengan semangat ingin membebaskan diri dari bias-bias Indologi, penelitian ini ingin mengajukan suatu wacana pendekatan yang peneliti sebut sebagai pengetahuan kolaboratif dalam perspektif struktur-kultural, yaitu upaya untuk menggabungkan hal terbaik dari pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah dari dunia Barat. Di mana hubungan-hubungan sosial lokal/timur dipandang sebagai *embedded* dalam kapitalisme/barat, begitu pun sebaliknya, sehingga menolak konsepsi yang menyebut prinsip-prinsip dasar ekonomi barat tidak cocok dengan masyarakat timur yang sistem sosial budayanya berbeda.

Hasil dari studi ini berhasil memberikan kemungkinan pilihan-pilihan untuk penerapan sistem ekonomi alternatif. Bagaimana teori pembentukan ekonomi lokal yang digagas dalam tesis ini dapat ditransformasikan menjadi suatu pilihan praxis baru yang mampu memberi sumbangan pemecahan atas berbagai permasalahan. Bahwa di luar sistem kapitalisme terdapat model-model lain yang kompatibel dengan sistem sosial budaya setempat, yang mendasarkan pembangunan ekonomi pada nilai budaya sambil mengintegrasikannya dengan teknologi modern. Fenomena “kebangkitan ekonomi lokal” yang ditopang oleh institusi patronase pertambakan, seharusnya dapat diintegrasikan ke dalam pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan nilai-nilai intrinsik (yakni nilai non-ekonomi, yang dijunjung tanpa memperhitungkan manfaat atau biayanya, misalnya kehormatan

ataupun patriotisme), bukan sekadar nilai-nilai instrumental (yakni nilai yang secara langsung bermanfaat bagi seseorang). Justru karena bersifat non-ekonomi, nilai-nilai itu tidak akan tergerus kesuksesan ekonomi dan karena sifatnya yang pro-ekonomi, nilai-nilai itu tidak akan berhenti mendorong proses akumulasi.

5.6 Implikasi Kebijakan

Fenomena kebangkitan ekonomi lokal, seperti yang dijumpai dalam penelitian ini, seharusnya dapat disinergikan ke dalam program prestisius Pengembangan Ekonomi Lokal (Baca: PEL) yang saat ini tengah digagas pemerintah melalui Bappenas. Mengingat gagasan PEL yang telah diterapkan tampaknya masih sangat bias pengetahuan Barat, setidaknya sampai sejauh ini konsepsi-konsepsi yang diadopsi secara kontekstual tidaklah khas lokal, sehingga operasionalisasinya masih dipertanyakan. Penetrasi cara-berpikir (yang serba pertumbuhan, serba investasi asing, serba akumulasi ekonomi dan serba ekspansi-kapital) itulah yang kemudian menghasilkan dominasi-dominasi budaya dalam cara berpikir yang melanggengkan 318 dominasi kekuasaan-kekuasaan politik lokal ala kelembagaan kapitalistik Barat (pada tatanan pengaturan lokal). Hal ini menandakan pentingnya kita menata kembali kehidupan di pedesaan dalam konteks keadilan spasial. Secara konsepsional melalui studi ini tersedia peluang yang bisa membuka celah-celah untuk menggeser struktur kekuasaan tradisional pro status-quo yang sudah berurat-berakar dan mengendap dalam kebudayaan lokal dengan suatu perspektif baru, sehingga ikut mereduksi permasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial.

Signifikansi studi ini, setidaknya berhasil menunjukkan bahwa kebangkitan ekonomi lokal mampu digerakkan oleh masyarakat migran Bugis dari golongan tomaradeka (masyarakat kebanyakan) secara mandiri (nyaris tanpa sokongan pemerintah) dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di sekitar mereka. Para pengusaha lokal tidak hanya mampu *survive* di tengah gempuran pasar global, mereka bahkan berhasil memainkan peran penting dalam menopang pondasi ekonomi bangsa, ketika hampir semua suprastruktur ekonomi mengalami “kebangkrutan” pasca krisis 2007/2008.

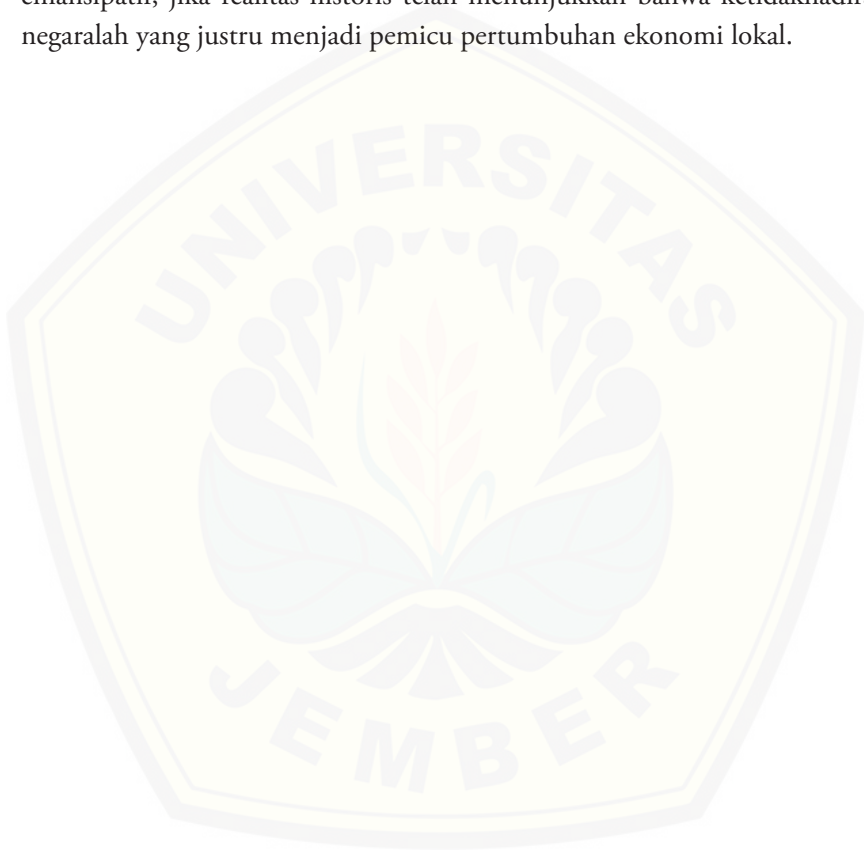
Kebangkitan ekonomi lokal tampaknya akan dapat diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi bangsa, jika bisa dikawal oleh sistem kepemimpinan nasional yang tangguh dan berpihak pada keberdayaan ketahanan ekonomi lokal.

5.7 Catatan Kritis

Kemampuan mobilitas vertikal yang ditunjukkan kaum proletar seperti pada fenomena “kebangkitan kapital lokal” dalam kegiatan pertambakan di Delta Mahakam, ironisnya justru dilakukan dengan mereproduksi kultur kaum aristokrat, sehingga mengingatkan pernyataan Nietzsche bahwa “manusia lebih menyukai ketiadaan daripada tidak menghendaki sama sekali”. Artinya manusia lebih suka memaknai hidupnya yang kosong nilai-nilai aristokrat dari pada hidup tanpa makna sama sekali. Proses hegemoni akan terjadi apabila cara hidup, cara berpikir dan pandangan pemikiran masyarakat bawah terutama kaum proletar telah meniru dan menerima cara berpikir dan gaya hidup nimetik (penjiplakan total) dari kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Di sini, proses fetishisme (peniruan yang menjadi *false consiousness*) justru direproduksi secara berulang oleh para ponggawa yang asal-usalnya dari golongan masyarakat to-maradeka (proletar), mereka secara tidak langsung telah menyebabkan ketergantungan dan ketidakmandirian secara permanen bagi para klien yang berada dalam jaringan patronasenya.

Kegiatan pertambakan di kawasan Delta Mahakam pun hingga saat ini masih menyisakan permasalahan pelik menyangkut status kepemilikan lahan. Meskipun kawasan hutan mangrove yang masih berstatus KBK tersebut telah beralih fungsi menjadi area pertambakan pribadi, namun hingga saat ini area pertambakan yang 319 berada di atas tanah-tanah negara dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal tersebut masih diklaim sebagai “kegiatan ekonomi ilegal” oleh otoritas kehutanan. Akibatnya masyarakat lokal tidak memiliki hak atas tanah-tanah yang dikelolanya (walaupun dalam kenyataannya sejumlah tambak diketahui memiliki sertifikat), sementara pemerintah pun tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan kontribusi PAD dari sektor pertambakan yang diklaim ilegal tersebut. Hal ini setidaknya

relevan dengan pernyataan Hernando de Soto yang mengungkapkan “negara-negara selain Barat tampaknya gagal mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kapitalisme dikarenakan ketidakmampuan negara itu untuk menciptakan kapital”. Tentu tidak sekadar kehadiran negara yang mampu memberikan energi positif bagi pembentukan ekonomi lokal dan mendorong proses emansipatif, jika realitas historis telah menunjukkan bahwa ketidakhadiran negaralah yang justru menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal.





6

PRAKISIS EKONOMI NUSANTARA ALA MASYARAKAT WAJO. SULAWESI SELATAN BERBASIS TENUNAN

Muhammad Syukur

Secara historis, membicarakan soal tenun pada masyarakat Bugis di Wajo, Sulawesi Selatan telah berlangsung semenjak abad 13. Pada zaman kerajaan praktik ekonomi tenun ini sudah terjadi yang bertujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa adanya orientasi pasar. Peruntukannya adalah buat pakaian khususnya sarung. Namun ketika masyarakat Bugis melakukan kontak dengan “mekanisme pasar” khususnya dengan pedagang dari India dan Gujarat, mereka mulai terintegrasi dengan ekonomi pasar.

Kain tenun di masa itu sudah berkembang pesat dengan diadopsinya benang tenun perak dan emas. Penggunaan benang ini berkaitan erat dengan hubungan perdagangan dengan pedagang asal India dan Gujarat. Demikian juga dengan kehadiran pedagang dari Cina yang memperkenalkan benang sutra. Akibatnya, masyarakat Bugis mengadopsi benang sutra sebagai bahan baku kain tenunan. Malahan dengan adopsi benang sutra membuat variasi tenun masyarakat Bugis semakin berkembang.

Kegiatan tenun Bugis semakin terintegrasi dengan pasar terjadi ketika revolusi industri tenun jilid 1. Pada masa itu, alat tenun bukan mesin (ATBM) mulai masuk sehingga produksi tenun diproduksi secara besar-besaran. Akibatnya, pangsa pasar tidak hanya terkonsentrasi di Sulawesi Selatan, tetapi

juga ke daerah supralokal, nasional, dan mancanegara. Demikian juga ketika revolusi industri jilid II dengan masuknya alat tenun mesin, membuat tenun semakin menggeliat. Kondisi ini melahirkan tiga kelompok dalam aktivitas tenun Bugis. Kelompok tenun gedongan (mayoritas ->5000-an), kelompok tenun ATBM (1.900), dan pengusahaan tenun 23 orang. Fakta ini sebenarnya, mengoreksi ejekan-ejekan Robinson bahwa masyarakat Nusantara tidak mungkin melahirkan kapitalis yang sangat tergantung usahanya dari belas kasih pemerintah.

Dalam konteks kelahiran pengusaha tenun di masyarakat tenun Bugis-Wajo bukan sama sekali dari belas kasih pemerintah, bukan juga bersumber orang-orang elit tetapi mereka berasal dari masyarakat maradeka. Jadi mereka memiliki omset miliaran dan jaringan bisnis di berbagai wilayah yang lahir dari rahim lokal (golongan maradeka). Mereka sukses dalam usahanya karena terpaan pasar, dan merintis usaha dengan kerja keras. Perkembangan alat tenun yang sebelumnya hanya berorientasi kebutuhan rumah tangga mulai dirasuki *cost and benefit* dalam *mindset* masyarakat tenun Bugis karena interaksinya dengan pasar. Namun masyarakat tenun tersebut tidak meninggalkan nilai dan norma agama. Nilai tindakan ekonomi penenun tersebut senantiasa bekerja di antara *undersocialized* dan *otosocialized* (baca: Granoveter). Basis moral dan basis rasionalitas dalam aktivitas ekonomi tiga kelompok penenun di atas memiliki basis rasionalitas yang berbeda. Penenun gedongan, melakukan tukar-menukar benang tenun dengan prinsip *reciprocal*. Demikian juga pertukaran dalam kehidupan tidak ada hitungan ekonomi. Mereka rela meninggalkan pekerjaan jika ada daur kehidupan yang dilakukan oleh tetangga dan teman sejawatnya. Aktivitas produksi hanya memenuhi kebutuhan pokok tetapi tidak menjadi akumulasi kapital. Mereka enggan mengambil risiko besar dan spekulatif. Meskipun bersifat tradisional mereka juga memiliki rasionalitas formal ketika mengisi waktu luang untuk meraup keuntungan ekonomis dan menempatkan posisi lokasi tempat menenun, misalnya di dapur.

Mengapa menempatkan alat tenun di dapur? Alasannya, supaya mereka dapat melakukan aktivitas lainnya. Kemudian terjadi pembentukan kapital yang diarahkan untuk pendidikan dan membeli emas. Namun, belum

diarahkan untuk mengembangkan usahanya. Penenun ATBM bertindak rasionalitas substantifis, melakukan pertukaran bersifat resiprokal, dilandasi kejujuran sebagai modal dan tidak bertindak spekulatif. Sayangnya, mereka kurang inovatif sebagaimana pengusaha tenun. Mereka juga memiliki patronase dalam aktivitas tenun yang melibatkan keluarganya. Uniknya, patronasenya tidak bersifat eksploitatif tetapi syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perkembangannya, penenun ATBM cenderung mulai berani mengambil risiko yang ditandai oleh tindakan menjual emas untuk pengembangan usaha. Ini menunjukkan adanya jiwa wirausaha dalam diri mereka.

Pengusaha tenun dalam aktivitas produksinya telah melibatkan dirinya dalam pertukaran menggunakan uang dan jasa. Mereka memilih menjalankan kesibukan bisnisnya dibandingkan menghadiri daur kehidupan. Tenun dijadikan sebagai pekerjaan pokok dan sumber utama penghasilan keluarganya. Mereka berani mengambil risiko, melakukan tindakan spekulatif, dan mengembangkan usahanya secara kreatif dan inovatif. Pembentukan kapital sebagai bentuk investasi jangka panjang melalui pendidikan anak, pembelian emas dan sewa/beli tanah. Mereka juga melakukan perluasan usaha, peningkatan intensitas produksi, dan pembelian toko/butik.

Dalam rana rasional substantifis, pertukaran dalam daur kehidupan diwakilkan kepada anggota keluarga dan perilaku kejujuran. Keuntungan usahanya sebagian diperuntukkan untuk sosial dan keagamaan. Dalam segala aktivitas mereka berlangsung hubungan patronase, umpamanya aktivitas sosial keagamaan. Para pengusaha tenun kerap memberikan sumbangan terbesar dalam pembangunan Masjid dan kegiatan sosial. Pengusaha tenun Wajo kini telah melakukan ekspansi di Kota Makassar lewat dibukanya Butik dan Toko yang menjual hasil tenunan.

Tindakan ekonomi penenun dalam bingkai ekonomi modern pada level mikro memiliki sifat keterlekatan (*embeddednes*) pada kultur agraris. Hubungan antara buruh tenun dan majikan (pengusaha tenun) bersifat informal dan pengelolaan usahanya berada dalam manajemen keluarga.

Pada level meso, kelompok penenun gedogan dan penenun ATBM tidak mampu bersaing dengan pengusaha tenun. Pengusaha tenun lebih unggul dari penenun ATBM dan penenun gedogan. Hal ini dikarenakan pengusaha tenun memproduksi kain tenun Bugis dan berorientasi kebutuhan pasar.

Pada level makro, pengusaha tenun dan penenun ATBM kalah bersaing dibandingkan pengusaha tekstil nasional dan global. Sementara, penenun gedogan tidak terpengaruh keberadaan produk tekstil nasional dan global. Penenun gedogan melakukan aktivitas ekonominya yang sangat lekat dengan budaya Bugis-Wajo.

Pengusaha tenun sudah mengalami gejala *disembedded* terhadap budaya Bugis, namun masih ada nilai-nilai lokal yang melekat pada pengusahanya tapi tidak sekuat penenun gedogan dan ATBM. Orientasi jaringan sosial ekonomi mereka mengalami kecenderungan lebih kepada jaringan kekeluargaan dan jaringan kedaerahan, pertemanan, maupun kesukuan. Semakin kecil jaringan sosial ekonominya, maka semakin kuat *trust* yang terbangun. Demikian pula sebaliknya. Situasi ini memiliki kemiripan dengan yang dimiliki Jepang. Bedanya penenun di Wajo, peran negara menentukan klusterisasi usaha tenun, akan tetapi negara tidak memberikan perlindungan bagi pengusaha tenun yang lemah. Di Wajo juga, masyarakat yang bermukim dan bersinteraksi dengan penenun menjadi pendukung aktivitas sosial ekonomi tenun. Di Jepang, negara berperan penting dalam masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan subsidi dan bantuan (jaminan sosial). Sistem ekonomi Jepang mengembangkan *family based* dalam aktivitas ekonominya.

Dalam tindakan ekonomi tenun di Wajo justru terjadi *mix* rasionalitas. Kondisinya berbeda dengan apa yang dikemukakan Granoveter. Tindakan penenun Wajo menggabungkan *under-socialized* dan *upper-socialized*. Di satu sisi, mereka memegang teguh nilai kultural dan memberi jaminan sosial terhadap buruh tenun. Namun di sisi lain mereka berorientasi mendapatkan keuntungan. Jika dipetakan tindakan ekonomi berdasarkan kategorinya yaitu penenun gedogan memegang teguh nilai-nilai kultural dan berorientasi keuntungan ekonomis. Pengusaha tenun berorientasi akumulasi kapital dibarengi kontribusi dalam kegiatan sosial keagamaan. Pengusaha tenun membangun kemitraan dengan penenun gedogan dan ATBM

berdasarkan rasa solidaritas (moral) dan ekonomis (formal). Pengusaha tenun sebagai patron memberikan jaminan sosial kepada kliennya tetapi juga klien mendapatkan keuntungan ekonomis.

6.1 Sejarah Perkembangan Tenun di Kabupaten Wajo

Keberadaan tradisi menenun di Wajo pada masa lalu termasuk dalam kategori *high culture*. Awalnya hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adat. Namun dalam perkembangannya aktivitas menenun mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Perubahan ini terjadi pada aktivitas produksi massal yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pasar. Sebagai aktivitas budaya dan ekonomi, tenun di Wajo telah mengalami proses transformasi yang cukup panjang sejak abad ke-13 hingga kini. Berbagai peristiwa penting telah dialami sejak masa kerajaan yang ditandai kemampuan para penenunnya mengikuti perkembangan zaman. Kemampuan mereka tetap eksis akibat proses transformasi secara terbuka untuk menerima pengaruh luar sambil memadukan unsur dari dalam yaitu kreativitas dan kecerdasan lokal (*local genius*) yang dimiliki penenun Wajo.

Pengaruh dari luar berupa penggunaan bahan baku (benang sutera dan zat pewarna sintesis) didukung teknologi tenun diserap dan diolah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Wajo. Penenun Wajo melakukan inovasi produksinya untuk beradaptasi dengan perkembangan selera pasar. Keadaan ini didukung oleh kebudayaan tenun yang mereka miliki dan kemampuan daya lenturnya. Proses transformasi corak tenun berkembang pesat sejak mulai dari era corak vertikal dan horizontal (*balo mattetong* dan *makkalu*) (tahun 1400–1600), dan corak kotak-kotak/palekat (1600–1900). Kini masyarakat setempat sudah mulai mengenal tenun dengan corak lebih baik dan bervariasi umpamanya corak garis-garis horizontal, yaitu babak corak bergambar (1900–sekarang). Corak ini berkembang pertenunan di Wajo dan tidak menghilangkan corak khas sudah ada sebelumnya. Demikian pula dalam teknologi penggunaan alat tenunan juga mengalami transformasi.

Mereka mulanya menggunakan alat tenun gedogan pada abad ke-13, lalu menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) semenjak tahun 1950, hingga menggunakan alat tenun mesin (ATM) sejak tahun 2004.

Pelestarian kegiatan tenun pada masyarakat Bugis-Wajo melalui proses sosialisasi dengan cara mengajarkan keterampilan menenun lewat aktivitas: *Pertama*, perempuan Bugis menerima keterampilan menenun dari ibunya dan meneruskannya secara berkelanjutan kepada anak-anak perempuannya. *Kedua*, keterampilan menenun diterima oleh perempuan Bugis sebagai adat yang mesti diketahui dan dikuasai sebelum menikah. *Ketiga*, terjadinya penyebaran keterampilan menenun pada etnis Bugis karena mereka berminat dan hendak mengetahui cara menenun serta kain tenun bernilai ekonomi penting dalam membantu ekonomi keluarga.

6.2 Tenun Bugis sebagai Praktik Ekonomi Nusanara (Nusantaranomics)

Kegiatan menenun bagi masyarakat Bugis-Wajo merupakan sebuah kearifan lokal (*local wisdom*) yang dipahami sebagai gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, bernilai baik dan melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Ragam kearifan lokal yang terkandung dalam fungsi kain tenun pada masyarakat Bugis, yaitu: 1) kain tenun sebagai pakaian keseharian atau sebagai alat untuk menutup tubuh dalam menahan pengaruh dari alam sekitar, 2) kain tenun sebagai hadiah, 3) kain tenun sebagai simbol status dan gengsi yang dianggap suci, dan 4) kain tenun sebagai benda yang digunakan dalam upacara adat.

Pertama, kain tenun Bugis sebagai pakaian semata terdiri baju dan sarung. Pakaian tersebut digunakan sebagai busana dalam kegiatan pernikahan. Pakaian tersebut juga digunakan dalam keseharian seperti memasak, mandi, menenun, belanja dan lain sebagainya.

Kedua, kain tenun dijadikan sebagai hadiah yang memiliki aneka makna yaitu: (i) sebagai bentuk penerimaan seorang mertua kepada menantunya, (ii) menjadi anggota baru dalam sebuah keluarga; (iii) sebagai tanda keselamatan kepada kerabat yang hendak merantau; (iv) pengganti uang

sumbangan (*passolo*) dalam acara pesta; (v) sebagai ungkapan rasa cinta dan penghormatan kepada seorang pejabat atau orang berpengaruh; dan, (vi) sebagai sumbangan dalam kegiatan keagamaan. Transaksi ekonomi dalam bentuk resipikal melalui kain tenun sebagai hadiah *embedded* dalam adat dan agama yang dianut masyarakat Bugis-Wajo.

Ketiga, kain tenun sebagai simbol status dan gengsi sosial memiliki makna yaitu: banyaknya jumlah sarung yang digunakan sebagai penghias tempat resepsi perkawinan (*baruga*) untuk pengantin Bugis. Ini menyimbolkan tinggi rendahnya status sosial seseorang. Warna merah dan hijau dengan aksan benang emas dan perak sebagai simbol kebangsawanan.

Keempat, kain tenun sebagai benda yang wajib digunakan dalam upacara adat di antaranya: (i) upacara *mappalisu lolo*, yaitu upacara yang dilakukan sesudah 40 hari melahirkan; (ii) upacara *mappaci* yaitu malam pacaran bagi mempelai laki-laki dan perempuan; dan; (iii) upacara *maeppe gemme* (upacara pemotongan rambut anak). Pakaian kedua orang tuanya dipilih di antara pakaian adat. Anak tersebut lalu ditidurkan di atas tujuh susunan lipa (sarung) yang melambangkan tingkat kehidupan manusia.

Posisi penenun gedogan mampu bertahan sampai saat ini disebabkan kemampuan mereka mengisi kekosongan produksi kain tenun yang tidak dihasilkan oleh penenun ATBM. Produksi pengusaha tenun lokal, maupun yang diproduksi pabrik di aras nasional hingga global berfungsi sebagai busana yang digunakan dalam berbagai ritual adat dalam masyarakat Bugis. Kain tenun yang diproduksi penenun gedogan lebih dijadikan pilihan oleh masyarakat Bugis dan produksi sejenis yang dihasilkan oleh penenun ATBM serta pengusaha tenun. Posisi penenun ATBM dan pengusaha tenun juga tetap mampu bertahan karena mereka mampu menghasilkan pakaian sutera yang menjadi busana yang eksklusif dibarengi inovasi yang memadukan antara motif tradisional dan kontemporer.

Posisi Sulawesi Selatan sebagai penghasil benang sutera terbesar di Indonesia berkontribusi menjamin keberlanjutan kegiatan penenun pada ketiga kelompok penenun di Wajo. Kegiatan menenun bagi perempuan Bugis Wajo merupakan jenis pekerjaan yang membentuk etika kerja keras

(*reso/pajjama*), ketekunan (*tinulu*) dan kecermatan. Oleh karena itu, wanita yang mampu menyelesaikan satu lembar kain tenun dianggap sudah layak menikah. Pasalnya, ia sudah memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Etika kerja keras (*reso/pajjama*), ketekunan (*tinulu*) tidak mutlak dimiliki laki-laki sebagai penanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan pun dituntut memiliki etika kerja keras (*reso/pajjama*), ketekunan (*tinulu*) sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam masyarakat Bugis-Wajo, kehidupan dalam berumah tangga membutuhkan etika kerja keras (*reso/pajjama*), ketekunan (*tinulu*) dan kecermatan. Oleh karena itu, perempuan (istri) memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan adanya jaminan keberlanjutan penghidupan bagi semua anggota keluarganya. Perempuan (istri) sebagai pihak yang mengelola keuangan keluarga juga dituntut cermat atau teliti dalam menjaga harta hingga kehormatan suaminya. Dalam konteks kebudayaan Bugis, perempuan dikenal sebagai *pabbaressena uruwane* (tempat menyimpan harta yang didapatkan suami). Pada posisi inilah yang menjadi makna dari pesan bijak (kearifan lokal) orang Bugis yang mengatakan bahwa wanita yang sudah mampu menghasilkan kain tenun satu lembar dianggap sudah layak untuk menikah.

Dalam tradisi Bugis juga mengandung aneka mitos dan larangan terkait kegiatan menenun. Mitos dan larangan tersebut antara lain: *pertama*, masyarakat Wajo masih memercayai bahwa *walida* sebagai salah peralatan tenun yang digunakan dalam alat tenun gedogan merupakan senjata bagi kaum wanita. Mitos *walida* mengandung pesan moral tentang perlunya memuliakan perempuan. Pesan moral yang ingin disampaikan kepada kaum laki-laki soal mitos *walida* adalah agar kaum laki-laki memperlakukan perempuan secara baik dan jangan sampai mereka melakukan pelecehan seksual kepada kaum perempuan. Sementara, pesan moral yang hendak disampaikan kepada pihak perempuan dari mitos *walida* adalah agar mereka melakukan perlawanan terhadap kaum laki-laki yang ingin berbuat jahat terhadapnya.

Kedua, larangan berbicara sebelum benang yang sedang dianai (disau) berputar tujuh kali. Larangan ini memberikan peringatan kepada penenun untuk berkonsentrasi dan teliti dalam pekerjaan.

Ketiga, adanya hari baik dan hari dianggap buruk untuk menjalankan aktivitas menenun. Mitos hari baik dalam menenun mengandung pesan untuk segera menyelesaikan suatu pekerjaan, Pasalnya, masih ada pekerjaan lainnya yang bisa dikerjakan.

Keempat, adanya larangan atau *pemmali* untuk menenun pada waktu-waktu tertentu. Hal ini mengandung pesan bijak agar berhemat dan menabung sebagai bagian dari kesiapan mengantisipasi kehilangan pekerjaan dalam waktu tertentu serta adanya kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga.

Nilai-nilai kearifan lokal yang telah diuraikan di atas diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat, khususnya penenun gedogan. Namun penenun ATBM dan pengusaha tenun cenderung memiliki sikap rasional dan menghapus nilai-nilai magis yang diyakini dalam tradisi menenun. Rasionalisasi dalam kegiatan tenun oleh penenun ATBM dan pengusaha tenun memiliki kemiripan dengan kemunculan kapitalisme di Barat. Kapitalisme merupakan bentuk rasionalitas urusan dunia dan menghapus/menghilangkan nilai-nilai yang bersifat magis.

Kehadiran nilai-nilai kearifan lokal dalam kegiatan menenun menginspirasi pembentukan pranata keluarga (*family institution*) dalam masyarakat Bugis. Keluarga Bugis amat menekankan pentingnya setiap anggota keluarga memiliki etika tolong-menolong (*sibali reso/sibali perri*), pekerja keras (*reso/pajjama*), ketekunan (*tinulu*) dan tidak cepat menyerah (*temmangingngi*), ketelitian/cermat, irit/berhemat, etika perlindungan dan perlawanan terhadap kaum lemah atau tertindas. Fondasi keluarga dalam masyarakat Bugis dibangun berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam aktivitas menenun.

Pesan-pesan bijak tersebut ditanamkan kepada setiap anggota keluarga sebagai bagian dari upaya menegakkan *siri'na* (rasa malu/harga diri) dalam keluarga. Keluarga Bugis akan merasa malu (*masiri*) jika mereka jatuh miskin hanya karena mereka malas dalam bekerja. Keluarga Bugis juga merasa malu

(*siri*) dan memiliki rasa empati (*pesse*) untuk menolong sesamanya yang membutuhkan bantuan. Setiap anggota keluarga yang mendapat *pappaseng* (pesan bijak) dari leluhurnya dan memiliki kewajiban moral melaksanakannya sekaligus mewariskannya kepada generasi berikutnya. Meskipun tidak ada sanksi fisik terhadap orang yang melanggar *pappaseng* (pesan-pesan bijak). Namun sanksi moral dari anggota keluarga bakal diberlakukan dengan memberi stigma sebagai pelanggar yakni orang yang tidak menaati dan mendurhakai kedua orang tuanya karena tidak menjalankan *pappaseng*.

Harga diri atau rasa malu (*siri*) dari keluarga yang melekat (*embedded*) dalam pesan bijak, kerja keras, dan kecermatan membuat setiap anggota keluarga berusaha menegakkan *pappaseng* sebagai bagian loyalitas pengabdian kepada keluarga. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut saling berkelindan satu sama lain dalam membina kehidupan keluarga. Kegiatan tolong-menolong antara semua anggota keluarga mutlak diperlukan untuk menopang keberlanjutan kehidupan. Tolong-menolong antara anggota keluarga diimplementasikan dalam bentuk membantu dan meringankan beban anggota keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan. Kegiatan tolong-menolong diwujudkan dalam kondisi senang maupun mengalami kesusahan.

Setiap anggota keluarga juga dituntut bekerja keras (*reso/pajjama*). Dalam sistem sosial masyarakat Bugis, suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, apabila pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka istri juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu suami mencari nafkah termasuk anaknya. Dalam posisi tersebut istri dan anak mesti memiliki spirit pekerja keras dalam mencari rezeki untuk menolong suami sebagai pencari nafkah utama. Ketekunan, semangat pantang menyerah dan ketelitian berfungsi amat strategis dalam kehidupan keluarga. Semangat kerja keras dalam melaksanakan sesuatu tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak barengi ketekunan, semangat pantang menyerah dan ketelitian.

Secara empiris, kegiatan tenun berperan penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat Wajo. Gejalanya ditandai oleh sebagian besar komponen masyarakat Wajo memosisikan tenun sebagai sumber nafkahnya (baik sebagai sumber nafkah utama maupun sebagai sumber nafkah tambahan).

Komponen masyarakat yang turut menikmati aktivitas pertenunan di Wajo seperti petani murbei dan ulat sutera, pedagang bibit ulat sutera, pedagang benang, penenun gedogan, penenun ATBM, pengusaha tenun, buruh tenun, dan pedagang kain.

6.3 Tindakan Ekonomi Penenun Bugis

Intervensi pasar dan perkembangan teknologi tenun dalam kegiatan pertenunan rakyat di Wajo menyebabkan terjadinya tiga kelompok penenun (penenun gedogan, penenun ATBM, dan pengusaha tenun) yang memiliki perbedaan keterlekatan (*embeddednes*) dan moral ekonomi. Gejala ini membuat posisi kain tenun Bugis berada antara produk kultural dan selera pasar. Kehadiran ketiga kelompok penenun Wajo dewasa ini merupakan respons dari pengaruh kapitalisme pertekstilan serta intervensi pasar dalam masyarakat penenun. Respons penenun gedogan terhadap kekuatan kapitalis pertekstilan serta intervensi pasar menunjukkan bahwa mereka tetap melekat (*embedded*) pada nilai-nilai ke-Bugis-an yang menjunjung tinggi etika tolong-menolong (*sibale perri/sibali reso*), saling memanusiaikan manusia dan menghormati sesama (*sipakatausipakalebbi*), dan kejujuran (*lempu*). Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh penenun gedogan amat kuat dan tidak mudah dipengaruhi gejolak harga pasar. Konsistensi penenun gedogan memproduksi kain tenun yang sarat dengan nilai-nilai kultural memiliki daya tahan yang relatif kuat terhadap masuknya produk tekstil yang dihasilkan kapitalis yang beroperasi di aras lokal, nasional dan global ke dalam masyarakat Bugis-Wajo.

Masalah lain yang membuat penenun gedogan bisa eksis adalah terkait kualitas dan nilai estetika kain tenun yang dihasilkan lebih unggul ketimbang produksi tekstil yang diproduksi kaum kapitalis. Hasil tenun gedogan memiliki kerapatan benang yang lebih baik dibandingkan produksi ATBM dan ATM. Warna yang dihasilkan juga lebih mengkilat ketimbang tenunan ATBM dan ATM.

Ketahanan sistem ekonomi penenun gedogan juga diperkuat adanya prinsip resiprokal dalam kegiatan menenun sehingga keterikatan pada modal menjadi sangat minim. Penenun gedogan setiap saat bisa meminta

benang kepada penenun gedogan lainnya apabila sewaktu-waktu mereka membutuhkannya. Demikian pula sebaliknya, kekuatan yang berpotensi merobohkan sistem ekonomi penenun gedogan adalah ketika etnis Bugis meninggalkan budayanya. Akibatnya, kain tenun Bugis bukan tak menjadi penting lagi bagi mereka. Namun gejala tidak tampak hingga kini. Kondisinya saat ini menunjukkan bahwa kain tenun Bugis tetap menjadi lambang/symbol identitas masyarakat Bugis di mana pun mereka berada.

Penenun ATBM di Wajo merupakan kelompok penenun yang paling rentang mengalami kemunduran atau kematian usahanya dibandingkan dua tipe penenun lainnya. Meskipun sebagian tindakan ekonomi penenun ATBM masih berada pada kutub *oversocialized* (berdasarkan nilai-nilai budaya orang Bugis). Namun sebagian tindakan ekonominya mengalami pergeseran ke arah saling ketergantungan dengan aktor ekonomi lainnya. Pergeseran tindakan ekonomi ini mengakibatkan adanya kompetisi yang cukup ketat di antara para aktor ekonomi dalam pembentukan kapital. Penenun ATBM mulai memproduksi kain berdasarkan selera pasar yang sejatinya belum mampu bersaing dengan pengusaha tenun di pasar lokal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Apalagi bersaing produksi tekstil yang dihasilkan kaum kapitalis nasional dan global. Sementara, penenun ATBM yang memproduksi kain tenun khas Bugis (produk kultural) memiliki kualitas yang kalah bersaing dengan produk penenun gedogan. Kendala lainnya adalah, keterikatan penenun ATBM terhadap modal sehingga mereka kesulitan bersaing dengan kapitalis lokal, nasional maupun global.

Pengusaha tenun merupakan pihak yang paling dominan meraup surplus ekonomi dalam kegiatan pertenunan di Wajo pada dewasa ini. Tindakan ekonomi pengusaha tenun lebih mengarah ke kutub *undersocialized* dibandingkan dua tipe penenun lainnya. Faktanya, hanya sebagian tindakan ekonomi pengusaha tenun yang masih melekat (*embedded*) dengan nilai-nilai ke-Bugis-an. Kehidupan pengusaha tenun dalam keadaan tertentu cenderung menilai solidaritas dari sisi materi, sehingga acapkali sifat kekeluargaan diabaikan dan lebih mementingkan operasionalisasi usahanya. Meskipun nilai solidaritas sosial mengalami penggerusan dalam hal tolong-menolong dalam berbagai daur kehidupan dan kegiatan tenun, namun solidaritas

sosial juga mengalami penguatan soal pemberian sumbangan buat kegiatan sosial-keagamaan. Pembentukan kapital di kalangan pengusaha tenun tidak diarahkan untuk berkontribusi besar dalam urusan materi/dunia semata, melainkan tetap menyisakan ruang berbagi terhadap sesama manusia khususnya lewat kegiatan sosial keagamaan. Tampak jelas bahwa pengusahaan tenun kerap sebagai memosisikan dirinya penyumbang terbesar di antara kedua kelompok lainnya.

Jaringan sosial dalam dinamika aktivitas tenun memudahkan mobilitas sumber daya. Salah satu keunggulan kegiatan tenun yang dijalankan pengusaha tenun dibandingkan dua tipe penenun lainnya di Wajo (penenun gedogan dan penenun ATBM) adalah kemampuannya melakukan mobilitas sumber daya. Untuk mengembangkan usaha tenunnya, pengusaha tenun membutuhkan kemampuan memobilisasi sumber daya dalam bentuk informasi dan finansial. Kemampuan pengusaha tenun menggerakkan sumber daya ditopang jaringan sosial ekonomi yang dimilikinya. Jaringan sosial kalangan pengusaha tenun lebih luas dan melibatkan multipihak. Hal ini sejalan dengan temuan Powell dan Smith-Doerr (1994) tentang pentingnya jaringan sosial dalam membantu kemampuan memobilisasi sumber daya dalam bentuk finansial dan informasi dalam mengembangkan usaha. Pengusaha tenun dalam mengembangkan usahanya, tidak hanya mengandalkan jaringan sosialnya di tingkat lokal, tetapi juga membangun jaringan sosial di level nasional dan global. Inilah yang membedakan dengan dengan jenis penenun lainnya yang hanya mengandalkan jaringan sosialnya di tingkat lokal.

Preferensi penenun di Wajo dalam mengembangkan usahanya di daerah baru dan belum dikenal menerapkan strategi dengan cara menelusuri pebisnis daerah memiliki hubungan latar belakang kerabatan, kedaerahan, kesukuan dan pertemanan. Jika mereka gagal menemukan jaringan pebisnis dengan latar belakang demikian, maka mereka mengarahkan pilihannya kepada pebisnis dari etnis lainnya (non-Bugis) untuk diajak bekerja sama yang saling menguntungkan. Penelusuran tersebut menunjukkan bahwa jaringan sosial dimanfaatkan oleh penenun di Wajo untuk melakukan ekspansi bisnis.

Tipe jaringan sosial yang berada dalam tiga level penenun yaitu jaringan sosial yang bersifat emosional, kepentingan (*interest*), dan power, hierarkis maupun horizontal secara terus-menerus saling bersinggungan. Persinggungan tersebut acapkali menimbulkan ketegangan dari aktor yang terlibat dalam jaringan bersangkutan karena logika situasional dan struktur sosial dari setiap tipe jaringan. Di sinilah melahirkan tindakan rasional campuran. Tindakan *mix rationality* (rasionalitas campuran) merujuk pada tindakan sosial ekonomi yang dilakukan penenun Wajo yang menggabungkan antara tindakan rasionalitas formal dan tindakan rasionalitas moral ke dalam satu tindakan. Praktik tindakan *mix* rasionalitas di antara ketiga tipe penenun di Wajo memiliki derajat berbeda yakni tindakan sosial ekonomi penenun gedogan lebih menonjolkan rasionalitas moral dibandingkan dengan rasionalitas formal. Penenun ATBM cenderung lebih berada di tengah (moderat) yaitu tindakan sosial ekonominya cenderung menyeimbangkan antara tindakan rasionalitas formal dan tindakan rasionalitas moral. Pengusaha tenun menonjolkan tindakan rasionalitas formal dibandingkan dengan rasionalitas moral. Penenun gedogan lebih mengedepankan nilai-nilai kultural dalam memproduksi kain tenun, namun di sisi lain mereka hendak berupaya mendapatkan keuntungan ekonomis dari hasil produksi kain tenunnya.

Akumulasi kapital yang dilakukan oleh pengusaha tenun tak hanya diarahkan buat kepentingan urusan dunia (pengembangan usaha), melainkan juga digunakan membantu terhadap sesamanya dalam kegiatan sosial keagamaan. Pengusaha tenun memiliki kekuatan ekonomi lebih kuat dibandingkan dua tipe penenun lainnya. Namun, tidak serta mematikan dan mengeksploitasi penenun yang lebih lemah. Melainkan, pengusaha tenun membangun kemitraan dengan penenun ATBM dan penenun gedogan. Kemitraannya melibatkan adanya rasa solidaritas (moral) di satu sisi, dan di sisi lain mendatangkan keuntungan ekonomis setiap pihak yang bermitra. Kehadiran patron (pengusaha dan penenun ATBM) memberikan jaminan sosial dan pekerjaan serta upah kepada para klien (buruh) untuk bekerja sepanjang sejalan kehendak klien. Namun patron (pengusaha dan penenun ATBM) juga mendapatkan keuntungan ekonomi terhadap hasil produksi klien (kain tenun yang dihasilkan oleh klien (buruh tenun)).

Setiap tindakan ekonomi yang dijalankan tiga golongan penenun Wajo mempertimbangkan keuntungan ekonomis di satu sisi. Tetapi di sisi lain juga mempertimbangkan unsur perasaan solidaritas dan moral. Terjadinya kompromi antara tujuan ekonomi yaitu hendak mencari manfaat (*utility*) berupa keuntungan ekonomis dengan sifat tenggang rasa mencerminkan perwujudan proses adaptasi kultural yang membentuk rasionalitas ekonomi khas kalangan penenun. Rasionalitas menjadi kekhasan dari tindakan ekonomi penenun Wajo adalah tindakan “*mix rasionalitas*”. Suatu rasionalitas ekonomi yang terbangun melekat (*embedded*) dan terkandung dalam nilai-nilai budaya *siri*² dan *passe*³. *Siri*² beroperasi dengan cara memanusiakan orang lain yang kehidupan ekonominya sedang terpuruk sehingga tidak harus kehilangan martabatnya. Sementara *passe*³ beroperasi melalui rasa empati dan belas-kasih untuk bisa saling berbagi (tolong-menolong), sehingga tetap memelihara solidaritas dan sikap saling percaya dalam kelompok.

Rasionalitas ekonomi yang mewujudkan bukan merupakan penghalang menuju suatu tata-cara pengelolaan perekonomian modern yang menuntut rasionalitas ekonomi tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, kehadiran tiga-tipe penenun Wajo memiliki basis etika moral ekonomi dan jaringan sosial yang berbeda dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya “*mix rasionalitas*” dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi. Umpamanya, penenun gedogan memiliki rasionalitas yang lebih mengedepankan solidaritas sosial atau kolektivitas karena melekat kuat pada nilai dan norma yang dianut masyarakat Bugis. Tindakan ekonomi penenun gedogan lebih didorong rasa solidaritas yang tinggi dan bukan berorientasi mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Rasionalitas penenun ATBM cenderung berada di tengah-tengah kutub solidaritas sosial atau kolektivitas dan individualis yang berorientasi diri (*self interest*). Sedangkan, pengusaha tenun memiliki tindakan ekonomi yang cenderung ke arah individualis ketimbang kolektivitas yaitu ragam tindakannya berorientasi keuntungan ekonomi serta mengarah saling ketergantungan dengan aktor ekonomi lain.

Rasionalitas dari Weber (1978; Turner, 1998; Ritzer dan Goodman: 2007) memetakan 4 kategori tindakan yaitu; 1). Rasional Instrumental (*Zweckrationalitat*), yaitu tindakan rasional yang berdasarkan kesadaran

akan pertimbangan dan pilihan yang berhubungan dengan tujuan tindakan serta alat yang digunakan mencapainya. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang paling rasional. 2) Rasionalitas yang Berorientasi Nilai (*Werttrationalitet*), yaitu tindakan aktor yang dipandu suatu nilai dalam menentukan tujuannya; 3) Tindakan Tradisional (*Traditional Action*) yaitu tindakan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masa lalu dan masih dipraktikkan serta diterima begitu saja tanpa adanya refleksi maupun perencanaan dari aktor; 4) Tindakan Afektif (*Affectual Action*) yaitu suatu tindakan yang dilandasi perasaan atau emosi, tanpa adanya refleksi intelektual dan perencanaan yang sadar.

Teori Weber amat tepat untuk menganalisis problematika penenun di Wajo. Temuan penelitian Syukur (2015) menunjukkan bahwa adanya “tindakan ekonomi campuran” yaitu rasionalitas instrumental dan rasionalitas tradisional hadir bersama dalam satu tindakan dari penenun. Bukti empirisnya menunjukkan bahwa ibu SL⁷ hanya mau menjual kain tenun corak bangsawan (corak cobo, warna kuning dan hijau) kepada kalangan bangsawan Bugis. Sedangkan kain tenun corak biasa ia menjualnya kepada kalangan masyarakat umum sesuai harga pasar. Tindakan ibu SL yang mau menuruti pesan (*pappaseng*) orang tuanya yang menunjukkan bahwa tindakannya bersifat tradisional. Pasalnya ia menuruti kebiasaan turun-temurun dari orang tuanya yang berprofesi sebagai penenun bagi raja-raja Bugis di masa lalu. Namun, di sisi lain tindakannya juga mengandung rasionalitas instrumental karena kain tenun yang dijual kepada kaum bangsawan mendapatkan keuntungan ekonomis dengan harga jualnya sesuai harga pasar.

Bukti empiris lainnya menunjukkan bahwa kalangan pengusaha tenun mampu mengakumulasi kapital dalam bisnisnya. Akan tetapi mereka tidak berorientasi ekonomi semata, melainkan sebagian kapital yang diperolehnya diperuntukkan buat kegiatan sosial dan keagamaan, seperti membantu kaum lemah, mengeluarkan zakat, naik haji dan lain-lain. Tindakan kalangan pengusaha tenun yang mengumpulkan kapital (sebagai rasional instrumental) sekaligus berfungsi sebagai sarana berbagi dengan sesama manusia dan mendekatkan diri pada Tuhan (tindakan afektif).

7 Nama seorang responden

Terdapat perbedaan dengan teori keterlekatan (*embeddeness*) Granovetter (1985; 1992) yang mengemukakan tindakan aktor ekonomi bekerja di antara kutub *undersosializad* (tindakan ekonomi rasional dan berorientasi pencapaian individual (*self interest*)) dan kutub *oversosialized* (tindakan ekonomi dituntun aturan-aturan berupa nilai dan norma). Teori keterlekatan Granovetter tersebut terkesan memandang nilai-nilai dan norma, budaya serta agama bersifat statis, jika dikaitkan dengan kasus masyarakat tenun Wajo. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kandungan maksa dari tiga kelompok penenun terhadap nilai dan norma serta agama yang dianutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai dan norma serta dogma agama berpeluang terbuka untuk menafsirkan kembali berdasarkan orientasi tindakan setiap aktor ekonomi. Meskipun tindakan ekonomi yang dijalankan penenun melekat (*embedded*) dalam budaya dan agama yang dianutnya. Namun realitas menunjukkan bahwa tindakan ekonomi dalam memaknai kerja (*reso*) dan nasib (*were*) sebagai bagian dari nilai budaya dan dogma agama yang dianut orang Bugis berbeda di antara tiga tipologi penenun. Kondisinya terjadi karena kebudayaan dan dogma agama sejatinya menyisakan ruang penafsiran atau pemaknaan ukang oleh tiga tipe penenun Wajo. Melemahnya legitimasi adat dalam kehidupan masyarakat Bugis dan absennya pemuka agama yang amat dihormati serta memiliki otoritas dalam menafsir dogma agama di tengah kehidupan masyarakat menyebabkan masyarakat penenun memiliki ruang penafsiran atau memaknai kembali kebudayaan dan dogma agama yang dianutnya sesuai orientasi hidup serta kondisi sosial yang mereka hadapinya.

Keyakinan bahwa *dalle* (rezeki) setiap orang telah ditentukan (secara kualitas maupun kuantitas) oleh yang Maha Kuasa menunjukkan bahwa ketergantungan sistematis kehidupan “duniawi” atas “agama” yang sakral yaitu duniawi tidak bernilai kecuali berhubungan dengan “agama”. Dualistik kerja (*reso*) dan nasib (*were*) yaitu kerja duniawi tidak dijalankan berdasarkan efisiensi bagi etika kerja produktif. “Perkenaan Tuhan” dengan ketaatan syariah di satu pihak bekerja efisien serta rezeki yang diperoleh saling berkelindan tetapi tidak bersifat kausalistik. Orientasi tindakan ekonomi penenun gedogan melekat (*embedded*) dalam pemahaman budaya dan agamanya dan menganggap kerja (*reso*) dan rezeki (*dalle*) amat ditentukan oleh Tuhan ketimbang usaha manusia. Menurut mereka kerja (*reso*) dan rezeki (*dalle*) tidak

merujuk pada kerja rasional dan sistematis (*undersocialized*) melainkan pada *Elona Puang* Allahu Taala (“ridho Tuhan”) yang bersifat abstrak dan misterius. Tindakan ekonomi semacam ini terkesan memaknai nilai-nilai budaya Bugis dan ajaran agama sebagai penghalang mencapai kemajuan dalam kehidupan ekonomi. Kondisi semacam ini oleh Geertz (1983) menganggap budaya sebagai penghalang kemajuan ekonomi (*culture-as-obstacle*).

Kalangan penenun ATBM memandang bahwa kerja (*reso*) untuk mendapatkan rezeki (*dalle*) merupakan tututan budaya dan agama. Meskipun dalam pandangan mereka bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Tuhan untuk setiap orang. Namun karena sifatnya abstrak, maka rezeki harus dicari dengan berusaha karena ia tidak datang menghampiri manusia. Kerja keras merupakan jembatan mendapatkan rezeki. Kepasrahan akan timbul apabila kerja maksimal sudah dilaksanakan. Mereka bersiap menerima apapun konsekuensi dan hasilnya sebagai bagian nasibnya (*were'na*). Tidak ada rasionalisasi untuk mengevaluasi kesuksesan atau kegagalan yang dialami dalam berusaha. Orientasi tindakan ekonomi di kalangan pengusaha tenun melekat (*embedded*) pada pemahaman budaya dan agamanya yang menganggap kerja (*reso*) dan rezeki (*dalle*) ditentukan oleh Tuhan sebagai bagian dari nasib (*were*) yang mesti diterima manusia. Oleh karenanya, rezeki merupakan bagian dari nasib (*were*) yang bersifat abstrak. Manusia wajib bekerja keras mencarinya. Menurut mereka kerja (*reso*) dan rezeki (*dalle*) merujuk kerja rasional dan sistematis agar mendapat ridho Tuhan yang abstrak dan misterius. Pengusaha tenun cenderung selalu melakukan rasionalisasi untuk mengevaluasi kesuksesan atau kegagalan kerjanya. Pembentukan kapital bukan sesuatu yang dilarang dalam konteks budaya Bugis dan agama Islam sepanjang dilakukan secara jujur dan halal (*sappa dalle hallala*). Pasalnya, cara demikian berpotensi seseorang membantu orang lain yang kurang beruntung. Tindakan ekonomi semacam ini terkesan memaknai nilai-nilai budaya Bugis dan ajaran agama sebagai pendorong mencapai kemajuan kehidupan ekonomi. Di sinilah posisi budaya dan agama berperan sebagai pendorong kegiatan ekonomi (*culture-as-stimulus*) (Geertz: 1983).

Berbagai jaringan yang dimiliki dan dimanfaatkan kalangan penun dalam kegiatan ekonomi menunjukkan adanya *mix* rasionalitas. Ikatan-ikatan yang membalut jaringan tersebut misalnya *interest* (kepentingan), hubungan emosional atau solidaritas, dan *power* (kekuatan) bekerja saling berhimpitan dalam jaringan milik penun. Jaringan yang diikat *interest* (kepentingan) cenderung mengedepankan rasionalitas ekonomi atau rasionalitas formal dengan ikatan lemah. Jaringan yang diikat hubungan emosional yang lebih menonjolkan moral ekonomi berlangsung dalam ikatan yang kuat. Kekuatan (*power*) berlangsung dalam hubungan yang bersifat asimetris atau hierarkis. Namun tidak bersifat eksploitatif dan manipulatif tetapi menjurus pada pola hubungan patron/klien. Posisi patron dalam jaringan yang dimiliki penun tidak menghisap klien, melainkan memposisikan diri sebagai pengayom dan memberikan jaminan keamanan dan penghasilan klien.

Konsep pemikiran teoretik Granovetter memberikan suatu interpretasi yang cenderung lebih mendasar. Ia mengatakan bahwa aktivitas kehidupan ekonomi mengandung “kelekatan sosial” (*embeddedness*). Oleh karenanya, tindakan ekonomi seorang individu tidak luput dari hubungan-hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kecenderungan ini memberikan kerangka pemikiran bahwa nilai-nilai budaya dan agama cukup berpengaruh dalam mendorong perkembangan ekonomi. Atau, sebaliknya menghambat perkembangan ekonomi pada kelompok masyarakat tertentu. Karenanya, merupakan suatu fenomena sosial yang cukup rumit untuk memisahkan antara “basis moral” dengan “tindakan rasional ekonomi” dalam masyarakat. Hal ini disebabkan keduanya saling berkaitan secara bervariasi, termasuk dalam kasus kehidupan sosial ekonomi masyarakat penun di Wajo. Pasalnya, dalam realitasnya adalah antara pertimbangan moral dan aktivitas ekonomi yang berbasis kalkulasi rasional, untung-rugi, acap kali bersifat kontradiktif. Namun dalam penelitian Syukur (2015) menemukan antara moral dan aktivitas ekonomi terjadi kompromi. Dalam pengertian, di satu pihak perlu mengikuti tuntutan “moral ekonomi” yang telah melekat kuat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun di pihak lain, tuntutan mekanisme pasar sudah semestinya dikedepankan sebagai pertimbangan rasionalitas ekonomi supaya meraup keuntungan ekonomi.



KONTRIBUSI EKONOMI DARI WIRAUSAHA LOKAL BERBASIS KOPI: PELAJARAN DARI KABUPATEN SIMALUNGUN, SUMUT

Rokhani

Ekonomi lokal di Simalungun dibangun dari *multireligion* dan multietnis sehingga mendukung ekonomi berbasis nilai keanekaragaman khas Simalungun. Ekonomi lokal khas Simalungun dibangun atas rasionalitas yang berbasis nilai (*value*) lokal untuk kesejahteraan petani kopi Arabika. Nilai-nilai lokal tersebut adalah kepercayaan, komitmen, solidaritas sosial, kegotongroyongan, kekeluargaan yang mendorong tindakan kolektif, sehingga melahirkan kolektivitas ekonomi. Kolektivitas ekonomi tersebut salah satunya mewujudkan dalam wadah kelompok tani.

Terbentuknya ekonomi lokal dalam masyarakat petani kopi Arabika di Simalungun ditandai oleh kemunculan aktor yakni pedagang kopi Arabika yang berasal dan sekaligus sebagai petaninya (petani pedagang). Pedagang muncul sebagai kelompok menengah yang berasal dari golongan petani semakin bertahan (*survive*), berlahan sempit melalui campur tangan negara dan swasta (eksportir). Intervensi negara baik dalam bentuk pembentukan kelembagaan seperti kelompok tani, gapoktan, maupun HMKSS⁸ turut mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal di Simalungun.

8 Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatra Simalungun (HMKASS)

Tabel 7.1 Identifikasi lembaga lokal berdasarkan konsep modal dan habitus Bourdieu di Nagori Sait Buttu Saribu, Kabupaten Simalungun 2016

| No | Ragam Lemabaga Lokal | Modal | | | | Habitus |
|----|--------------------------|---------|--------|----------|--------|---------------------------|
| | | Ekonomi | Sosial | Simbolik | Budaya | (sosial/ instrumental) |
| 1 | Marsidapari | | √ | | √ | Sosial |
| 2 | Beskoman | | √ | | √ | Sosial > Instrumental |
| 3 | Wirid & Persatuan | | √ | √√ | √ | Sosial |
| 4 | STM | | √ | √√ | √ | Sosial |
| 5 | Arisan | √ | √√ | √ | √ | Sosial > Instrumental |
| 6 | Kelompok Tani & Gapoktan | √ | √ | √ | √ | Sosial > Instrumental |
| 7 | Ibamu | √ | √ | √√ | √ | Sosial > Instrumental |
| 8 | Pujakesuma | √ | √ | √√ | √ | Sosial > Instrumental |
| 9 | Geraja | √ | √ | √√ | √ | Sosial > Instrumental |
| 10 | Yayasan Ar-Ridho | | √ | √√ | | Sosial |

Lembaga lokal di Nagori Sait Buttu Saribu, Simalungun rata-rata memiliki habitus yang mencerminkan kentalnya tindakan dengan motif sosial dibandingkan instrumental. Ragam lembaga lokal tersebut memainkan modal sosial, budaya dan simbolik untuk memperkuat eksistensinya pada masyarakat yang dominan bekerja sebagai petani kopi arabika. Lembaga dengan habitus tersebut menjadi wadah/media dan katalisator dalam melakukan tindakan kolektif, di mana tindakan kolektif. Di sini dimaknai sebagai tindakan sukarela (didorong oleh moral/sosial) yang diambil oleh kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Habitus aktor yang tergabung dalam lembaga lokal marsidapari, wirid, serikat tolong-menolong (STM) maupun Yayasan Ar-Ridho lebih bertindak dengan motif sosial. Lembaga lokal ini pula yang menjadi *field* bagi aktor yang tergabung di dalamnya melakukan praktik sesuai dengan tuntutan *field*-nya. Sebagai contoh petani *smallholders* kopi arabika dan pedagang yang tergabung dalam kelompok tani membawa konsekuensi pada habitus pertukaran yang terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai kelompok dan tidak dapat melakukan pertukaran bebas sebagaimana layaknya dalam pasar bebas.

Tingkat Kesejahteraan Rumah tangga Petani Kopi Arabika di Nagori Sait Buttu Saribu sebagian besar berada pada kategori cukup (47,62%). Berdasarkan strata, rumah tangga petani kopi arabika di Kabupaten Simalungun sudah memiliki tingkat kesejahteraan dalam kategori hidup layak, terutama pada rumah tangga strata atas dan menengah. Sedangkan, pada rumah tangga strata bawah sebagian besar masih dalam kategori hidup cukup namun masih ada yang masuk dalam kategori miskin sekalipun hanya 1,39%. Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kopi arabika yang sebagian besar masih masuk dalam tingkat 'cukup' disebabkan oleh kepemilikan dan penguasaan lahan yang menjadi basis ekonomi rumah tangga petani relatif sempit. Rata-rata petani kopi arabika adalah etnis Jawa yang membeli lahan (ladang kopi) dari etnis Batak secara bertahap. Rumah tangga petani kopi arabika *strata* bawah dengan kepemilikan ladang kopi 0,04 hektare (400 rante) sampai 1,15 hektare harus berstrategi nafkah ganda untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sebagian besar petani melakukan tumpang sari kopi arabika dengan tanaman seperti jagung, cabe, tomat, kubis hingga kentang yang disebut dalam istilah lokal sebagai "tanaman muda". Hasil pemanenan tanaman muda ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Berbeda dengan rumah tangga strata atas yakni 'petani pedagang' menganggap kopi lebih sebagai tanaman tabungan, dan dengan kekuatan kapital yang dimilikinya sudah mampu mengakumulasi modal untuk mengembangkan usaha.

Sebagaimana semangat yang termaktub dalam UU No. 6/2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut dipergunakan 2 pendekatan yakni Desa membangun dan membangun Desa. Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mengikutsertakan aktor ekonomi lokal yang berciri sosial *entrepreneur* untuk bergabung dalam organisasi ekonomi yang diintroduksi oleh negara, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

7.1 Kolektivitas Ekonomi

Tergabungnya petani kopi arabika dalam sirkuit pasar global (pasar ekspor kopi) menunjukkan bahwa pasar lokal kopi *embedded* dengan pasar global, dan sebaliknya pasar global *embedded* di dalam pasar lokal. Penetrasi pasar global bisa memiliki konsekuensi sama atau berbeda tergantung nilai (*value*) yang dipegang teguh oleh masyarakat. Karakteristik etnis Jawa di Simalungun (Batak Jawa) dan Batak yang telah membaaur dengan etnis Jawa melalui proses kawin-mawin tidak serta merta melahirkan akulturasi budaya namun diversitas budaya, karena inti budaya masing-masing masih dipertahankan hingga kini.

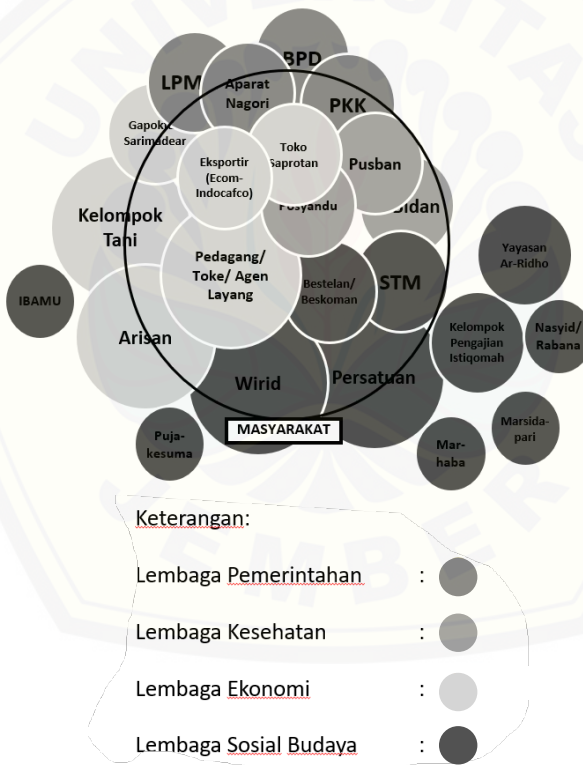
Etnis Jawa yang telah berdiaspora di Simalungun dan mengalami mobilitas vertikal melalui saluran ekonomi dengan bekerja sebagai pedagang kopi tetap bertahan (*persisten*) hingga kini karena memiliki habitus untuk selalu mendapatkan keuntungan dengan kekuatan kapital yang dimiliki, namun di sisi lain masih memegang teguh nilai-nilai (*values*) seperti berdagang sebagai bentuk pengabdian pada keluarga, jujur, adil, tidak culas, dan tidak rakus namun masih mendasarkan tindakan pada sisi moral yang mewujud dalam bentuk solidaritas sosial. Pedagang dengan karakteristik tersebut di atas masih dapat eksis di tengah persaingan usaha dagang yang sengit, sebaliknya beberapa pedagang gulung tikar (*collaps*) karena berbagai faktor. Faktor utama adalah habitus pedagang yang terlalu rakus (*greedy*), yakni mengambil margin keuntungan terlalu besar dari petani sehingga dijauhi petani yang semula menjadi langganannya. Tak jarang lobi-lobi khusus dengan pengambil kebijakan “atas nagori” hingga tindakan (praktik) memotong mata rantai usaha pedagang lain dilakukan oleh oknum pedagang yang menjadi *rent seeker* demi keuntungan pribadi. Dalam teori pemasaran perilaku *rent seeker* dikenal dengan perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*). *Bridging rent seeker* kuat, namun *bonding* di tingkat lokal lemah, sehingga tidak mendapatkan langganan dan dalam jangka panjang berdampak pada *collaps*-nya usaha dagang yang telah digelutinya.

Di tataran ekonomi global, nilai-nilai sebagai cerminan lokal semakin penting untuk keberlanjutan usaha. Di tingkat mikro (*nagori*) hubungan antara agen layang dan agen kopi arabika menyerupai hubungan patron klien, dan hubungan inilah yang membuat para agen mampu bertahan di tengah perlombaan dengan agen lain. Realitas di lapang menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi perpindahan agen layang ke agen lain. Bahkan karena keluwesan dalam berproduksi, kepercayaan (*trust*) yang tinggi, kemampuan bernegosiasi, menjaga komitmen/loyal, perilaku jujur, jaringan (*network*) yang kuat dan wawasan tentang bisnis yang diperoleh dari kelembagaan lokal yang diikuti, agen mampu mengakses pasar hingga ke tingkat *afalis* (penjamin) bahkan eksportir kopi arabika.

Sifat spesifik dari kopi arabika yang pengembangannya diarahkan pada kopi *specialty* dapat dipertahankan sebagai produk lokal Simalungun dengan *branding* Kopi Arabika Sumatra Simalungun mampu bertahan karena bentuk hubungan patron klien, sehingga mutu kopi arabika Sumatra simalungun dapat dipertahankan. Transaksi dapat dilakukan secara cepat karena dasar kepercayaan (*trust*) yang tinggi antara petani dan agen. Jadi kekuatan ekonomi lokal Simalungun adalah prinsip moral dan kepercayaan yang dipegang kuat setiap aktor. Prinsip moral yang dipegang teguh oleh para agen justru menjadi sarana efektif dalam penyelesaian permasalahan seperti pembayaran kopi arabika dalam transaksi antara *afalis* (penjamin) yang memiliki gudang besar dengan agen.

Sama halnya dengan gambaran ekonomi di aras makro yang dijelaskan oleh Benjamin (2013) dalam konsep *Sosial Solidarity Economy* (SSE), gambaran ekonomi lokal di Simalungun juga dibangun di atas norma-norma sosial, kerja sama (*cooperation*) sekaligus menjadi ciri budaya timur (Asia). Nilai solidaritas sosial inilah yang akhirnya menumbuhkan tindakan kolektif untuk menghadapi tuntutan pasar ekspor kopi. Nilai solidaritas sosial yang tertanam (*embedded*) dalam tindakan aktor dalam sistem ekonomi lokal mampu mendorong tindakan kolektif pada aktor (pedagang) dalam bentuk kesalehan sosial. Di sinilah tesis Weber tentang konflik yang damai di pasar teruji, bahwa sekalipun terjadi konflik namun ke depan ekonomi yang persisten adalah ekonomi yang dibangun atas dasar kerja sama

(*cooperation*). Kolektivitas ekonomi atau ekonomi solidaritas yang menjadi ciri khas ekonomi lokal di Simalungun ini dibangun dengan basis etnis yang beragam, *multireligion* menjadi sebuah alternatif bahwa model ekonomi lokal dapat dibangun dengan basis budaya yang beragam. Sekalipun untuk kasus Simalungun, nilai-nilai lokal yang luhur masih belum dapat mengantar petani kopi pada kehidupan yang sejahtera secara menyeluruh, karena habitus sebagian kecil aktor pedagang yang masih bertindak sebagai *rent seeker* dan dalam pemasaran kopi masih terdapat aktor yang berperilaku oportunistik (*opportunistic behavior*).



Gambar 7.1 Integrasi lembaga lokal di Nagori Sait Buttu Saribu, Kabupaten Simalungun 2016

Etika solidaritas yang menjadi ciri khas Simalungun memang telah terbangun sejak lahirnya lembaga lokal seperti marsidapari, pujakesuma, beskoman, ibamu, namun semakin berkembang dengan intervensi negara melalui serangkaian kebijakan, intervensi dari sisi kelembagaan dan peran swasta (dunia usaha) termasuk eksportir hingga pembeli (*buyer*). Bahkan peran negara sangat nyata karena turut memperkenalkan kopi arabika di Simalungun melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun. Ekonomi lokal di Simalungun diperkuat oleh penyesuaian habitus aktor pada tuntutan pasar dan makin berkembang dengan kehadiran negara (pemerintah), dunia usaha termasuk eksportir hingga pembeli (*buyer*). Negara hadir dengan serangkaian kebijakan, sekalipun terkadang masih kurang tepat dalam langkah praktisnya seperti pemberian alat pengolah kopi dengan spesifikasi yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan petani *smallholders* kopi arabika. Namun rencana pemerintah untuk mendorong perluasan areal tanam kopi arabika dengan memanfaatkan lahan tak terpakai (bekas perkebunan teh) layak diapresiasi mengingat pasar ekspor kopi arabika yang masih terbuka luas, terlebih untuk kopi arabika yang pengembangannya diarahkan pada produk *specialty*.

Ekonomi lokal dalam masyarakat petani kopi Arabika di Simalungun ditandai oleh kemunculan pedagang kopi arabika yang berasal dari petani kopi arabika, sebagian adalah migran etnis Jawa yang telah berdiaspora di Simalungun. Identitas aktor lokal yakni etnis Batak dan pendatang yakni etnis Jawa yang sudah berdiaspora terus di (re)produksi di arena (pasar). Simalungun dengan basis multireligiusitas dan multietnis menjadikan aktor (baik lokal maupun pendatang) hidup dalam realitas yang majemuk, di mana setiap aktor lahir dari latar belakang identitas yang berbeda (gereja, Ibamu, Pujakesuma maupun wirid) dan pengalaman yang berbeda, yakni sebagai petani maupun pedagang, namun memiliki hak yang sama di arena (pasar). Doxa dan orthodoxy bahwa ekonomi kopi arabika yang semula hanya 'dikuasai' etnis Batak yang merupakan bentuk dominasi ekonomi, kini menjadi heterodoxy dengan munculnya etnis Jawa yang telah berdiaspora di Simalungun menjadi salah satu 'pemain' dalam ekonomi kopi dan turut membangun ekonomi lokal. Pedagang muncul sebagai kelompok menengah

yang berasal dari golongan petani *small holders* kopi arabika, lalu melalui campur tangan negara maupun swasta (eksportir) akhirnya menjadi aktor yang sukses dan turut membangun ekonomi lokal.

Intervensi negara melalui serangkaian kebijakan, intervensi berupa mesin pengolah kopi, maupun intervensi pembentukan kelembagaan seperti kelompok tani, Gapoktan, maupun HMKSS turut mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal di Simalungun. Artinya ekonomi lokal di Simalungun dibangun di atas keberagaman etnis (diibaratkan beribu etnis) sesuai dengan nama nagorinya yakni Sait Buttu Saribu, dengan etnis dominan Batak Jawa tanpa menafikan peran 4 (empat) etnis Batak yang diyakini dalam tatanan sejarah dikenal sebagai etnis membuka lahan, yakni etnis Batak bermarga Damanik, Saragih, Purba dan Sinaga. Intinya di tataran filosofi menjelaskan dialektika filosofi ekonomi, yakni sebuah kontestasi filosofi antara ekonomi global dan ekonomi lokal kopi arabika. Tokoh ekonomi global/ekonomi pasar bebas adalah Milton Friedman, yang memaparkan intervensi negara dalam bentuk subsidi dianggap tidak efektif bahkan dinilai berdampak negatif. Filosofi ekonomi pasar bebas menjunjung tinggi kebebasan individu untuk berusaha dan memiliki alat produksi sendiri. Kontrol negara dianggap sebagai penyebab ketidakejahteraan. Aliran ini percaya bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas, karena filosofi ekonomi pasar bebas adalah individu, di mana aktor secara pribadi dapat melakukan transaksi sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya tanpa kontrol negara. Ini berarti bahwa pasar bebas sangat menjunjung tinggi kebebasan ekonomi bagi setiap individu.

Tesis yang dibangun ekonomi global menjadi ‘jauhkan negara/kolektivitas (subsidi) atau campur tangan kekuatan non pasar dari pasar’ sehingga arena (*field*)-nya menjadi pasar itu sendiri, produsen dan pembeli, di mana pasar sebagai institusi yang sekaligus sebagai habitus. Sebaliknya, filosofi ekonomi Keynesian dengan tokoh John Maynard Keynes menyatakan bahwa perekonomian suatu negara tidak dapat diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar sehingga diperlukan campur tangan pemerintah melalui serangkaian kebijakan (misal: subsidi). Dalam konteks ekonomi lokal kopi arabika, tindakan ekonomi aktor juga melekat (*embedded*) di level institusi

dan kelompok. Di mana lembaga lokal beserta nilai-nilai lokal mendapatkan tempat pada ekonomi lokal. Keterlekatan lembaga lokal (*local institutional embedded*) mewujud dalam bentuk kolektivitas lokal ala Olson. Tesis yang dibangun ekonomi lokal adalah ‘harus ada campur tangan institusi lokal dalam pasar’, sehingga arena (*field*)-nya dari semula hanya 3 (tiga) yakni pasar, produsen dan pembeli menjadi 4 (empat) yakni pasar, produsen, pembeli serta kelompok. Dalam kelompok terdapat norma dan nilai-nilai bersama, sehingga habitus individu yang tergabung dalam kelompok harus sesuai dengan norma kelompok yang telah disepakati (arena).

Dalam konteks Simalungun kelompok yang menjadi basis kolektivitas dari beragam etnis adalah kelompok tani. Bertambahnya *field* tersebut menyebabkan perubahan habitus dari pertukaran bebas menjadi pertukaran terikat. Karena pertukaran dalam kelompok diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sehingga melahirkan kolektivitas ekonomi. Sekalipun bangun atau wadah kolektivitas ekonomi tidak selalu dalam bentuk koperasi, namun prinsip-prinsip koperasi telah diadopsi oleh beberapa lembaga lokal di Simalungun. Ekonomi pasar bebas tidak sesuai dengan jati diri bangsa karena cenderung menafikkan peran nilai-nilai moral. Individu dihadapkan pada persaingan (pertarungan) sehingga tidak memungkinkan terwujudnya kerja sama secara sinergis. Terkait dengan konteks Indonesia, dari kajian ini ekonomi yang sesuai dengan jati diri bangsa adalah kolektivitas ekonomi, dengan nilai-nilai penjabaran dari pancasila, yang memberi ruang bagi negara untuk melakukan berbagai intervensi melalui subsidi dan tingkat lokal memberi ruang pada lembaga-lembaga lokal untuk turut berperan membangun ekonomi lokal. Ekonomi lokal memberi ruang luas pada kebudayaan, agama dan nilai-nilai lokal, di mana nilai-nilai lokal seperti kepercayaan (*trust*), solidaritas sosial, komitmen hingga kolektivitas lokal dapat disinkronisasi dengan nilai-nilai modern dan tuntutan pasar.

7.2 Konstruksi Teori

Secara teoritis, pendekatan yang saya bangun dilandaskan tiga teori besar, yakni tindakan sosial-Weber, keterlekatan-Granovetter dan praktik-Bourdieu dalam studi kasus ekonomi lokal di Simalungun dengan memandang pasar

sebagai arena. Menelaah ekonomi lokal hanya dengan satu teori dalam pandangan peneliti akan mereduksi banyak hal. Upaya meminjam 3 (tiga) teori sebagai alat analisis dalam menelaah ekonomi lokal dilakukan oleh peneliti karena ketiga teori tersebut memiliki titik temu. Menurut Weber, tindakan sosial (*social action*) sebagai tindakan individu (aktor) yang memiliki makna subjektif bagi individu tersebut tetapi berdampak pada individu lain dan mengharapkan timbulnya reaksi dari individu lain tersebut. Artinya aktivitas ekonomi tergolong tindakan sosial karena tindakan aktor selalu bersinggungan dengan individu lain dan menghadirkan reaksi atas tindakan tersebut. Tindakan ekonomi adalah tindakan sosial yang berorientasi ekonomi, yakni upaya memenuhi kebutuhan, termasuk di dalamnya upaya menguasai sumber daya ekonomi dan mencari keuntungan.

Pemikiran Granovetter dibangun dari 3 (tiga) proposisi utama, yaitu: (1) Tindakan ekonomi adalah suatu bentuk tindakan sosial (*economic action is form of social action*), (2) Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial (*economic action is socially situated*), dan (3) Institusi-institusi ekonomi dikonstruksi secara sosial (*economic institutions are social constructions*). Dari ketiga proposisi tersebut, pemikiran Granovetter hampir sama dengan pemikiran Weber yang akhirnya dipertajam oleh Swedberg dan Granovetter, yakni: (1) tindakan ekonomi adalah sosial, (2) tindakan ekonomi selalu melibatkan makna, dan (3) tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan. Dengan mengacu pada pemikiran Weber tentang konsep tindakan sosial, tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Weber menjelaskan bahwa aktor selalu mengarahkan tindakannya kepada perilaku orang lain melalui makna-makna yang terstruktur. Artinya aktor menginterpretasikan (*verstehen*) kebiasaan-kebiasaan, adat, dan norma-norma yang dimiliki dalam sistem hubungan sosial yang sedang berlangsung. Tindakan ekonomi menurut Weber disituasikan secara sosial dan melekat pada jaringan hubungan sosial personal yang sedang berlangsung dari para aktor (Damsar 2009).

Menurut Granovetter (1985), *social embeddedness* membutuhkan moral ekonomi tertentu. Etika kolektivitas dibangun oleh aktor (individu maupun institusi) di dalam masyarakat untuk menopang sistem kehidupan mereka.

Tindakan ekonomi aktor yang berpegang pada *sosial embeddedness* terjadi pada saat ada kesadaran aktor yang diikat oleh norma-norma dalam masyarakat untuk membangun sistem ekonomi kolektif yang berfungsi sebagai “asuransi” bagi risiko ekonomi si aktor. Konsep Granovetter tentang keterlekatan dimaksudkan untuk menganalisis tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat di dalam jaringan-jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor, di samping juga di level institusi dan kelompok. Jaringan sosial yang terjadi di dalam kehidupan ekonomi dalam suatu masyarakat dimaksudkan sebagai rangkaian hubungan yang khas di antara sejumlah orang (Granovetter 1985, Granovetter & Swedberg 1992).

Granovetter (1985) menjelaskan bahwa tindakan ekonomi aktor di pasar terlekat dengan aspek sosial budayanya melekat pada struktur sosial budayanya. Dalam kerangka Granovetter (1992), ada keterlekatan (*embeddedness*) tindakan aktor pada jaringan, norma dan kepercayaan dalam struktur sosial. Berbicara *supply chain* pasti berbicara tentang agen yang berkaitan dengan struktur. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa struktur terlihat secara objektif dengan memandang ‘pasar’ sebagai arena. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di pasar terdapat dua kekuatan besar yakni persaingan (*competition*) dan kerja sama (*cooperation*) untuk mencapai kemajuan ekonomi lokal.

Teori Bourdieu memandang bahwa individu dan masyarakat (subjektivisme dan objektivisme) tidak harus dipertentangkan, artinya pendirian Bourdieu adalah strukturalis yang tidak mengabaikan agen. Praktik dilihatnya dalam hubungan yang dialektis antara struktur dan agen. Sekali pun Bourdieu tidak secara eksplisit berbicara tindakan kolektif, namun pada saat menjelaskan hubungan dialektis antara struktur-struktur objektif dan subjektif Bourdieu menyinggung tentang kolektivitas (Ritzer 2012). Habitus dilihatnya sebagai suatu fenomena kolektif, yang memiliki sifat (a) bertahan lama artinya bertahan di sepanjang rentang waktu tertentu dari kehidupan seorang agen; (b) bisa dialihpindahkan dalam arti sanggup melahirkan praktik-praktik di berbagai arena aktivitas yang beragam; (c) merupakan “struktur yang distrukturkan dalam arti mengikursertakan kondisi-kondisi

sosial objektif pembentukannya; (d) merupakan “struktur-struktur yang menstruktur” artinya mampu melahirkan praktik-praktik yang sesuai dengan situasi-situasi khusus dan tertentu (Bourdieu 2010).

Sekalipun secara epistemologis pemikiran Bourdieu berada di ranah filsafat Konflik-Marxian, namun *founding father* lain seperti Weber juga turut mempengaruhi pemikiran Bourdieu. Pemikiran Bourdieu tentang habitus menjadi titik temu antara pikiran Weber, Granovetter dan Bourdieu. Menurut Bourdieu, habitus adalah resultante (hasil) dari *belief* (yang terus-menerus) *men-drive* “*doxa*” (sebuah perasaan kepasrahan dan *taken for granted ethics*) yang membangun *consciousness awareness* sehingga perilaku seseorang menjadi terbiasa untuk bertindak sesuai dengan *doxa* yang menjelma menjadi habitus. Habitus dihasilkan oleh kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode historis yang panjang, jadi habitus merupakan produk historis. Ketiga teori tersebut dipandang dapat membantu peneliti menelaah ekonomi lokal di Simalungun yang syarat dengan nilai-nilai keberagaman baik dari sisi etnis maupun agama. Studi ini sangat kuat konteks ekonomi lokal dan nilai-nilai (*values*) budaya lokal yang turut serta dalam membangun ekonomi lokal. Teori yang memberikan ruang yang luas untuk mengeksplor budaya (*culture*) adalah teori Bourdieu bahkan menempatkan budaya sebagai salah satu modal di antara tiga modal lainnya yakni: ekonomi, sosial dan simbolik.

Upaya mensintesis 3 (tiga) teori besar tersebut memang tidak mudah dan mengalami kendala terutama saat memahami struktur sosial yang bekerja di pasar kopi, karena struktur sosial menjadi basis dalam pembentukan lapisan sosial dan relasinya. Dalam pembahasan, peneliti menggunakan salah satu aliran pemikiran yang berkembang di Prancis era 1980–1990an yaitu pendekatan strategis yang berusaha menyatukan pelaku (agen atau aktor) dan struktur, antara subjektivisme dan objektivisme yang disebut dengan metode strukturalis genetis (*genetic structuralism*). Strukturalis genetis berusaha mendeskripsikan suatu cara berfikir dan cara mengajukan pertanyaan, mendeskripsikan, menganalisis dan memperhitungkan asal-usul seseorang atau asal-usul berbagai struktur sosial. Mutakhir (2011) menyebut analisis struktur-struktur objektif tidak bisa dipisahkan dari asal-usul struktur-struktur mental dalam individu-individu biologis yang sebagian merupakan produk dari struktur-struktur sosial sendiri.

Dalam konteks *supply chain* kopi arabika, maka setiap agen ditelusuri asal-usul serta pengalamannya agar pembahasan tentang habitus aktor dapat dilakukan lebih mendalam. Peneliti menyadari betul bahwa dengan memakai pisau analisis Bourdieu, maka antara lembaga dan individu adalah aktor sebagai unit analisis (di dalamnya saling membentuk identitas: internalisasi-eksternalitas/eksterior dan eksternalisasi-internalitas/interior), pemisahan di antara keduanya hanya dilakukan untuk kepentingan analisis. Jadi dengan menggunakan pisau analisis Bourdieu, pasar dalam sintesis penelitian ini bukanlah menjadi ajang kontestasi persaingan para aktor yang berkepentingan semata, melainkan pasar juga menjadi wadah bagi aktor untuk membangun persekutuan, artinya di arena juga menjadi wadah membangun relasi sosial dalam bentuk kerja sama dan solidaritas para aktor yang termanifestasikan dalam bentuk tindakan kolektif dalam membangun ekonomi lokal Simalungun. Penggunaan tiga teori besar hanya sebagai *guide* yang menuntun peneliti untuk menemukan teori yang berbasis pada empiris (realitas sosial) khas ‘timur’, yakni pengembangan ekonomi lokal yang syarat akan nilai-nilai (*values*) lokal. Nilai lokal di Simalungun tumbuh bersama sejarah yang panjang dan terlekat (*embedded*) dengan budaya lokal Simalungun.

7.3 *Empirical Evidence*: Kontribusi Ekonomi dari Wirausaha Lokal Berbasis Kopi di Kabupaten Simalungun

Keberadaan kelembagaan lokal yang bertahan (persisten) hingga kini menjadi basis munculnya benih-benih (cikal bakal) tindakan kolektif dan sarana untuk meredam konflik. Beberapa lembaga lokal seperti Marsidapari, Pujakesuma, wirid, bestelan atau beskoman sudah lahir bersamaan dengan tumbuhnya budaya petani kopi. Pedagang selain menjadi aktor yang melakukan tindakan ekonomi juga menjadi ketua kelompok tani yang melakukan proses pengolahan kopi dari kopi gelondong (*cherry*) menjadi kopi gabah sehingga dalam tindakan ekonominya tidak hanya memperhitungkan untung rugi semata namun juga melekat hubungan sosial di dalamnya. Hubungan sosial dalam tindakan ekonomi pedagang ini semakin mempererat hubungan ekonomi antara pedagang dengan petani. Pedagang (agen layang

dan agen/pedagang tingkat nagori) menunjukkan ekonomi moral dalam tindakannya terutama dalam transaksi di dalam komunitasnya. Di aras “supra nagori” tindakan ekonomi pedagang dilandasi oleh kepentingan ekonomi berdasar prinsip persaingan demi keberlanjutan usahanya. Ekonomi moral pedagang (agen layang dan agen/pedagang tingkat nagori) dilandasi oleh keteguhan moral yang diwujudkan dalam tindakan pedagang bermotif sosial yang telah tertanam (*embedded*) dalam komunitas pedagang.

Di sini ekonomi moral pedagang berhierarki. Transaksi antara petani dengan agen layang dominan dilandasi oleh moral ekonomi. Transaksi antara agen layang dan agen atau pedagang tingkat nagori serta antara pedagang tingkat nagori dengan pedagang tingkat kecamatan dilandasi oleh moral ekonomi dan kepentingan ekonomi, namun masih dominan moral ekonominya. Transaksi antara pedagang tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten serta antara pedagang tingkat kabupaten dengan eksportir dominan dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Hierarki ekonomi moral pedagang dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai tentang hakikat hidup dan latar belakang pekerjaan sebelum menjadi pedagang. Pedagang dengan latar belakang pekerjaan sebagai petani menunjukkan ekonomi moral yang kuat dalam setiap tindakannya, sebaliknya pedagang dengan latar belakang pekerjaan sebagai pedagang lebih mengedepankan prinsip untung rugi dalam tindakannya.

Hadirnya secara bersama-sama tindakan rasional formal dan tindakan rasional moral (rasionalitas substantif) pada diri pedagang menyebabkan pedagang menghadapi dilema. Untuk mengatasi dilema pedagang, pedagang tingkat kecamatan hanya melakukan transaksi secara tunai di pasar dengan melakukan perdagangan kecil yang berciri “ada uang ada barang”. Pasar di sini dipandang sebagai institusi sosial yang mengandung norma-norma dan sanksi-sanksi yang terbentuk baik dalam interaksi antara pedagang dengan petani maupun sesama pedagang dan pedagang dengan eksportir. Agen layang dan pedagang tingkat desa mengatasi dilema dengan tetap tergabung dalam kelompok-kelompok etnis maupun religius, seperti lembaga Pujakesuma, kelompok wirid, Serikat Tolong-Menolong (STM), Ikatan Batak Muslim (Ibamu) hingga menjadi donator pada Yayasan Ar Ridho. Dengan bergabung dalam kelompok tersebut, pedagang terhindar atau meminimalisasi tindakan mencari keuntungan ganda dan curang dalam transaksi.

Gambaran ekonomi moral pedagang di Nagori Sait Buttu Saribu ini seperti gambaran ekonomi moral pedagang di Jepang di mana motivasi ekonomi pedagang bukanlah keuntungan pribadi semata namun sebagai bentuk pengabdian pada keluarga. Pengabdian pada keluarga ini menguatkan motivasi ekonomi tanpa mengabaikan ekonomi moralnya. Kelembagaan pasar dengan struktur oligopsoni, bagi sebagian petani sekaligus pedagang (petani pedagang) berada di posisi tertekan sehingga petani yang merasa “tersandera” membentuk struktur pasar baru. Tindakan (praktik) aktor dalam *supply chain* kopi arabika ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki aktor dan seberapa legitim kedudukan aktor dalam arena, yakni pasar kopi arabika. Perilaku aktor yang bertindak bak pemburu rente (*rent seeker*) menjadikan aktor tidak legitim lagi di pasar, sehingga kedudukannya digantikan oleh aktor lain. Model kemitraan yang hendak dibangun di Simalungun, Sumatra Utara adalah sebagaimana model yang diterapkan di Jawa Timur, yakni motramed atau model kemitraan bermediasi dengan meningkatkan mutu produksi kopi dan sistem pemasaran dengan bekerja sama dengan eksportir kopi. Untuk membangun model ini diperlukan komitmen yang sangat kuat dari Pemda setempat dan yang paling utama adalah keguyuban para petani kopi arabika agar daya tawar mereka lebih tinggi di hadapan para pembeli.

Terbentuknya ekonomi lokal dalam masyarakat petani kopi arabika di Simalungun ditandai oleh kemunculan pedagang kopi arabika yang berasal dari petani kopi arabika. Pedagang muncul sebagai kelompok menengah yang berasal dari golongan petani berlahan sempit, sebagian migran dari Jawa yang telah berdiaspora di Simalungun, lalu melalui campur tangan negara dan swasta (eksportir) berkembang menjadi petani *smallholders*. Intervensi negara dalam berbagai kebijakan dan pembentukan kelembagaan seperti kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) maupun HMKSS turut mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal di Simalungun.

Ekonomi lokal di Simalungun dibangun dari *multireligion* dan multietnis sehingga mendukung kolektivitas ekonomi berbasis keanekaragaman khas Simalungun. Ekonomi lokal khas Simalungun dibangun atas rasionalitas yang berbasis nilai (*value*) lokal, yakni solidaritas sosial antar aktor dalam *supply chain* kopi arabika. Akhir dari ekonomi lokal adalah kesejahteraan

petani. Berdasarkan strata, rumah tangga petani kopi arabika di Kabupaten Simalungun sudah memiliki tingkat kesejahteraan dalam kategori hidup layak, terutama pada rumah tangga strata atas dan menengah. Sedangkan pada rumah tangga strata bawah sebagian besar masih dalam kategori hidup cukup namun masih ada yang masuk dalam kategori miskin sekalipun hanya 1,39%. Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kopi arabika yang sebagian besar masih masuk dalam tingkat 'cukup' disebabkan oleh kepemilikan dan penguasaan lahan yang menjadi basis ekonomi rumah tangga petani relatif sempit.

Rata-rata petani kopi arabika adalah etnis Jawa yang membeli lahan (ladang kopi) dari etnis batak secara bertahap. Rumah tangga petani kopi arabika strata bawah dengan kepemilikan ladang kopi 0,04 hektare (400 rante) sampai 1,15 hektare harus berstrategi nafkah ganda untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sebagian besar petani melakukan tumpang sari kopi arabika dengan tanaman seperti jagung, cabe, tomat, kubis hingga kentang yang disebut dalam istilah lokal sebagai "tanaman muda". Hasil pemanenan tanaman muda ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Berbeda dengan rumah tangga strata atas yakni 'petani pedagang' menganggap kopi lebih sebagai tanaman tabungan, dan dengan kekuatan kapital yang dimilikinya sudah mampu mengakumulasi modal untuk mengembangkan usaha. Kondisi kesejahteraan petani kopi menjadi cerminan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan sinergi antara petani, pedagang, swasta (eksportir) maupun pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal.

7.4 Novelty

Teori tindakan kolektif digunakan untuk menjelaskan sistem ekonomi yang berciri Asia, karena terkait dengan budaya ketimuran (dilandasi moral). Tindakan kolektif dimaknai sebagai tindakan sukarela yang diambil oleh kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan tindakan kolektif erat kaitannya dengan modal sosial. Modal sosial menjadi faktor yang menjadi penyebab dan hasil tindakan kolektif. Teori tindakan kolektif

memberikan dasar analisis lebih lanjut untuk modal sosial pada penelitian di masa depan. Pasar mengharap individu saling berkompetisi, sementara struktur yang dipersiapkan oleh pemerintah (*state*) adalah petani kopi harus menjalankan usahanya secara berkelompok dalam wadah kelompok tani. Apabila di pasar aktor secara individu harus bersaing dengan kekuatan kapital yang dimilikinya, di sisi lain petani kopi harus kuat secara kolektivitas untuk menghadapi pasar global (ekspor kopi). Akibatnya dalam diri petani yang sekaligus sebagai pedagang (petani pedagang) hadir secara bersama-sama tindakan rasional formal dan tindakan rasional moral (rasionalitas substantif) sehingga muncul dilema kolektivitas.

Studi ini memperkuat tesis Kalberg (1980) yang menyatakan bahwa tindakan aktor tidak dapat berlandaskan rasional formal maupun rasional moral saja, namun berada di antara keduanya. Struktur terlihat secara objektif dengan memandang pasar sebagai arena. Teori Bourdieu menekankan praktik. Tindakan aktor (pedagang) menurut Bourdieu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, tetapi juga oleh habitus dan pengalaman. Habitus pedagang adalah mencari keuntungan dalam setiap transaksinya. Namun dalam mencari keuntungan, tindakan (praktik) pedagang dipengaruhi oleh struktur dan pengalamannya. Habitus individu pedagang diperoleh dari pengalaman hidupnya sebelum menjadi pedagang. Habitus inilah yang akan membentuk kehidupan sosial melalui praktik dan habitus menyediakan prinsip-prinsip yang dengan prinsip itu aktor membuat pilihan dan memilih strategi yang akan digunakan dalam kehidupan sosialnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh pedagang kopi arabika, bahwa pedagang dengan latar belakang pengalamannya sebagai petani menunjukkan ekonomi moral dalam setiap tindakan ekonominya, sebaliknya dengan pedagang dengan latar belakang pengalamannya sebagai pedagang di masa sebelumnya lebih mengedepankan prinsip untung rugi dalam setiap praktik atau tindakan ekonominya. Namun prinsip untung rugi masih berada dalam bingkai religiusitas sehingga praktik sosial pedagang masih terhindar dari perilaku rakus (*greedy*) dan mengambil keuntungan dengan cara-cara curas.

Studi ini memberi kritik pada konsep Bourdieu tentang arena (*field*), dalam studi ini adalah pasar. Menurut Bourdieu, di ranah (*field*) pertarungan sosial akan selalu terjadi. Aktor yang memiliki modal dan habitus yang sama dengan individu kebanyakan di arena (pasar) akan mampu mempertahankan atau mengubah struktur dibandingkan mereka yang tidak memiliki modal. Kritik pada konsep Bourdieu adalah relasi sosial yang terjadi di arena (*field*), yakni pasar bukan hanya pertarungan antar individu untuk memperoleh posisi semata, namun di pasar juga terdapat relasi sosial lainnya seperti: kerja sama, solidaritas yang semula terabaikan dalam konsep arena. Di dalam 'arena' sebagai suatu lokus, telah tercakup adanya pertarungan, di mana pertarungan dapat dilakukan baik dengan maupun tanpa kerja sama, sehingga kerja sama sudah merupakan bagian dari arena atau proses yang terjadi di arena. Maknanya di 'arena' boleh ada kerja sama dan setiap kerja sama bertujuan untuk memenangkan pertarungan. Di sini berarti terdapat bentuk hubungan lain dalam kehidupan sosial dan tidak hanya demi kepentingan posisi aktor ('petani pedagang') semata.

Di 'arena' tidak hanya terfokus pada persaingan individu antar pedagang, namun persaingan di 'pasar' seringkali pula terjadi antar kelompok yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk hubungan, baik hubungan ekonomi, sosial maupun kekerabatan. Sebagaimana dinyatakan Weber bahwa persaingan atau konflik di pasar adalah konflik yang damai. Bentuk kerja sama maupun solidaritas dirajut oleh para aktor (petani pedagang) melalui berbagai relasi dalam kelembagaan lokal yang "mendekatkan" seperti: Ibamu (Ikatan Batak Muslim), Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatra), wirid, persatuan, Serikat Tolong-Menolong (STM), kelompok tani hingga Gapoktan. Berbagai kelembagaan lokal yang tumbuh bersama budaya lokal menjadi benih tindakan kolektif dan kerja sama antar aktor.

Untuk mengatasi dilema kolektivitas dapat memperkuat unsur-unsur modal sosial, terutama meningkatkan kepercayaan (*trust*) di antara sesama anggota kelompok tani. Meningkatkan kepercayaan (*trust*) bukan berarti mengabaikan dimensi modal sosial lainnya seperti jaringan (*network*) dan lembaga. Tindakan kolektif dalam kelembagaan kelompok tani kopi berperan positif dalam meningkatkan akses petani ke pasar, mendapatkan

harga yang lebih baik, mengurangi biaya transaksi dan membantu petani beradaptasi dengan tuntutan pasar. Diperlukan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha/swasta/eksportir dan petani kopi untuk mencapai keunggulan kolektivitas lokal.

Ragam lembaga lokal yang ada di Nagori Sait Buttu Saribu menunjukkan bahwa cikal bakal semangat kolektivitas telah muncul seiring dengan bertumbuhnya kelembagaan lokal tersebut. Lembaga lokal dengan tingkat manfaat besar dan mudah diakses seperti pedagang kopi arabika, kelompok tani, arisan, wirid dan persatuan dapat menjadi media pemberdayaan bagi petani kopi arabika sehingga terwujud prinsip *people centered development*, yakni pembangunan yang berpusat pada rakyat. Artinya kebijakan pembangunan dan pengembangan kelembagaan baik di tingkat nasional maupun lokal merujuk pada implementasi prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, pemberdayaan, pelestarian, jejaring sosial, keswadayaan lokal dan prinsip *sustainability* (Nasdian 2014). Kelompok tani yang terbentuk dengan ikatan *supply chain* perlu dipertahankan hingga ke depan karena dinilai cukup berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal di Simalungun melalui peran aktor dalam *supply chain* tersebut.

Kelompok tani yang merupakan habitus negara dalam perkembangannya dapat bersinergi dengan aktor lain. Kelompok tani juga menjadi simbol hadirnya negara dalam bentuk intervensi secara kelembagaan, karena intervensi melalui lembaga (kelompok) dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerja sama dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan selain dari sisi pemerintah memudahkan proses evaluasi. Akhir atau tujuan dari ekonomi lokal adalah kesejahteraan petani. Sehingga saran dari sisi metodologi adalah untuk menggambarkan kesejahteraan petani kopi dapat dilakukan dengan kriteria lain selain kategori Sayogyo dengan jumlah sampel petani yang lebih besar dan batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) yang lebih kecil (misalnya 5%) agar data primer memiliki akurasi yang lebih tinggi. Studi ini memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dengan kasus di Simalungun.

Pengembangan ekonomi lokal ini sejalan dengan semangat UU No.6/2014 tentang Desa, di mana pada Bab IX Pasal 78 Ayat 1 tercantum bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat dua pendekatan yakni 'desa membangun' dan 'membangun desa'. Pengembangan ekonomi lokal memerlukan aktor dengan jiwa sosial *entrepreneur* tinggi, dan tantangan ke depan sekaligus implikasi kebijakannya adalah bagaimana mengikutsertakan aktor ekonomi lokal yang berciri sosial *entrepreneur* untuk bergabung dalam organisasi ekonomi yang diintroduksi oleh negara, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

**DARI WIRUSAHA LOKAL
MENUJU EKONOMI GLOBAL:
PENGALAMAN DAN HISTORIS
WIRUSAHA INDUSTRI
BORDIR TASIKMALAYA DALAM
PEREKONOMIAN LOKAL DAN
GLOBAL**

Joharatul Jamilah

Secara sosio historis ada beberapa pendapat yang mengkaji kelahiran Tasikmalaya, yaitu *Pertama*, Tasikmalaya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda pada awal abad ke-19 terutama pasca letusan Gunung Galunggung tahun 1882, yang kemudian menjadi sebuah nama kabupaten setelah sebelumnya bernama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913. Hal ini berdasarkan keberadaan bukit-bukit kecil yang berjumlah ribuan akibat letusan gunung tersebut maka dari situlah kata Tasikmalaya muncul. *Kedua*, Kota Tasikmalaya awalnya bernama distrik Tawang Galunggung, tetapi dalam arsip kolonial Belanda tidak pernah tercatat distrik Tawang, atau distrik Tawang Galunggung (Marlina, 2007). Ketiga, ada anggapan bahwa Tasikmalaya bagian dari Kabupaten Sukapura, sehingga sejarah Tasikmalaya selalu bertitik tolak dari Kabupaten Sukapura. Padahal informasi lain mengatakan bahwa Tasikmalaya merupakan bagian dari Kabupaten Parakan Muncang kemudian menjadi bagian dari Kabupaten Sumedang (Falah 2010). Keberadaan Kota Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari Kabupaten Tasikmalaya, yang pada

awal abad ke-16 dibentuk oleh Sultan Agung dari Mataram pada 9 Muharram tahun Alip. Pada saat itu Tasikmalaya bernama kabupaten Sukapura (Marlina, 2007).

Pada tahun 1913 kabupaten tersebut berubah menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Kehadiran Islam di Priangan Timur, khususnya Tasikmalaya tidak bisa lepas dari pengaruh kesultanan Mataram terhadap kota tersebut selama kurang lebih dua setengah abad dimulai sekitar abad ke-17 sampai awal abad ke-19 (Falah 2010). Pengaruh Kesultanan Mataram yang begitu kuat dan lama di Tatar Sunda, membuat penetrasi ajaran-ajaran Islam terhadap budaya Sunda semakin mendalam, sehingga budaya Sunda yang berada di Priangan semakin tergeser dan sulit untuk dibedakan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Sunda. Akulturasi yang terjadi antara budaya Sunda dan Islam ini oleh E Saepudin Ansari dikatakan bahwa 'Islam adalah Sunda dan Sunda adalah Islam' (Lubis 2011). Proses akulturasi yang terjadi berabad-abad ini mengindikasikan banyaknya kesamaan nilai-nilai di antara kedua budaya tersebut dan menyatu menjadi satu budaya baru sebagai karakteristik yang menjadi ciri khas Islam Priangan, khususnya Tasikmalaya. Islam Sunda masyarakat Priangan memiliki perbedaan dengan Islam Sunda pada masyarakat Cirebon ataupun masyarakat Sunda Banten. Sunda Tasikmalaya (Priangan) memiliki *undak unduk* basa (tingkatan-tingkatan bahasa yang membedakan bahasa halus dan kasar sesuai dengan siapa berbicara) akibat pengaruh dari kerajaan di Jawa (Mataram).

Awal abad ke-20, aktivitas politik masyarakat Tasikmalaya dipengaruhi oleh pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Sarekat Islam (SI). Anggota SI sampai tahun 1916 mencapai tahun 1200 orang yang mengindikasikan bahwa cikal bakal para pedagang atau pengusaha di Tasikmalaya sangat tinggi. Mereka terlibat dalam keanggotaan gerakan tersebut sebagai respons dan perlawanan kekuatan pada pemerintah Hindia Belanda. Pergerakan selanjutnya adalah munculnya gerakan nasional dari kalangan pesantren dari adanya birokratisasi agama oleh pemerintah Tasikmalaya. Corak Islam di Tasikmalaya adalah ahli sunnah waljamaah, khususnya Nahdhatul Ulama (NU) yang mendominasi masyarakatnya. NU yang berada di Tasikmalaya berbeda coraknya dengan

NU yang berkembang di Jawa tengah atau Jawa Timur. NU di Tasikmalaya termasuk NU yang progresif karena penganutnya yang memiliki visi dan orientasi dengan kemajuan khususnya di bidang ekonomi. Ketika organisasi ini terbentuk di Tasikmalaya awal abad ke-20, anggota-anggotanya banyak sebagai pedagang atau pengusaha sukses yang memiliki jiwa *entrepreneur* tinggi. Selain organisasi keagamaan yang mewakili kalangan islam tradisional, di Kota Tasikmalaya juga berdiri beberapa organisasi yang mewakili kalangan Islam modernis, seperti Persatuan Islam (PERSIS), Muhammadiyah dan Ahmadiyah. Keberadaan berbagai organisasi keagamaan di Tasikmalaya menambah dinamika keagamaan di Tasikmalaya (Falah 2010). Pengaruh lain yang tidak bisa diabaikan adalah pengaruh aliran tarikat Islam di wilayah Tasikmalaya, termasuk para pengusaha bordir di Kawalu. Islam di Tasikmalaya juga memiliki kekhasan dengan berkembangnya berbagai macam tarikat. Tarikat yang paling banyak diikuti dan keanggotaannya diakui adalah Tarikat Qadiriyyah Naqshabandiyah, selain tarikat itu tarikat al Idrisiyah, Sajiliyah dan tarikat lainnya banyak mewarnai dalam kehidupan masyarakat Tasikmalaya (Ghani 2015 wawancara).

8.1 Sejarah Transformasi Industri Bordir Tasikmalaya

Sejarah bordir di Tasikmalaya diawali pada tahun 1920-an dan dalam satu abad dibagi dalam tiga periode. Periode Pertama, adalah periode Perintis dalam kerajinan dan seni bordir (awal abad ke-20). Ketahanan perajin bordir dalam berbagai pembabakan waktu perjalanan yang dilalui tidak bisa dilepaskan dari tindakan ekonominya yang terlekat dengan budaya yang membentuknya. Orang Sunda Tasik memiliki sistem budaya yang merupakan akulturasi dari nilai-nilai Islam dengan budaya Sunda (Priangan). Adanya perembesan budaya Islam dengan Sunda terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, sejak Islam dari Cirebon dan berlanjut dengan kerajaan Mataram yang berkuasa di Tasikmalaya (ibukota Priangan Timur) cukup memberikan kontribusi bagi ketahanan kerajinan bordir. Seni bordir sebagai bagian menghias pakaian kaum bangsawan atau menak sejak masa kolonial Belanda. Pada masa periode awal ini para bangsawan atau menak mengenakan

baju bersulam atau berhias bordir sebagai pembeda dengan masyarakat kebanyakan (cacah/somah). Biasanya bordir ini sebagai hiasan pakaian kebaya yang bisa dipakai pada menak kaum perempuan saat itu. Tetapi menak laki-laki juga tidak ketinggalan dalam pakaian-pakaian tertentu terutama untuk acara upacara adat atau acara-acara kerajaan. Biasanya hiasan tersebut terlihat dalam pakaian kebesaran dengan menggunakan benang emas.

Jejak sejarah perbordiran di Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari desa Tanjung, kecamatan Kawalu. Bordir sebagaimana sekarang sudah tersebar hampir di seluruh desa, kabupaten, dan kota di Tasikmalaya, Tanjung merupakan embrio kelahiran industri bordir di Tasikmalaya yang tidak dapat dilepaskan dari jasa seorang puteri keluarga Bupati (menak) yang bernama Siti Umayah. Ia mendapat keterampilan seni bordir dari orang Belanda pada awal abad ke-20. Keluarga Siti Umayah serta keturunannya tidak ada yang tertarik untuk mempelajari seni bordir ini, karena bagi kaum menak bekerja (sebagai buruh) adalah hal yang menurunkan status mereka. Kemudian Siti Umayah mentransfer ilmunya kepada H Zarkasi yang merupakan perintis awal untuk keterampilan bordir ini. Sejak tahun 1920-an sampai pertengahan abad ke-20 seni bordir belum begitu berkembang, mengingat hanya kalangan menak saja yang dapat memakainya. Meskipun kaum menak memiliki otoritas tradisional dan kekuasaan pada saat itu.

Periode awal ini pengaruh budaya penjajah (Belanda) sangat mendominasi masyarakat Sunda Priangan. Pada masa itu kaum pribumi menjadi kelas terendah dibanding kedua kelas di atasnya yaitu bangsa asing dan orang Cina. Menak adalah kaum pribumi (birokrat) yang kedudukannya bisa disejajarkan dengan bangsa Eropa/Belanda yang menjadi kelas paling tinggi dengan cerminan sistem budaya feodal. Pada masa itu bupati yang awalnya merupakan keturunan raja-raja memiliki otoritas tradisional tertinggi, hak istimewa dan merupakan orang paling kaya. Periode ini berakhir pada masa Hindia Belanda berakhir sekitar 1942, dengan demikian kaum menak atau priyayi (Jawa) mulai hilang (Lubis, 1998).

Pada babak ini bordir masih berkisar pada hiasan dalam kain untuk baju kebaya dan selendang. Bahan yang digunakan adalah kain katun atau kain paris. Kerajinan bordir di Tasikmalaya dimulai sejak masa kolonial

sekitar tahun 1920-an yang dipelopori putri seorang Bupati Tasikmalaya dalam lapisan kaum menak yang belajar membordir dari orang Belanda, sebagai kegemaran (*passion*). Alat yang digunakan pada waktu itu masih sederhana yakni menggunakan mesin kejek yang dioperasikan secara manual. Perkembangan selanjutnya kerajinan bordir ini tidak hanya dipelajari dan dimiliki oleh kalangan menak dan keturunannya tetapi sudah merambah kepada masyarakat kalangan di bawahnya dan rakyat kecil (cacah/somah) yang bekerja sebagai petani, sebagai bagian dari pekerjaan sampingan mereka (Lubis1998, Falah 2010).

Periode kedua, disebut sebagai pengusaha penerus mulai tahun 1960-an sampai tahun 1990-an menjelang tahun 1997/1998. Pada periode ini, keterampilan bordir mulai dikenalkan dan diajarkan pada kerabat, tetangga dan masyarakat sekitar. H Zarkasi sebagai penerus dari Siti Umayah pada masa ini mentransfer ilmunya yang didapat dari menak kepada masyarakat kebanyakan (cacah). Pada masa ini pula bordir mulai menyebar ke berbagai pelosok wilayah Tasikmalaya dan desa-desa di sekitarnya, dengan corak gambar tentang tumbuhan yang berada di lingkungan masyarakat Sunda. Bahan baku yang digunakan masih dari kain katun atau oxpord. Seni bordir datang ke Tasikmalaya, pada mulanya sebagai serapan dari kebudayaan Cina. Dalam perkembangannya, seni ini mengalami modifikasi dari tangan-tangan terampil dan ulet serta kreatif, sehingga dapat tumbuh subur dan berkembang di Tasikmalaya. Tak berhenti sebatas itu, mereka juga membangun nilai tambah (berinovasi) bagi seni bordir yang dikerjakannya. Maka terciptalah kebaya, tunik, blus, rok, selendang, kerudung, sprej, sarung bantal, taplak meja, baju gamis, mukena, baju koko, hingga baju sehari-hari dengan bordir yang menarik.

Periode ketiga, adalah masa periode pengembangan bordir (sekitar tahun 2000-an sampai saat ini) yang ditandai dengan masuknya peralatan seperti mesin bordir berbasis komputer. Seiring dengan perkembangan komputer yang diintegrasikan dengan mesin bordir mampu menambahkan twist dalam teknik menjahit membuat proses lebih mudah untuk produksi massal desain bordir. Saat ini, banyak mesin bordir yang mampu membordir desain yang sesuai permintaan konsumen/pasar. Dengan mesin bordir yang

terkomputerisasi memudahkan setiap orang untuk menciptakan desain-desain bordir yang rumit sekalipun. Bordir sebagai bentuk seni telah meningkatkan peradaban kita, sehingga kita lebih menyadari keindahan yang dapat dibuat dengan jarum dan benang. Desain rumit dan pola berwarna-warni telah menciptakan keindahan pada kain, menambah nilai seni dan bisa menjadi milik siapapun dengan perkembangan teknologi saat ini.

Pusat industri bordir berada di wilayah kota Tasikmalaya, yaitu di kecamatan Kawalu sebagai kawasan industri bordir terbesar. Meskipun demikian, desa-desa yang ada di kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dipisahkan dalam jaringan sosial ekonomi yang membentuk industri bordir tetap bertahan. Secara sosial budaya masyarakat Tasikmalaya, khususnya Kawalu masih memiliki ciri-ciri masyarakat pedesaan. Selain itu, Kawalu sebagai pusat industri bordir di Tasikmalaya tidak bisa terlepas dari kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Tasikmalaya. Bahkan bisnis bordir di kota Tasikmalaya berjejaring dengan desa-desa yang berada di wilayah kabupaten Tasikmalaya seperti Karang Nunggal, kecamatan Salopa, Cibalong, Singaparna, dan Cikatomas yang termasuk merupakan kecamatan di wilayah kabupaten Tasikmalaya yang terbanyak menjadi mitra dalam bisnis bordir dengan pengusaha-pengusaha yang berada di kota Tasikmalaya. Dari kecamatan-kecamatan inilah para pekerja bordir dan pemakloon yang menjadi penyokong bisnis ini terus berlangsung.

Kota Tasikmalaya dalam perekonomian digerakan oleh industri kreatif, perdagangan, serta jasa yang mencapai hampir 36% dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Industri kreatif yang ada Kota Tasikmalaya menghasilkan barang-barang berupa bordir, batik, kelom geulis, tikar dan kerajinan lainnya dari bahan mendong. Industri bordir menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar di Kota Tasikmalaya sehingga menjadi faktor utama bagi roda penggerak perekonomian. Pada tahun 2014 nilai investasi industri bordir mencapai Rp5.200.500.000 sedangkan nilai produksi mencapai Rp23.751.900.000. (Dinas Industri dan UMKM Kota Tasikmalaya, 2014). Pada tahun 2000 para pedagang bordir membentuk Asosiasi Gabungan Pengusaha Bordir Tasikmalaya (GAPEBTA) dan pada tahun 2002 para pedagang meminta lokasi yang tetap kepada pengelola pasar Tanah Abang. Dengan difasilitasi

Pemerintah Kota Tasikmalaya, Asosiasi GAPEBTA mendapatkan pinjaman uang muka untuk pembayaran bangunan yang representatif di blok F2 lantai 5 dari anggaran dana PIM (Pinjaman Industri Manufaktur) Provinsi Jawa Barat yang mulai beroperasi pada tahun 2007 (Wawancara, Ridwan, 2014). Khusus produk bordir, barang-barang ini dipasarkan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, setiap hari Senin dan Kamis dengan omzet sebesar Rp30 miliar per bulan. Sementara untuk pasar ekspor bordir telah mampu menembus negara-negara Saudi Arabia, Singapura, Malaysia, dan Afrika. Selain ke Pasar Tanah Abang, pemasaran bordir Kota Tasikmalaya juga disalurkan ke Pasar Tegal Gubug, Cirebon dan daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa maupun luar Jawa seperti: Pasar Turi, Surabaya, Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah, Pulau Batam, Makassar, dan Pontianak, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Potensi Industri Kecil Kerajinan Tangan terus mengalami perkembangan setiap tahun. Sampai pada akhir tahun 2009 terdapat 3.779 unit usaha yang tersebar di 130 sentra, dengan nilai investasi Rp276.607.782.300.- dan nilai produksi Rp1.344.791.876.000.- serta mampu menyerap tenaga kerja sekitar 36.472 orang. Komoditas yang dihasilkan mencapai 23 komoditas yang di antaranya adalah industri kecil dan menengah bordir, kelom, meubel, batik, sandal, anyaman mendong, anyaman pandan, kerajinan bambu, payung geulis, konveksi dan aneka jenis makanan (Dinas Perindustrian dan UMKM Kota Tasikmalaya, 2009).

Seni bordir datang ke Tasikmalaya, pada mulanya sebagai serapan dari kebudayaan Cina. Dalam perkembangannya, seni ini mengalami modifikasi dari tangan-tangan terampil dan ulet serta kreatif, sehingga dapat tumbuh subur dan berkembang di Tasikmalaya. Tak berhenti sebatas itu, mereka juga membangun nilai tambah (berinovasi) bagi seni bordir yang dikerjakannya. Maka terciptalah kebaya, tunik, blus, rok, selendang, kerudung, spreng, sarung bantal, taplak meja, baju gamis, mukena, baju koko, hingga baju sehari-hari dengan bordir yang menarik. Sejumlah sentra industri bordir hingga kini berkembang di Tasikmalaya, yang terbesar atau terbanyak terdapat di Kecamatan Kawalu terutama Desa Tanjung, Talagasari, Kersamenak, dan Karikil. Demikian juga industri bordir terdapat di kecamatan Cibeureum, khususnya Desa Mulyasari, kecamatan Tawang dan Mangkubumi. Kini tak kurang dari 1.371 unit industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

bordir bertebaran di seluruh wilayah kota Tasikmalaya dengan nilai produksi mencapai lebih Rp1.008.707.676 di tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Perkembangan industrinya mampu menyerap 13.520 tenaga kerja yang sebagian adalah kaum laki-laki. Sehingga bordir Tasikmalaya juga dianggap sebagai sumber pendapatan dan ekspresi diri masyarakat Tasikmalaya.

UMKM bordir dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan yang signifikan. Sampai tahun 2014, jumlah industri bordir di Tasikmalaya mencapai 1371 unit. Industri bordir ini melibatkan 13.856 pekerja (1–100 pekerja per unit usaha). Sedangkan tahun 2012 jumlah UKM industri bordir sebanyak 1317 unit yang melibatkan tenaga kerja sebanyak 12898 orang. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan, meskipun tidak begitu signifikan (Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, 2014). Industri bordir berkembang cukup pesat di Tasikmalaya dan industri ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak khususnya kaum laki-laki. Daerah yang di kenal sebagai sentra industri bordir terdapat di Kecamatan Kawalu yaitu Desa Tanjung, Gunung Tandala, Talagasari, Kersamenak dan Karikil. Selain itu, terdapat juga di Kecamatan lainnya yaitu Cibeureum, Mangkubumi, Tawang, Cipedes, Tamansari dan Cihideung. Dengan adanya dukungan pemerintah kota Tasikmalaya, para pengusaha bordir mendapatkan lokasi di pasar Tanah Abang sebagai pusat penjualan bordir asal Tasikmalaya tepatnya di blok F2 lantai 5. Selain itu, pemasaran tidak terbatas hanya di Pasar Tanah Abang tetapi juga ke Pasar Tegal Gubug Cirebon, Pasar Turi Surabaya, Pasar Klewer Solo, Pulau Batam, Makasar, Pontianak dan lain-lain.

Berdasarkan nilai produksinya, industri bordir dalam lima tahun terakhir mengalami dinamika yang fluktuatif. Hal ini terlihat dari tahun 2010–2012 mengalami kenaikan, meskipun tidak terlalu signifikan. Sedangkan tahun 2013–2014 industri ini mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2014 nilai produksinya hanya mencapai 2,35% yang sebelumnya di tahun 2013 mencapai 8,73%. Diduga penurunan nilai produksi karena pengaruh dari ekonomi global yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Nilai tukar rupiah yang mengalami penurunan ini pun menyebabkan harga-harga

mengalami kenaikan termasuk bahan baku bordir yaitu kain dan benang. Hal inipun secara tidak langsung mempengaruhi daya beli masyarakat menjadi menurun.

8.2 Penggunaan Alat Kerajinan Bordir dari Masa ke Masa

Alat untuk membordir pada awal kelahirannya itu masih bersifat manual, yang disebut dengan mesin kejek⁹. Pada tahun 1960-an jenis bordir yang dihasilkan adalah kebaya dan pakaian tradisional Cina karena pemesannya kebanyakan dari kalangan etnis Tionghoa. Pada tahun 1970-an jenis kain bordir merambah ke jenis kain untuk ruangan (*home interior*), seperti: spre, taplak meja, korden, dan lain-lain, terutama setelah menggunakan mesin juki¹⁰. Pada tahun 1980-an dominasi jenis kain bordir mulai bergeser ke pakaian-pakaian muslim, seperti: mukena, gamis, baju koko, jilbab, baju muslim dan lain-lain. Para pengusaha pada umumnya mempekerjakan karyawan lepas, yaitu mereka hanya datang ke perusahaan untuk mengambil bahan kain dan menyerahkan kembali setelah selesai dibordir. Pekerjaan membordir mereka lakukan di rumah masing-masing. Pihak pengusaha hanya meminjamkan mesin bordir. Para perajin kain bordir yang bekerja di perusahaan tersebut pada umumnya juga hanya tinggal di Desa Telagasari dan desa-desa sekitarnya. Sedangkan karyawan yang tinggal jauh atau berada di daerah seperti Cikatomas, Salopa, Singaparna, Cikalong dan lain-lain yang mendapatkan pekerjaan dari seorang cengkaw¹¹. Mereka mendapatkan pekerjaan melalui seorang cengkaw yakni seorang agen yang dipercaya oleh pengusaha untuk mengkoordinasi (sekitar 5–20 pekerja) dalam mengerjakan bordiran tersebut.

Pada tahun 2002 beberapa pengusaha mulai mengoperasikan mesin bordir otomatis yang dikendalikan melalui komputer. Mesin ini dapat mengerjakan pola bordir yang sama dalam jumlah banyak sekaligus (antara 12–24 lembar kain). Pola dan desain juga dibuat melalui program komputer.

9 Mesin kejek adalah mesin yang masih menggunakan tenaga kaki dan tangan.

10 Mesin juki adalah merek mesin jahit yang berasal dari Jepang dengan menggunakan tenaga listrik

11 Cengkaw adalah seorang agen yang dipercaya oleh pengusaha untuk mengkoordinasi 5–20 pekerja untuk mengerjakan bordir.

Pada tahun 1990-an mesin semacam ini sudah pernah diperkenalkan kepada masyarakat, tetapi ditolak oleh para pejabat desa, dengan alasan agar tetap memberi lapangan kerja kepada masyarakat desa. Dengan adanya mesin bordir otomatis tersebut, maka akan mengurangi tenaga pembordir dalam jumlah banyak. Satu mesin dapat mengurangi 12–24 orang pekerja, karena pengusaha hanya memerlukan beberapa orang pekerja untuk mengoperasikan komputer. Adanya mesin bordir otomatis ini juga menyebabkan produksi kain bordir berlimpah, yang tidak diimbangi dengan kelancaran pemasarannya. Akibatnya, harga kain bordir menjadi jatuh. Tetapi karena tuntutan perkembangan jaman, maka masuknya teknologi mesin bordir otomatis tidak dapat dicegah, dan konsekuensinya adalah menimbulkan pengangguran baru dan turunnya harga kain bordir.

Pengerjaan kain bordir terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pembuatan desain, pembordiran, dan penjahitan. Masing-masing tahap dilakukan oleh orang yang berbeda, sesuai dengan spesialisasinya. Tahap pembuatan desain dilakukan secara khusus oleh para desainer. Desainer mempunyai peranan penting bagi perkembangan perusahaan karena setiap perusahaan harus mempunyai ciri-ciri motif sendiri dan motif-motif tersebut harus disukai oleh konsumen. Mereka menggambar pola-pola hiasan pada kain dengan menggunakan pensil. Motif-motif yang banyak digunakan adalah tumbuhan, bunga, dan geometris. Keahlian para desainer pada umumnya diperoleh berdasarkan pengalaman, bukan karena hasil pendidikan formal. Tahap kedua, yaitu pembordiran, sebagian besar dilakukan di rumah masing-masing perajin, walaupun ada pula yang dilakukan di bengkel kerja perusahaan. Mereka yang membordir di bengkel kerja perusahaan pada umumnya masih dalam taraf berlatih dari tingkat dasar ke tingkat terampil, tetapi belum masuk tingkat mahir.

Alat-alat yang digunakan untuk membordir manual, antara lain: (a) Mesin bordir berpengerak tenaga listrik, (b) Opal. Bentuk opal menyerupai alat yang digunakan untuk menyulam, yaitu sepasang kayu berbentuk lingkaran, digunakan untuk menjepit bagian kain yang akan dibordir. Kain yang terjepit di tengah opal akan terentang secara merata, sehingga mudah untuk dibordir, (c) Benang-benang warna. Benang-benang

tersebut dimasukkan ke dalam jarum mesin bordir, berfungsi untuk mengisi bordiran. Setiap kali bagian yang dibordir harus diganti warnanya, perajin harus mengganti benang dengan warna yang diinginkan. Para pekerja melakukan pembordiran berdasarkan desain yang sudah digambarkan pada kain. Namun terkadang mereka juga melakukan improvisasi-improvisasi dari desain yang dibuat oleh para desainer. Tahap ketiga, yaitu penjahitan. Di dalam tahap ini kain-kain yang sudah dibordir dibentuk menjadi bermacam-macam pakaian atau kain jadi, seperti: mukena, baju koko, busana muslimah, taplak meja, kebaya, sarung bantal, peci, dan lain-lain.

Bahan dasar kain bordir di samping diperoleh dari Tasikmalaya sendiri, sebagian besar justru diperoleh dari kota-kota lain, seperti: Bandung, Jakarta, Solo, dan Pekalongan. Untuk memperoleh kain dasar dan benang warna yang diinginkan, biasanya pengusaha yang datang sendiri ke kota-kota tersebut. Hal yang menarik adalah, sebagian besar tenaga pembordir pada saat ini kaum laki-laki, terutama para pemuda, yang pada awalnya didominasi kaum perempuan. Hal ini mungkin dikarenakan kerajinan kain bordir merupakan lapangan kerja yang cukup menjanjikan, sehingga banyak kaum laki-laki yang tidak terserap di lapangan pekerjaan lain memilih bekerja sebagai pembordir. Sedangkan kaum wanita sudah banyak terserap ke industri kerajinan lainnya, seperti anyaman mendong, kelom geulis, payung kertas, dan lain-lain. Selain itu bordiran yang dihasilkan pada saat ini banyak dikerjakan oleh mesin dengan sistem komputerisasi. Tenaga pembordir mendapat upah rata-rata Rp50.000,00 per hari, dengan jam kerja dari pukul 7.00–16.00. Dahulu ketika masih menggunakan mesin bordir manual (digerakkan dengan tenaga kaki), para pembordir didominasi oleh kaum perempuan.

8.3 Perubahan Motif dan Jenis Kerajinan Bordir dari Masa ke Masa

Kaum menak yang hidup sampai pertengahan abad ke 20 ini mengenakan busana dengan aplikasi hiasan bordir sebagai simbol status sosial di kalangan mereka. Pada saat itu pakaian yang berhiaskan bordir, khususnya merupakan bagian dari simbol kedudukan mereka. Hiasan bordir diaplikasikan pada baju kebaya para elit ini yang digunakan untuk menghadiri suatu acara formal atau

menghadiri suatu pesta. Berdasarkan Mallaranggeng (2011), kerajinan bordir telah mengalami pergeseran orientasi dalam makna sampai saat ini. Meskipun banyak UKM di bidang industri kreatif ini berada pada kondisi sunset (merosot), *entrepreneurial mindset* pengrajin ternyata menonjol dan mendorong pemilihan *turnaround strategy*, berbasis kreativitas dan inovasi untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan penguasaan *entrepreneurial culture* mendorong strategi *turnaround* yang bercirikan *sustainability* dan *durability*, agar lebih menjamin peningkatan kinerja perusahaan. Strategi *turnaround* usaha kecil berbeda dengan usaha besar, yang menekankan *down sizing* bila kinerja terus merosot. UMKM yang mampu bertahan ternyata gigih dalam mengaplikasikan strategi *turnaround* yang berlandaskan kreativitas dan inovasi. Di antara strategi yang tampak adalah bahwa motif bordir telah mengalami pergeseran dari motif bunga-bunga yang menyatu dengan alam ke motif yang sesuai dengan permintaan pasar. Beberapa motif sebagai bagian dari strategi UMKM untuk tetap tumbuh di antaranya adalah a) motif alam, b) motif dekoratif, c) motif geometris, d) motif abstrak.

8.4 Etika Moral, Jaringan Sosial, dan Tindakan Ekonomi Pengusaha Bordir

Berdasarkan teori Granovetter perspektif sosiologi ekonomi Weberian terhadap pengusaha bordir Tasikmalaya, keterlekatan nilai agama, budaya, dan ekonomi dalam tindakan ekonomi pengusaha bordir Tasikmalaya tersebut adalah nilai-nilai agama Islam, nilai-nilai budaya Sunda, dan nilai-nilai etika formal. Nilai-nilai agama Islam yang melekat di antaranya adalah adil, sabar, *siddiq* (jujur), amal shaleh, tawakal, takdir dan lain-lain. Nilai-nilai budaya Sunda yang melekat di antaranya adalah silih asih, silih asuh, silih asuh, bageur, sauyunan, bener, cageur, dan lain-lain. Sedangkan nilai-nilai etika formal di antaranya adalah bersaing, maksimalisasi keuntungan, dan *self interest*. Beberapa contoh keterlekatan nilai dalam tindakan ekonomi pengusaha bordir ditampilkan pada Tabel 8-1.

Tabel 8.1 Contoh keterlekatan etika ekonomi dalam tindakan ekonomi pengusaha bordir

| Nilai | Tindakan Ekonomi | Konsep Ekonomi |
|------------------------------------|--|---|
| Nilai-nilai islami | | |
| Keimanan atau ritual | Membayar zakat | Kesalehan sosial/ekonomi |
| Adil | Membayar gaji yang sama kepada pekerja sesuai keahlian | Keadilan distributif |
| Amal saleh (sedekah) | Memberi sembako dan bantuan untuk fakir miskin dan yatim | Ekonomi berbagi |
| Nilai-nilai sunda | | |
| Sapapit, samanis, sauyunan | Berbagi keuntungan lebih kepada pekerja | Profit distributif |
| Silih asih, silih asah, silih asuh | Mengajari pekerja cara membordir yang baik | Transfer kompetensi |
| Berehan, bageur | Memberi bantuan tetangga | Kepedulian sosial |
| Nilai-nilai kapitalis | | |
| Maksimisasi keuntungan | Membeli bahan dengan harga murah | Menekan biaya produksi serendah mungkin |
| Persaingan | Membajak pelanggan maupun inovasi motif bordir lain | Persaingan tidak fair |
| <i>Utility</i> | Keuntungan untuk memperkaya diri | Ekspansi usaha |

8.5 Isomorphisme Tindakan Ekonomi Pengusaha Bordir

Menurut Di Maggio dan Powell (1983), organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian diinstitutionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir ala organisasi tersebut. Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal karena penegasannya atas organisasi hanya sebagai simbol dan ritual. Selanjutnya D'Maggio dan Powell (1983) menyebutkan

ada tiga bentuk institusional yang bersifat isomorphis yaitu, pertama; coersif isomorphis yang menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas. Kedua; mimesis isomorphis, yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain. Ketiga, normatif isomorphis, karena adanya tuntutan profesional. Sementara konsep lain pada teori institusional menurut Meyer dan Scott (1983) dalam Donaldson (1995) adalah *loose-coupling* yaitu teori institusional mengambil tempatnya sebagai sistem terbuka. Dalam kasus pengusaha bordir di Tasikmalaya adalah termasuk bentuk yang kedua. Sebagai bentuk mimesis karena para pengusaha ini dalam tindakan ekonominya mengikuti atau meniru pengusaha lainnya yang sudah lebih dahulu berhasil dan bertahan.

Perspektif yang lain dikemukakan oleh Meyer dan Scott (1983) dalam Donaldson (1995), yang mengklaim bahwa organisasi berada di bawah tekanan berbagai kekuatan sosial guna melengkapi dan menyelaraskan sebuah struktur, organisasi harus melakukan kompromi dan memelihara struktur operasional secara terpisah, karena struktur organisasi tidak ditentukan oleh situasi lingkungan tugas, tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi masyarakat secara umum di mana bentuk sebuah organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektivitas dan rasionalitas pada masyarakat.

Dalam perusahaan bordir (sebagai sebuah organisasi) banyak pengusaha yang berhasil mempertahankan usahanya puluhan tahun dan berkembang sehingga dapat meningkatkan aset dan omsetnya. Adanya keberhasilan para pengusaha ini adalah disebabkan diikuti oleh pengusaha lainnya dengan meniru atau mengikuti perilaku yang selama ini dilaksanakan oleh para pengusaha tersebut. Perilaku atau tindakan sosial ekonomi pengusaha tersebut sebagai manifestasi dari nilai-nilai yang dianut mereka. Hal ini mengakibatkan adanya keseragaman bentuk etika dan tindakan ekonomi para pengusaha bordir. Bentuk-bentuk kesamaan tindakan sosial ekonomi tersebut ditampilkan pada Tabel 8-2.

Tabel 8.2 Beberapa contoh kesamaan tindakan ekonomi pengusaha bordir

| No. | Nilai | Tindakan Ekonomi |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | Kekeluargaan | Tidak memberikan aturan formal (tertulis) |
| 2. | Keadilan | Membayar pekerja sesuai dengan kuantitas dan kualitas kerja |
| 3. | Kerja sama | Membayar utang sesuai dengan perjanjian |
| 4. | Kepercayaan | Menyediakan tempat tinggal bagi pekerja di dalam perusahaan atau rumah |
| 5. | Kepercayaan dan kejujuran | Memberi tenggat waktu pembayaran kepada pelanggan |

Adapun teori *isomorphisme* terhadap keterlekatan nilai-nilai dalam tindakan ekonomi menunjukkan adanya bentuk-bentuk yang sama, baik dari aspek nilai-nilai Islam dengan Sunda, maupun aspek tindakan ekonominya. *Isomorphisme* dari nilai-nilai Islam dan Sunda di antaranya adalah kekeluargaan, kerja sama, kejujuran, kepercayaan dan keadilan, sedangkan *isomorphisme* tindakan ekonomi di antaranya adalah tidak memberikan aturan formal/tertulis, membayar pekerja sesuai dengan kuantitas dan kualitas kerja, memberi makan 2–3 kali sehari, membayar utang sesuai dengan perjanjian, menyediakan tempat tinggal bagi pekerja di dalam perusahaan/ rumah dan lain-lain. Kesamaan bentuk tindakan (*isomorphism*) pada ke tiga tipe pengusaha ini adalah melakukan hal yang serupa dengan pengusaha lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peniruan atau imitasi terhadap perusahaan-perusahaan yang lebih dahulu beroperasi dan mengalami keberhasilan. Kesamaan tersebut baik berupa tindakan ekonomi maupun tindakan-tindakan sosial lainnya. Tindakan ekonomi terjadi dalam hubungan produksi antara pengusaha dengan pekerja, pengusaha dengan pedagang, pemodal maupun dengan masyarakat sekitar yang memiliki kesamaan dalam tindakan sosial.

8.6 Tipologi Pengusaha Bordir dan Jaringan Sosial

Keterlekatan dan ketidakterlekatan (*embeddedness-disembeddedness*) pertama kali digagas oleh Polanyi (1953) dan dikembangkan pada tahun 1985 oleh Granovetter. Menurut Polanyi, tindakan ekonomi masyarakat melekat dalam institusi-institusi ekonomi dan non ekonomi. Pada masyarakat nonindustri tindakan ekonomi melekat pada institusi-institusi non ekonomi, sedangkan pada masyarakat modern tindakan ekonomi terlepas dari institusi sosial karena diatur oleh pasar (Smelser dan Swedberg 1994; Turner, 1998; Ritzer dan Goodman 2007). Berbeda dengan Polanyi, Granovetter (1985; 1992) berpendapat bahwa setiap aktivitas ekonomi pada masyarakat industri (modern) pun memiliki keterlekatan sosial (*social embeddedness*) pada institusi non ekonomi seperti agama dan budaya meskipun keterlekatannya berada pada garis kontinum kuat dan lemah. Berdasarkan keterlekatan tindakan ekonominya yang telah di bahas pada bab sebelumnya maka tipologi pengusaha bordir terbagi menjadi tiga tipe yaitu, Pengusaha Islami-Sundanis, Pengusaha Sunda-Islami dan Pengusaha kapitalis.

Religiusitas (*religiosity*) adalah sebuah ekspresi spiritual dengan sistem keyakinan nilai, hukum yang berlaku dan ritual (Kaye dan Raghavan, 2000). Religiusitas memiliki arti keshalihan dan pengabdian yang besar terhadap agama. Religiusitas merupakan aspek yang dihayati oleh individu dalam hati, getaran hati nurani seseorang dan sikap personal (Mangunwijaya, 1986). Menurut Glock and Stark (Rahmat, 2003) ada lima dimensi religiusitas seseorang yaitu (1) dimensi ideologi atau keyakinan, (2) dimensi ritualitas atau ibadat, (3) dimensi penghayatan (pengalaman), (4) dimensi pengetahuan dan (5) dimensi pengamalan. Gambar 8.1 menggambarkan adanya keterlekatan tindakan ekonomi pengusaha bordir Tasikmalaya terhadap etika moral (nilai-nilai) Islam.

Pengusaha Islami-Sundanis memiliki karakteristik yang bersifat kekeluargaan, mengedepankan persaudaraan (tolong-menolong) sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai ukhuwah islamiyah dan religiusitasnya dimanifestasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui

pendirian atau membangun lembaga pendidikan/keagamaan seperti pesantren atau sekolah Islam dan yayasan yatim piatu dan majlis taklim memiliki perilaku yang mementingkan kewajaran, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupannya sebagai manifestasi dari nilai-nilai budaya Sunda (silih asih, silih asah, silih asih, dan sineger tengah).

Tipe pengusaha Sunda-Islami memiliki ciri lebih menjalankan tradisi-tradisi yang diwariskan orang tua/nenek moyang mereka dan mengedepankan sikap kebersamaan yang kuat (sauyunan) tidak menonjolkan diri sendiri dan lebih bersifat kolektivisme/komunal (kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak). Sedangkan pengusaha kapitalis memiliki karakter yang lebih kuat dalam pertimbangan ekonomi formal dibanding sisi moral, dan lebih individual. Meski demikian tipe pengusaha kapitalis ini tetap masih memiliki kepedulian terhadap kegiatan sosial keagamaan di lingkungannya, secara formal. Ada kecenderungan bahwa tipe pengusaha kapitalis ini bertransformasi ke tipe pengusaha Islami-Sundanis (keterlekatan kuat dengan nilai-nilai agama) karena materi semata tidak menjamin kebahagiaan seseorang.

Pada tipe Sunda-Islami hubungan sosial ekonomi produksi antara pengusaha tipe ini dengan pekerja diikat dengan kekeluargaan yang kuat. Sentimen kedaerahan yang kental mewarnai dalam hubungan mereka. Semua pekerja dapat dikatakan berasal dari wilayah Tasik dan sekitarnya dan beretnis Sunda, sehingga perasaan seperti saudara turut mempengaruhi hubungan tersebut. Oleh karena itu, pekerja dianggap seperti bukan buruh tetapi *partner* dalam bekerja. Meskipun ada peraturan secara tidak tertulis, pekerja merasa bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka yang harus dilaksanakan tanpa menjadi beban. Hubungan yang bersifat horizontal antara pengusaha dengan pekerja lebih dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Pengusaha lebih baik mengalah dari pada berkonflik dengan pekerja. Karakteristik seperti ini merupakan ciri-ciri orang Sunda (mengalah dari pada berkonflik atau pundung). Tipe pengusaha seperti ini dikatakan stagnan karena dengan mengedepankan nilai-nilai sauyunan (kebersamaan) mereka lebih memikirkan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan dengan pekerja sehingga tidak mengadopsi inovasi baru (mesin bordir komputer) karena dapat mengurangi atau merumahkan (PHK) pekerja. Sebenarnya

pengusaha ini mampu untuk membeli mesin komputer tersebut untuk meningkatkan efisiensi kerja dan secara otomatis meningkatkan keuntungan, tetapi tidak dilakukan karena lebih mengutamakan nasib pekerja, walaupun terpaksa ada yang menggunakan mesin komputer, pengusaha tetap memberi pekerjaan pegawai (buruhnya) menjadi penjahit.

Pengusaha bordir Tasikmalaya dalam hubungan produksi dengan para pekerjanya memperlakukan mereka seperti dalam suatu keluarga besar (*extend family*). Pekerja dianggap sebagai bagian dari keluarga pengusaha. Etika kerja pengusaha terhadap pekerja menganggap pekerja seperti saudara (bagian dari keluarga besar). Hal ini sesuai dengan nilai-nilai agama Islam bahwa “sesama muslim adalah saudara”, sehingga mereka lebih terlihat lebih “memanusiakan” pekerja dibanding dengan mengeksploitasi mereka. Perilaku yang dijalankan para pengusaha di atas mencerminkan seorang muslimpreneur. Pengaruh nilai-nilai Islam (“dalam hartamu ada sebagian hak orang lain” melalui zakat, infak, sedekah) dan budaya Sunda (silih asih, silih asah, silih asuh) melekat kuat (*over embedded*) dalam tindakan ekonomi pengusaha religius kulturalis. Empati yang begitu kuat dalam diri pengusaha seperti ini, terhadap apa yang dialami orang lain yang kekurangan, sangat terlekat dalam tindakan ekonominya, sehingga tidak memikirkan untung ruginya dalam berbagi yang dapat berimplikasi pada usaha bordirnya. Etika moral tolong-menolong dan solidaritas sosial.

Pada tipe pengusaha kapitalis, hubungan produksi antara pengusaha kapita dengan para pekerjanya bersifat rasional formal. Etika yang diusung adalah maksimalisasi keuntungan. Pekerja tidak diberi kebebasan seperti pada pengusaha lainnya. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, pekerja yang meminta izin tidak masuk karena ada urusan penting tidak diizinkan kecuali dengan perjanjian yang sangat ketat. Alasan pengusaha tidak memberi izin karena operasionalisasi kerja akan terganggu semua sehingga merugikan perusahaan. Hubungan patron-klien meskipun masih terlihat, tetapi cenderung mengembangkan etika maksimalisasi keuntungan dibanding tolong-menolong dan kebersamaan. Pekerja yang membuat kesalahan langsung dipecat tanpa banyak pertimbangan.

8.7 Jaringan Sosial Pengusaha Bordir

Pengusaha bordir yang berada di Tasikmalaya tidak semuanya langsung terjun menjadi pengusaha bordir, tetapi sebagian besar mereka awalnya menjadi pengrajin atau pekerja dahulu, pemakloon (subkontrak) atau cengkaw dan baru menjadi pengusaha bordir setelah memiliki cukup modal (material, mental dan spiritual). Selain modal material (kapital), pengusaha juga harus memiliki modal immaterial (keuletan, kesabaran dan kesungguhan serta keyakinan (spiritual) yang kuat agar bisa terus melanjutkan usaha tersebut dan bertahan dari berbagai faktor yang bisa membuat mereka mengalami kegagalan atau kebangkrutan.

Cengkaw adalah agen yang mengkoordinasi pekerjaan (bordiran) dari pengusaha ke pekerja/buruh yang berada di luar atau berada di rumah masing-masing. Biasanya seorang cengkaw memiliki/mengkoordinasi buruh bordir berbeda-beda, antara lima sampai 20 orang. Setiap cengkaw akan mengambil keuntungan dari setiap helai kain bordiran tersebut, sekitar 10-20%. Perbedaan makloon dengan cengkaw adalah kalau makloon menerima orderan pekerjaan dari pengusaha yang mensubkontrakan pekerjaannya kepada pengusaha yang khusus memakloon baik itu hanya CMT (*Cutting, Making dan Trimming*) yaitu memotong, menjahit/membordir dan merapikan atau *finishing* (membuang benang sisa yang menempel di kain, menyetrika, melipat dan memasukkan ke plastik). Ada juga makloon yang mulai dari membuat desain bordir, memilih kain, sampai finishing (merapikan), tetapi kebanyakan pengusaha maklon bordir adalah membordir yang sudah ada desainnya pada kain yang sudah dipotong, sedang *finishing* di lakukan oleh pekerja yang ada di dalam perusahaan.

Aktor atau pelaku selanjutnya dalam jalur produksi adalah pekerja atau karyawan bordir. Berdasarkan catatan dinas industri dan perdagangan kota Tasikmalaya jumlah pekerja laki-laki lebih banyak dibanding dengan pekerja perempuan. Adanya adopsi inovasi teknologi mesin bordir yang dahulu dikerjakan secara manual dan lebih mengedepankan keterampilan tangan bertransformasi ke mesin bordir dengan teknologi komputer, sehingga mengubah struktur pekerja industri bordir yang awalnya mayoritas perempuan

menjadi mayoritas laki-laki. Masuknya suatu inovasi dalam suatu sistem sosial akan berkonsekuensi pada terjadinya perubahan dalam sistem sosial itu sebagai akibat adopsi atau penolakan terhadap inovasi tersebut, (Rogers 1983), dan menyebabkan perubahan struktur (Lawsons 2000). Perubahan pekerja yang awalnya mayoritas laki-laki menjadi perempuan disebabkan teknologi komputerisasi dapat menggeser dan menggantikan tenaga manusia, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, dan laki-laki dianggap lebih mampu secara fisik dan mental karena dapat mengoperasikan selama 24 jam dengan pergantian dua *shift* (satu *shift* 12 jam) atau tiga *shift* (@*shift* 8 jam).

Adapun aktor lain dalam jalur produksi adalah penyedia/pemasok bahan dan benang bordir yaitu pengusaha kain yang memiliki toko atau pabrik kain dan pedagang kain. Di kota Tasikmalaya ada dua pedagang kain besar yang sangat dikenal di kalangan pengusaha bordir yaitu toko “Babah” dari etnis Cina dan toko “Ajad” dari etnis India. Kedua pedagang kain ini selain memiliki toko yang besar juga memiliki macam-macam kain yang lengkap, sehingga tidak mengherankan bagi pengusaha yang membutuhkan kain dalam jumlah yang banyak akan mendatangi dan berbelanja di antara kedua pengusaha kain tersebut. Selain itu kedua pedagang tersebut juga dapat meminjamkan kainnya (diutangkan) dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu lama sampai satu tahun (pada pelanggannya) menjelang hari raya Idul Fitri.

Jalur pemasaran untuk industri bordir terdiri dari individu maupun perusahaan. Jalur individu adalah melalui pengusaha yang memasarkan dagangannya sendiri, pedagang pengumpul yang datang langsung maupun melalui ekspedisi atau pengusaha yang menjalin relasi dengan pedagang lokal, regional maupun internasional. Sebagian besar pengusaha bordir memasarkan hasil usahanya sendiri, baik di rumahnya yang sekaligus juga menjadi showroom ataupun di kios-kios pasar lokal tradisional seluruh wilayah Tasikmalaya maupun pasar-pasar luar Tasikmalaya. Para pengusaha juga nganpas ke pasar-pasar sekitar pulau Jawa, seperti Bandung, Cirebon, Jakarta, Bogor, Solo, Madiun, Surabaya, Yogyakarta dan daerah lainnya.

Pada awal mereka memasarkan bordiran itu melalui nganpas untuk mencari pelanggan di daerah lain. Setelah memiliki pelanggan/pedagang di kota tersebut, pengusaha hanya menunggu pesanan dan mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi atau dikirim sendiri dan pembayaran transferan via Bank atau giro. Tetapi setelah disediakan tempat di Tanah Abang melalui GAPEBTA pada tahun 2007, maka banyak pengusaha yang pemasarannya hanya di pasar Tanah Abang tersebut, dengan alasan pasar Tanah Abang pusat perdagangan terbesar di Indonesia bahkan di Asean. Banyak pedagang-pedagang dari daerah di Indonesia bahkan negara tetangga yang berbelanja di Tanah Abang. Gabungan Pengusaha Bordir Tasikmalaya (GAPEBTA) adalah sebuah asosiasi yang mewadahi para pengusaha bordir dari Tasikmalaya yang didirikan pada tahun 2000. Pada saat ini GAPEBTA diketuai oleh Ir Asep Ridwan, seorang sarjana peternakan yang menjadi pengusaha bordir. GAPEBTA memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu para pengusaha untuk mendapatkan tempat usaha yang permanen dan menjadi mediator dalam urusan kerja, sama antar lembaga dan pemerintah daerah. Sampai saat penelitian ini berlangsung anggota GAPEBTA berjumlah 499 pengusaha. Para pengusaha tersebut hampir semuanya memiliki kios atau lapak di pasar Tanah Abang Blok F2 lantai 5. Kios atau lapak yang mereka miliki ataupun sewa dicicil para pengusaha melalui GAPEBTA dengan PD Pasar Jaya. Di samping membayar cicilan kios atau lapak tersebut, pengusaha yang menjadi anggota GAPEBTA juga membayar iuran anggota bulanan. (Wawancara, Ridwan, 19 Sept 2014).

Pedagang pengumpul pada umumnya membeli bahan maupun berbagai jenis pakaian yang menggunakan aplikasi bordir dengan motif berbeda-beda dari beberapa pengusaha untuk dijual kembali kepada konsumen. Pedagang pengumpul ini biasanya datang dari daerah yang sama maupun dari daerah yang berbeda dengan daerah pusat bordir. Pada awalnya pedagang pengumpul ini berbelanja dengan pembayaran tunai. Seiring berjalan waktu, lama kelamaan mereka menjadi pelanggan tetap, biasanya barang dagangan bisa dipinjamkan dahulu, atau dibayar sebagian dahulu, dan sebagian lainnya setelah seluruh barang terjual. Aktor lainnya yang terkait dengan bisnis bordir adalah dalam bidang permodalan, baik formal maupun informal. Modal ekonomi bordir ini didapatkan melalui jalur individu atau lembaga ekonomi seperti perbankan.

Individu didapatkan dari tabungan sendiri atau penjualan barang berharga seperti logam mulia, penjualan properti (tanah, rumah atau properti lainnya), pinjaman seseorang (anggota keluarga atau orang lain). Sedang jalur lembaga formal dan informal didapatkan seperti pinjaman dari Bank, koperasi, BMT serta lembaga keuangan lainnya atau rentenir. Modal ini juga bisa didapatkan dari pedagang/pengusaha kain yang meminjamkan kainnya sampai satu tahun lamanya. Tumbuhnya kepercayaan dalam relasi sosial ini disebabkan kedekatan secara personal (*relational embeddedness*, Granovetter, 1985) antara pengusaha bordir dengan pedagang kain yang menjadi langganannya.

Pengusaha bordir di Tasikmalaya sebagai bentuk dari perusahaan keluarga, memiliki karakter kepemimpinan transisional yang memiliki ciri nilai-nilai dan keyakinan tertentu, visi bersama, orientasi jangka panjang dan kesetiaan serta kepercayaan. Meskipun ada suksesi kepemimpinan dalam usaha keluarga, tetapi sebagian besar yang ditemukan bahwa sebelum ada suksesi tersebut, generasi kedua atau ketiga sudah membuat atau mendirikan usaha yang sama. Ciri lain dalam usaha bordir di Tasikmalaya baik tipe pengusaha Islami-Sundanis, pengusaha Sunda-Islami maupun pengusaha kapitalis adalah pelibatan pasangan dalam struktur hubungan kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan pada usaha bisnis bordir yang cenderung usaha milik keluarga kepemimpinannya bersifat otoriter dan bersifat paternalistik. Sebagian pengusaha bordir di Tasikmalaya juga memiliki lembaga pendidikan keagamaan tersebut, di antaranya HAR, HAH, HNQ, dan HMS. Salah satu pengusaha yang memiliki lembaga pendidikan pesantren, sekolah Madrasah Aliyah dan SMP Islam terpadu, serta Majelis Taklim (MT) adalah bapak HAR, sedang ibu HAH memiliki Taman Pendidikan AlQuran, bapak HNQ memiliki Majelis Taklim dan HM memiliki asrama untuk salah satu pesantren dengan nama Al-Muslim. Berikut profil pengusaha tersebut dengan segala aktivitas ekonomi mereka. Jaringan sosial yang terbentuk pada industri bordir Tasikmalaya adalah melalui berbagai jalur yaitu produksi, distribusi, modal, dan juga kelembagaan. Tabel 8.3 menampilkan jaringan sosial pada ketiga tipologi pengusaha bordir di Tasikmalaya.

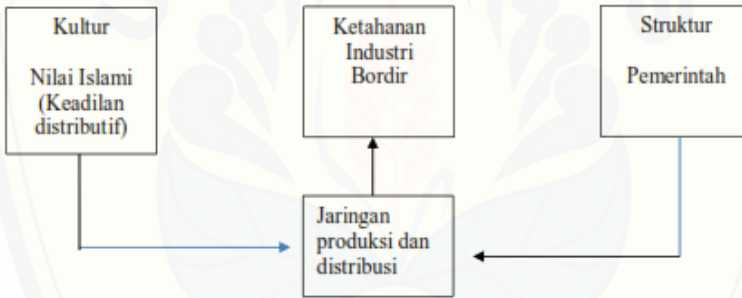
Tabel 8.3 Jaringan sosial pada 3 tipologi pengusaha bordir di Tasikmalaya

| Jaringan | Islami-sundanis | Sunda Islami | Kapitalis |
|-------------|---|---|---|
| Produksi | 1. Pekerja 2. Cengkaw 3. Makloon | 1. Pekerja 2. Cengkaw | 1. Pekerja 2. Cengkaw 3. Makloon |
| Modal | Pedagang | 1. Pedagang Kain 2. Mandiri | 1. Mandiri 2. Bank |
| Distribusi | 1. Global 2. Nasional 3. Lokal | 1. Kondumen 2. Pedagang Pengumpul 3. Pasar Lokal | 1. Global 2. Nasional 3. Pengumpul |
| Kelembagaan | 1. Pemerintah 2. GAPEBTA 3. Lokel dan Agama (sosial) | 1. Pemerintah 2. Lokal dan Budaya (sosial) | 1. Pemerintah 2. GAPEBTA 3. Sosial Formal |
| Nilai | Islam dan Sunda (Over <i>Embedded</i>) Under : Ekonomi | Sunda dan Islam (Over <i>Embedded</i>) Under : Ekonomi | Kapitalis (Over <i>Embedded</i>) - |

8.8 Ketahanan Industri Bordir: Keterlekatan Religio-Kultural dalam Jaringan Sosial

Keterlekatan religio-kultural (*Religio-Cultural embeddedness Theory*) adalah novelty yang diajukan oleh disertasi ini atau temuan teori yang diajukan dalam penelitian ini. Keterlekatan religio-kultural yang dimaksud adalah adanya pengaruh dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai budaya Sunda dalam tindakan sosial ekonomi para pengusaha bordir di Tasikmalaya. Keterlekatan religio-kultural yang ada pada masyarakat pengusaha bordir Tasikmalaya menyebabkan ketahanan dan kekuatan serta kekhasan moral dan tindakan ekonomi yang tidak ditemukan di tempat lain, sekalipun di tatar Sunda yang lain (seperti di Cirebon, Indramayu, Banten). Kekhasan inilah yang menjadikan ketahanan dan kekuatan industri bordir di Tasikmalaya berjalan sekalipun diterpa krisis dan perkembangan yang seringkali mengancam.

Dalam memperoleh keuntungan ekonomi, tindakan ekonomi pengusaha bordir ini diletakkan atas dasar prinsip-prinsip etika moral Islam dan Sunda. Rasional moral lebih mengemuka dibanding dengan rasional formal. Dalam praktiknya keterlekatan etika moral Islam dan etika moral Sunda dalam tindakan ekonomi pengusaha memiliki derajat keterlekatan berbeda-beda. Teori ini selain memperkuat teori Granovetter (1985) dengan sosial *embeddedness* yang memiliki derajat keterlekatan berbeda-beda dari keterlekatan kuat (*over embedded*) dan keterlekatan lemah (*under embedded*) juga mengembangkan teori *embeddedness* tersebut menjadi keterlekatan pada etika moral agama dan budaya, sehingga menjadi teori religio-kultural *embeddedness*. Bagan ketahanan industri bordir di Tasikmalaya ditampilkan pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1 Bagan ketahanan industri bordir di Tasikmalaya

8.9 Ketahanan Industri Bordir: Perspektif Menak-Cacah

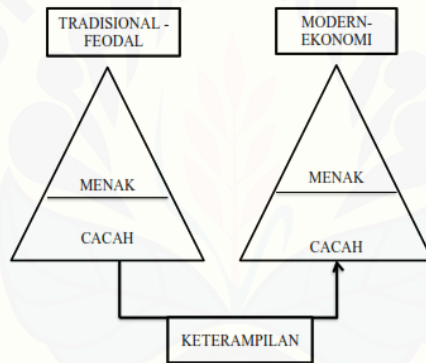
Ketahanan ekonomi industri bordir Tasikmalaya juga selain adanya keterlekatan religio-kultural dalam tindakan ekonomi pengusaha juga konsekuensi sosiologis munculnya menak baru sebagai elit sosial ekonomi yang berasal dari kelas cacah. Adanya golongan menak baru ini berbeda dengan menak pada masa feodal yang menciptakan kesenjangan sosial yang sangat dalam dengan masyarakat biasa (cacah). Stratifikasi yang tercipta antara menak baru (pengusaha bordir) dengan cacah (buruh) atau masyarakat kebanyakan (petani) tidak tidak terlalu timpang karena mereka bisa bekerja

sama untuk saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Pada masa feodal menak jarang bersosialisasi atau ada hubungan sosial dengan masyarakat cacah, bahkan kaum cacah diperlakukan seperti 'budak', karena dianggap tidak satu level. Gaya hidup dan etiket mereka sangat jauh berbeda.

Pada masa sekarang kehidupan sudah berbeda, meskipun mereka berbeda strata, tetapi dalam kehidupan sosial ekonomi bisa saling bekerja sama. Menak baru (pengusaha) tidak akan ada kalau tidak ada cacah (pekerja/buruh). Apalagi menak baru ini berasal dari kalangan masyarakat cacah yang berhasil secara ekonomi. Dengan demikian adanya dinamika menak-cacah dalam kehidupan masyarakat bordir Tasikmalaya dapat mendukung terciptanya ketahanan ekonomi industri bordir di Tasikmalaya. Kekuatan dan ketaatan masyarakat Tasikmalaya pada agama dan budayanya sangat mempengaruhi perilaku masyarakatnya, termasuk dalam tindakan ekonomi pengusaha bordir. Berdasar derajat kekekatannya pada nilai agama Islam dan budaya Sunda maka terbentuklah tipologi pengusaha bordir yang berbeda-beda. Keterlekatan yang kuat dalam hubungan jaringan sosial keagamaan dan budaya (komunitas lokal Sunda) membentuk adanya kesamaan atau keseragaman bentuk (isomorphisme) tindakan ekonomi pengusaha, sehingga semakin memperkuat adanya ketahanan ekonomi industri bordir di Tasikmalaya. Jika keberadaan para pengusaha lokal (menak) yang juga merupakan elit sosio-ekonomi dalam masyarakat Sunda Tasikmalaya tersebut diletakkan dalam konteks sejarah sosialnya, maka lapisan pada masyarakat Tasik kontemporer akan mewujudkan seperti Tabel 8.4 di bawah ini, di mana secara garis besar hanya terdapat dua lapisan dalam masyarakat bordir Tasikmalaya kontemporer, yaitu Menak (elit sosial ekonomi) dan Cacah (masyarakat biasa), selanjutnya kedua lapisan dipisahkan oleh statusnya.

Tabel 8.4 Lapisan sosial masyarakat Tasikmalaya kontemporer dalam kegiatan bordir

| Lapisan | Golongan | Status |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Menak | | |
| 1. Menak Luhur | 1. Pengusaha besar | Eksportir dan pengusaha |
| 2. Menak Sedang | 2. Pengusaha sedang | Pengusaha |
| 3. Menak Handap | 3. Pengusaha kecil | Sub-kontraktor |
| | 4. Pengusaha makloon | Pedagang mandiri |
| | 5. Pedagang pengumpul | |
| Cacah | 1. Pekerja bordir (buruh) | Pekerja atau buruh |
| | 2. Sales (perantara) | Perantara atau broker |



Gambar 8.2 Transformasi Menak-Cacah dari Feodal-Tradisional ke Modern-Ekonomi

Terdapat transformasi menak cacah pada masa feodal tradisional yang membagi stratisikasi sosial berdasarkan supra sturktur kebangsawanan (mazhab Weberian/idealisis) menjadi stratifikasi sosial berdasarkan kepemilikan ekonomi (mazhab Marxian/Kritis) melalui inovasi dengan kemampuan *skill* (keterampilan) yang didapatkan masyarakat cacah sehingga bisa menjadi kelas menak baru, seperti terlihat dalam Gambar 8.2. Dengan demikian, ketahanan ekonomi industri bordir Tasikmalaya juga selain adanya keterlekatan religio-kultural dalam tindakan ekonomi pengusaha juga konsekuensi sosiologis munculnya menak baru sebagai elit sosial ekonomi yang berasal dari kelas cacah. Adanya golongan menak baru ini berbeda dengan menak pada masa feodal

yang menciptakan kesenjangan sosial yang sangat dalam dengan masyarakat biasa (cacah). Stratifikasi yang tercipta antara menak baru (pengusaha bordir) dengan cacah (buruh) atau masyarakat kebanyakan (petani) tidak tidak terlalu timpang karena mereka bisa bekerja sama untuk saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Pada masa feodal menak jarang bersosialisasi atau ada hubungan sosial dengan masyarakat cacah, bahkan kaum cacah diperlakukan seperti 'budak', karena dianggap tidak satu level. Gaya hidup dan etiket mereka sangat jauh berbeda. Pada masa sekarang kehidupan sudah berbeda, meskipun mereka berbeda strata, tetapi dalam kehidupan sosial ekonomi bisa saling bekerja sama.

Bertahan dan berkembangnya industri bordir di Tasikmalaya, memunculkan menak baru. Menak sebagai elit sosial baru, mendorong ekonomi lokal semakin berkembang. Meskipun kemunculan menak-menak baru ini sangat berperan terhadap perekonomian bangsa khususnya kota Tasikmalaya, tetapi keberhasilan para pengusaha di Tasikmalaya, baik secara ekonomi, sosial maupun politik, tidak sekelas dengan pengusaha-pengusaha nasional dari etnis lainnya. Mereka menjadi elit hanya berada pada tataran pengusaha lokal dan regional. Hal ini diduga karena para pengusaha bordir Tasikmalaya ini, masih terikat dengan nilai-nilai Islam-Sunda yaitu hidup sederhana, tidak boleh menonjolkan diri dan untuk menghindari persaingan/konflik. Nilai-nilai *ukhuwwah* (persaudaraan dan kekeluargaan) dan silih asah, silih asih, silih asuh membuat kehidupan ekonomi mereka berada kelas menengah saja. Apabila mereka secara ekonomi sudah berhasil melebihi dari cukup, maka pengusaha ini berbagi dengan masyarakat sekitar yang masih kekurangan dengan mendirikan lembaga pendidikan dan sosial keagamaan (seperti pesantren dan yayasan yatim piatu).



**SOLIDARITAS PETANI
DALAM MEMAJUKAN DESA
DAN EKONOMI PEDESAAN
(PELAJARAN DARI KONVERSI
SIKLIKAL SAWAH - KELAPA
SAWIT - SAWAH
DI PEDESAAN BENGKULU)¹²**

Andi Ishak

9.1 Pendahuluan

Nusantaranomics atau ekonomi nusantara yang digagas oleh Prof. Didin S. Damanhuri menurut saya merupakan pendekatan ekonomi Indonesia yang memiliki basis filosofis. Secara ontologis, Nusantaranomics menempatkan konteks ekonomi yang akan selalu dipengaruhi kondisi sosial dan budaya masyarakat. Indonesia memiliki ribuan pulau dan ratusan etnis dan budaya yang memiliki kearifan lokal. Pengembangan terhadap realitas sistem ekonomi Indonesia atau Nusantaranomics itu tidak akan terlepas dari aspek kearifan lokal, meskipun dalam kuatnya ekspansi pasar dan kapital yang tidak dapat dihindari akibat globalisasi ekonomi dewasa ini. Inilah pendekatan

¹² Sumber data dari tulisan ini berasal dari Disertasi penulis pada Program Studi Sosiologi Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia IPB. Terima kasih disampaikan kepada Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA, Dr. Drs. Satyawan Sunito, dan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, MS. DEA.

heterodoks sebagai epistemologi Nusantaranomics untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berbasis lokal maupun nasional.

Pendekatan heterodoks terbukti berhasil di Asia. Sistem kapitalisme yang dipadukan dengan dukungan dan penguatan hubungan bisnis pengusaha lokal sukses diterapkan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Demikian juga ekonomi hibrid yang mensinergikan ekonomi kapitalis dan sosialis terbukti efektif di Tiongkok dan Vietnam (Block & Evan, 2005). Negara-negara industri baru di Asia berhasil menyasiasi neoliberalisme barat dengan jalan mensinergikannya dengan nilai-nilai lokal. Keberhasilan model pembangunan ekonomi yang berbeda ini disebut John Naisbitt sebagai “*The Asian Way*” (Damanhuri, 2010). Apakah Nusantaranomics dengan pendekatan heterodoks ini dapat menjadi suatu *school of thought* di dalam pembangunan perekonomian di Indonesia yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah dominasi pasar dan kapital? Suatu pertanyaan yang perlu dijawab dengan fakta-fakta empiris yang saya lihat banyak terjadi khususnya di dalam sistem perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian.

Jika bicara pertanian, maka perbincangan tentang ketahanan pangan menjadi suatu isu yang sangat hangat karena terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan politik. Lahan merupakan prasyarat utama dalam mendukung ketahanan pangan yang tanpanya kegiatan produksi komoditas tidak dapat terlaksana. Lahan bukan saja berhubungan dengan media tanam, tetapi juga terkait dengan ruang yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi manusia lainnya. Permasalahan lahan pertanian berada pada kontestasi di seputar kedua fungsi lahan tersebut.

Konversi lahan sawah menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan pertanian di Indonesia (Kementan, 2015). Fenomena ini banyak terjadi di Pulau Jawa yang menjadi sentra produksi padi nasional. Konversi lahan sawah tersebut terjadi karena persaingan pemanfaatan lahan akibat keterbatasan sumberdaya lahan, pertambahan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi (Irawan, 2005; Mariyono, 2007; Sunartomo, 2015), rendahnya produktivitas dan kualitas lahan sawah (Nurliani & Rosada, 2016), dan fragmentasi lahan (Mansur *et al.*, 2014).

Konversi lahan sawah secara masif akan mendatangkan permasalahan pangan karena sawah merupakan andalan bagi produksi padi nasional, apalagi bila yang dikonversi adalah lahan sawah irigasi. Sumbangan produksi padi sawah dalam periode 1969–2014 rata-rata mencapai 94,40% terhadap total produksi padi nasional (BPS, 2015). Hilangnya lahan sawah irigasi secara luas merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional karena produksi padi di dalam negeri harus terus digenjut mengikuti peningkatan jumlah kebutuhan beras akibat pertumbuhan penduduk dan sekaligus mengurangi ketergantungan akan impor beras.

Konversi lahan sawah di Jawa ke depan diperkirakan akan terus terjadi. Itulah maka pemerintah mulai mempertimbangkan daerah di luar Jawa sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Hal ini telah disadari sejak tahun 1990-an ketika Indonesia tidak dapat mempertahankan swasembada beras secara berkelanjutan pada masa Orde Baru. Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah di zaman Orde Baru (McCarthy *et al.*, 2012) dan pembukaan lahan sawah di Merauke Papua melalui Proyek MIFEE sejak tahun 2006 (Obidzinski *et al.*, 2013), adalah dua contoh orientasi ekstensifikasi pertanian padi di luar Pulau Jawa.

Meskipun banyak pulau lain di luar Jawa telah dikembangkan sebagai penyangga ketahanan pangan, namun Pulau Sumatra merupakan penyangga utama produksi padi nasional karena memiliki lahan sawah terluas kedua setelah Pulau Jawa dengan proporsi sekitar 27% (Pusdatin, 2017). Permasalahannya, konversi lahan sawah juga terjadi di Sumatra dengan cara yang berbeda dengan konversi di Jawa. Apabila di Jawa lahan sawah dikonversi untuk keperluan non pertanian, maka di Sumatra lahan sawah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat. Konversi ini terjadi di berbagai wilayah di Pulau Sumatra seperti di Sumatra Utara (Alridiwersah, 2013), Bengkulu (Widiono, 2008), Riau (Fahri *et al.*, 2014; Sali & Purwadio, 2012), dan Jambi (Rist *et al.*, 2010; Daulay *et al.*, 2016).

Tulisan ini mencoba mengungkap suatu fenomena dinamika konversi lahan sawah yang terjadi di Daerah Irigasi Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Daerah irigasi ini merupakan daerah irigasi terluas di Provinsi Bengkulu yang dibangun pada tahun 1983–1986 dengan sumber

air dari Sungai Air Manjuntio. Daerah irigasi ini merupakan daerah irigasi permukaan yang wilayah pelayanan irigasinya mencakup sawah seluas 9.493 ha yang tersebar pada 21 desa di 4 kecamatan (V Koto, Lubuk Pinang, Air Manjuntio, dan XIV Koto). Kewenangan pengelolaannya ada di Pemerintah Pusat. Pada periode 1994–2007, lahan sawah irigasi dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat dan selanjutnya lahan-lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dikonversi kembali secara siklikal menjadi lahan pertanian padi pada periode 2008–2017. Konversi kelapa sawit ke sawah ini diinisiasi oleh petani dengan kekuatan-kekuatan ekonomi lokalnya yang berbasis budaya pertanian agraris.

Secara sosiologis, tindakan petani mengonversi lahan sawah disebabkan oleh banyak faktor yang berasal dari diri petani sebagai pelaku konversi (agensi) dan beragam faktor lingkungannya (struktur). Struktur yang berperan dalam transformasi agraria di pedesaan dapat berupa aspek sosial seperti sistem perekonomian masyarakat, demografi, hukum, politik, dan budaya, bahkan juga terkait juga dengan aspek teknis seperti agronomi dan ekologi (Wiradi, 2008). Oleh karena itu pendekatan Teori Strukturasi dari Anthony Giddens, seorang sosiolog Inggris, yang memadukan interaksi agensi dan struktur dalam tindakan sosial menjadi pilihan teori untuk menganalisis konversi lahan sawah di Air Manjuntio dan perubahan sosial yang menyertainya. Giddens (1984) berpendapat bahwa praktik atau tindakan sosial selalu berlangsung secara dualitas yang mengandaikan adanya agensi dan struktur. Struktur tidak hanya menekan (*constraining*) tindakan aktor, namun juga bersifat memberdayakan (*enabling*). Teori strukturasi ini bersifat integratif dengan memadukan pendekatan sosiologi mikro dan makro (Ritzer & Goodman, 2003).

Konsep agensi menekankan kemampuan (kuasa) seseorang (aktor/agen) untuk berpikir, bersikap dan bertindak secara independen, bebas, dan otonom, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sementara itu, struktur yang mempengaruhi tindakan aktor terbagi dalam dua bagian yaitu struktur sosial dan struktur non sosial (fisikal-material). Kedua bentuk struktur tersebut mewujudkan dalam enam bentuk struktur yaitu wacana atau diskursus, aturan-aturan termasuk norma dan adat istiadat, para aktor sosial lain, tindakan para aktor sosial, stratifikasi dan kelompok-kelompok sosial, serta sumberdaya fisik baik alamiah maupun non alamiah (Kinseng, 2017).

9.2 Sistem Pertanian Masyarakat Air Manjuntio

Penduduk yang mendiami wilayah sekitar Daerah Irigasi Air Manjuntio terbagi atas dua etnis utama, yaitu etnis Minang Mukomuko yang merupakan penduduk asli (etnis lokal) dan etnis Jawa yang didatangkan lewat program transmigrasi pada tahun 1988-1992 sekitar 4.300 KK dari wilayah yang terdampak pembangunan Proyek Waduk Kedung Ombo di Kabupaten Boyolali dan Sragen Jawa Tengah yang meliputi lahan sekitar 12 ribu hektare. Dari 21 desa pada 4 kecamatan yang mendapatkan pelayanan irigasi Air Manjuntio, 14 desa di antaranya didominasi etnis lokal Minang Mukomuko dan 7 desa etnis Jawa. Selain dua etnis dominan tersebut, terdapat juga para pendatang dari berbagai daerah seperti orang Batak yang datang secara swadaya untuk berkebun kelapa sawit ke wilayah ini.

Orang Minang Mukomuko pada awalnya adalah peladang berpindah yang berladang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga (subsistensi) dengan menanam padi dan kebun campuran. Usaha pertanian dilaksanakan pada tanah ulayat milik 7 kelompok masyarakat yang disebut “kaum”. Praktik peladangan berpindah berlangsung sampai dengan akhir tahun 1980-an akibat dibangunnya irigasi Air Manjuntio dan diperkenalkannya sistem pertanian menetap budidaya sawah irigasi. Penduduk lokal memiliki lahan sawah pada tanah mineral atau bergambut. Berbeda dengan penduduk lokal, para transmigran memiliki budaya pertanian agraris yang intensif dan lebih maju dalam penerapan teknologi. Namun sayangnya, kawasan persawahan transmigran berada di atas lahan gambut yang tidak mudah dikelola untuk pertanian padi sawah. Mereka menanam padi, jagung, ubi kayu.

Pada saat awal kedatangan, setiap transmigran mendapatkan 2 ha lahan, terdiri atas 0,25 ha lahan rumah dan pekarangan, dan 1,75 ha lahan usaha pertanian. Pada awalnya, daerah transmigrasi di Air Manjuntio memiliki banyak permasalahan. Daerah transmigrasi Air Manjuntio sebagian masih merupakan hutan yang belum dibuka, sarana pendidikan dan kesehatan masih sangat kurang, akses jalan yang masih jelek, dan saluran irigasi yang belum dibangun seluruhnya (Stanley, 1994).

Kesulitan hidup di daerah transmigrasi, membuat sebagian transmigran asal Kedung Ombo memutuskan untuk kembali pulang ke daerah asalnya. Diperkirakan sebanyak 10-20% KK transmigran meninggalkan Air Manjuntjo. Bagi transmigran yang bertahan, suasana kesulitan yang dihadapi dan asal dari satu daerah dan etnis yang sama mendorong mereka untuk selalu bergotong-royong menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Semboyan *tiji-tibeh (mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)* yang berarti mati satu mati semua atau makmur satu makmur semua (Wasino, 2015) menjadi pegangan yang kuat bagi transmigran untuk berjuang bersama-sama dalam kondisi yang sulit di atas lahan gambut. Para transmigran bergotong-royong berbasis perdusunan, desa, dan lintas desa. Mereka memperbaiki dan menimbun jalan usahatan, membangun jembatan kayu, memperbaiki saluran irigasi, membuat balai pertemuan, dan lapangan olahraga, bahkan sampai membantu tetangga mendirikan rumah. Budaya gotong-royong sangat melekat pada wilayah ekstrasmigran. Pertemuan warga sering dilakukan baik dalam bentuk pertemuan kelompok, arisan, yasinan, maupun selamatan, seperti contoh pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Jenis-jenis pertemuan warga di Dusun 7 Desa Tirta Mulya, Air Manjuntjo.

| No. | Jenis pertemuan | Lingkup pertemuan | Sifat pertemuan | Waktu |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------|
| 1. | Arisan keluarga | Lintas desa | Rutin | Bulanan |
| 2. | Selamatan desa, persiapan HUT 17 Agustus | Desa | Rutin | Tahunan |
| 3. | Pertemuan kelompok tani | Dusun | Rutin | Bulanan |
| 4. | Arisan ibu-ibu | Dusun | Rutin | Bulanan |
| 5. | Yasinan bapak-bapak | Dusun | Rutin | Malam jumat |
| 6. | Yasinan ibu-ibu | Dusun | Rutin | Malam senin |
| 7. | Persiapan pernikahan | Dusun | Insidental | - |

Sumber: Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tirta Mulya.

9.3 Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Mukomuko

Konversi lahan sawah menjadi kelapa sawit di Air Manjuntio tidak lepas dari ekspansi perkebunan kelapa sawit di Mukomuko. Ekspansi kelapa sawit terjadi dengan cepat karena berlangsung “dari atas” oleh para pemilik perkebunan besar swasta dan “dari bawah” oleh petani perkebunan rakyat. Kabupaten Mukomuko memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas di Bengkulu. Pada tahun 2016 tercatat ada 152.231 ha di Mukomuko (38% luas wilayah kabupaten) dan menyumbang 28,52% areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bengkulu (BPS Provinsi Bengkulu 2017). Areal perkebunan kelapa sawit di Mukomuko terdiri atas 73,44% perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta 26,56%.

a. Ekspansi “Dari Atas”

Ekspansi dari atas adalah ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar kelapa sawit. BPS (2016) mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 53 perusahaan besar swasta kelapa sawit di Bengkulu, 21 perusahaan di antaranya berada di Mukomuko, yang terdiri atas 11 perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan 10 perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan budidaya kelapa sawit dengan luas areal 60.217 ha. Pembangunan perkebunan besar swasta juga diikuti dengan pendirian pabrik pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Kabupaten Mukomuko sampai tahun 2015 telah memiliki 13 unit pabrik yang dioperasikan oleh 11 perusahaan. Ekspansi perusahaan besar swasta kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko dalam dua dekade terakhir begitu masif. Lokasi perusahaan terdapat di 12 dari 15 kecamatan di Mukomuko (Gambar 9.1).

produktivitas karena mampu menghasilkan minyak 4–23 kali lebih banyak dibandingkan dengan jenis tanaman penghasil minyak nabati lainnya (Sheil *et al.*, 2009).

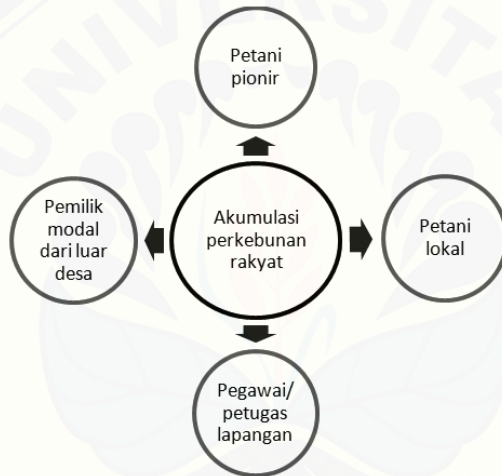
Faktor pendorong dari dalam negeri lainnya yang menyebabkan masifnya ekspansi kelapa sawit adalah dukungan kebijakan politik pemerintah yang kondusif bagi investasi kelapa sawit. Meningkatnya peran swasta ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi. Para pemilik modal besar mudah mendapatkan izin perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sehingga terjadi konsentrasi penguasaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit sampai ratusan ribu hektare. Hal ini semakin cepat terjadi pada era otonomi daerah karena desentralisasi kewenangan perizinan perkebunan kepada kepala daerah (Pichler, 2015). Lima konglomerasi kelapa sawit (Wilmar, Musim Mas, GAR, Cargill dan Asian Agri) pada tahun 2014 menguasai sekitar 40 pabrik penyulingan minyak sawit yang bersumber dari 850 pabrik CPO dan mengontrol 1.600 lokasi perkebunan di Indonesia (Pacheco *et al.*, 2017). Selain itu, pemerintah mendorong peran perusahaan perkebunan besar swasta untuk membentuk jaringan agribisnis kelapa sawit dengan petani dan masyarakat lokal melalui berbagai skema perkebunan sejak tahun 1980-an (McCarthy *et al.*, 2012).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit tentu tidak terlepas dari permintaan minyak sawit global. Minyak sawit digunakan secara luas dalam berbagai produk pangan, energi, dan industri. Konsumsi minyak nabati dari kelapa sawit ditujukan untuk kebutuhan pangan (oleopangan) dan non pangan. Konsumsi minyak sawit dunia terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014, minyak sawit telah menyumbang 41% kebutuhan minyak nabati dunia (GAPKI, 2014), dan telah menjadi minyak nabati dominan menggeser minyak kedelai sejak tahun 2007 (Gaskell, 2015).

b. Ekspansi “Dari Bawah”

Ekspansi “dari bawah” adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat. Ekspansi perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Mukomuko mulai terjadi sejak pertengahan tahun 1990-an setelah ada pasar TBS akibat ekspansi dari atas. Tidak seperti perusahaan

perkebunan besar swasta, pelaku perkebunan kelapa sawit rakyat terdiri atas banyak agen dari berbagai kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial tersebut adalah petani pionir yaitu para pendatang dari Sumatra Utara yang memelopori pembukaan perkebunan kelapa sawit, petani rakyat, pegawai dan petugas lapangan, dan para pemilik modal dari luar desa (Gambar 9.2). Berbagai aktor tersebut membuka kebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Mukomuko. Perkebunan kelapa sawit rakyat luasannya relatif sempit-sempit dibandingkan dengan PBS, namun ketika dihitung secara agregat memiliki areal perkebunan yang lebih luas.



Gambar 9.2 Pemetaan kelompok sosial pemilik perkebunan kelapa sawit rakyat di Mukomuko.

Pahan (2007) menyatakan bahwa kelapa sawit pertama kali ditanam secara komersial di Sungai Liput (Aceh) dan Asahan (Sumatra Utara) pada 1911. Itulah sebabnya para pendatang dari Sumatra Utara telah lebih dulu mengenal sistem budidaya kelapa sawit. Keberhasilan ekonomi petani pionir dari Sumatra Utara berkebun kelapa sawit mendorong penduduk lokal untuk ikut menanam kelapa sawit. Hak kepemilikan tanah adat menjadi modal yang dimanfaatkan oleh penduduk lokal untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Salah satu kelompok sosial yang ikut melakukan ekspansi dari bawah adalah para pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Mukomuko. Sementara itu,

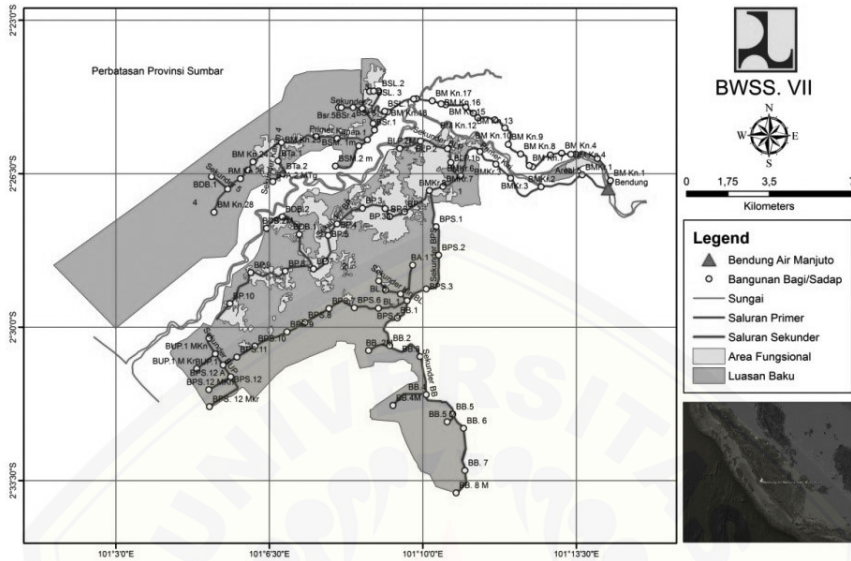
para pemilik modal dari luar desa (pedagang, pengusaha, pejabat) membeli tanah dan membuka perkebunan kelapa sawit di Mukomuko dengan cara membentuk jaringan bersama orang-orang lokal.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit menyebabkan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat di Mukomuko yaitu terbentuknya perkebunan besar swasta akibat ekspansi dari atas dan perkebunan rakyat akibat ekspansi dari bawah. Sistem patron-klien terbentuk antara petani dengan pedagang dalam pemasaran TBS kelapa sawit. Pelaku ekspansi sama-sama bermotif ekonomi dan struktur dominan yang mempengaruhinya adalah pasar.

9.4 Konversi Siklikal Sawah Irigasi di Air Manjuntjo

a. Konversi Sawah menjadi Kebun Kelapa Sawit Rakyat di Air Manjuntjo

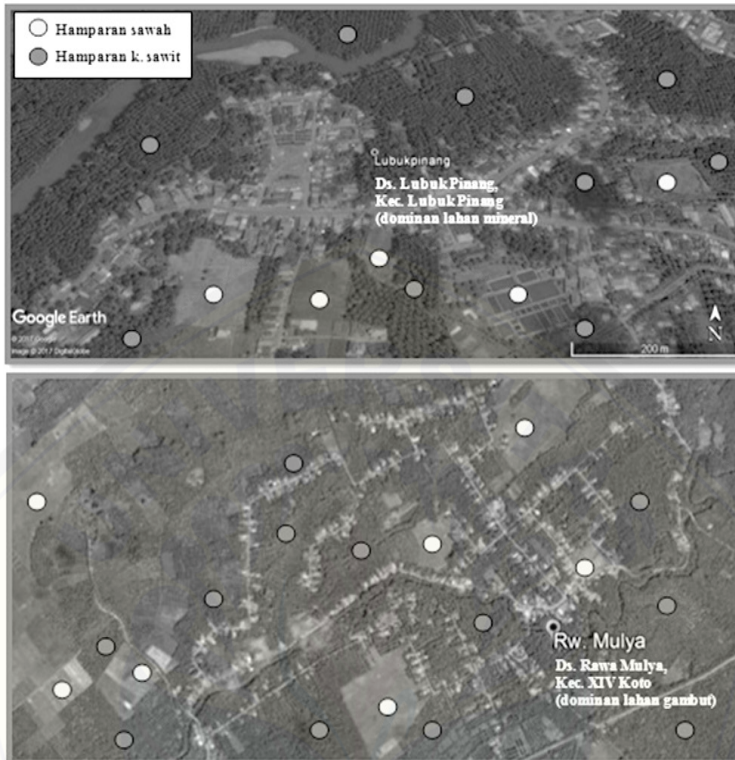
Bendung Air Manjuntjo dibangun dalam periode 1983–1986, terletak di Desa Lalang Luas, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko. Daerah irigasi Air Manjuntjo seluas 9.493 ha yang mengairi areal persawahan di 21 desa pada 4 kecamatan. BPS Kabupaten Mukomuko (2015) mencatat bahwa luas lahan sawah irigasi fungsional (sawah irigasi yang masih ditanami padi) pada keempat kecamatan tersebut pada tahun 2014 adalah 3.078 ha atau hanya 32,42% dari luas sawah baku yang ada. Berkurangnya areal sawah baku karena telah banyak dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat (Gambar 9.3).



Gambar 9.3 Sawah baku pada daerah irigasi Air Manjuntou-daerah berwarna abu-abu tua adalah sawah baku yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat.

(Sumber: BWSS VII Bengkulu, 2016).

Masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Mukomuko juga masuk sampai ke daerah irigasi Air Manjuntou. Kelapa sawit ditanam oleh petani terutama pada kawasan sawah bergambut yang tidak optimal untuk budidaya padi karena tidak mendapatkan air irigasi. Hamparan sawah potensial (sawah baku) yang telah menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat tersebut tersebar merata di desa-desa dalam daerah irigasi, menghasilkan lanskap (bentangan alam) yang unik (Gambar 9.4).



Gambar 9.4 Citra satelit penggunaan lahan sawah di 2 desa pada daerah irigasi Air Manjuntjo: Lubuk Pinang (atas) dan Rawa Mulya (bawah)

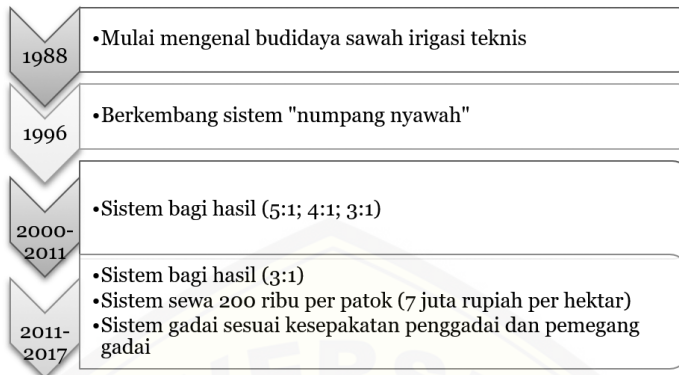
(Sumber: Google Earth, 2015).

Permasalahan utama yang dihadapi petani ekstrasmigran dalam budidaya padi sawah di Air Manjuntjo adalah kondisi lahan gambut yang sering menyebabkan kerusakan saluran irigasi. Menurut Najiyati *et al.* (2005), setelah dilakukan pembukaan lahan, gambut berangsur akan kempes dan amblas (subsidence) akibat penurunan permukaan tanah. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya kandungan air. Rata-rata kecepatan subsidence adalah 0,3–0,8 cm/bulan, dan terjadi selama 3-7 tahun setelah proses drainase dan pengolahan tanah.

Sifat subsidensi lahan gambut menyebabkan saluran irigasi (khususnya irigasi tersier) yang melayani petakan sawah menjadi tidak stabil dan cepat rusak. Kerusakan saluran irigasi sulit diatasi oleh petani karena terkadang membutuhkan modal yang besar karena kondisinya parah. Kerusakan irigasi tersebut menyebabkan sawah tidak dapat diairi dan akhirnya petani tidak dapat bersawah dengan optimal. Kondisi ini paling dirasakan oleh ekstrasmigran karena proyek transmigrasi Air Manjuntio ditempatkan pada kawasan gambut.

Berbeda dengan wilayah ekstrasmigran, wilayah persawahan penduduk lokal etnis Minang Mukomuko masih layak diusahakan secara intensif untuk budidaya padi karena berada pada lahan mineral. Padi masih dibudidayakan secara tradisional dengan menanam sekali setahun. Interaksi antara penduduk lokal dengan ekstrasmigran yang ingin tetap bersawah telah membuka peluang intensifikasi sawah irigasi milik penduduk lokal untuk meningkatkan intensitas pertanaman padi dari sekali menjadi tiga kali setahun yang diawali dengan sistem numpang nyawah. Kondisi ini selanjutnya memunculkan berbagai praktik penyakapan lahan (bagi hasil, sewa, gadai) (Gambar 9.5). Usahatani padi semakin termonetisasi yang juga menyebabkan komodifikasi tenaga kerja dan komersialisasi gabah.

Konversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan hasil interaksi antara agensi-struktur dalam semesta kehidupan petani sebagai pelaku tindakan. Petani terpaksa mengonversi lahan sawah gambut yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sawah irigasi di Air Manjuntio. Faktor struktural yang menyebabkan petani menanam kelapa sawit di lahan sawah selain kondisi lahan gambut dan masalah pengairan, juga adalah adanya pasar TBS lokal. Adanya pasar TBS telah menarik petani perkebunan rakyat secara tidak langsung masuk ke dalam sistem perdagangan global kelapa sawit. Meskipun tidak dapat bersawah, masyarakat ekstrasmigran yang memiliki budidaya agraris mengembangkan interaksi dengan penduduk lokal untuk dapat tetap bersawah.



Gambar 9.5 Perubahan sistem penyakapan lahan sawah irigasi milik etnis Minang Mukomuko di Air Manjuntou.

b. Konversi Kelapa Sawit kembali ke Sawah

Proses konversi kelapa sawit ke sawah tidak terlepas dari pengaruh kondisi infrastruktur pengairan yang semakin baik dan motivasi petani ekstrasmigran. Semakin baiknya kondisi irigasi membuat petani kembali tertarik untuk bersawah. Lahan-lahan kebun kelapa sawit di Air Manjuntou yang sempit-sempit milik petani kemudian dikonversi menjadi sawah (Gambar 9.6).



Gambar 9.6 Konversi kebun kelapa sawit kembali ke sawah oleh petani di Air Manjuntou.

Keinginan petani untuk mengonversi lahan kebun kelapa sawitnya tidak terlepas dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari usahatani padi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelapa sawit. Usahatani padi sawah lebih menguntungkan dibandingkan dengan kelapa sawit dengan margin keuntungan antara 26–51% per hektare per tahun. Bagi pemilik sawah etnis Jawa (transmigran), keuntungan lain yang diperoleh dengan mengonversi kebun kelapa sawit menjadi sawah adalah sawah dapat ditanami dengan palawija pada saat pengeringan irigasi di samping dua kali tanam padi dalam setahun yang akan ikut meningkatkan pendapatan keluarga.

Rendahnya pendapatan dari berkebun kelapa sawit ekstrasmigran disebabkan karena penerapan teknik budidaya kelapa sawit yang tidak intensif akibat keterbatasan pengetahuan dan permodalan petani. Faktor penentu utama adalah penggunaan bibit kelapa sawit yang kebanyakan adalah bibit asalan (tidak berlabel) yang diambil dari bibit asalan yang tumbuh di bawah batang-batang tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan pada lahan-lahan kebun petani asal Sumatra Utara atau membeli bibit yang tidak jelas sumbernya. Padahal penggunaan bibit unggul merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya kelapa sawit. Ditambah lagi dengan penerapan teknologi pengelolaan kebun (jarak tanam, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit) yang masih kurang baik. Tanaman kelapa sawit bagi petani transmigran adalah tanaman yang baru dikenal sehingga pengetahuan dan keterampilan budidaya yang dimiliki petani juga masih minim. Di samping itu, luas kebun yang relatif sempit tidak dapat dijadikan sumber pendapatan utama bagi petani.

Petani mulai mengubah kebun kelapa sawit menjadi sawah dalam periode 2013–2016 karena kondisi irigasi yang semakin baik. Zulkarnain (2016) melaporkan bahwa sejak tahun 2011–2016, kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi Air Manjuntjo yang telah dilaksanakan Kementerian PUPR meliputi jaringan irigasi (primer, sekunder, dan tersir) dengan total luas 19.426 ha. Fenomena konversi lahan kelapa sawit ke sawah terjadi di tiga desa ekstrasmigran yaitu Desa Tirta Mulya dan Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuntjo, dan Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang (Tabel 9.2).

Tabel 9.2 Kebun kelapa sawit yang dikonversi menjadi sawah secara swadaya oleh petani ekstrasmigran di Air Manjuntjo.

| No. | Lokasi | Tahun | Luas lahan konversi (ha) |
|---------------|---|-----------|--------------------------|
| 1. | Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuntjo | 2013–2016 | 7 |
| 2. | Desa Tirta Mulya Kecamatan Air Manjuntjo | 2013–2016 | 4 |
| 3. | Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang | 2013–2016 | 15 |
| Jumlah | | | 26 |

Sumber: Wawancara lapangan dengan berbagai sumber.

Konversi kelapa sawit ke sawah dilakukan petani dengan dua cara, manual dan mekanis. Ketika air irigasi dapat disalurkan ke kebun kelapa sawit, petani pemilik kebun memangkas seluruh pelepah daun kelapa sawit, membunuh pokok tanaman dengan herbisida, dan membuat pematang sehingga siap dijadikan sawah. Batang-batang sawit perlahan-lahan akan mati. Inilah cara manual. Sementara itu, cara mekanis dilakukan dengan menggunakan alat berat. Batang tanaman kelapa sawit ditumbang dengan eskavator, tanah kebun diratakan, pematang sawah dibuat.

Fenomena konversi kebun kelapa sawit rakyat menjadi lahan sawah yang banyak terjadi sejak tahun 2013 telah menjadi perhatian Pemda Kabupaten Mukomuko. Keinginan petani untuk kembali bersawah disambut baik oleh pemerintah daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alih Fungsi dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Daerah Irigasi Air Manjuntjo juga telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya tanaman pangan yang meliputi Kecamatan Air Manjuntjo, Lubuk Pinang, V Koto, dan XIV Koto, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012–2032.

Program pencetakan sawah pada daerah irigasi Air Manjuntjo dilakukan Pemerintah pada tahun 2017. Terdapat lima pemangku kepentingan dalam program pencetakan sawah ini yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah (PUPR) dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang

mewakili pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, serta petani. Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pembangunan jaringan dan pemeliharaan fasilitas bendungan serta jaringan irigasi primer dan sekunder. Kementan dan Pemda bertanggung jawab dalam program pencetakan sawah dan pembinaan terhadap petani. Sementara itu, petani sebagai pemilik lahan memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan jaringan irigasi tersier agar kegiatan budidaya padi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Proses pencetakan sawah ditampilkan pada Gambar 9.7.



Gambar 9.7 Konversi kelapa sawit ke sawah oleh Pemerintah di Air Manjunto.

Lahan yang direvitalisasi menjadi sawah seluas 1.005 ha yang melibatkan 1.086 petani pada 10 desa di Daerah Irigasi Air Manjunto. Proses pencetakan lahan sawah di Air Manjunto dilakukan melalui kerjasama antara Pemda Kabupaten Mukomuko dengan TNI AD. Lahan sawah yang dicetak seluas 1.005 ha pada 10 desa di 3 kecamatan yang melibatkan 1.086 petani (Tabel 9.3).

Konversi perkebunan kelapa sawit kembali ke sawah di daerah irigasi Air Manjunto adalah suatu proses perubahan yang relatif panjang. Dibutuhkan waktu sekitar dua puluh tahun untuk kembali mengoptimalkan pemanfaatan daerah irigasi Air Manjunto sebagai sentra pertanian padi di Mukomuko dengan mengonversi perkebunan kelapa sawit rakyat di lahan sawah irigasi kembali menjadi sawah. Faktor utama penentu dikonversinya kebun kelapa sawit menjadi sawah adalah rasionalitas dan motivasi ekonomi petani. Petanilah yang menginisiasi atau yang memelopori praktik konversi ini, adalah petani yang berlahan sempit yang berada pada desa-desa transmigran.

Prosesnya dilakukan secara manual maupun mekanis. Selain motivasi ekonomi, perasaan petani juga lebih tenang untuk mewariskan sawah ke generasi berikutnya dibandingkan kelapa sawit karena mampu menjamin ketahanan pangan keluarga.

Tabel 9.3 Lokasi cetak sawah di Air Manjuntio tahun 2017.

| No. | Desa, Kecamatan | Tutupan lahan | Luas lahan (ha) | Jumlah petani (orang) |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Desa Pondok Panjang, V Koto | Kelapa sawit | 47,16 | 49 |
| 2. | Suka Pindah, Lubuk Pinang | Kelapa sawit | 74,71 | 107 |
| 3. | Arah Tiga, Lubuk Pinang | Belukar | 8,39 | 11 |
| | | Kelapa sawit | 73,87 | 79 |
| 4. | Lubuk Gedang, Lubuk Pinang | Belukar | 1,27 | 2 |
| | | Kelapa sawit | 95,33 | 90 |
| 5. | Sumber Makmur, Lubuk Pinang | Kelapa sawit | 392,70 | 421 |
| 6. | Tanjung Alai, Lubuk Pinang | Kelapa sawit | 38,74 | 27 |
| 7. | Agung Jaya, Air Manjuntio | Belukar | 28,26 | 27 |
| | | Kelapa sawit | 26,65 | 27 |
| 8. | Kota Praja, Air Manjuntio | Belukar | 23,12 | 25 |
| | | Kelapa sawit | 53,54 | 64 |
| 9. | Tirta Makmur, Air Manjuntio | Kelapa sawit | 118,67 | 132 |
| 10. | Tirta Mulya, Air Manjuntio | Kelapa sawit | 22,52 | 25 |
| | | Belukar | 61,04 | 65 |
| | Sawit | | 943,58 | 1.021 |
| Jumlah total | | | 1.005 | 1.086 |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko (2017)

Petani pionir yang mengonversi kebun kelapa sawit menjadi sawah berasal dari etnis Jawa. Terbukti bahwa budaya pertanian agraris menyebabkan petani ekstrasmigran cenderung terus bersawah meskipun dalam kondisi lahan gambut yang kurang optimal. Bantuan program pemerintah, baik yang dikerjakan secara langsung/dikontrakkan oleh dinas/instansi, maupun yang dikerjakan secara swakelola oleh petani memiliki peran penting untuk perbaikan infrastruktur irigasi, sangat besar peranannya dalam optimalisasi

sawah irigasi karena didukung dengan jaminan kecukupan air. Konversi kelapa sawit kembali ke sawah menyebabkan intensifikasi padi. Padi dapat ditanam 2-3 kali setahun yang meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian pedesaan di Air Manjuntjo.

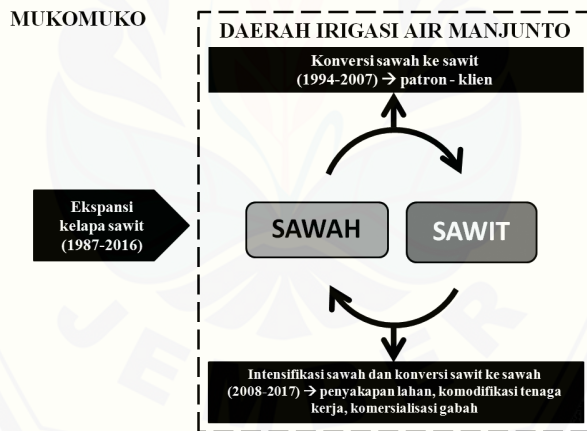
Rasionalitas dan motivasi petani (etnis Jawa) mengejar keuntungan ekonomi dengan dukungan struktur budaya dan perbaikan irigasi melalui berbagai program pemerintah mendorong terjadinya konversi kebun kelapa sawit kembali ke sawah yang dilakukan oleh petani. Inisiasi konversi kelapa sawit ke sawah ini akhirnya mendorong konversi secara besar-besaran oleh pemerintah melalui program pencetakan sawah di Air Manjuntjo. Praktik konversi kelapa sawit kembali ke sawah hanya mungkin terjadi karena adanya sinergi antara petani dan pemerintah. Program pencetakan sawah merupakan hasil kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dari pusat sampai ke daerah, termasuk petani sebagai pemilik lahan. Dinamika hubungan agensi-struktur dalam konversi kelapa sawit menjadi sawah di Air Manjuntjo ditampilkan pada Gambar 9.8.



Gambar 9.8 Dinamika interaksi agensi-struktur dalam konversi perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sawah di Air Manjuntjo.

9.5 Penutup

Perubahan masyarakat pertanian yang terjadi pada daerah irigasi Air Manjunto di Kabupaten Mukomuko-Provinsi Bengkulu kurang lebih dalam 30 tahun terakhir berlangsung dengan sangat dinamis. Ekspansi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan perkebunan besar swasta di Mukomuko yang mulai terjadi bersamaan dengan dibukanya daerah irigasi Air Manjunto disertai kedatangan transmigran pada akhir tahun 1980-an menjadi dua penyebab utama terjadinya transformasi masyarakat pertanian di daerah irigasi Air Manjunto. Transformasi masyarakat pertanian yang terjadi di daerah irigasi Air Manjunto khususnya pada pemanfaatan lahan sawah adalah berpola siklikal, dari sawah yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan kemudian dikembalikan lagi menjadi sawah (Gambar 9.9).

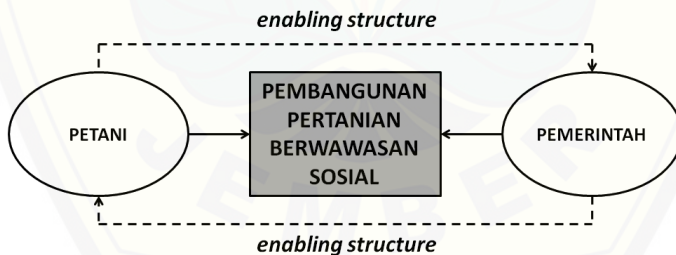


Gambar 9.9 Konversi sawah berpola siklikal di Air Manjunto.

Konversi siklikal terjadi secara dinamis akibat interaksi agensi-struktur dalam semesta kehidupan petani. Ekspansi kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko terjadi “dari atas” dan “dari bawah” Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Mukomuko akhirnya berlangsung secara masif karena terjadi “dari atas” melalui investasi perusahaan perkebunan besar swasta dan “dari bawah” melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dilakukan oleh beragam aktor. Ekspansi perkebunan kelapa sawit rakyat menyebabkan

konversi sawah ke kelapa sawit di Daerah Irigasi Air Manjuntjo. Hal ini karena lahan-lahan sawah pada kawasan gambut yang kurang subur dan kerusakan jaringan irigasi, dan adanya peluang pasar TBS kelapa sawit.

Peneliti yang meminjam Teori Strukturasi Giddens sebagai alat analisis membuktikan bahwa intensifikasi padi sawah irigasi mampu dilakukan di atas lahan gambut ketika ada sinergi antara petani dan pemerintah (Gambar 9.10). Proses konversi dari kelapa sawit kembali ke sawah yang dilakukan oleh petani hanya dapat terjadi ketika ada dukungan program perbaikan irigasi dari pemerintah. Di sisi lain program pencetakan sawah yang dimotori oleh pemerintah hanya mungkin dilaksanakan ketika masyarakat tani juga mendukungnya. Pada kedua fenomena itu, baik tindakan petani maupun tindakan pemerintah mengonversi kelapa sawit kembali ke sawah, terjadi ketika ada struktur yang mendukung (*enabling structure*) dari masing-masing pihak terhadap pihak lain. Ketika petani melakukan konversi kelapa sawit ke sawah, pemerintah merupakan *enabling structure*. Hal yang sama juga terjadi ketika pemerintah melaksanakan program pencetakan sawah, petani bertindak sebagai *enabling structure* yang memungkinkan proses-proses tersebut dapat terlaksana.



Gambar 9.10 Sinergi agensi–struktur dalam program pembangunan pertanian.

Pelajaran dari Air Manjuntjo memberikan fakta bahwa dengan kekuatan ekonomi lokal yang berbasis budaya agraris yang kuat dapat dijadikan sebagai modal dalam pembangunan pertanian. Suatu fakta empiris beroperasinya Nusantaranomics seturut gagasan Prof. Didin S. Damanhuri.

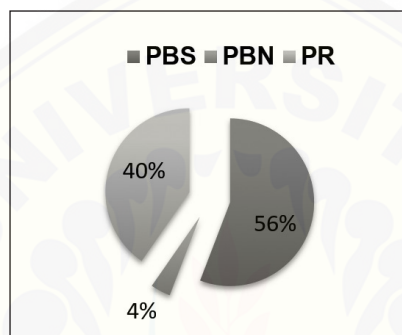
SOLIDARITAS EKONOMI RAKYAT BERBASIS SAWIT VIS A VIS KORPORASI NASIONAL DAN ASING. KASUS SUMATRA BARAT

Elvawati

Struktur agrarian di Sumatra Barat didominasi oleh sektor pertanian. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, sektor ini berperan dalam peningkatan ekonomi nasional (Christensen and Yee 1964) maupun peningkatan pendapatan (Cervantes-Godoy and Dewbre 2010). Peningkatan hasil produksi sektor pertanian pada aras makro didukung oleh kebijakan pemerintah sedangkan pada aras mikro petani melakukan ekspansi. Ekspansi pertanian juga dipengaruhi oleh akses ke pasar, modal manusia, penguasaan lahan (Bragança 2018). Di sisi lain, ekspansi terjadi akibat petani terhubung dengan pasar ekspor dengan model produksi berbasis pasar ekspor (Pacheco 2006). Sedangkan, pada tingkat lokal dipicu oleh kemajuan teknis maupun teknologi (Byerlee, Stevenson, and Villoria 2014).

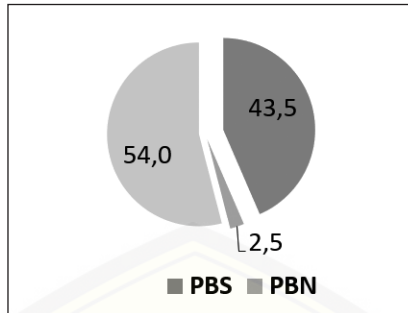
Sektor pertanian yang berbasis pasar ekspor di Indonesia saat ini adalah sektor perkebunan. Sektor perkebunan mengarah kepada tanaman komersial yang berbasis ekspor seperti karet, kelapa sawit, kakao dan lain-lain. Salah satu sektor perkebunan yang menempatkan Indonesia pada posisi terbesar ekspornya adalah kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan 12,30 juta hektare (Direktorat Jenderal Perkebunan 2016).

Peningkatan perluasan perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh berbagai kalangan baik pemerintah, perusahaan maupun petani. Petani merupakan aktor yang berperan penting dalam melakukan ekspansi, dilihat dari status perusahaan lahan perkebunan di Indonesia, petani merupakan aktor yang menempati posisi kedua setelah Perusahaan Besa Swasta (PBS) sedangkan di wilayah Sumatra Barat petani menempati posisi pertama dalam status perusahaan lahan kelapa sawit (Direktorat Jenderal Perkebunan 2016).



Gambar 10.1 Kepemilikan lahan sawit di Indoensia tahun 2021

Pertumbuhan sektor pertanian kelapa sawit pada aras makro mendukung PDB negara. Namun di aras mikro sangat berpengaruh terhadap ekonomi rumah tangga petani. Rumah tangga petani yang berinvestasi pada kelapa sawit, secara langsung mendukung pendapatan. Untuk mengubah sistem produksi yang berorientasi subsisten menjadi berorientasi pasar mendorong peningkatan pendapatan (Baisa 2009) mestinya dikembangkan investasinya. Berinvestasi dalam sektor pertanian adalah kunci pemberantasan kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi khususnya di daerah pedesaan (FAO 2017). Di sisi lain, perkembangan kelapa sawit juga medorong perubahan *livelihood system* (Obidzinski *et al.*, 2012), *men-drive* pertanian agribisnis, yang mampu mengubah strategi penghidupan (McCarthy, 2010), tetapi berdampak terhadap kerentanan nafkah (Hidayah, Dharmawan, and Barus, 2016).



Gambar 10.2 Kepemilikan lahan sawit di Sumatra Barat tahun 2021

10.1 Ekspansi Kelapa Sawit: Transformasi Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani

Peralihan mode produksi di pedesaan mengakibatkan peralihan fungsi lahan yaitu lahan pertanian pangan menjadi lahan perkebunan sehingga mempengaruhi sistem nafkah petani. Di samping itu, mengubah struktur agraria lokal dan sistem pola nafkah rumah tangga pada masyarakat lokal (Dharmawan, Yulian, and Rahmadian 2016). Misalnya dalam hasil penelitian terjadi peralihan budidaya tanaman pangan dan sayur mayur ke kelapa sawit sebagai sumber pendapatan (Dharmawan, Mardiyarningsih, and Yulian 2016). Selanjutnya, strategi penghidupan dan nafkah pedesaan selalu dibangun ke sektor pertanian (Dharmawan 2007). Strategi nafkah merupakan kombinasi dari kegiatan dan aset yang menghasilkan sarana kelangsungan hidup rumah tangga (Martin and Lorenzen 2016). Di sisi lain, adopsi kelapa sawit dapat melepaskan sumber daya buruh rumah tangga dengan input tenaga kerja rendah dan dengan demikian memungkinkan perluasan lahan pertanian dan diversifikasi produksi tanaman pangan. Selain itu, ekspansi kelapa sawit memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan. Budidaya kelapa sawit merupakan strategi baru yang dapat meningkatkan sumber nafkah rumah tangga petani. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri budidaya kelapa sawit meraup pendapatan yang lebih tinggi (Mingorría *et al.*, 2014).

Perubahan tersebut mendorong rumah tangga petani memiliki sumber nafkah yang lebih beragam (diversifikasi nafkah) sebagai strategi kelangsungan hidup rumah tangganya di pedesaan. Diversifikasi nafkah sebagai proses di mana rumah tangga membangun beragam kegiatan dan menciptakan kemampuan menjamin kelangsungan hidupnya sehingga meningkatkan taraf hidup (Ellis 1998, 1999). Menurut Tambo, ketahanan rumah tangga diarahkan kepada peningkatan pendapatan rumah tangga, meningkatkan ketahanan pangan dan membangun aset (Tambo 2016).

Dengan demikian, berdasarkan literatur dapat terlihat bagaimana perubahan struktur nafkah pada masyarakat pedesaan yang dipicu oleh tanaman kelapa sawit. Adopsi kelapa sawit dijadikan sebagai sumber nafkah baru bagi rumah tangga petani dan sebagian petani secara sadar meninggalkan sumber nafkah lama karena sumber nafkah baru lebih menjanjikan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri kehadiran kelapa sawit memunculkan sumber nafkah baru bagi rumah tangga petani. Kehadiran sumber nafkah baru tersebut dapat menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan-tekanan ekonomi. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh rumah tangga petani, maka semakin besar akses terhadap mata pencaharian dan semakin beragam sumber nafkah, dengan bentuk perubahan sumber nafkah tersebut dapat dari *farm* ke *non-farm* atau sebaliknya.

10.2 Pergeseran Preferensi Rumah Tangga Petani

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mata pencaharian dan peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan. Awalnya sektor perkebunan yang berkembang di Kecamatan Sangir Batang Janggo dan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok adalah perkebunan karet yang diperkirakan mulai tahun 1970-an dan menjadi komoditas unggulan di lokasi tersebut. Rumah tangga petani di Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Sangir Batang Hari rata-rata memiliki perkebunan karet di samping usaha pertanian lainnya. Sedangkan pada desa transmigrasi, karet juga merupakan komoditas unggulan. Tanaman karet merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan mendukung ekonomi rumah tangga petani transmigran ke

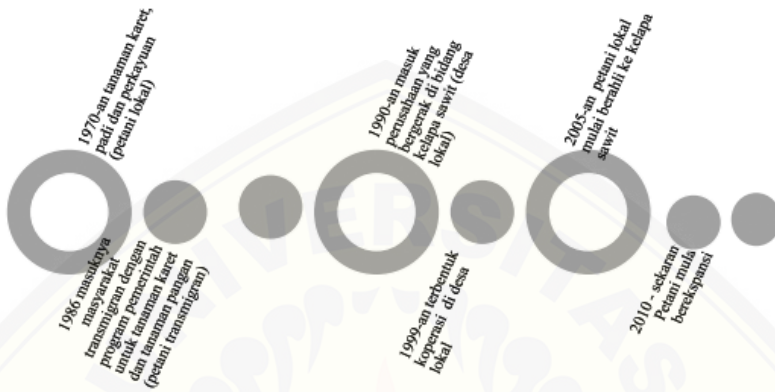
depannya. Sehingga pada saat sekarang rumah tangga petani transmigran rata-rata masih bertahan di tanaman karet, oleh karena itu masih sedikit yang beralih ke kelapa sawit.

Selanjutnya, rumah tangga petani lokal melakukan konversi lahan ke karet, karena pada saat itu harga karet sangat bagus dan tanaman ini bisa mendukung ekonomi keluarga dan bisa diharapkan memberikan uang mingguan atau bulanan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini dipicu oleh hasil dari tanaman pangan yang tidak menentu, seperti tanaman padi yang hanya bisa panen satu kali dalam jangka waktu 4 bulan dengan risiko gagal panen di musim kemarau. Oleh karena itu, karet dijadikan sebagai tanaman sumber pendapatan perbulan yang didukung oleh harga yang lumayan tinggi. Dengan kata lain lonjatan harga karet menyebabkan konversi lahan cepat dan luas (Ahrends *et al.*, 2015).

Perusahaan kelapa sawit di tahun 1990-an mulai masuk dan membuat rumah tangga petani tertarik untuk mencoba tanaman kelapa sawit, namun pada awalnya di rumah tangga petani lokal baru diperkirakan mulai mencoba menanam kelapa sawit di tahun 2005-an. Kondisi ini dipicu oleh harga karet yang semakin menurun serta munculnya penyakit tanaman karet yang mengakibatkan kematian terhadap tanaman tersebut yang berdampak terhadap sumber penghasilan rumah tangga petani.

Seiring waktu dengan hasil produksi dan pendapatan yang menurun mengakibatkan rumah tangga petani lokal melakukan ekspansi pada tanaman kelapa sawit. Ekspansi dilakukan rata-rata tahun 2010-an oleh rumah tangga petani lokal. Pada tataran rumah tangga petani transmigran, ekspansi yang dilakukan hanya skala kecil dengan cara mengganti sebagian lahan karet ke kelapa sawit. Keterbatasan lahan dan bibit membuat rumah tangga petani transmigran tidak melakukan ekspansi secara agresif berbeda dengan rumah tangga petani lokal yang memiliki sumberdaya alam berupa lahan dan modal finansial. Di sisi lain rumah tangga petani transmigran melakukan penanaman kelapa sawit secara bertahap sesuai dengan bantuan bibit dan dana. Sedangkan, dalam pemanfaatan tenaga kerja merupakan tenaga kerja rumah tangga yaitu istri yang membantu di lahan perkebunan. Rumah

tangga petani transmigran rata-rata menggunakan tenaga kerja sendiri dalam pengembangan dan pengelolaan lahan, kondisi ini bertolak belakang dengan rumah tangga petani lokal.

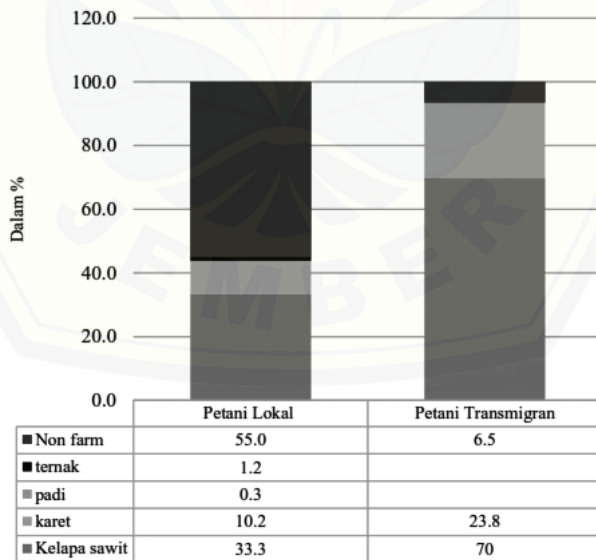


Gambar 10.3 Milestone perkembangan pergeseran komoditas karet ke kelapa sawit di Solok, Sumatra Barat

Rumah tangga petani lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan menggunakan tenaga kerja upahan yang disediakan oleh tauke maupun tenaga kerja dari saudara dan masyarakat sekitar. Selain itu pada rumah tangga petani lokal, faktor yang mendorong melakukan perluasan di bidang kelapa sawit disebabkan oleh harga tandan buah segar (TBS) stabil dan masih di atas Rp1.000,00/Kg. Selain itu, waktu kerja yang digunakan oleh rumah tangga petani kelapa sawit relatif sedikit dibandingkan dengan karet. Di sisi lain, hasil panen yang tidak bergantung terhadap cuaca, yang mana dalam pemanenan kelapa sawit bisa dilakukan dalam jangka dua kali dalam satu bulan atau satu kali dalam 20 hari. Untuk pemasaran, tauke langsung keperkebunan petani sehingga petani tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dalam pengangkutan TBS. Oleh sebab itu, perkerjaan di kelapa sawit lebih menguntungkan dari pada perkerjaan di karet (Bou Dib *et al.*, 2018).

10.3 Transformasi Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani Lokal dan Transmigran

Transformasi komoditas karet ke kelapa sawit, berdampak terhadap ekonomi rumah tangga petani. Transformasi tersebut berdampak terhadap munculnya struktur nafkah baru di luar pertanian. Dilihat dari struktur rata-rata pendapatan rumah tangga petani lokal dan transmigran sumber utama pendapatan dari pertanian adalah kelapa sawit. Rata-rata rumah tangga petani memiliki lahan kelapa sawit namun tidak dengan tanaman karet. Transformasi tanaman karet ke kelapa sawit, menghadirkan keberagaman sumber nafkah baru dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani, sumber nafkah baru tersebut bisa dari sektor *farm* maupun *nonfarm*. Kelapa sawit menambah keberagaman struktur nafkah seperti karet, kelapa sawit, padi, ternak (ayam, sapi dan kerbau), sedangkan pada sektor *nonfarm* membuka peluang baru bagi rumah tangga petani mulai dari wiraswasta, tenaga kerja perkebunan maupun sektor jasa lainnya.



Gambar 10.4 Struktur pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit berdasarkan sumbernya pada desa lokal dan transmigrasi

Berdasarkan Gambar 10.2 di atas dapat terlihat struktur pendapatan rata-rata rumah tangga petani lokal dan transmigran adalah sektor *farm* yang mendominasi namun tidak pada rumah tangga petani lokal (sempit). Berdasarkan komoditas tanaman, pada rumah tangga petani lokal dan transmigran didominasi oleh kelapa sawit dan karet. Hal ini disebabkan rumah tangga petani transmigran masih berupaya membudidayakan tanaman karet, karena tanaman karet merupakan tanaman utama dari program pemerintah untuk daerah transmigran. Dari keberagaman struktur nafkah pada sumber *farm*, rumah tangga petani lokal lebih beragam dibanding dengan rumah tangga petani transmigran.

Selanjutnya, dari sumber *nonfarm*, rumah tangga petani lokal lebih unggul dan beragam dibanding dengan rumah tangga petani transmigran. Pada rumah tangga petani lokal sumber pendapatan dari *nonfarm* berasal dari wiraswasta, berdagang, usaha *furniture*, mendulang emas, pegawai negeri sipil dan karyawan swasta (tenaga kerja perkebunan). Sedangkan, bagi rumah tangga petani transmigran sumber pendapatan yang berasal dari *nonfarm* yaitu *marketing* dan usaha bengkel. Artinya dilihat dari sektor *farm* dan *nonfarm*, rumah tangga petani lokal lebih beragam dibandingkan dengan rumah tangga petani transmigran.

Semakin luas lahan yang dimiliki rumah tangga petani semakin beragam sumber nafkahnya dibandingkan dengan penguasaan lahan sempit. Kondisi ini disebabkan rumah tangga petani dengan penguasaan lahan luas memiliki akses terhadap modal yang tinggi khususnya modal alam, modal finansial dan modal manusia. Faktor ini mendukung dan memicu rumah tangga petani dengan penguasaan lahan luas semakin mampu melakukan ekspansi ke sektor lain. Dengan demikian akumulasi aset dapat meningkatkan pendapatan di semua kelompok sosial ekonomi termasuk kombinasi kegiatan pertanian dan non-pertanian. Aset dapat memfasilitasi transisi ke dunia kerja non-pertanian, serta menjadi lebih luas ke berbagai kegiatan kerja pertanian. Hal ini semakin memperkuat mata pencaharian dan mengurangi risiko kerentanan nafkah karena saling melengkapi.

Namun pada rumah tangga petani transmigran, keberagaman nafkah hanya terjadi pada tataran rumah tangga petani dengan lapisan sedang, akan tetapi dilihat dari persentasenya sangat kecil yang terlibat dalam bidang *nonfarm*. Hal ini disebabkan tenaga kerja rumah tangga petani digunakan untuk merawat dan membersihkan lahan perkebunan sendiri sehingga tidak ada waktu untuk terlibat di sektor *nonfarm*. Selain itu tanaman karet masih mendominasi rumah tangga petani dengan lapisan sedang, tanaman ini membutuhkan waktu kerja setiap hari, akibatnya rumah tangga petani tidak memiliki waktu luang di luar sektor pertanian.

Merujuk gambar di atas, terlihat rendahnya kontribusi sektor *nonfarm* terhadap rumah tangga petani transmigran dalam menopang pendapatan ekonomi bertolak belakang dengan rumah tangga petani lokal. Kontribusi *nonfarm* pada rumah tangga petani lokal sangat tinggi terhadap pendapatan yaitu 55%. Selanjutnya jika dilihat dari luas penguasaan lahan semua lapisan dalam rumah tangga petani lokal masuk ke sektor *nonfarm*. Namun bagi rumah tangga petani transmigran sektor *nonfarm* hanya didominasi oleh rumah tangga petani dengan penguasaan lahan sedang (2–5 hektare) dengan kontribusi terhadap pendapatan hanya 6,5% di luar sektor *farm*. Dengan demikian, bagi rumah tangga petani lokal kehadiran kelapa sawit membuka peluang pekerjaan di luar pertanian. Bagi rumah tangga petani transmigran kelapa sawit tidak membuka peluang untuk struktur nafkah baru di luar pertanian. Oleh karena itu, pada rumah tangga petani transmigran sektor pertanian masih mendominasi struktur nafkah. Dengan demikian, dari pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit, rata-rata rumah tangga petani lokal memiliki pekerjaan di sektor *nonfarm*. Pendapatan dari sumber *nonfarm* tersebut mendukung ekonomi rumah tangga petani. Artinya pekerjaan di luar pertanian merupakan strategi yang paling mudah diakses untuk menambah pendapatan (Meert *et al.*, 2005), dan sebagai strategi bertahan hidup (Weltin *et al.*, 2017) serta untuk mengurangi risiko (Hansson *et al.*, 2013).

Di sisi lain, perbedaan struktur rata-rata pendapatan rumah tangga petani didukung oleh perbedaan penguasaan lahan dan modal. Rumah tangga petani lokal rata-rata memiliki sumber daya lahan perkebunan 5 hektare sedangkan pada rumah tangga petani transmigran luas area perkebunannya rata-rata 2,3

hektare. Dampaknya, rumah tangga petani lokal lebih mudah berekspansi dibandingkan dengan rumah tangga petani transmigran. Selain itu pada tataran rumah tangga petani dengan penguasaan lahan luas dan sedang memiliki sumber daya lahan yang lebih luas dibandingkan dengan rumah tangga petani sempit, serta modal secara finansial yang lebih tinggi sehingga mendukung perluasan area kelapa sawit.

Selanjutnya, transformasi struktur nafkah dari karet ke kelapa sawit cenderung ke arah peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga petani. Pendapatan dari ekspansi pertanian akan memberi dorongan untuk akumulasi aset yang dapat berkelanjutan dan akumulasi kekayaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan (Mullan *et al.*, 2018). Peningkatan kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh rumah tangga petani lokal, akan tetapi juga dinikmati oleh rumah tangga petani transmigran. Hal ini tampak dari gaya hidup konsumtif dan materialistik pada rumah tangga petani.

Materialisme dikonseptualisasikan sebagai nilai konsumen, di mana pengembangan skala materialisme berorientasi nilai dengan tiga komponen yaitu perolehan sentralitas, akuisisi sebagai pengejaran kebahagiaan, dan keberhasilan yang ditentukan kepemilikan (Richins and Dawson 1992). Selain itu peningkatan pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit memicu perubahan *lifestyle*. Perubahan *lifestyle* rumah tangga dapat dilihat dari penggunaan uang, mengadopsi teknologi, mengikuti perkembangan pasar serta perubahan gaya hidup. Dari penggunaan uang rumah tangga petani kelapa sawit mengalami perubahan, yang mana saat sekarang selain kebutuhan pangan, konsumsi rumah tangga petani mengalami peningkatan dalam pembelian pakaian teknologi, observasi dan wawancara, rumah tangga petani memiliki keinginan untuk mengikuti tren terbaru dan yang sedang berkembang di daerah tersebut maupun daerah tetangga atau mengikuti perkembangan kota.

Selanjutnya, media teknologi juga mereka jadikan sebagai alat untuk melihat perkembangan pasar. Perkembangan pasar memicu rumah tangga petani untuk mengadopsi hal-hal baru yang ditawarkan oleh pasar. Oleh karena itu, perkembangan masyarakat sangat ditentukan oleh perkembangan dalam bidang ekonomi. Ekonomi merupakan faktor penentu dalam

perubahan sosial (Marx 1993; Wirawan 2014). Artinya perubahan *lifestyle* yang terjadi secara keseluruhan dalam rumah tangga petani disebabkan oleh perkembangan sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit yang mendukung peningkatan ekonomi.

Di sisi lain adopsi kelapa sawit meningkatkan standar hidup dan gizi rumah tangga (Euler *et al.*, 2017). Hal ini tentu didorong oleh peningkatan pendapatan yang didukung oleh hasil produksi kelapa sawit. Pada tingkat rumah tangga petani lokal berdasarkan penguasaan lahan, sektor *farm* sangat berperan dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga khususnya bagi petani dengan penguasaan lahan luas dan sedang. Berdasarkan penguasaan luas lahan, sumber pendapatan rumah tangga petani petani luas 36,8% bersumber dari kelapa sawit sedangkan untuk rumah tangga petani dengan lahan sedang 32,1% dan rumah tangga petani dengan lahan sempit 13,5%. Begitu pula dengan rumah tangga petani transmigran 70% sumber pendapatan adalah dari kelapa sawit, kontribusi sektor *farm* khusus untuk tanaman kelapa sawit secara umum mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga petani sehingga kesejahteraan semakin meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut mendukung peningkatan sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan. Rata-rata rumah tangga petani mampu mengirim anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di sisi lain, kehadiran kelapa sawit juga berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani melalui sumber pendapatan *nonfarm*. Hal ini dapat terlihat pada rumah tangga petani lokal dengan penguasaan lahan sempit, ketergantungan terhadap sektor *nonfarm* sangat tinggi (86,1%), sedangkan bagi rumah tangga petani lokal (luas dan sedang) tingkat ketergantungan antara *farm* dan *nonfarm* hampir seimbang. Rata-rata sektor *nonfarm* yang dikerjakan oleh rumah tangga petani kelapa sawit dengan penguasaan lahan sempit adalah sebagai tenaga kerja diperkebunan kelapa sawit. Artinya ada hubungan positif pendapatan *nonfarm* dengan kesejahteraan rumah tangga petani di pedesaan (Barrett, Reardon, and Webb 2001).

10.4 Tipologi Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit Pasca Transformasi

Berdasarkan transformasi struktur nafkah rumah tangga petani kelapa sawit, dapat ditipologikan menjadi tiga bagian seperti ditampilkan pada Tabel 10-1. *Pertama livelihood diversified oil palm*. Tipologi pertama ini terjadi keberagaman sumber nafkah pada rumah tangga petani kelapa sawit. Kehadiran kelapa sawit berdampak terhadap diversifikasi nafkah atau munculnya sumber nafkah baru di dalam rumah tangga petani. Keberagaman nafkah terjadi di setiap lapisan rumah tangga petani berdasarkan penguasaan lahan. Namun diversifikasi nafkah yang lebih beragam rata-rata pada rumah tangga petani lokal lapisan sedang 2–5 hektare dan diikuti oleh rumah tangga petani dengan lahan luas >5 hektare. Artinya kehadiran kelapa sawit di dalam rumah tangga petani memberikan sumbangan atas keberagaman struktur nafkah *farm* dan *nonfarm* (lihat Gambar 10.3).

Tabel 10.1 Tipologi rumah tangga petani kelapa sawit berdasarkan sektor dominan pasca transformasi

| No | Tipologi Rumah Tangga | Lapisan Rumah Tangga Berdasarkan Penguasaan Lahan (Ha) | | Sektor yang Dominan |
|----|---|--|--------------------|---------------------|
| | | Petani Lokal | Petani Transmigran | |
| 1 | <i>Livelihood diversified oil palm</i> | 2–5 Ha >5 Ha | 2–5 Ha | Farm dan nonfarm |
| 2 | <i>Household with oil palm dominated livelihood structure</i> | >5 Ha | 2–5 Ha <2 Ha | Farm (kelapa sawit) |
| 3 | <i>Household less influenced by oil palm income structure</i> | 2–5 Ha <2 Ha | | Nonfarm |

Tipologi kedua *household with oil palm dominated livelihood structure*. Pada tipologi ini, rumah tangga petani kelapa sawit mengandalkan berbagai sumber nafkah namun kelapa sawit merupakan sumber nafkah yang dominan. Berdasarkan penguasaan lahan rata-rata rumah tangga petani lokal

dengan penguasaan lahan luas (>5 hektar), struktur nafkah didominasi oleh sektor *farm* 50,6% dengan tanaman kelapa sawit sebagai sektor *farm* yang memberikan sumbangan paling besar. Hal ini bertolak belakang dengan rumah tangga petani transmigran, kelapa sawit mendominasi pada petani dengan luas lahan 2–5 hektare dan <2 hektare.

Tipologi yang ketiga adalah *household less influenced by oil palm income structure*, yaitu rumah tangga yang sumber pendapatannya kurang dipengaruhi oleh kelapa sawit. Berdasarkan data lapangan, tipologi ini ditemukan pada rumah tangga petani lokal yang memiliki luas lahan 2–5 hektare dan <2 hektar, sektor yang dominan pada rumah tangga ini adalah *nonfarm*. Sedangkan pada rumah tangga petani transmigran rata-rata struktur nafkah bergantung pada kelapa sawit. Dengan demikian transformasi rumah tangga petani maju secara struktur nafkah karena didominasi oleh kelapa sawit. Namun dianalisis dari agresivitas ekspansi, maka rumah tangga petani lokal jauh lebih agresif dibandingkan dengan rumah tangga petani transmigran. Hal ini dapat dilihat dari angka mutlak struktur pendapatan rumah tangga petani lokal jauh lebih tinggi dibandingkan rumah tangga petani transmigran.

10.5 Heterodoks sebagai Dasar Solidaritas Ekonomi Petani Sawit Minangkabau

Heterodox merupakan suatu pola pikir dan tindakan yang mengutamakan nilai-nilai budaya, nilai-nilai lokal, kearifan lokal, agama dan kondisi struktural serta kultural direaktualisasikan dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat. (Damanhuri, 2014). Nilai tersebut menjadi suatu fundamental bagi masyarakat Minang yang kental dengan persistensi nilai keagamaan dan adat dalam perwujudan solidaritas ekonomi. Kita mengetahui Minangkabau sangat kuat dengan suatu filosofi:

Nan barek samo dipikue, Nan ringan samo dijinjang, Ka bukik samo mandaki, Ka lurah samo manurun, Nan ado samo dimakan, Nan indak samo dicari, bagaikan aur dengan tebing, saling bantu membantu, saling bahu membahu

Filosofi Minangkabau tersebut terpatri dalam setia pola aktivitas petani sawit secara umum di Sumatra Barat dengan ciri utama seperti *trust*, ekonomi berbasis moral, kolegialitas untuk kepentingan kelompok, pola tindakan sosial yang berorientasi nilai dan tradisional dan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Meski begitu secara individual dan prinsip usaha para petani dan pengusaha sawit tetap menerapkan nilai nilai kapitalisme seperti:

1. Sistem kerja upahan
2. Pengambilan keputusan dalam perkebunan tidak ada lagi kompromi
3. Munculnya semangat kapitalis yang mengutamakan keuntungan pribadi
4. Kredit di lakukan ke perbankan dengan jaminan lahan perkebunan
5. Khusus sistem penghidupan kelapa sawit, hubungan terbentuk karena kepentingan (buruh mendapatkan upah, pemilik lahan mendapatkan keuntungan)
6. Menanamkan rasa individu dari pada rasa kebersamaan

Pola hybrid/*heterodox* yang dilakukan masyarakat petani sawit Minangkabau pada akhirnya melahirkan suatu *novelty* yaitu ***Struktur Neo-Dualisme***. Dalam struktur ini, masyarakat mengintegrasikan antara ekonomi sosialistik alam minang dan individualis kapitalistik yang diadaptasikan secara bersama-sama. Sistem penghidupan sosial budaya dicirikan dengan pengamalan nilai-nilai sosial tinggi, hubungan yang bersifat kekeluargaan dan tindakan berorientasi nilai yang menuntut tindakan sosial dan moralitas tinggi sehingga menghasilkan hubungan sosial yang romantis & kolektif. Sedangkan, sistem penghidupan Kelapa Sawit yang dilakukan masyarakat sawit Minangkabau memiliki distingsi seperti, Komersialisme, hubungan sosial: pekerja dan pemilik yang bersifat transaksional, sistem pembayaran kerja dengan upah/gaji yang memiliki standar tersendiri sesuai dengan tupoksi masing-masing orang. Tindakan instrumental yang berorientasi pada maksimisasi keuntungan, hal tersebut diinternalisasikan dalam hubungan individualistik dalam ruang komersial perkebunan.

Tabel 10.2 Solidaritas ekonomi dalam struktur neo dualisme

| Parameter | Teori Dualisme Boeke | Proposisi Neo Dualisme |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Aktor | Kapitalis dan pra kapitalis | Aktor ekonomi skala besar dan kecil |
| Relasi | Eksplotatif komersial | Partnership |
| Perilaku Ekonomi | Orientasi profit | Simbiosis mutualisme |
| Organisasi | Tidak terjadi Kerjasama | Ada Kerjasama |
| Informal Sosial | - | Adanya sosial <i>security system</i> |

Merujuk tabel di atas dapat ringkas terkait solidaritas ekonomi pada ekonomi masyarakat Minangkabau kaitannya dengan Nusantaranomics, yaitu:

1. Organisasi lokal, budaya lokal, nilai-nilai lokal dan agama memiliki peran dalam menghadapi penetrasi kapitalis.
2. Penetrasi kapitalis yang terjadi pada masyarakat Minangkabau tidak mengubah basis sosial budaya namun memperkuat khususnya di masyarakat petani sawit Minangkabau.
3. Neo dualisme muncul sebagai strategi penetrasi kapitalisme perkebunan dengan adanya legitimasi negara dan masyarakat.
4. Kapitalisme perkebunan masuk ke desa Minang dengan membawa “mahar sosial” bernama kemitraan.
5. Sosialis makin kuat dan sistem kapitalis membangun dalam sisi ekonomi sehingga terwujud solidaritas ekonomi



TANTANGAN DAN PROSPEK WIRUSAHA ROTAN DI ERA INDUSTRI 4.0. PENGALAMAN DAN HISTORIS INDUSTRI ROTAN DI CIREBON

Haryono

Keputusan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha dipengaruhi oleh jaringan sosial, misalnya terkait kerja sama antar pelaku usaha (Czernek-Marszałek 2020). Keterikatan tindakan ekonomi yang terjadi pada pelaku usaha dapat terjadi dalam bentuk kelompok atau masyarakat pengusaha yang didukung oleh ikatan jejaring sosial (Alexandrescu *et al.*, 2016). Hal ini terjadi di kalangan pengusaha rotan di Cirebon. Jejaring sosial dan bentuk ekonomi juga dapat terjadi pada masyarakat pedesaan, yang memiliki ikatan keluarga yang lebih kuat dibandingkan masyarakat perkotaan (Tregear dan Cooper 2016). Pengusaha lokal mampu bersaing dalam perekonomian dengan tetap mempertahankan karakteristik perekonomian pedesaan dengan nilai-nilai kearifan yang dimilikinya (Bosworth dan Turner 2018). Keterikatan tindakan ekonomi berkembang dan tumbuh pada usaha kecil di pedesaan (Greenberg, Farja, dan Gimmon 2018). Praktik keterikatan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha lokal di jejaring sosialnya terjadi di masyarakat di Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Kota Cirebon merupakan salah satu “kota” yang secara historis telah menghubungkan negara-negara di barat dan timur yang dikenal dengan “Jalan Sutra”. Cirebon berkembang dari pelabuhan lokal, kemudian menjadi pelabuhan regional

dan internasional. Dampak dari pembangunan pelabuhan Cirebon adalah tumbuhnya Kota Cirebon sebagai pusat politik, ekonomi, dan sosial budaya (agama Islam). Cirebon yang semula dikenal sebagai dukuh (desa), berubah menjadi kota besar (kesultanan Islam) yang menjadi pusat pertemuan budaya regional dan internasional.

Masyarakat Cirebon, merupakan masyarakat yang mewarisi nilai-nilai luhur tokoh agama Islam di Jawa, yaitu Syarif Hidayatullah/Sunan Gunung Jati (1448–1568) (Abbas 2015). Peradaban Islam berkontribusi pada pembentukan cara pandang masyarakat Cirebon dalam menghadapi kehidupan sosial dan keagamaannya. Warisan kearifan lokal Sunan Gunung Jati terus dilestarikan di kalangan masyarakat Cirebon hingga saat ini. Keberhasilannya dalam dakwah dan kegiatan sosial budaya pada abad ke-17 telah mengukuhkannya sebagai sosok suci yang mewariskan nilai-nilai luhur yang menjadi kearifan lokal masyarakat Cirebon.

Pandangan hidup masyarakat Cirebon adalah pelaksanaan adat istiadat berdasarkan terjemah Hadits dan Al-qur'an. Kehadiran berbagai sentra kerajinan rakyat di Cirebon tidak terlepas dari upaya penyebaran agama Islam Sunan Gunung Jati. Ki Tegalmantra sebagai pengikutnya, mengajarkan menenun kepada masyarakat Cirebon khususnya masyarakat Tegalwangi dan kini terkenal sebagai sentra industri kerajinan rotan terbesar di Indonesia. Menurut Sandee *et al.* (2003) usaha rotan komersial secara besar-besaran telah dimulai di Tegalwangi sekitar tahun 1930-an, dimulai dari pembuatan tikar dan kerai sederhana dari rotan. Tikar rotan pertama yang dibuat oleh pengrajin disebut kelasa atau lampit. Lampit dalam masyarakat agama dan adat merupakan kebutuhan penting (tempat duduk, tempat ibadah, dan dekorasi rumah) agar memiliki jangkauan pasar yang cukup luas pada saat itu bagi penduduk desa dan kota di sekitar Cirebon seperti Indramayu dan Sumedang. Selanjutnya banyak pengrajin rotan mulai membuat mebel rotan dan yang terkenal saat itu adalah bentuk mebel rotan yang mirip dengan gentong (tong) yang kemudian disebut dengan kursi gentong.

Yip dkk. (2018) membedakan bentuk keterikatan sebagai keterikatan relasional dan keterikatan struktural. Jamilah dkk. (2016) menyebutkan bahwa keterikatan etika Islam dan Sunda untuk aksi ekonomi di Tasikmalaya

pengusaha bordir terbagi menjadi tiga jenis pengusaha, yaitu Islam-Sundanis, Sunda-Islam, dan Sunda Kapitalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengusaha rotan di Cirebon dalam perspektif waktu, jejaring sosial antar pengusaha rotan di Cirebon, dan peta jaringan ekonomi dan jejaring sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini didasarkan pada asumsi bahwa pada saat itu aktivitas para wirausahawan terbentuk dalam dialektika nilai dan kondisi yang mereka hadapi.

Tulisan ini memotret praktik industri rotan di Cirebon khususnya Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, dan Desa Karang Mulya, Kecamatan Plumbon. Kabupaten Cirebon sebagai lokasi merupakan industri rotan terbesar di Indonesia dan internasional, hampir 85% kerajinan dan mebel rotan di dunia ini berasal atau dipasok dari Kabupaten Cirebon. Selain itu, Kabupaten Cirebon memiliki budaya dan sejarah dalam perkembangan industri rotan serta nilai lokal masyarakat Cirebon yang sangat menjaga warisan budaya leluhur Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu, isu pembentukan wirausaha lokal sejati (*Local Genuine Entrepreneurship*) pada wirausaha rotan sebagai fenomena ekonomi politik di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat sangat mungkin terjadi.

Paradigma konstruktivis digunakan dalam memotret fenomena ini, yaitu paradigma yang menganggap interpretasi subjektif bukan sebagai sumber yang bias. Paradigma ini membantu dalam memahami bagaimana orang dan masyarakat berpartisipasi dalam membangun realitas sosial. Mencermati topik tersebut, temuan ini merupakan realitas aktual yang bersifat sosiologis, namun pada dasarnya permasalahan tersebut sebenarnya merupakan hasil dari suatu proses sejarah. Oleh karena itu, tidak dapat dinilai semata-mata dari perspektif aktual masa kini tetapi juga didekati dengan perspektif sejarah. Pendekatan ini menyediakan alat untuk melakukan penjelasan atas pertanyaan “bagaimana” proses suatu realitas yang sebenarnya terjadi.

11.1 Tindakan Ekonomi *Local Genuine Entrepreneurship* (LGE) di Cirebon

Pada tahun 1950-an, penduduk asli Tegalwangi mulai membuat kursi rotan secara massal dan menjualnya kepada konsumen lokal. Usaha tersebut merupakan kelompok usaha berbasis keluarga (Harms 2014; Dana dan Ramadani 2015). Saat itu permintaan tidak hanya datang dari warga sekitar, namun juga masyarakat Kota Cirebon yang menciptakan bisnis mereka sendiri. Proses demonopolisasi keterampilan telah bergeser dari kemampuan yang hanya dimiliki oleh pengusaha Belanda dan pedagang Cina menjadi penduduk asli.

Usaha rotan pertama yang tercatat dalam sejarah industri kerajinan rotan di Tegalwangi adalah usaha rotan semaun yang berdiri pada pertengahan tahun 1930-an. Status “Semaun” adalah pemasok komponen furnitur untuk bengkel-bengkel besar di kota Cirebon. Bengkel besar yang memiliki nama perusahaan sendiri dan dikenal sebagai empat perusahaan asli milik penduduk asli Tegalwangi, yaitu CV. Ali, CV. Senta, “Bumi Rotan” dan “Cahaya Rotan”. Industri kerajinan rotan di Cirebon telah mengangkat pengusaha rotan sebagai pengusaha lokal asli. Wirausahawan lokal ini dihadirkan sebagai kekuatan sosial yang potensial dalam konteks transformasi masyarakat Cirebon dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri melalui nilai-nilai lokal yang tertanam dalam jejaring sosial. Proses kemunculannya menunjukkan aspek asal mula berdirinya wirausahawan dan kekuatan sosial yang mewujudkan status sosial sebagai wirausahawan. Sementara itu, proses keberlanjutan wirausahawan erat kaitannya dengan kekuatan sosial lainnya.

Sebelum tahun 1986, Indonesia merupakan pengekspor bahan baku rotan terbesar di dunia, sedangkan industri pengolahan rotan nasional masih tertinggal. Sejak 1986, pada masa Menteri Rahmat Saleh sebagai Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan (1986) mengeluarkan larangan ekspor bahan baku rotan. Industri pengolahan rotan nasional mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sementara itu, industri pengolahan rotan di luar negeri (Taiwan dan Eropa) yang bahan bakunya mengandalkan pasokan dari Indonesia bangkrut dan mengalihkan usahanya ke Indonesia. Industri

kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon telah menjadi pemasok sebagian besar pasar dunia, terutama negara-negara di Eropa. Industri ini termasuk dalam kategori strategis untuk Jawa Barat. Pada tahun 2002 industri ini menyerap kurang lebih 200 ribu tenaga kerja, penerimaan devisa negara pada tahun 2003 sebesar US\$ 122 juta dan meningkat pada tahun 2004 menjadi US\$ 135 juta (BPS Kabupaten Cirebon 2009; BPS Kota Cirebon 2009). Dalam kurun waktu 2001–2004, jumlah perusahaan, produksi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja pada subsektor industri pengolahan rotan di Cirebon bertambah, di mana jumlah perusahaan bertambah dari 923 unit usaha menjadi 1.060 unit usaha, produksi ditingkatkan dari 62.707 ton menjadi 91.181 ton, ekspor meningkat dari 32.871 ton (senilai US\$ 101,67 juta) menjadi 51.544 ton (senilai US\$ 116.572 juta) dan penyerapan tenaga kerja meningkat dari 51.432 orang menjadi 61.140 orang.

Kementerian Perdagangan RI (2005) tentang Ketentuan Ekspor Rotan yang memperbolehkan ekspor bahan mentah untuk rotan dan rotan setengah jadi. Kebijakan tersebut menyebabkan industri rotan Indonesia semakin terpuruk, baik produksi, ekspor maupun penyerapan tenaga kerja pada subsektor industri pengolahan rotan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurut pernyataan Kementerian Perindustrian tahun 2013, pada tahun 2005 Indonesia menduduki peringkat ketiga (7,68%) dalam perdagangan kursi rotan dan mebel rotan di pasar global setelah Cina (20,72%) dan Italia (17,71%) (Maulana, Nurmalina, dan Suharno 2017). Industri pengolahan rotan di negara pesaing khususnya Cina dan Taiwan berkembang pesat, sehingga merebut pangsa pasar dan potensi pasar ekspor produk rotan dari Indonesia. Ekspor Cina produk rotan pada tahun 2002 masih seimbang dengan Indonesia sebesar US\$ 340.000, namun pada tahun 2006 meningkat 4 kali lipat; sedangkan Indonesia sebagai produsen bahan baku rotan, ekspor produk rotan mengalami penurunan. Volume ekspor rotan olahan mengalami penurunan dari 193.078 ton pada tahun 2003 menjadi 172.782 ton pada tahun 2006 atau turun rata-rata sebesar -3,63% per tahun. Jumlah penurunan ditunjukkan pada Tabel 11.1.

Tabel 11.1 Data jumlah unit usaha dan tenaga kerja di industri rotan

| Tahun | Unit Bisnis | | Pekerja | |
|-------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Industri Furnitur Rotan | Pengolahan Rotan | Industri Furnitur Rotan | Pengolahan Rotan |
| 2006 | 300 | 68 | 38.670 | 7.575 |
| 2007 | 305 | 40 | 36.885 | 2.756 |
| 2008 | 287 | 38 | 35.246 | 3.582 |
| 2009 | 281 | 27 | 30.279 | 2.266 |
| 2010 | 220 | 27 | 26.813 | 2.697 |

Sementara dengan kebijakan tersebut, beberapa produsen mebel rotan di Cirebon mengalami penurunan produksi di antaranya yang mampu mengekspor sebanyak 120 peti kemas per bulan, kemudian hanya mampu mengekspor 15–20 peti kemas, dan ada pula yang sudah tidak berproduksi lagi. Sekitar 30% pengusaha bangkrut, omzet pengusaha turun dan 50.000 pekerja rotan menganggur dan sebagian beralih profesi. Hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan bahan baku rotan yang berkualitas.

Pada tahun 2005, nilai ekspor produk rotan turun dari US\$ 347 juta menjadi hanya US\$ 138 juta. Laju pertumbuhan volume ekspor kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon dari Agustus 2005 sampai Juli 2006 mengalami penurunan, sedangkan proyeksi pertumbuhan nilai ekspor kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon dari Agustus 2005 sampai Juli 2006 mengalami penurunan sebesar 0,0089% (Hidayanti 2006). Menurut Badan Pusat Statistik, dalam hal volume ekspor dan nilai ekspor dari tahun 2004 hingga 2010, nilai Cirebon mengalami penurunan. Hal ini disajikan pada Tabel 11.2.

Tabel 11.2 Volume dan nilai ekspor mebel Kabupaten Cirebon tahun 2004–2010

| Tahun | Volume | Nilai (Juta Dollar) |
|-------|--------|---------------------|
| 2004 | 17.334 | 135,86 |
| 2005 | 16.113 | 130,23 |
| 2006 | 12.881 | 116,80 |
| 2007 | 12.490 | 115,20 |
| 2008 | 13.541 | 130,72 |
| 2009 | - | 96,85 |
| 2010 | 9.113 | 129,67 |

Di era Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, dicetuskan kebijakan tentang ketentuan ekspor rotan dan produk rotan yang melarang ekspor rotan mentah dan menghidupkan kembali industri rotan di Indonesia. Rotan olahan mampu menyumbang devisa terbesar dari hasil hutan bukan kayu yaitu sebesar USD 286,72 juta pada tahun 2012. Namun pada tahun 2014 dan 2015, nilai ekspor rotan olahan mengalami penurunan sebesar USD 214,33 juta dan USD 149,23 juta karena terhadap krisis ekonomi global (Data Kementerian Perindustrian 2016, *dalam* Anwar 2021). Pada 2012, setahun setelah larangan ekspor bahan baku rotan diberlakukan, volume produk furnitur rotan Indonesia berada di atas Cina. Hal ini disebabkan oleh terhentinya pasokan bahan baku rotan ke dalam negeri. Perbandingan nilai ekspor mebel rotan tahun 2012 adalah Indonesia sebesar 115.680.093 USD dan Cina sebesar 53.869.286 USD di pasar internasional (BPS Kota Cirebon 2012).

Lonjakan penjualan mebel rotan di Kabupaten Cirebon mengindikasikan adanya peningkatan konsentrasi produk rotan asal Cirebon. Dari 2009 hingga 2011, Cirebon menyumbang 55% dari total produksi furnitur rotan Indonesia yang mencapai 62% pada 2011. Pada 2012, angka itu naik menjadi 73%. Data perdagangan menunjukkan bahwa perdagangan rotan meningkat setelah pelarangan. Meningkat dari Rp11,3 juta menjadi 35,7 juta atau meningkat 216% (BPS Kota Cirebon 2012).

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) kategori kelompok industri, industri kerajinan rotan dengan jumlah unit usaha tertinggi mencapai 1.398 unit usaha pada tahun 2017 dan tersebar di kalangan rumah tangga di desa-desa, khususnya desa Tegalwangi sebagai sentra kerajinan rotan di Cirebon. Tabel 11.3 menunjukkan bahwa peningkatan nilai investasi pada tahun 2014 sebesar Rp 215,11 Miliar, meningkat setiap tahunnya, dan pada tahun 2017 mencapai Rp 252,01 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya nilai investasi menunjukkan bahwa industri kerajinan rotan telah menjadi andalan dan mata pencaharian masyarakat Cirebon.

Tabel 11.3 Perkembangan industri rotan di Kabupaten Cirebon tahun 2014–2017

| | Furnitur Rotan/Kerajinan | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Unit Bisnis | 1.331 | 1.370 | 1.362 | 1.398 |
| Pekerja | 57.102 | 59.712 | 59.763 | 60.455 |
| Nilai Investasi (Rp Juta) | 215.110.199 | 236.560.199 | 244.860.199 | 252.010 |
| Kapasitas Produksi (ton) | 75.085 | 98.485 | 101.940 | 104.917 |

Usaha industri kerajinan rotan khususnya di Tegalwangi Cirebon didukung oleh usaha kecil dalam pengadaan komponen dalam jumlah banyak. Pola kerja subkontrak sering dilakukan oleh pengusaha pengeksport mebel rotan. Adanya pola subkontrak ini akan memberikan banyak keuntungan antara lain: perputaran pesanan yang stabil dan harmonis, pengadaan aset modal kecil, peningkatan kontrol kualitas dan transfer teknologi yang efisien. Sistem hubungan kerja antara pengusaha ekspor, pengrajin (subkontraktor) dan pengrajin upahan ditunjukkan pada Gambar 11-1.



Gambar 11.1 Sistem Hubungan Kerja Industri Rotan

Kehadiran industri kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon khususnya sejak beberapa tahun terakhir dan 1980-an sebagai fenomena sosiologis memunculkan indikasi wirausaha rotan atau *entrepreneur* rotan. Pengusaha rotan muncul pada tataran kehidupan bisnis sebagai wujud perwujudan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam masyarakat Cirebon. Pengusaha rotan sebagai kelompok sosial sangat strategis bagi masyarakat Cirebon. Kelompok ini merupakan kelompok kekuatan sosial yang potensial dalam mentransformasi masyarakat Cirebon dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam perkembangannya, industri mengalami fluktuasi sebagai akibat dari kelangkaan bahan baku rotan. Pengusaha rotan di

Cirebon sangat bergantung pada bahan baku dari luar Cirebon, terutama dari Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Kebijakan perdagangan rotan sangat mempengaruhi keberlangsungan industri rotan dan keberadaan pengusaha rotan di Cirebon.

a. Jejaring Sosial di Cirebon Jawa Barat

Nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Cirebon menjadi bagian penting dalam mengikuti jejaring sosial yang digambarkan oleh (Granovetter dan Swedberg 2011). Secara historis, Cirebon dikuasai oleh Belanda pada tahun 1681 dan kesultanan Cirebon mendapat tekanan dari penjajah Belanda, terutama di bidang politik dan ekonomi. Kesultanan dan para pemimpinya kehilangan kekuasaan di bidang politik dan ekonomi. Hal ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, karena sejak saat itu hingga awal abad ke-20, pemerintah Belanda melakukan eksploitasi tanah dengan membuka perkebunan tebu dan mendirikan pabrik gula di wilayah Karesidenan Cirebon. Hak kepemilikan tanah masyarakat tentu semakin dirampas dan masyarakat berada dalam kemiskinan.

Salah satu nilai dalam masyarakat Cirebon adalah nilai-nilai Islam. Ada banyak kelompok muslim yang cerdas, pandai atau cerdas yang memiliki pengaruh kuat dalam masalah agama dan ekonomi. Rustandi dkk. (2019) menyebut mereka dengan istilah 'kelas menengah Muslim'. Beberapa Kyai (ulama Muslim) dan santri (pelajar Muslim) dari pesantren (sekolah agama) yang mengkhususkan diri dalam kegiatan keagamaan, juga memiliki perhatian yang luas terhadap perekonomian umat (masyarakat Muslim). Kelompok ini dianggap sebagai pelopor dalam meningkatkan perekonomian umat. Kelompok saudagar santri berpotensi berkembang menjadi pengusaha kapitalis yang terdepan basis usahanya di pasar, pertokoan dan usaha kecil, sedangkan kelompok priyayi berpotensi melahirkan pengusaha kapitalis profesional dan berbadan hukum seperti yang terjadi di Eropa.

Industri rotan di Cirebon pada awalnya dikembangkan dan diajarkan oleh pengikut Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama dan membuka desa di Tegalwangi dengan nama Ki Tegelmantra. Hingga saat ini ia dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh agama yang membangun desa Tegalwangi.

Hilangnya pengaruh kesultanan Cirebon dalam bidang politik dan ekonomi yang saat itu dikuasai oleh Belanda tidak menyurutkan semangat untuk memperbaiki nasib rakyatnya dengan melakukan pergantian kepemimpinan di bawah para pemuka agama di masing-masing desa. Kegiatan keagamaan dan ekonomi yang dilakukan oleh para kiai dan santrinya juga merupakan wujud kepedulian pihak keluarga kerajaan terhadap masyarakat adat. Salah satu informan menyatakan bahwa kemunculan wirausahawan muslim menjadi angin perubahan bagi masyarakat pribumi yang mampu menjadi sosial mover dan modifikator status sosial (*agency*).

Berdasarkan uraian salah satu informan terkait gaya pengusaha Cirebon dalam mengelola semangat kerjanya sebagai berikut:

”Masyarakat Cirebon adalah masyarakat yang sangat rasional dan berani mengambil risiko untuk memenuhi kebutuhannya ketika budaya baru datang. Mereka mencoba menginvestasikan budaya, pengetahuan, dan bahkan kekayaan mereka untuk tujuan meningkatkan kehidupan mereka. Hal ini ditunjukkan oleh para santri yang didukung oleh para pemilik pesantren (*kyai*) atau kalangan terpelajar di masyarakat atau yang disebut kelas menengah muslim untuk mengembangkan industri di Cirebon. *Kyai* membantu santrinya mengembangkan industri lokal.”

Informan lain menceritakan bahwa selain dukungan masyarakat dan pemuka agama papatah pepitih (*nasihat*) dari Sunan Gunung Jati juga terukir dalam perilaku pengusaha di Cirebon. Salah satu contoh nasihatnya adalah *aja akeh kang den pamrih* (*jangan berharap banyak dari hasil*). Dukungan keluarga kerajaan juga tidak kalah pentingnya yang membuat perekonomian masyarakat tetap lestari menuju kearifan lokal Cirebon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan kewirausahaan Cirebon tidak hanya dibentuk oleh nilai-nilai lokal, tetapi juga masyarakat dan kekuatan politik.

Nilai yang tersebar di kalangan pengusaha di Cirebon, menurut beberapa informan nilai Islam di Cirebon yang Nilai yang tersebar di kalangan pengusaha di Cirebon, menurut beberapa informan nilai Islam di Cirebon yang memiliki nuansa khas. Islam di Cirebon adalah Islam yang sudah bersentuhan dengan konteks lokalitasnya. Islam yang demikian adalah Islam yang mengakomodasi tradisi lokal, tidak menghilangkan tradisi lokal sepanjang tidak bertentangan

dengan Islam murni dan masih memiliki relevansi dengan tradisi besar Islam. Hubungan Islam dan budaya lokal berpola akulturatif-sinkretik sebagai hasil konstruksi bersama antara agen (elit lokal) dan komunitasnya dalam dialektika proses yang berkesinambungan (Kata 2015). Penguatan ajaran Islam dilakukan melalui proses transformasi yang berkesinambungan (Nuruddin 2018). Proses legitimasi pengajaran didasarkan pada interpretasi elit lokal. Legitimasi elit lokal menghasilkan konstruksi sosial tentang Islam lokal (Lenggono 2018). Nilai-nilai Islam tersebar dalam semua kegiatan sosial, termasuk kegiatan ekonomi.

Dalam mengelola kegiatan ekonomi, beberapa informan menggarisbawahi beberapa prinsip dalam Islam yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Beberapa prinsip yang dipegang informan dalam hidupnya adalah hidup halal, orientasi untuk mendapatkan ridho Allah, kerelaan bersama sebagai prinsip pertukaran, dan semangat memberi dan peduli. Hal ini sejalan dengan kebutuhan mencari nafkah dalam perspektif Abbas (2013). Menurut Abbas (2015), salah satu harus memperhatikan halal mata pencaharian. Ada tiga jenis sumber mata pencaharian halal. Pertama, usaha dan pekerjaan berada di jalan ridho Allah. Kedua, kegiatan jual beli harus dilakukan atas kerelaan bersama, tidak ada unsur kecurangan atau pemaksaan, bebas dari unsur tipu muslihat atau batil dan paksaan atau riba, dan tidak ada spekulasi dan perjudian. Ketiga, hadiah diberikan secara sukarela. Ada prinsip dalam Islam bahwa tangan di atas (memberi) lebih baik daripada tangan di bawah (menerima).

Nilai-nilai di atas digunakan oleh para pengusaha di Cirebon sebagai sumber konsep umum tentang dunia, diri, dan hubungan antara dua aspek. Beberapa informan dari pihak pengusaha mengatakan bahwa mereka yakin bahwa agama dapat memberikan etos untuk menentukan jalan dan pencapaian hidup mereka. Informan lain menyatakan bahwa pemahaman pengusaha mengenai konsepsi keagamaan dalam tindakan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perilaku pengusaha di Cirebon. Menurut mereka, pertumbuhan bisnis mereka bukan hanya karena keinginan kemanusiaan para pengusaha tetapi lebih cenderung disebabkan oleh kearifan budaya lokal masyarakat adat dalam menanggapi berbagai tekanan kehidupan sosial ekonomi mereka, tetapi

juga semangat keagamaan untuk mencoba yang terbaik. Menurut mazhab Asy'ariyah, manusia mampu memilih dalam tindakannya. Di mana tindakan tersebut tergantung pada kehendak dan pilihan manusia. Kehendak dan pilihan ini, menurut Asy'ariyah, bersumber dari Tuhan. Beberapa informan lain menyatakan beberapa nilai lokal yang mereka pegang dalam aktivitas hidup mereka. Nilai-nilai tersebut dijelaskan pada Tabel 11-4.

Tabel 11.4 Nilai Lokal Masyarakat Cirebon

| No. | Nilai Lokal | Implementasi |
|-----|---------------|---|
| 1. | Kejujuran | Dalam menjalankan bisnis menjadi poin penting |
| 2. | Rame Ing Gawe | Selalu bekerja keras dalam menjalankan bisnis rotan |
| 3. | Wirang | Malu jika kita menjadi pecundang |
| 4. | Kesungguhan | menerima apa yang telah diterima |

Empat prinsip yang dikemukakan informan yaitu Kejujuran, *rame ing gawe*, *wirang*, dan keikhlasan merupakan prinsip yang sangat penting, tidak hanya dalam dunia wirausaha tetapi juga dalam kehidupan pada umumnya. Kejujuran adalah sikap yang berani mengatakan yang sebenarnya. Sikap ini sangat penting dalam dunia wirausaha, dan akan membuka kesuksesan dalam usahanya. Hal ini karena kejujuran akan menghasilkan kepercayaan di antara konsumen.

Rame ing gawe, merupakan prinsip yang menekankan pentingnya selalu bekerja keras dalam menjalankan bisnis. Walaupun prinsip ini diterapkan, akan menghasilkan kesuksesan dalam bisnis, karena tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. *Wirang*, adalah sikap malu jika kita menjadi pecundang. Jika sikap ini diterapkan, maka akan memunculkan integritas diri yang kuat dan akan menimbulkan kepercayaan di antara pelanggan. Yang terakhir adalah Ketulusan, yaitu menerima apa yang telah diterima, dan tidak menginginkan apa yang orang lain dapatkan tanpa usaha pribadi.

11.2 Peta Aksi Ekonomi di Jejaring Sosial

Berdasarkan penjelasan informan, tindakan ekonomi yang muncul di kalangan pengusaha rotan didasarkan pada luasnya jaringan individu. Jaringan pengusaha perorangan ini banyak dijumpai di kalangan pengusaha rotan di

pedesaan. Banyak hubungan antara pengusaha di daerah pedesaan didasarkan pada hubungan keluarga. Selain hubungan individu, terdapat hubungan lain antar pengusaha, yaitu hubungan antara individu dengan lembaga atau struktur tertentu, atau hubungan antar lembaga atau struktur yang menghasilkan hubungan yang luas. Granovetter dan Swedberg (Granovetter 2005) dalam konteks ini menjelaskan bahwa tindakan ekonomi dalam masyarakat terjadi pada kisaran antara *underembedded* (tertanam lemah) dan *overembedded* (sangat tertanam). Oleh karena itu, tindakan ekonomi terjadi pada kontinuum antara kutub yang mengakar kuat dan kutub yang tidak mengakar kuat (Granovetter 2005). Granovetter (2005) juga membedakan dua bentuk *embedded*, yaitu *relational embedded* dan *structural embedded*. Kedua bentuk *embedded* tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pertama, *Relational Embedded* adalah tindakan ekonomi yang secara sosial terstratifikasi dan tertanam dalam jaringan sosial pribadi yang terjadi antar aktor. Kedua, *Structural Embedded* adalah *embedding* yang terjadi pada jaringan hubungan yang lebih luas. Jaringan hubungan yang lebih luas dapat berupa institusi atau struktur sosial.

Mengenai pembentukan jaringan, beberapa informan mengatakan bahwa hubungan antara pengusaha dan antara pengusaha dengan pihak lain bukanlah sesuatu yang terbentuk dengan sendirinya. Sejarah panjang pengusaha rotan di Cirebon telah membentuk dinamika relasi antar pengusaha tersebut, antara pengusaha dengan institusi yang ada dan juga struktur sosial. Granovetter (2005) mengeksplorasi gagasan pengaruh struktur sosial, terutama yang terbentuk berdasarkan jaringan sosial pada manfaat ekonomi mengenai kualitas informasi. Lebih lanjut ia menjelaskan empat prinsip utama yang mendasari pemikiran tentang hubungan antara jaringan sosial dan manfaat ekonomi, yaitu, 1) Norma dan Kepadatan Jaringan; 2) Kekuatan Ikatan Lemah, atau manfaat ekonomi, yang ternyata cenderung diperoleh dari jalinan ikatan lemah. Untuk itu, Granovetter menjelaskan bahwa pada tataran empiris, informasi baru, misalnya, akan cenderung diperoleh dari kenalan baru dibandingkan dengan teman dekat yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu, dan kenalan baru relatif membuka cakrawala dunia luar individu; 3) Pentingnya Lubang Struktural, yaitu peran lubang-lubang struktural di luar ikatan lemah dan kuat yang justru berperan dalam menjembatani hubungan individu dengan pihak luar; dan

4) Interpenetrasi tindakan ekonomi dan nonekonomi, yaitu adanya kegiatan nonekonomi yang dilakukan dalam kehidupan individu kehidupan sosial yang ternyata mempengaruhi tindakan ekonominya. Dalam hal ini, Granovetter menyebutnya penundaan tindakan non-ekonomi dalam kegiatan ekonomi sebagai akibat dari jejaring sosial. Keterkaitan tindakan ekonomi terkait jejaring sosial di kalangan ekonomi lokal masyarakat Cirebon dijelaskan pada Tabel 11.5.

Tabel 11.5 Jejaring sosial dalam manfaat ekonomi

| Norma dan Kepadatan Jaringan | Kekuatan Ikatan Lemah | Pentingnya Lubang Struktural | Interpenetrasi Aksi Ekonomi dan Non-Ekonomi |
|--|---|--|---|
| Nilai-nilai Islam yang telah mengakar pada masyarakat Cirebon diwujudkan dalam kegiatan ekonomi usaha rotan mereka secara turun-temurun. | Pengusaha menghadiri pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk membuka pelanggan atau pembeli baru | Peran pemerintah dalam membuka pameran baik di dalam maupun luar negeri serta memfasilitasi perajin lokal dengan membuat pelatihan dan <i>showroom</i> | Pembukaan wisata rotan bertujuan untuk memperkenalkan industri rotan kepada masyarakat sekitar sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli baru. |

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa dalam perspektif Granovetter (2005) apa yang diamati di kalangan pengusaha rotan dapat dipetakan dan diringkas seperti pada Tabel 11.7. Tabel tersebut menunjukkan keterkaitan antara ketersediaan pengusaha lokal di Cirebon dan orientasi terhadap keberhasilan dalam mengembangkan usahanya. Pengusaha rotan di Cirebon, Jawa Barat sudah terbentuk sejak lama. Setidaknya dalam catatan sejarah pengusaha, rotan sudah ada sejak sekitar tahun 1950-an. Jangka waktu yang cukup untuk membuat bisnis menjadi matang. Proses panjang tumbuh dan berkembangnya usaha lokal di bidang kerajinan rotan telah membentuk jaringan ekonomi yang kuat. Jaringan ekonomi yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial masyarakat Cirebon. Jika jaringan ekonomi dipetakan dalam jejaring sosial, menunjukkan adanya berbagai peta keterikatan sosial. Keragaman ini ditentukan oleh proses yang dilakukan oleh masing-masing bisnis.

CREATIVEPRENEUR BERBASISKAN FESTIVAL DAN KEARIFAN LOKAL SUKU OSING DI BANYUWANGI

Iwan Nurhadi

12.1 Komodifikasi Budaya dan Transisi Etik dalam Perkembangan Pariwisata: Potret Suku Osing, Indonesia

Pembangunan sektor pariwisata telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dari devisa dan *multiplier effect*-nya dan ekonomi kreatif khususnya di lokasi kawasan wisata. Pandangan tersebut berlaku di Banyuwangi dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan wisata di daerah ini menciptakan diversifikasi mata pencaharian masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan, dan memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam angkatan kerja. Semua itu berdampak pada pendapatan per kapita (PCI) daerah meningkat 138% dan PDRB melonjak 141.80% dalam kurun delapan tahun (Anas, 2019); Hasil akhir dari proses pengembangan tersebut adalah membantu meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Namun, dampak positif yang menjanjikan di sektor ekonomi tersebut mesti dibarengi konsekuensi lain, seperti sosial budaya dan ekologi. Hal ini diilustrasikan secara singkat oleh *guest house* yang ada sebagai permintaan tempat tinggal sementara bagi wisatawan.

Tabel 12.1 Capaian indikator kinerja Kabupaten Banyuwangi periode 2010–2018

| | 2010 | 2018 | Kenaikan |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| PDRB | Rp32,46 triliun | Rp78,48 triliun | 141,80% |
| Pendapatan per kapita | Rp20,86 juta | Rp48,75 juta | 134% |
| Kunjungan wisnus | 491.000 | 5.200.000 | 960% |
| Kunjungan wisman | 12.505 | 127.420 | 919% |
| Aksesibilitas (Jkt-Bwi) | 21 jam | 90 menit | |
| Aksesibilitas (Jkt-Sby) | 7 jam | 50 menit | |
| Penumpang Pesawat | 7.835 | 365.493 | 4664,90% |
| Calender of Event | n.a | 99 | |

Dewasa ini ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi sosial budaya dan ekologi (Choi, 2010). Aneka ragam literatur yang menjelaskan dampak buruk dari pengembangan pariwisata terhadap aspek ekonomi dan lingkungan. Dari segi ekonomi, dampak negatif pariwisata adalah (i) tingginya permintaan barang impor, (ii) inefisiensi anggaran belanja dan pendapatan negara, (iii) ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor pariwisata, dan (iv) terjadinya inflasi harga tanah (Kumar, 2019). Harga tanah yang tinggi dan tidak masuk akal karena perkembangan pariwisata mengganggu penguasaan tanah untuk ruang hidup (lingkungan inti seperti pertanian). Dampak lainnya ialah permukiman kumuh dan menurunnya kualitas hidup. Dari segi lingkungan, pengembangan pariwisata mentransformasi penggunaan lahan di bidang pertanian dan menimbulkan risiko pada ketahanan pangan bagi penduduk lokal. Sutawa (2012) dan Lanya *et al.*, (2017) menyampaikan bahwa penggunaan lahan di bidang pertanian telah bertransformasi menjadi fasilitas pariwisata seiring dengan berlangsungnya pembangunan di sektor pariwisata. Pandangan lain seperti disampaikan Cordova dkk. (2021) mengidentifikasi masalah sampah sebagai tantangan baru yang terjadi di Komodo Pulau sebagai tempat wisata.

Dampak negatif perkembangan pariwisata juga terjadi pada aspek sosial budaya. Dampak sosial budaya tersebut dapat dijelaskan dengan munculnya komodifikasi budaya yang menjadi isu sentral untuk pengembangan pariwisata. Komodifikasi budaya adalah singkatan dari komoditas dan modifikasi yang

mengacu pada barang atau layanan yang terkait dengan produksi kapitalis sementara modifikasi didefinisikan sebagai perubahan. Syarat komodifikasi budaya dalam pariwisata sebagian besar didefinisikan sebagai tindakan untuk mengubah budaya menjadi komoditas, paket, dan artefak budaya lainnya, seperti kerajinan, pertunjukan, fotografi, keramahmataman, dan identitas (Cole, 2007) dan dijual kepada wisatawan.

Dalam hal ini, komodifikasi budaya secara singkat dapat dipahami sebagai: mengubah budaya menjadi komoditas ekonomis seperti permintaan pasar. Definisi tersebut diilustrasikan dalam karya fenomenal Greenwood pada tahun 1989 yang telah meneliti Festival Alerde Fuenterrabia di Spanyol dan festival Basque menggunakan perspektif antropologis. Berdasarkan hasil risetnya, Greenwood menganggap bahwa pertunjukan tidak lagi milik pemain pertunjukan, melainkan berbalik menjadi tontonan bagi orang luar (*audience*). Dia menambahkan bahwa pertunjukan itu dikomoditasasi dan dianggap sebagai objek yang diperkecil dengan mempersingkat pertunjukan dan bervariasi untuk menarik wisatawan. Bukti dari penelitian ini menunjukkan bahwa komodifikasi budaya mengubah seni tradisional menjadi komoditas dengan kehadiran wisatawan dan merevolusi seni tradisional dari keaslian menjadi momentum sebagai mata uang oleh Graburn pada tahun 1984 sebagai keaslian untuk kenang-kenangan. “*authenticity to memento*”.



Gambar 12.1 Sirkulasi komodifikasi budaya Osing

Adanya komodifikasi budaya Osing bisa dipotret dengan mengkaji transisi moral etika kegiatan dan ekonomi wisata Osing menggunakan Utilitarianisme Bentham. Pandangan agregasi yang didefinisikan Bentham adalah keadilan untuk seluruh komunitas karena keputusan diambil dari mayoritas anggota, bagaimanapun, dia tidak menganggap suara itu diambil sebagai keputusan utama sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan. Ada kemungkinan bahwa keputusan komunal tidak hasil dari semua lapisan dalam masyarakat dan mewakili semua lapisan dalam masyarakat jika suara yang didengar hanya mereka yang berada di stratifikasi atas. Dalam konteks pariwisata, gagasan ini menjadi pertanyaan menarik apakah keputusan menunjuk masyarakat Osing sebagai tujuan wisata, sejak ide awal pengembangan sektor pariwisata harus diamanatkan oleh pemerintah, menciptakan kemajuan atau kemunduran bagi masyarakat Osing.

Tujuan utama dari riset ini ialah menyelidiki risiko pariwisata perkembangan sosial budaya di Banyuwangi, khususnya pada masyarakat Osing, yang spesifik. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menyelidiki konsekuensi sosial budaya dari pengembangan pariwisata dan menggambarkan bagaimana pembangunan memanfaatkan etika dalam kegiatan ekonomi di masyarakat Osing. Masyarakat Osing dipilih sebagai bukti cepatnya perubahan dan perekonomian daerah peningkatan karena kebijakan berbasis pariwisata. Masyarakat Osing dalam hal ini menjadi ikon dari Banyuwangi sebagai destinasi pariwisata. Untuk membenarkan hipotesis tersebut, penyelidikan ini mengambil bentuk: pendekatan studi kasus kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Analisis data menggunakan model interaktif berbasis Miles *et al.* (2014) dan Cresswell (2014), dan teori utilitarian Bentham (1995) dan teori keterikatan Granovetter (1985) sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis fenomena.



Siapakah Suku Osing?

- Ada dalam ruang spasial Blambangan/Banyuwangi yang *Terra Incognita*
- Perebutan hegemoni kuasa
- Sisa Blambangan yang melakukan pengisolasian diri
- Berbahasa Jawa dialek *banyuwangen*
- Islam yang mempraktikkan *kejawan*: islam sikretik
- Pola penghidupan dan budaya agraris
- Tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

Gambar 12.2 Karakteristik Suku Osing

Pentingnya dan orisinalitas studi Osing ini adalah mengeksplorasi sosial budaya yang positif dan negatif, konsekuensi dari komodifikasi budaya dalam satu komunitas adat, yaitu Osing Kemiren masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan pemahaman teoritis tentang jurang komodifikasi budaya dan transisi etika-moral dalam masyarakat adat yang bertikai dengan konsekuensi ekonomi dan sosial yang menguntungkan. Selanjutnya, pemahaman tentang sosial budaya risiko, komodifikasi, dan gerakan moral etis akan membantu aspek politik, terkait dengan pembuatan kebijakan. Namun, karena kendala praktis, makalah ini tidak dapat memberikan tinjauan komprehensif tentang hubungan kekuasaan antar aktor yang dapat memperburuk dampak negatif dalam hal distribusi keuntungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam membedah dan menangkap komodifikasi budaya dan etika transisi moral suku Osing, ada dua kerangka teori yang digunakan. Teori pertama adalah Teori Granovetter tentang *embeddedness* yang meneliti atribut sosial yang tertanam dalam setiap tindakan ekonomi, termasuk komodifikasi budaya sejalan dengan pengembangan pariwisata. Karena, Granovetter memberikan sedikit perhatian pada menjelaskan dinamika transisi moral etis sebagai akibat dari komodifikasi. Teori Utilitarian Bentham digunakan

untuk menjelaskan prinsip moral dalam tindakan anggota masyarakat. Secara keseluruhan, kombinasi kedua teori tersebut cocok untuk menjawab komodifikasi budaya bersamaan dengan transisi moral etis.

Teori keterlekatan Granovetter pada awalnya merupakan penyempurnaan dari konsep keterlekatan yang didalilkan oleh Polanyi (1977). Teori keterlekatan Granovetter menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari hubungan sosial. Setelah itu, Granovetter mendefinisikan bahwa kegiatan ekonomi sebagai tindakan sosial-ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (*utility*) di mana ekonomi tindakan terletak secara sosial dan konstruksi sosial mempengaruhi hasil dari institusi ekonomi (Czernek-Marszałek, 2020a). Berdasarkan definisi tersebut, ia menawarkan penjelasan bahwa kegiatan ekonomi dalam masyarakat terjadi sebagai akibat dari keterikatan yang kuat (*over-embedded*) atau keterikatan yang lemah (*under-embedded*) dari tindakan sosial dalam masyarakat. Jadi, sampai batas tertentu, tindakan sosial dalam cara tertentu berdampak pada tindakan ekonomi, dan besarnya konsep yang dijelaskan dalam jaringan sosio-ekonomi.

Kemudian, Granovetter mengklasifikasikan dua bentuk jaringan sosial, yaitu keterlekatan relasional, dan keterikatan struktural. Keterikatan relasional mengacu pada pola hubungan antara individu atau hubungan pribadi diadik sementara keterikatan struktural didefinisikan sebagai hubungan antara kelompok dan individu atau kelompok yang lebih luas. Dalam ilmu ekonomi, jejaring sosial memiliki posisi strategis dalam kegiatan ekonomi untuk mempengaruhi kesediaan untuk berbagi informasi ekonomi, bentuk struktur sosial budaya, dan menentukan transaksi ekonomi, seperti fleksibilitas harga komoditas.

Secara khusus, manfaat keterikatan sosial dapat diperlakukan dengan baik di bawah tiga judul: kepercayaan, ketepatan transfer informasi, dan pemecahan masalah bersama (Czernek-Marszałek, 2020a). Mengambil contoh kepercayaan, masalah kegiatan ekonomi antara *travel agent* dengan ketua Kelompok Sadar Wisata Kencana (organisasi lokal yang mengelola kegiatan pariwisata) di Banyuwangi adalah mereka mendapatkan manfaat, fleksibilitas, dan keuntungan finansial yang adil. Pasalnya, kedua belah pihak terikat hubungan sosial, terutama identitas mereka yang sama sebagai orang

Osing. Selain itu, keterikatan sosial berdampak pada transfer informasi dalam ekonomi aktivitas, semakin dekat hubungan antar aktor, semakin lancar distribusi informasi. Tentang kegiatan ekonomi, informasi yang paling berharga adalah pengetahuan *tacit* (misalnya, pengalaman, pikiran, kompetensi, komitmen, dan kebaikan) karena mengungkapkan preferensi dan distribusi konsumen informasi. Terakhir, pemecahan masalah bersama digunakan untuk mengelola risiko dalam hubungan sosial karena beberapa risiko menunjukkan bahwa salah satu pihak berkorban bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang maksimal. Melainkan, mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pihak lain. Untuk mengelola risiko, aktor menjaga kedekatan hubungan sosial dengan memperoleh kepentingan yang fleksibel dalam transaksi ekonomi antar pelaku.

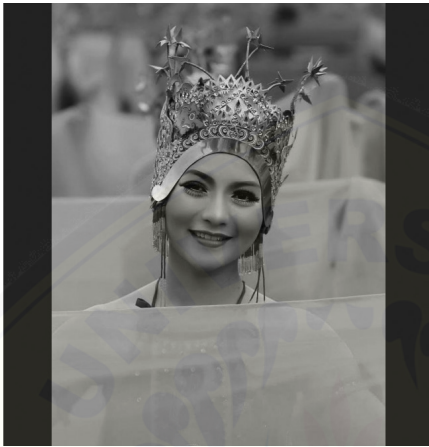
Utilitarianisme Bentham menjelaskan moral etis dari pengarsipan tujuan akhir yang baik. Konsep dari utilitarianisme menunjukkan kebahagiaan sebagai konsekuensi dari memuja aturan dalam masyarakat. Akhir yang baik mengacu untuk kebahagiaan sementara hal buruk diwakili oleh penderitaan atau rasa sakit. Ketika kebaikan menjadi sarana, kemudian secara moral, itu setuju sebagai tujuan akhir. Namun, suatu tujuan akhir dapat dikategorikan baik jika memiliki kesenangan intrinsik dan tidak ada konsekuensi lebih lanjut. Sebuah akhir dianggap baik sejauh keputusannya dibuat berdasarkan pertimbangan kebahagiaan maksimal yang dapat diperoleh oleh sebagian besar masyarakat anggota. Untuk tujuan ini, teori ini mengusulkan istilah kebahagiaan maksimum sebagai tujuan akhir yang baik dan kelak diperoleh oleh semua anggota masyarakat atas tindakan mereka. Meskipun, dalam masyarakat kebahagiaan setiap orang berbeda, pola kebahagiaan umum mesti dipertimbangkan dan diambil sebagai keputusan akhir. Oleh karena itu, teori utilitarian secara gamblang menjelaskan konsekuensi dari agregasi. Kebahagiaan umum diambil sebagai konsensus yang akan membawa kesenangan bagi sebagian besar orang. Sementara sisanya akan mendapatkan rasa sakit atau kebahagiaan tambahan. Orang-orang yang memiliki bentuk kebahagiaan yang berbeda akan menyesuaikan dan berkompromi kebahagiaan mereka sebagaimana diharapkan masyarakat.

12.2 Komodifikasi Budaya Osing sebagai Bentuk *Creativepreneur*

Di Desa Kemiren, pertunjukan festival hidup dikelola oleh masyarakat setempat dan pihak lain. Berdasarkan analisis lapangan, orang-orang yang terlibat dalam mewujudkan kinerja secara garis besar dapat dikategorikan menjadi: keterlibatan dua kali lipat yaitu, keterlibatan di tempat dan keterlibatan di luar situs. Keterlibatan di tempat diidentifikasi melalui keterlibatan anggota masyarakat dalam berbagai festival yang dilakukan secara rutin oleh Komunitas Osing, inovasi *event* baru, fasilitas penginapan, café dan toko souvenir di Kemiren daerah desa. Dalam hal ini, masyarakat memberikan keterlibatan langsung dalam festival *Tumpeng Sewu Ngopi Sepuluh Ewu*, *Barong Ider Bumi*, *Angklung Paglak*, dan *Pasar Kampung Osing*. Di sisi lain, keterlibatan di luar situs umumnya diakses oleh artis yang diundang atau dipilih berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah atau swasta. Festival umum yang dilakukan tidak terbatas pada *Meras Tari Gandrung* yang diselenggarakan oleh *Taman Gandrung Terakota* milik *sociopreneur* Sigit Purnomo dan Festival Gandrung Sewu yang menjadi agenda tahunan tempat wisata Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, penampilan lainnya adalah Seblang Olehsari, Seblang Bakungan, Festival Kebo Alihan, dan Festival Gandrung Sewu.

Dari pengamatan langsung, dapat disimpulkan bahwa anggota masyarakat Osing memiliki kesadaran untuk terlibat dan berkontribusi pada budaya mereka. Kami percaya bahwa keterlibatan itu diilhami oleh kebanggaan sebagai anggota masyarakat dan pemilik budaya pertunjukan. Hasil wawancara dengan pembuat Gamelan ternyata mendukung anggapan tersebut ketika mereka diundang untuk memainkan Gamelan dalam *event* pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa kesenangan komodifikasi budaya tidak hanya ekonomi motif, tetapi non-ekonomi. Penjelasan yang mungkin yaitu orang-orang menyadari untuk mengaitkan identitas sebagai anggota masyarakat, sehingga ketika mereka tampil akan mencontohkan budaya dan jalan hidup. Temuan ini mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Cole (2007), Finn (2009), dan Su (2011) yang menegaskan bahwa meskipun

budaya itu dipertunjukkan untuk orang luar dan dikomoditaskan, tetapi mampu meningkatkan kesadaran diri dan kebanggaan terhadap budayanya sendiri, sehingga meningkatkan tingkat kelestariannya.



Karakteristik *Creativepreneur* Suku Osing

- *Creativepreneurship* diwujudkan dalam bentuk festival
- Melakukan *selective commodification*
- Multiple-embeddedness dalam praktik *creativepreneurship*

Gambar 12.3 Karakteristik *Creativepreneur* Suku Osing

Penguatan nilai dan identitas sebagai anggota masyarakat akibat komodifikasi bertolak belakang dengan beberapa riset lainnya (Zhuang *et al.*, 2019, Goulding, 2000; Halewood dan Hannam, 2001; Getz & Page, 2016) yang menemukan komodifikasi membawa konsekuensi sosial budaya yang merugikan dalam studi kasus pengembangan pariwisata di Bali. Di Bali ditemukan bahwa lingkup sosial budaya sebagian besar didominasi oleh gaya hidup wisatawan, seperti bar, toko, kafe, dan sektor komersial lainnya. Secara umum, aspek sosial budaya berbeda dan bukan lagi budaya “primitif” seperti kondisi sebelumnya dalam masyarakat. Setelah itu, tujuannya tampak kurang otentik, dan nilai produknya berkurang. Konsekuensi ini bertolak belakang dengan konsep pariwisata modern itu sendiri yang menuntut pengalaman otentik seperti yang dikemukakan oleh Cohen (2012). Ia mengatakan bahwa wisatawan melakukan perjalanan untuk mencari gaya hidup mereka sendiri pada tujuan yang *dihosting*, di mana keadaan eksistensial khusus keberadaan itu benar dan otentik. Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan wisatawan, terutama orang asing, menyebabkan dan mempercepat perbedaan budaya, terutama dalam struktur masyarakat seperti perubahan struktural

profil pariwisata, pertumbuhan kegiatan pariwisata, dan interaksi intensif antara lokal dan turis (Kırlar Can *et al.*, 2017). Di atas segalanya, konsekuensi negatif harus disalahkan interaksi dua atau lebih masyarakat yang berbeda yang memiliki struktur dan nilai sosial budaya yang berbeda (Erwin & Smith, 2008).

Temuan ini juga mencerminkan bahwa anggota masyarakat Osing tidak hanya terlibat dalam kegiatan budaya tetapi juga dalam atribut usaha pariwisata atau yang disebut komodifikasi budaya seperti menyediakan akomodasi, fasilitas hiburan tambahan, dan toko souvenir. Fasilitas yang dikembangkan dan elemen tambahan disediakan sebagai pendamping untuk festival di mana budaya itu dilakukan, dimodifikasi, dan ditambah dengan motif ekonomi. Ini menunjukkan bahwa ekonomi dan kondisi masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan. Fenomena tersebut dapat dipahami bahwa setelah warisan budaya ditampilkan kepada orang luar-wisatawan, suasana komunitas akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan. Dengan demikian, keaslian lingkungan dan budaya dimodifikasi dan tidak lagi sepenuhnya menjadi milik anggota masyarakat, tetapi juga milik wisatawan, kepuasan dan kepentingan.

Sebaliknya, komodifikasi budaya tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga membawa positif berdampak pada lahirnya kembali adat tersendiri seperti *otekan performance*. Sebelum adanya budaya komodifikasi, kebiasaan menumbuk padi sebagai kegiatan komunal sudah tidak ada lagi. Orang yang digunakan teknologi menumbuk padi, sehingga mengurangi aktivitas masyarakat setempat untuk bersama-sama mengolah nasi menggunakan tumbukan dan mengurangi jumlah karyawan. Karena, permintaan akan pertunjukan otekan, Osing secara eksklusivitas dimanfaatkan masyarakat untuk menghidupkan kembali tradisi mengolah beras sebagai kegiatan komunal. Para anggota memperoleh keuntungan budaya dan keuntungan ekonomi. Mengingat afinitasnya, hasilnya menyarankan bahwa komodifikasi budaya tidak hanya dirangsang oleh kegiatan pariwisata tetapi mendahului kondisi seperti perkembangan teknologi.

Interpretasi di atas diilustrasikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“...tidak, karena ada mesin gilling (pengolah beras), sudah tidak digunakan lagi. Dulu berfungsi untuk pisahkan kulit beras dari isinya. Tapi karena ada mesin penggilingan, kami tidak pernah pisahkan kulit beras dengan isinya menggunakan lumpang (wadah yang terbuat dari kayu atau batu untuk dihaluskan) beras, kopi, atau bahan olahan lainnya dan biasanya digunakan dengan alat penumbuk alu yang dibuat dari kayu dengan bagian tengah yang mengecil untuk pegangan).

“Karena ada mesin giling, kami tidak lagi menggunakan lumpang untuk mengolah padi yang dipanen. Lumpang dan alu akan digunakan untuk mengolah tepung ketika ada acara seperti pernikahan.” “Pernah ada yang bilang ingin tahu seperti apa gedogan itu. Saya disuruh belajar caranya untuk bermain gedogan pada hari Minggu. Sejak hari itu, kami berlatih siang dan malam hingga pukul 10 malam. Itu otekan dimainkan oleh sedikitnya 5 orang wanita berbusana khas Osing dan beberapa laki-laki yang memainkan angklung (alat musik dari daerah Sunda di Jawa Barat yang dibuat) dari sejumlah tabung bambu dan melekat pada bingkai bambu) (Wawancara Sun, Cagar Budaya Sukosari, 10 Oktober 2019).

Temuan ini konsisten dengan Cole (2007), Kırlar Can *et al.*, (2017) dan Getz & Page (2016) yang menemukan bahwa kehadiran wisatawan mendesak perbedaan budaya dan keaslian yang dimodifikasi. Itu konsekuensi mungkin sebagian dijelaskan oleh interaksi intensif antara lokal dan wisatawan dan motif ekonomi sambil memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal. Ide ini mendukung gagasan yang diajukan oleh Bentham (2000) dalam utilitarianismenya yang mengemukakan kecenderungan suatu tindakan untuk meningkat secara keseluruhan kebahagiaan. Kegiatan ekonomi masyarakat Osing menggambarkan bahwa rasa bangga mengenalkan budaya dan keuntungan ekonomi mendorong mereka untuk terus menjual dan memproduksi dalam bentuk pagelaran seni budaya. Tindakan dan pilihan untuk memodifikasi festival menunjukkan bahwa kesenangan dari kedua aspek merupakan fondasi metafisik, dan perilaku pilihan mencerminkan tingkat yang diperoleh kesenangan. Ketika anggota komunitas memperoleh keuntungan sosial budaya seperti kebanggaan dan identitas yang diperkuat

dan keuntungan ekonomi, mereka cenderung terus melakukan komodifikasi budaya seperti yang disarankan oleh Bentham (2000) bahwa kesenangan menjadi sinyal pergi yang mengarahkan makhluk untuk mempertahankan aktivitas penting, dan rasa sakit menjadi tanda berhenti yang menghalangi kegiatan yang merugikan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa komodifikasi budaya mempengaruhi hubungan sosial antar aktor dalam pelaksanaan festival di mana transaksi ekonomi berlangsung. Memperkecil konsekuensi dari komodifikasi budaya, kami menemukan bahwa hal itu memperluas jaringan sosial di antara aktor, memodifikasi jaringan sosial, dan membangun jaringan sosial baru. Kondisi transaksi ekonomi terjadi dalam 4 tipologi relasi antar aktor, yaitu

1. Dalam anggota masyarakat Osing Kemiren,
2. Antara masyarakat Osing Kemiren dengan wisatawan,
3. Antara masyarakat Osing Kemiren dengan pelaku usaha pariwisata (pengelola hotel, agen perjalanan, dan tour pemandu), dan
4. Antara masyarakat Osing Kemiren dengan pemerintah

Pada kategori pertama, keterlibatan sosial dalam festival membuang nilai-nilai komunal yang diwujudkan dalam ritual tradisional. Kepentingan yang berbeda dari anggota masyarakat adat Osing dilebur melalui kegiatan bersama secara simultan untuk mewujudkan ritual. Dengan demikian, keikutsertaan dalam ritual ini merupakan bentuk keyakinan akan kewajiban menjalankan perintah *Danyang* dan para leluhur pendiri *Kemiren* desa yang tidak pernah dilanggar dan diubah. Dalam kedok ini, hubungan antara anggota Osing terbukti bahwa komodifikasi budaya tidak mengubah hubungan dan keterlibatan anggota dalam mewujudkan festival dan hidup warisan budaya. Bahkan keinginan dan kesadaran mereka untuk mempertahankan ritual-ritual tersebut dicadangkan dan dikuatkan sebagai komodifikasi budaya di masyarakat Osing.

Dalam kategori kedua, komodifikasi budaya meyakinkan bahwa ia menambahkan hal baru dan memperluas hubungan sosial dalam komunitas Osing dari koneksi tunggal di antara anggota komunitas hingga hubungan antara anggota Osing dengan wisatawan. Meskipun hubungan yang diselesaikan bersifat impersonal dan sementara. Hasilnya menimbulkan fakta bahwa komodifikasi budaya menarik wisatawan untuk datang ke komunitas Osing dan menikmati serta merasakan festival hingga keaslian budaya Osing di wilayah warisannya. Akibatnya, interaksi antara wisatawan dan anggota Osing tidak dapat dihindari. Alhasil, daya pikat untuk memberikan dan mempersembahkan penampilan terbaik bagi para wisatawan pun meningkat dan membuka antusiasme untuk berhubungan dengan wisatawan dalam ritual. Padahal pada pada zaman dahulu yang dikhususkan bagi anggota masyarakat. Dalam kategori ketiga, pengkondisian sosial ditekankan dan mendasari hubungan bisnis antara pelaku bisnis perhotelan, agen perjalanan, dan pemandu wisata dan Osing yang diposisikan sebagai bagian dari rencana perjalanan.

Tabel 12.2 Komodifikasi ritual budaya Osing

| BENTUK RITUAL | KEARIFAN AWAL | KOMODIFIKASI |
|---------------|--|--|
| Tumpeng Sewu | Dilaksanakan pada bulan Dzulhdijah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan harapan kesehatan dan kesuburan - Populer dengan kuliner khas Osing, pecel pithik yang memiliki makna filosofis " <i>kang diucel-ucel saben dinane kethitika barang hang apik</i> " (apa yang digeluti) setiap hari adalah hal yang baik) - dilakukan secara komunal di teras masing-masing warga | Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak-benda 2014 - Menjadi salah satu Festival Banyuwangi acara mulai tahun 2012 - Diadakan di sepanjang jalan utama desa - menjadi paket wisata kuliner dengan harga Rp250.000/ pax - diikuti oleh pertunjukan tari |

Tabel 12.2 Komodifikasi ritual budaya Osing (lanjutan)

| BENTUK RITUAL | KEARIFAN AWAL | KOMODIFIKASI |
|------------------|--|--|
| Barong Ider Bumi | Dilaksanakan pada tanggal 2 Syawal sebagai bagian dari tradisi bersih desa yang harus dilakukan agar warga terhindar dari bencana dan bersyukur atas rejeki nomplok yang telah diterima - dimulai dari kantor Desa Kemiren lalu berkeliling desa dan diakhiri tradisi yang disebut sebagai Makam Buyut Cili yaitu dianggap sebagai nenek moyang Desa Kemiren | Tidak ada Komodifikasi |
| Tari Gandrung | Ungkapan syukur atas hasil panen <ul style="list-style-type: none"> - Penghormatan sosok Dewi Sri - Alat perjuangan untuk membangun semangat sisa populasi Osing setelah tahun 1767 kehancuran perusahaan belanda - Terdiri dari 3 babak yaitu Jejer, Paju atau Ngibing dan Seblang Subuh | Menjadi Maskot Pariwisata Banyuwangi berdasarkan SK Bupati Banyuwangi No. 173/2002 <ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkan sebagai Tarian Selamat Datang berdasarkan (SK Bupati Banyuwangi Nomor 147 Tahun 2003) - Menjadi paket wisata seharga Rp1.500.000/ pax maksimal untuk 60 wisatawan - Waktu pementasan yang dipersingkat meliputi: Jejer gandrung, Repenan (diulang), Paju gandrung (berulang), Seblang Subuh |

Tabel 12.2 Komodifikasi ritual budaya Osing (lanjutan)

| BENTUK RITUAL | KEARIFAN AWAL | KOMODIFIKASI |
|-----------------------------|---|---|
| Festiival Ngopi Sepuluh Ewu | Menjadi nilai filosofis lungguh, suguh dan gupuh dalam menghormati tamu | Menjadi festival bersama dengan popularitas budaya kopi - Diadakan di teras rumah di mana pengunjung dikenakan tarif sepuluh ribu untuk menikmati kopi - Memberi label aktivitas dengan <i>Sak corotan dadi sak duluran Brewing</i> (bersama-sama kemudian menjadi kakak beradik) |

Sumber: Data primer, diolah (2019)

Hasil riset menunjukkan bahwa komodifikasi budaya Osing membuka relasi yang lebih luas lingkup jejaring sosial di antara berbagai aktor. Selain itu, hubungan yang berulang dan panjang membentuk bisnis kontra fleksibel yaitu motif bisnis murni secara bertahap menjadi hubungan pribadi, hingga adanya pergeseran yang didorong oleh kepercayaan dan manfaat ekonomi di antara para aktor. Para pelaku bisnis perhotelan, agen wisata, dan pemandu wisata mendapatkan bayaran dari wisatawan sedangkan masyarakat lokal mendapatkan penghasilannya dari belanja wisatawan selama festival berlangsung. Dalam mengelola kegiatan antara masyarakat Osing Kemiren dengan usaha pariwisata, Kelompok Sadar Wisata Kencana menjadi aktor penting dalam pelaksanaan festival tersebut. Mereka menjadi aktor sentral dan kuat untuk mengatur distribusi keuntungan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka mengelola kegiatan festival yang terdiri dari persiapan *venue*, penyiapan acara dan rumah.

Ritual yang menjadi ciri identitas masyarakat Osing mengalami perubahan menjadi sesuatu yang bisa disajikan untuk kepentingan wisatawan, atau dikomodifikasikan. Wisatawan menikmati pertunjukan ritual yang eksotis seperti yang dilakukan oleh rakyat. Mereka didorong

untuk mengalami momentum otentik yang dilakukan budaya Osing. Namun pada kenyataannya, Lanfant dalam Shepherd, (2002) berpendapat bahwa dulunya warisan budaya adalah dijadikan komoditas wisata, kemudian makna budayanya dikomodifikasikan menjadi nilai komersial dalam yang memperindah budaya yang mengarah ke realitas hiper. Nilai komodifikasi budaya cukup besar jumlah pertukaran ekonomi. Kegiatan Festival Tumpeng Sewu misalnya, dengan kurang lebih 1.113 kepala keluarga menggunakan sedikitnya satu ekor ayam dan kelapa sebagai bahan dasar bumbu, saat itu ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan. Peran Pokdarwis Kencana dalam Kegiatan Festival Tumpeng Sewu sangat sentral untuk mengatur siapa saja yang mendapat kesempatan menerima pesanan senilai Rp250.000/pax dari wisatawan. Pokdarwis Kencana juga mengelola juru masak pechel pithik menu senilai Rp200.000/orang. Dibandingkan dengan wilayah studi lain, Greenwood pada tahun 1989 juga menemukan bahwa Festival Alerde Fuenterrabia di Spanyol dan festival Basque dimodifikasi sesuai permintaan wisatawan.

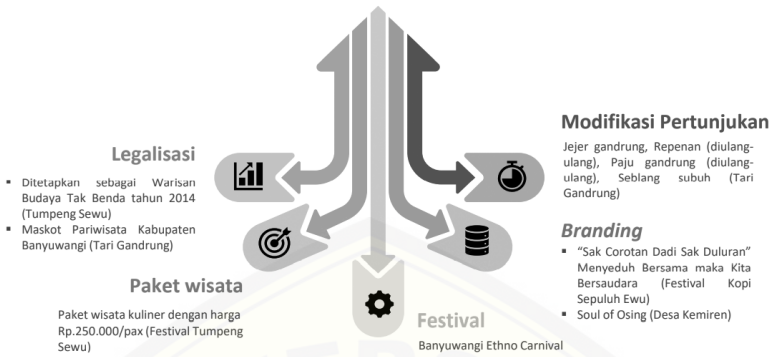
Kegiatan budaya-ekonomi masyarakat Osing menggambarkan tindakan rasionalitas untuk hidup nilai-nilai weluri (tradisional). Pada mulanya mereka memandang ritual Barong Ider Bumi sebagai kegiatan yang dilandasi nilai-nilai weluri untuk melindungi warga dari bahaya atau bencana. Selanjutnya, Festival Ngopi Sepuluh Ewu lebih dijabarkan sebagai kegiatan untuk menghargai tamu. Selanjutnya, renovasi rumah adat Gebyok menjadi sebuah kegiatan memelihara rumah adat sebagai tradisi weluri yang menunjukkan kerja sama dan toleransi. Hal ini merupakan tindakan rasionalitas yang ditunjukkan oleh masyarakat Osing yang menggambarkan bentuk perlawanan mereka melalui identitas politik (etnis) menggunakan pariwisata (Anoegrajekti & Effendy, 2007). Konstruksi sejarah sosial budaya Masyarakat Osing telah membentuk kegiatan ekonomi berdasarkan rasionalitas nilai-nilai tersebut. Untuk hal ini, nilai-nilai weluri dilestarikan tidak hanya karena sejarah, tetapi juga kesadaran masyarakat akan komoditas yang dikomodifikasi sebagai nilai komoditas pariwisata. Hal ini mencerminkan bahwa komodifikasi budaya ritual *Tumpeng Sewu*, yaitu hidangan tumpeng dan *pechel pithik* mewakili kepentingan pribadi yang mengandung rasa syukur demi keamanan dan kesuburan Desa Kemiren.

Namun, karena komodifikasi budaya, nilai-nilai dimodifikasi oleh motif ekonomi. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kepentingan pribadi anggota komunitas berubah menjadi kepentingan ekonomi yang memiliki hubungan sosial yang mesti dilestarikan antar Kelompok Sadar Wisata. Hal ini berperan sebagai kewenangan untuk mengatur usaha pariwisata dan masyarakat Osing sebagai penyedia jasa. Pokdarwis memahami potensi peluang dan kecemburuan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan Osing Masyarakat Adat Kemiren. Oleh karena itu, aturan siapa yang mendapat kesempatan untuk membuat dan hadir layanan untuk wisatawan seperti pithik pechel yang didistribusikan secara merata sesuai dengan jumlah tamu yang memesan. Manajemen Kelompok Sadar Wisata menunjukkan bahwa festival ini memiliki nilai ekonomis yang mestinya dimiliki oleh semua anggota masyarakat Osing. Manajemen dari Kelompok Sadar Wisata juga menggambarkan bahwa daya tarik nilai ekonomi cukup signifikan, sehingga orang akan terlibat untuk mendapatkan keuntungan dan pihak lain secara otomatis atau sukarela akan mengelola pendapatannya. Fenomena ini mungkin dijelaskan oleh Weber dalam Sumarti (2007) yang menyebutkan bahwa minat mendorong tindakan manusia, dalam perspektif mereka tentang dunia yang menentukan keputusan yang dibuat.

Yang signifikan dan menarik adalah absennya komodifikasi budaya *Barong Ider Bumi*. *Barong Ider Bumi* merupakan ritual kolosal yang dilakukan oleh masyarakat Osing Kemiren. Ia memiliki nilai kesucian yang tidak berubah. Mulai dari filosofi, ritual slametan (acara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengundang tetangga dan makan bersama yang melambangkan keinginan dan doa), dan *pechel pithik* hidangan kuliner. Simbolisasi Barong Kemiren merupakan bagian penting dari *Barong Ider Bumi ritual* yang mengandung makna kebersamaan (barong = kebersamaan), kerja keras, pengingat sejarah, nilai rasa syukur dan murka kepada Tuhan Yang Maha Esa (dilambangkan dengan mahkota berbentuk kubah). Untuk alasan itu, *Ritual Barong Ider Bumi* menjadi representasi nilai dan citra diri Osing Kemiren agar susunannya tetap sama untuk menghindari nasib sial dan tidak dikomodifikasi.

Nilai yang melekat dalam ritual *Barong Ider Bumi* bagi masyarakat Osing menunjukkan bahwa mereka memiliki rasionalitas untuk memilih ritual mana yang bisa dikomodifikasi dan mana yang tidak. Kesakralan dalam *Barong Ider Ritual bumi* menjadi alasan utama Barong Ider Bumi tidak mengalami komodifikasi budaya sebagaimana ritual lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komodifikasi budaya hanya terjadi pada ruang-ruang budaya yang profan. Literatur tentang komodifikasi budaya telah menyoroti dampak positif dan dampak negatifnya (Indiarti, 2016; Karsono dkk., 2019). Dalam kajian Festival Angklung Banyuwangi (Karsono *et al.*, 2019), sisi negatif dari komodifikasi budaya dipersepsikan melalui pandangan tentang pendangkalan makna budaya dan menurunkan kualitas budaya. Sedangkan, dari sisi positifnya ditunjukkan pada pandangan bahwa komodifikasi budaya dalam bentuk festival menjadi media integrasi sosial dan budaya berkelanjutan dan diyakini dapat membangun karakter dan mentalitas pelakunya (Karsono *et al.*, 2019). Proses komodifikasi budaya dan penguatan identitas Osing dibangun melalui acara dan festival budaya Banyuwangi mau tidak mau menjadi komodifikasi budaya (Indiarti, 2018).

Temuan tersebut bertolak belakang dengan kondisi saat ini yang menunjukkan bahwa masyarakat Osing memiliki sistem klasifikasi terkait budaya mana yang bisa atau tidak bisa dikomodifikasi. Lanskap budaya Osing memiliki sistem pengetahuan rahasia yang mengkategorikan budaya sakral dan profan. Terkait ritual adat Barong Ider Bumi yang menunjukkan kondisi nilai-nilai sakral transendental tidak pernah mengubah sistem pelaksanaannya. Sementara, seni pertunjukan Gandrung yang dianggap sebagai tarian memiliki nilai profan dan mengalami komodifikasi budaya yang sejalan dengan kepentingan pariwisata. Dasar inilah yang menjadi pedoman apakah suatu ritual atau kesenian dapat diakomodasi atau tidak. Situasi semacam juga didukung oleh sikap pemerintah yang memberikan kebebasan kepada suku Osing untuk memilih ritual yang mana mengalami perubahan dan yang mana tidak berubah.



Gambar 12.4 Transisi komodifikasi selektif suku Osing

Secara teoritis disimpulkan sebagai berikut:

1. Komodifikasi selektif pada ritual dan kebiasaan komunitas adat Osing Kemiren tidak merubah makna budaya meskipun menambah aspek komersial di dalam kegiatannya.
2. Osing Kemiren hidup dalam dua rasionalitas, rasionalitas tradisional dan rasionalitas instrumental.
3. Dua rasionalitas hidup tersebut berdialektika di mana kepentingan yang berbeda tidak selalu bersifat kontradiktif (sakral-profane, *self interest-communal*) namun bersifat *selected* dan kontinu.

Fakta ini menunjukkan bahwa komodifikasi budaya tidak berarti bertentangan dengan kepentingan pariwisata. Keaslian budaya tidak dapat diukur melalui ukuran ekonomi yang didasarkan pengulangan industri budaya (dikomodifikasi) (Shepherd, 2002). Tren wisatawan dewasa ini bergerak mengejar pengalaman budaya “asli” untuk mengenal diri secara lebih baik. Soal autentisitas budaya, penilaiannya berkaitan dengan siapa yang melakukan dan di mana ruang budaya ditampilkan sehingga penting bagi wisatawan. Bagi masyarakat lokal untuk berbagi pengalaman budaya dengan wisatawan adalah cara mereka memperkuat dan mengabadikan identitas budayanya. Situasi ini bersifat objektif yaitu ada komunitas lokal yang statis, historis dan tidak memiliki agensi sendiri dan dikumpulkan berdasarkan ruang dan waktu dengan dunia luarnya (Shepherd, 2002).

12.3 Utilitarianisme Konsekuensialisme Sebagai Etika Moral Ekonomi Osing dalam Kegiatan Pariwisata

Kedudukan sosial ekonomi masyarakat Osing bisa dikategorikan dalam tiga perspektif, *pertama*, dari segi budaya, masyarakat Osing menjadi ikon budaya Banyuwangi yang hadir dalam pertunjukan Tari Gandrung. Menurut Anoe-grajekti & Effendy, (2007), tari Gandrung merupakan proyek ikon pariwisata. Ia menjadi objek “penaklukan” di kalangan umat Islam yang menginginkan tari Gandrung diperankan untuk menghormati hukum Islam. Ia merupakan proyek yang memperkuat identitas sebagai hasil dari terbukanya peluang bagi penari Gandrung dalam sektor pariwisata.

Kedua, berdasarkan perspektif sosial, masyarakat Osing adalah komunitas terpinggirkan dibandingkan etnis lainnya di Banyuwangi (Madura, Jawa, Bugis, dan Bali). Sebelum revitalisasi struktur politik di Banyuwangi, masyarakat Osing tidak memiliki kesempatan duduk dan menjabat dalam birokrasi pemerintah atau anggota sebagai dewan. Pasca revitalisasi tahun 2004, komunitas Osing mendapat kedudukan strategis dalam birokrasi pemerintahan. Alhasil, secara tidak langsung mereka turut andil dalam mengukuhkan eksistensi Suku Osing yang terpinggirkan selama ini.

Ketiga, dalam perspektif ekonomi memberikan citra Banyuwangi sebagai daerah tertinggal dan terpinggirkan di Jawa Timur. Akan tetapi, akibat pengembangan pariwisata yang masif 10 tahun terakhir, komunitas Osing diposisikan sebagai ikon budaya yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Imbasnya, kesejahteraan komunitas Osing juga meningkat. Sebagai masyarakat komunal dalam tulisan ini juga mendeskripsikan etika moral dalam kegiatan wisata Osing. Mereka berkegiatan wisata berdasarkan keputusan komunal dan kesadaran diri sebagai anggota masyarakat Osing. Sebuah wawancara yang menggambarkan nilai komunal dalam kegiatan wisata Osing adalah:

“Misalnya pakaian adat, dibandingkan dengan Jambesara dan Boyolangu, terus menjadi diumumkan di masjid “halo, pakai baju hitam dan udeng untuk festival besok”. Semua orang akan melakukan atau besok akan Ngopi Sepuluh Ewu, dan kemudian orang akan memakai warna hitam pakaian. Kalau boleh saya bilang, ini terjadi karena orang iri dan suka pamer. Ketika sebuah anggota mengenakan pakaian hitam di festival yang akan diikuti orang lain. Saya pikir begitu karena orang akan lebih suka membeli beras daripada pakaian seperti desa lain.” (Wawancara Ri, Dusun Krajan, 1 Oktober 2019).

Dari kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa etika moral ekonomi bertindak berdasarkan prinsip memperoleh keuntungan besar secara kolektif. Etika moral ekonomi memberi konsekuensi yang diinterpretasikan sebagai ciri khas masyarakat adat Osing memberikan dasar/fundamental apa yang mesti dikehendaki dan mempengaruhi pilihan yang tersedia dari aspek bentuk, cara, dan tujuan dari tindakannya. Persepsi para aktor diikat oleh keharusan moral yang mendahulukan kepentingan tindakan kolektif dan menanggung bersama tindakan yang dipilih. Tipologi etika semacam ini sejalan dengan prinsip utilitarianisme dalam sub teori konsekuensialisme yaitu satu-satunya hal terpenting dalam memutuskan sesuatu yang paling tepat adalah keharusan manusia dalam bertindak. Kutipan wawancaranya:

“... Seorang pemimpin tidak bisa tidak bisa berpikir hanya dari satu sudut pandang. Dari sudut agama melihat, itu adalah tanggung jawab. Dari sudut pandang ekonomi dan perspektif matematika bagaimana banyak negatif dan berapa banyak positifnya. Itu saja yang harus dipikirkan. Bagaimana menjembatani itu terobosan juga harus dimiliki... positif dan negatif diberikan. Berdoa tidak penting bagi saya, bagi saya yang penting adalah mensyukuri apa yang kita lakukan. Karena Tuhan janji, siapa yang mensyukuri nikmatnya akan ditambah...” (Wawancara ESA, Kemiren Kantor Desa, 30 September 2019).

Kegiatan ekonomi masyarakat Osing juga menunjukkan perkiraan agregasi sejumlah kesenangan dan rasa sakit yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Keberatan dan penolakan dari kelompok pribumi termasuk mereka yang mewakili kesenangan dan rasa sakit diperhitungkan dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga menjadi jalan keluar yang diterima anggota

masyarakat. Kutipan wawancara berikut menyajikan agregasi tindakan ekonomi untuk memastikan keputusan yang menimbulkan kesenangan semua anggota.

“Saat itu artis Kemiren memprotes Color Fun Festival karena berhubungan dengan musik DJ (musik modern), sehingga kami modifikasi menjadi Festival Sembur Kuwung yang menggunakan musik tradisional. Suatu ketika, seorang seniman memprotes bahwa nilai keikhlasan yang tertanam dalam budaya Osing tidak lagi dipertahankan karena dikomersialkan. Kemudian saya menjawab bahwa kami, pemerintah, menginginkan masyarakat menjadi damai dan sejahtera, dan saya berasumsi bahwa orang munafik tulus sepanjang waktu.”
(Wawancara dengan ESA, Balai Desa Kemiren, 30 September 2019).

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa keputusan Osing sebagai tujuan wisata semula diprakarsai oleh interpretasi pemerintah tentang apa yang terbaik bagi berbagai pihak. Dalam proses pengembangan pariwisata didorong oleh kepentingan elit. Kasmiasi *et al.*, (2016) yang menemukan bahwa pengembangan ekowisata relatif bersifat inklusif sehingga masyarakat yang mengakses ketersediaannya adalah kelompok rumah tangga kelas atas. Dialog antar kelompok kepentingan menunjukkan bahwa utilitas suatu entitas bersifat relatif terhadap sudut pandang setiap pemangku kepentingan. Di balik kedok semacam ini, keputusan akhir dalam memilih pariwisata sebagai bagian mata pencaharian orang Osing mesti dianggap sebagai proses agregasi etika moral akibat dorongan mencari kesenangan dan mengesampingkan potensi efek negatif atau kesakitan.



Gambar 12.5 *Multiple Embeddedness* dalam budaya Suku Osing

Konstruksi etika moral ekonomi masyarakat Osing menunjukkan sifat altruistik yang berorientasi pada kepentingan komunal dan kemampuan memperoleh peluang ekonomi dari perkembangan pariwisata. Sikap altruistik tersebut ditunjukkan lewat pengungkapan individu. Mereka menganggap keuntungan finansial menjadi prioritas kedua pasca memperoleh keuntungan ekonomi komunal dengan identitas Osing sebagai sebuah tindakan yang mendasar. Kerukunan dan integrasi sosial menjadi prioritas dalam menjaga hubungan intim antara masyarakat Osing dan pariwisata. Gagasan ini direpresentasikan dengan baik dalam perspektif mereka *vis a vis* dengan hubungan sosial perkotaan yang individualistis.

“Ini untuk pengembangan Osing. Kami hampir tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar, bahkan jika kami berada di titik impas point (dari kegiatan ekonomi mereka). Jadi saya tidak ingin membesar-besarkan desa saya (berdasarkan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata). Anda sudah tahu bahwa orang-orang di sini hebat dan memiliki rasa hidup komunal yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berada di kota yang memiliki lebih tinggi ego.” (Wawancara SMT, tempat tinggal informan, 8 Oktober 2019).

Konstruksi etika ekonomi suku Osing diinternalisasikan lewat interaksi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dinamika internal masyarakat Osing menunjukkan bahwa interaksi dengan entitas eksternal yang mengusung nilai-nilai individualistik dalam ranah bisnis mengalami tekanan sedemikian rupa ketika berhadapan dengan aspek harapan sosial dan nilai-nilai budaya Osing. Dalam konteks pengembangan pariwisata, menggambarkan bahwa perubahan struktur sosial masyarakat Osing ditandai oleh kelompok pemudanya memiliki peran sosial vital dalam menyelenggarakan aktivitas pariwisata. Struktur sosial masyarakat adat Osing dicirikan oleh stratifikasi berdasarkan *gerontokrasi* dan umur senioritas menjadi dasar stratifikasinya. Namun, dewasa ini peran sentral kalangan pemudanya terutama *Pokdarwis Kencana* membuktikan bahwa prinsip *gerontokrasi* secara lambat laun mengalami perubahan. Peran mereka digantikan oleh kelincahan dan kreativitas pemuda.

Persepsi aktor diikat oleh keharusan moral yang mengutamakan kepentingan tindakan kolektif dan menanggung bersama tindakan yang dipilih. Hal ini tampak nilai ketakutan sehingga mempertahankan *Barong Ider Ritual bumi*. Masyarakat Osing setuju tidak mengkomodifikasi ritual tersebut meskipun jenis ritual lainnya mengalami transformasi dan perubahan akibat aktivitas pariwisata. Ditambah lagi perhitungan keuntungan yang diabaikan pemilik *homestay* ketika berhadapan dengan kepentingan subjektivitas komunal.

Tipologi etika semacam ini sejalan dengan konsekuensialisme yang mengandaikan konsensus mayoritas menjadi kesepakatan bersama dengan konsekuensinya. Dalam konsep konsekuensial, utilitarianisme pun mengusulkan bahwa tindakan untuk memperoleh kebahagiaan akan menjadi keputusan komunal. Dengan denikian mampu menjelaskan mengapa tidak ada komodifikasi budaya pada *Barong Ider Bumi*. Utilitarianisme konsekuensial berperan sebagai etika moral ekonomi Osing dalam kegiatan pariwisata dan memperkuat identitas anggota Osing. Hal ini digambarkan dalam kutipan berikut yang Osing memperkuat identitas dan menghidupkan kembali nilai-nilai masyarakat Osing.

“Dulu kita malu dikenal sebagai anggota Osing Kemiren. Sekarang, kita bangga menjadi orang Osing.” (Wawancara ESA, Balai Desa Kemiren, 30 Oktober 2019).

“Manfaat identitas kita juga berdampak pada pemutar musik Gamelan. Mereka memperoleh penghidupan dari penampilan. Dengan kata lain, identitas kita sebagai orang Kemiren berdampak pada kesejahteraan kita. Namun, pengrajin Gamelan belum mendapatkan manfaat yang sama karena identitas membuat profil kami sebagai pemutar musik Gamelan terkenal dari Kemiren, bukan Gamelan pengrajin dari Kemiren.” (Wawancara SGT, Balai Desa Kemiren, 7 Oktober 2019)

“... hal yang baik tentang orang-orang di sini adalah tingginya tingkat nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dia berbeda dengan orang-orang di kota yang memiliki ego tinggi.” (Wawancara MSD, Desa Kemiren Aula, 8 Oktober 2019).

Lintasan sejarah Osing yang memosisikan mereka dalam wacana pinggiran. Mereka mendapatkan momentum tatkala mengalami revitalisasi pasca penetapan sebagai ikon budaya Banyuwangi. Kebanggaan orang Osing menjadi sebagai budaya strategi dibalut ragam kepentingan pariwisata. Kebijakan merevitalisasi seni budaya dari Pemerintah Daerah Banyuwangi memosisikan budaya sebagai sarana dalam meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Anoegrajekti *et al.*, 2018). Dengan perkataan lain, etika moral ekonomi mengalami hibridisasi nilai hedonistik dan tindakan agregatif akibat kemaslahatan bersama.

Secara keseluruhan, etika moral ekonomi masyarakat Osing mengandalkan prinsip seberapa besar keuntungan kolektif yang diperoleh. Etika moral dari ekonomi konsekuensial tersebut dikonseptualisasikan sebagai ciri khas masyarakat Osing yang memberikan dasar bagi apa mesti dikehendaki dan mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk, cara, hingga tujuan tindakan. Selain itu, konstruksi sosial budaya tradisi *weluri* terintegrasi atau sejalan dengan rasionalitas ekonomi pariwisata. Akibatnya, jumlah transaksi bukan yang mendasari transaksi ekonomi, melainkan didasari kepercayaan. Temuan ini konsisten dengan Dahles *et al.* (2020) dan Dahles dan Susilowati (2015) yang menemukan bahwa ketahanan UMKM kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta selama masa krisis dipengaruhi oleh hubungan pribadi, dan interaksi bisnis yang kuat dengan mitra dan pemangku kepentingan lainnya. Hal dimaknai bahwa kegiatan ekonomi mustahil dari konteks sosial budaya. Keberlanjutan aktivitas ekonomi tidak hanya ditentukan modal melainkan juga modalitas sosial.

Data yang disajikan dalam riset ini ditafsirkan dengan hati-hati karena keterbatasan teori dan literatur pendukungnya untuk menjelaskan transisi moral etis. Namun, terlepas dari interpretasi kehati-hatian dalam berhipotesis bahwa masyarakat Osing menggunakan utilitarianisme konsekuensialisme yang memberikan hasil signifikan dua hal utama. *Pertama*, sukses mengidentifikasi penyesuaian sosial berupa komodifikasi budaya untuk komodifikasi ritual maupun ritual yang tidak mengalami komodifikasi. Di samping itu, mampu mengidentifikasi alasan tepat yang mendasari mengapa terjadi komodifikasi ritual dan tidak mengalami komodifikasi ritual dalam masyarakat Osing.

Kedua, mampu mengidentifikasi moral etika kegiatan wisata Osing. Terlepas hasilnya menjanjikan, namun menimbulkan pertanyaan terkait tinjauan komprehensif mengenai hubungan kekuasaan antar aktor, distribusi keuntungan, dan kesejahteraan masyarakat yang dianalisis menggunakan sumber data kuantitatif maupun kualitatif.

12.4 *Creativepreneur* Suku Osing dalam bingkai Nusantaranomics

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana penyesuaian sosial dan transisi etika berlanngsung akibat komodifikasi sosial budaya dalam pariwisata di Masyarakat Osing. Hasilnya studi ini menunjukkan hasil signifikan dalam proses komodifikasi pada masyarakat Osing. Hasil awalnya menunjukkan bahwa komodifikasi ditemukan dalam kegiatan wisata Osing. Tapi, tidak semua ritual mengalami modifikasi, umpamanya Barong Ider Bumi. Orang-orang mengajukan pengaturan ritual untuk menjaga kesuciannya karena berhubungan langsung dengan kepercayaan masyarakat tentang kekuatan Tuhan. Orang-orang Osing percaya bahwa modifikasi ritual berdampak negatif terhadap kehidupannya karena struktur ritual telah diatur berdasarkan nilai-nilai weluri leluhur. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional tertanam dalam budaya komodifikasi. Masyarakat Osing juga telah memiliki pengetahuan awal tentang sistem komodifikasi budaya untuk memutuskan ritual mana yang dapat dimodifikasi dan mana yang tidak.

Hasil signifikan lainnya dari riset ini adalah adanya jejaring sosial yang dioperasikan dalam kegiatan pariwisata Osing. Ketika komodifikasi budaya terjadi, jaringan sosial dalam masyarakat Osing dimodifikasi secara lebih luas. Komodifikasi budaya membuka relasi baru antar aktor berupa (i) hubungan antar anggota komunitas Osing Kemiren, (ii) antara komunitas Osing Kemiren dengan wisatawan; (iii) kalangan masyarakat Osing Kemiren dan pelaku usaha pariwisata (pengelola hotel, agen perjalanan, dan tur pemandu), dan (iv) antara masyarakat Osing Kemiren dengan pemerintah.

Hubungan-hubungan tersebut dicirikan oleh keterikatan relasional dan struktural. Keterikatan relasional ditandai hubungan personal antara aktor-aktor yang disebutkan di atas. Sementara, keterikatan struktural tercermin

dalam hubungan antar instansi pemerintah, swasta, Pokdarwis, dengan masyarakat Osing. Hal ini menggambarkan bahwa relasi yang mengalami komodifikasi budaya adalah relasi yang didorong oleh kepentingan tertentu misalnya: manfaat ekonomi. Dampaknya, perluasan jejaring sosial bermanfaat bagi masyarakat Osing untuk mendapatkan identitas budaya yang lebih kuat.



Gambar 12.6 Multiple *Embeddedness* dalam *Creativepreneur* Osing Kemiren

Terkait transisi etika ekonomi, nilai kolektif tetap sama dengan risiko kegiatan budaya yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa paradigma utilitarianisme kolektif berlangsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat Osing. Hasil penelitian ini memberikan hipotesis bahwa anggota masyarakat Osing berkegiatan ekonomi berdasarkan dua konsep sosial campuran, yaitu keterikatan utilitarianisme. Makanya, kebaruan dalam penelitian ini berupa karakteristik kegiatan pariwisata di masyarakat Osing, yaitu utilitarianisme yang tertanam dalam budaya dan dimodifikasi untuk mendapatkan manfaat maksimal. Sementara nilai-nilainya yang bertahan tetap tertanam dalam masyarakat.

Pemahaman baru tersebut membantu meningkatkan aspek teoretis dan praktis bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berdampak negatif bagi lokasi pariwisata, melainkan juga masyarakat hendak mempertahankan budayanya dan memberikan manfaat ekonomi. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan pariwisata pembangunan memperkuat identitas anggota masyarakat. Pada saat yang sama juga memberikan makna bahwa mempertahankan identitas budaya berupaya menghayati keaslian masyarakat adatnya yang sampai batas tertentu dikomodifikasi untuk memperoleh manfaat ekonomi. Secara keseluruhan, upaya mencapai manfaat ekonomi dan mempertahankan warisan budaya menyebabkan masyarakat Osing memodifikasi kegiatan ekonominya berdasarkan nilai-nilai budayanya. Akibatnya, poin terbaru dari penelitian ini adalah konsep keterikatan utilitarianisme. Secara praktis, temuan, keterikatan sosial antar aktor yang terlibat dalam kegiatan pariwisata Osing dan utilitarianisme kolektif amat penting dalam menjaga pengembangan pariwisata dan budaya. Temuan ini memberikan dasar bagi pemerintah Daerah Banyuwangi untuk memperhatikan paradigma ekonomi tersebut dalam merumuskan dan membuat kebijakan. Penulis merekomendasikan agar pemerintah daerah memberikan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan mempertahankan nilai-nilai budaya dan mengembangkan inovasi dalam meningkatkan daya tarik wisata.

Bagi komunitas Osing, penulis menyarankan agar memastikan posisi *Pokdarwis Kencana* sebagai salah satu manajemen inti dalam mengamankan fungsi distribusi ekonomi, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh anggota komunitas Osing. Makanya, Pokdarwis Kencana membutuhkan dan menetapkan mekanisme prosedur operasi standar sebagai titik awal untuk memastikan anggota masyarakat yang terlibat dalam dunia kepariwisataan. Tujuannya agar mereka memahami dan mematuhi standar-standar pelayanan dalam bidang kepariwisataan.

Bagi kalangan usahawan, penulis menyarankan agar membangun karakteristik lokal dalam pengembangan pariwisata Osing. Di antaranya: derajat dalam membangun rasa hormat mereka akibat kehilangan nilai-nilai budaya sebagai imbas bisnis inti dalam pariwisata. Kalangan usahawan juga perlu menghargai budaya yang hilang sebagai akibat pengalaman wisata

sehingga berguna dalam memperkaya pengetahuan tentang keragaman budaya. Secara teoritis, penulis menyarankan agar teori *embeddedness* digabungkan dengan teori-teori sosial lainnya untuk menggali pemahaman tentang relasi kuasa aktor.



Gambar 12.7 Model Pengembangan *Creativepreneurship* Osing Kemiren

Kontribusi *Creativepreneurship* Suku Osing dalam pemikiran Nusantaranomics:

1. Praktik *creativepreneurship* Suku Osing adalah salah satu bentuk eksemplar Nusantaranomics yang memiliki karakteristik distingtif.
2. Analisis *creativepreneurship* masih terbatas pada penggunaan teori dengan *setting* sosial masyarakat Barat.
3. Nusantaranomics merupakan jawaban sementara landasan teori dalam mengkaji perilaku ekonomi khas Indonesia yang terbuka untuk didiskusikan, dikritisasi dan dicoba untuk diterapkan dalam dialektika akademik.
4. Belajar dari Suku Osing, praktik *creativepreneurship* mesti berbasis budaya dan memperhitungkan kompleksitasnya dalam konteks sosial, spasial, institusional dan politik.



DIALEKTIKA PEMIKIRAN PAKAR TENTANG NUSANTARANOMICS

13.1 Solidaritas Ekonomi Rakyat dan Kewirausahaan Lokal dalam Menghadapi Tantangan Global: Prof. Bagong Suyanto

Urgensi Nusantaranomic pada dasarnya adalah memperkuat solidaritas ekonomi rakyat. Solidaritas ekonomi rakyat dapat dilihat dengan mengetahui posisi ekonomi kerakyatan dalam perkembangan kapitalisme global. Ada pranata dan nilai dari sistem ekonomi kerakyatan sehingga mampu bertahan dari kapitalisme global. Apakah sektor ekonomi kerakyatan dan Firma bisa berjalan paralel (tidak saling meniadakan), atau ini dua dunia yang berjalan sendiri. Perlu lebih hati-hati dalam membahas persoalan kemitraan sosial ini. Apakah betul kemitraan menjadi jalan keluar untuk membuat sektor ekonomi kerakyatan bisa berkembang? Sebagai contoh, ketika daerah yang sudah maju dihubungkan dengan yang kurang berkembang yang muncul terjadi justru penghisapan. Madura dan Surabaya dihubungkan oleh Suramadu justru membuat pulau Madura semakin tertinggal. Ada proses penurunan perputaran uang di Madura.

Oleh karena itu, menafsirkan kemitraan harus dilihat aktor kemitraan tersebut karena hasilnya akan berbeda. Seringkali kata “kemitraan” yang sesungguhnya bernilai baik, justru menjadi alat penghisapan kelompok ekonomi kuat kepada yang lemah. Banyak pihak terjebak dengan terminologi yang mengesankan. Contoh lainnya, seperti istilah ekonomi syariah dari segi nama, sangat menjanjikan karena ada nilai keagamaan di dalamnya. Namun, jika

dilihat dari unsur kepemilikannya adalah pemilik bank swasta yang kapitalis. Apakah ini bisa kita anggap sebagai perwakilan ekonomi kerakyatan. Ataukah ini merupakan bentuk penebaran jaring yang lebih lebar dari kapitalis untuk menyerap keuangan masyarakat. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat sebuah fakta ekonomi secara menyeluruh (bukan hanya yang tampak di permukaan). Strategi ekonomi kerakyatan tidak perlu dikembangkan linear ke atas. Karena jika dibesarkan ke atas maka kompetitornya adalah orang-orang kapitalis yang jauh lebih mapan. Jika ekonomi kerakyatan berkembang ke atas, maka dalam waktu singkat akan terjun bebas.

Ekonomi kerakyatan memiliki keterbatasan. Apakah strategi ekonomi kerakyatan justru sebaiknya dikembangkan ke samping? Berdasarkan kondisi di lapangan, ternyata strategi diversifikasi usaha lebih membuat ekonomi kerakyatan lebih mampu bertahan. Strategi paling realistis untuk menolong usaha kecil adalah memperkuat skala usahanya dan memperlebar diversifikasinya ke samping, bukan semakin memperbesar ke atas. Bagi usaha kecil, proses semakin membesar, akan sulit dilaksanakan karena bukan kompetensi mereka.

13.2 Nusantaranomics; Ekonomi Kreatif dan Digital untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Dr. Umar Juoro

Pendekatan Prof. Didin selalu *heterodox, comprehensive* sebagai ilmuwan dan cendekiawan. Menurut saya model *heterodox* ini bisa diungkapkan secara verbal dan terutama untuk mahasiswa Magister (S2) dan Doktor (S3) bisa diungkapkan dengan matematis (model yang rigorous). Sistem kapitalis mengandalkan kapitalis sebagai pertumbuhan, dengan peran negara minimal, dan mekanisme pasar sebagai sarana utama dalam pertumbuhan. Sistem kapitalis menghendaki ekonomi berkembang baru pemerataan. Peran negara minimal dan kurang menentukan. Mekanisme pasar menjadi sarana utama dalam pertumbuhan ekonomi. Sistem sosialis dimulai dengan pemerataan, kendali modal dilakukan negara dan kapitalis ditiadakan. Negara memiliki

peran sentral dalam perencanaan ekonomi. Negara ikut menentukan dalam distribusi dan produksi sehingga mekanisme pasar dibatasi dan sering dihilangkan.

Model heterodoks menjadi sebuah sistem heterodoks, bergerak dengan peran negara dan mekanisme pasar saling bersinergi, dalam mengembangkan ekonomi yang maju dan mandiri. Peran negara lebih besar dalam memberikan haluan, perencanaan, termasuk dalam produksi dan distribusi. Peran swasta dikembangkan tetapi tidak boleh melakukan monopoli dan oligopoli. Kelembagaan koperasi dikembangkan masyarakat secara musyawarah berdikari. Jika dicermati, Indonesia sejatinya lebih cocok dengan sistem heterodoks untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya dan membangun kekuatan ekonominya. Pada titik inilah, maka gagasan nusantaranomics yang bertumpu pada kearifan dan kreativitas lokal akan semakin berkembang dalam bingkai ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Tidak hanya di pasar lokal melainkan juga pasar global.

Nusantaranomics merupakan konsep ekonomi yang berdasar pada prinsip-prinsip ekonomi yang mengedepankan kearifan dan kreativitas lokal. Nusantaranomics lebih sebagai konsep ekonomi politik. Dalam praktiknya mekanisme pasar bersinergi dengan fasilitasi pemerintah dan institusi masyarakat lokal yang produktif dan kreatif. Nusantaranomics berfungsi sebagai *welfare function* (*Maximizing welfare function*). Amartya Sen mendapatkan hadiah nobel dengan "*freedom*". Ia memasukkan *freedom* sebagai bagian dari pembangunan (*development*). Kita juga bisa melakukan upaya untuk memasukkan nilai lokal dalam model perhitungan ekonomi.

Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada inovasi, kreativitas dan kolaborasi. Ekonomi kreatif dalam bentuk kuliner, *fashion* dan kriya menyumbang sekitar 8% dari PDB. Kuliner berkontribusi paling besar, kemudian diikuti *fashion* dan kriya. Ekonomi kreatif akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan kreativitas dan inovasi. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, internet dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Ekonomi digital di Indonesia sekitar USD 70 miliar yang mencakup *ecommerce*, *ePayment*, dan *crypto currency* (juga NFT/*Non-fungible token*). Ekonomi digital akan terus berkembang dengan meluasnya pemanfaatan digitalisasi dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Sinergi ekonomi kreatif dan digital berkontribusi semakin besar dalam perkembangan ekonomi. UMKM dapat berkembang lebih pesat dalam bingkai ekonomi kreatif dan digital. Transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai sekitar Rp 190 triliun. *Tokopedia*, *Shopee*, Bukalapak, Blibli merupakan ragam *platform e-commerce* yang sudah dikenal luas oleh masyarakat.

Masyarakat luas juga semakin familiar mempergunakan *e-payment*, seperti GoPay, OVO, DANA, pay tren, Sakuk, Link Aja, dan Doku. Bank Indonesia mendorong penggunaan digital *payment* dengan menerbitkan QRIS dan BI-Fast. Cryptocurrencies juga berkembang pesat di Indonesia, dengan pengawasan oleh BAPEPTI yang terdaftar pada 18 perusahaan, 229 kripto dengan transaksi mencapai sekitar Rp 859 triliun tahun 2021. Sudah mulai banyak yang menerbitkan *token* sendiri, sekalipun dengan beberapa permasalahan. Metaverse juga sudah mulai dikembangkan, antara lain oleh Mandiri, BNI, CIMB Niaga, dan para *conten creator*. Ekonomi digital ini banyak berkontribusi dalam memfasilitas perkembangan UMKM di Indonesia.

Nusantaranomics dalam praktik *e-commerce* dapat terwujud dalam *cluster* kuliner dan *fashion*. Saat ini kita sudah bisa mendapatkan semua produk UMKM di berbagai *e-commerce* dengan harga yang terjangkau. Umpamanya, kain songket yang merupakan produk budaya lokal bisa ditemui diberbagai *e-commerce*. Demikian pula, seni kriya dapat ditemukan di berbagai *e-commerce*. Nusantaranomics dalam praktik *e-commerce* menciptakan *high end fashion, green economy, and tourism*.

Pendekatan heterodoks memanfaatkan peran negara untuk meregulasi dan meminimalisasi dampak yang terjadi akibat distorsi kebijakan ekonomi. Contohnya, *cryptocurrency*. Negara perlu hadir untuk mengaturnya sehingga aspek-aspek yang menguntungkan bisa dimanfaatkan.

Pendekatan heterodoks juga dapat diwujudkan lewat nilai-nilai budaya nusantara ke dalam *non-fungible token* dan dimasukkan ke dalam tataran global. Dalam hal positif, tidak perlu dikhawatirkan terkait persaingan karena ia memiliki keunikan dari budaya Nusantara yang menjadi dasar kekuatan dalam bertahan. Nusantaranomics *in* NFT, sudah berkembang dalam *metaverse* dari berbagai lini oleh kreator-kektor lokal.

13.3 Reorientasi Ekonomi Indonesia Berkas Ekonomi Nusantara: Gumilar Rusliwa Somantri

Pertama-tama saya hendak *flashback* dan mengingatkan kembali kepada format ekonomi. Kita mengetahui bersama bahwa format ekonomi pertama kali berjaya di Eropa tatkala berbicara *European Economy* sebagai *World Economy* adalah merkantilisme di Inggris pada abad ke-17. Merkantilisme berasal dari tradisi Calvinisme di Eropa daratan yang bersumber dari nilai Protestan Etik. Kemudian ia rontok ketika kapitalisme hadir. Orientasi pada pasar yang lebih luas dengan mengaplikasikan prinsip *supply and demand* menyebabkan kekuatan kapitalisme merambah kemana-mana. Popularitas dan praktik kapitalisme yang meluas begitu cepat mengakibatkan rontoknya sistem merkantilisme di Inggris. Respons yang timbul akibat pemikiran kapitalisme adalah sosialisme *ala marxist* atau *marxian socialism*. Ia menjadi penantang utama dari kapitalisme. Dalam sejarah Eropa, lahirnya fasisme dengan beragam agresivitasnya menghadirkan luka bagi peradaban dunia akibat perang dunia. Hal ini juga merupakan respons terhadap kapitalisme.

Kapitalisme hingga kini menjadi kekuatan yang begitu dahsyat yang merambah ke seluruh dunia. Kapitalisme tak lagi memiliki penantang utama pasca berakhirnya sosialisme yang ditandai runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet serta Yugoslavia tahun 1990-an. Begitu dominannya kapitalisme di era modern saat ini sehingga Francis Fukuyama sangat mengkhawatirkannya sebagai sebuah sistem tanpa penantang di dunia. Penantang terakhir dari sistem kapitalisme adalah sosialisme yang diterapkan

Cina. Akan tetapi dalam perjalanannya Cina akhirnya menerapkan *One Nation* dengan sistem politik yang otoriter dan komunis. Namun, dalam hal ekonomi Cina sangat liberal.

Jadi, jika dikontekstualisasikan dengan Indonesia saat ini, maka kerangka kehidupan ekonominya juga didominasi oleh kapitalisme. Dalam praktik bernegara, ketika kapitalisme menjadi kekuatan yang tak terhindarkan, maka terdapat dua ideologi yang malang melintang di dunia adalah ideologi liberal dan sosial-demokrasi. Ideologi liberal menyatakan bahwa segala sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan diserahkan kepada mekanisme pasar. Dengan perkataan lain peran negara menjadi sangat minimal (*minimal state*). Hal ini termasuk memfasilitasi *neo-liberal state* dengan membentuk berbagai perangkat yang difasilitasi negara seperti organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*), dan organisasi negara-negara pengekspor minyak (*Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC*). Sementara, dalam sosial demokrasi adalah pandangan ideologis negara yang melandasi lahirnya *welfare state* yang berarti tidak anti pasar. Namun, berkaitan dengan isu-isu kebutuhan dasar (*basic needs*) negara mesti hadir dan campur tangan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar masyarakat. Contohnya, di negara-negara Eropa daratan di antaranya Jerman, Belgia, dan Belanda, negara berperan kuat dalam pendidikan, kesehatan, dan aspek yang berkaitan dengan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Dalam konteks sosio-politik di Indonesia tak terjadi begitu saja, melainkan mengalami fase-fase yang dimulai dari masa kerajaan (*before colonialism*), era kolonialisme, dan pasca kolonialisme. Hal yang menarik adalah semasa fase kolonialisme. Kita mengetahui bahwa *in counter* masyarakat Indonesia dengan kolonialisme global terjadi secara tidak langsung yaitu lewat pemerintah kolonialisme. Komoditas hasil bumi (terutama rempah-rempah) yang berasal dari kepulauan Nusantara sebagai barang yang diperdagangkan masuk ke Rotterdam dan Amsterdam. Kemudian hasil-hasil bumi tersebut masuk ke pasar global pada masa itu. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia meraih kemerdekaannya dan mendapat pengakuan oleh dari pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 setelah dilaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949, di Denhaag, Belanda.

Pada fase inilah Indonesia memasuki era *post*kolonial. Pada fase ini, konteks sosio-politiknya ditandai oleh tiga hal: (1) *civil society* yang tidak berkembang; (2) Sistem ekonomi yang tidak bersinggungan dengan kapitalisme, dan; (3) Sistem demokrasi yang relatif terbatas. Perubahan yang berlangsung pasca peristiwa 1965 yang kemudian melahirkan Orde Baru yang runtuk tahun 1998 yang disebut sebagai proses transisi. Pasalnya, pada masa itu demokrasi amat terbatas yang ditandai limitasi-limitasi tertentu. Namun, era tahun 70-an. Indonesia telah mengenal liberalisasi ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang diperkenalkan Presiden Soeharto misalnya investai asing. Kebijakan ini membuka jendela dan angin segar bagi investasi asing masuk ke Indonesia sehingga otomatis ekonomi Indonesia mulai menjadi bagian ekonomi global. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memasuki era *scaffolding of the world economy* dan secara masif terintegrasi dengan sistem kapitalisme global. Pada fase tersebut ekonomi Indonesia lambat laun ditandai dengan kekuatan ekonomi kapitalistik yang sifatnya *intrusive* dan *massive*.

Fase pasca rontoknya Orde Baru tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi. Konteks sosio politik pada masa ini dinamakan sebagai *the end of post kolonialisme society* yang ditandai liberalisasi yang kian berlanjut, dan demokratisasi yang amat cepat disertai kian meluasnya peran *civil society*. Ragam fenomena yang muncul pasca rontoknya Orde Baru adalah *pertama*, tingginya disparitas di Indonesia. Hal ini ditandai oleh penguasaan 65 persen sumberdaya ekonomi negara oleh 1 persen jumlah penduduk. Makanya, apabila mengukur kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia hanya menggunakan parameter ekonomi seperti *Gross Domestic Product* (GDP) maupun *Gross National Product* (GNP) bakal terjadi *misleading*. Pasalnya, angka fantastis yang dihasilkan hanya diwakili oleh presentase yang sedikit menguasai sumberdaya ekonomi. Secara statistik, angka tersebut diwakili oleh golongan orang kaya yang menyembunyikan kemiskinan, ketimpangan, dan kesenjangan distribusi sumberdaya.

Kedua, tingginya tingkat eksploitasi sumber kekayaan alam akibat kerja sama antara pemain lokal dengan pemain global. Problemnya adalah sejauh mana negara menikmati hasilnya secara adil melalui royalti, pajak, maupun dividen akibat eksploitasi sumberdaya alam tersebut. Pasalnya, jika hasilnya

masuk ke negara berarti negara memiliki sumberdaya untuk melaksanakan pembangunan lewat program-program pengentasan kemiskinan. Kita juga mengetahui bahwa isu pertambangan membutuhkan hilirisasi supaya memberikan nilai tambah (*value added*) yang tinggi secara ekonomi. Hingga saat ini, isu tersebut belum teratasi secara tuntas umpamanya dalam kasus nikel. Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia. Produksi nikel Indonesia tahun 2021 mencapai angka 1 juta metrik ton (37,04%) di dunia. Sementara, cadangan nikel di Indonesia diperkirakan mencapai 21 juta metrik ton. Masalahnya, Indonesia belum optimal dalam hilirisasi sehingga sumberdaya nikel agar memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk mencapai pemerataan pembangunan. Dalam kasus lain, sektor perikanan juga mengalami proses hilirisasi secara menyeluruh di Indonesia karena sebagian ekspor perikanan Indonesia masih dalam bentuk segar dan beku. Akibatnya, nilai tambah dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional baru sebesar 2,8 persen.

Ketiga, liberalisasi yang amat *massive* di Indonesia. Hingga kini kapitalisme masih menjadi *cover* yang amat kuat di Indonesia. Padahal, bangsa Indonesia kerap dibidang memiliki tanah yang subur, kekayaan alam melimpah serta ideologi Pancasila. Sayangnya, proses industrialisasi yang berlangsung di Indonesia masih bersifat semu. Sejatinya, mata rantai industrialisasi yang lengkap terdiri dari *research and development* (R & D), produksi pasca melalui pengembangan *prototype*, *marketing*, dan sebagainya. Penulis menilai industrialisasi di Indonesia adalah sebuah proses industrialisasi yang tidak lengkap karena tidak adanya proses *research and development*. Begitu pula hubungan universitas/kampus-kampus di Indonesia dengan industri terputus. Kampus-kampus hanya melakukan riset yang bersifat tersier dan tidak menyentuh *core bisnis* (substansial) dari kalangan industrial di Indonesia.

Keempat, hadirnya industri retail yang menjadi pemain besar seperti *farmers market*, *giant*, *carrefour*, dan *indomart*. Kehadiran industri retail yang dikuasai pemain-pemain besar tersebut tidak dibarengi dengan integrasi dengan industri lokal misalnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan aktivitas bisnis rakyat sekitarnya.

Kelima, dunia pendidikan dan kesehatan di Indonesia juga mengalami liberalisasi yang mengadopsi sistem sosial demokrasi. Hal ditandai oleh kuatnya campur tangan negara tetapi masih memiliki keterbatasan-keterbatasan.

Ketika membahas Nusantaranomics, maka penulis mesti mendudukan dalam konteks ideologi yang dijunjung bersama bangsa ini yaitu Pancasila. Secara historis, Pancasila pertama kali digagas oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Kemudian diikuti oleh pidato para tokoh pendiri negara lainnya yaitu Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dan dr. Radjiman Wedyodiningrat hingga tokoh-tokoh lainnya. Sejarah mencatat bahwa proses perumusan ideologi Pancasila diawali dengan panitia delapan lalu diubah Bung Karno menjadi panitia sembilan yang melahirkan Piagam Jakarta. Pasca Indonesia Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, –tepatnya 18 Agustus 1945– Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia yang merupakan rumusan final tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Hal inilah yang menyebabkan bergabungnya kawasan timur Indonesia menjadi bagian dari Negara Indonesia merdeka yang awalnya tak menyepakati rumusan sila pertama dalam piagam Jakarta.

Kita sebagai bangsa Indonesia mesti memahami Pancasila dari para tokoh nasional atau pendiri negara yang memiliki idealisme dan kapasitas nasionalis religius. *Pertama*, Sila Ketuhanan yang Maha Esa. Para tokoh nasional atau pendiri negara mengetahui persis bahwa Tuhan yang Maha Esa itu apa? *Kedua*, kita mesti memahami bagaimana sila Ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. *Ketiga*, kemanusiaan berkumpul dalam suatu wadah untuk bersatu. *Keempat*, ketika sudah bersatu, maka manusia yang telah berkumpul tersebut perlu melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. *Kelima*, hasil dari proses pengambilan keputusan secara musyawarah akan mencapai dan menghasilkan keadilan sosial.

Membicarakan Nusantaranomics jangan sampai hanya asik pada tataran jargon, simbol hingga dasar negara sementara kita menyaksikan bahwa kapitalisme telah merasuk di berbagai lini kehidupan secara *massive, intrusive* dan *un-avoidable*. Pertanyaannya, adalah apa yang perlu dilakukan dalam konteks re-orientasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi negara dalam paradigma Nusantaranomics.

Penulis tak berpretensi bahwa kita mesti menjadikan *third-way* ekonomi Indonesia adalah Ekonomi berdasarkan Pancasila. Suka atau tidak suka, ekonomi liberal menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Akan tetapi yang penting adalah bagaimana mendudukkan ekonomi negara dalam konteks bangsa yang beraneka ragam dan memiliki dasar negara sebagai konsensus bersama menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mesti membangun keadilan sosial dan memosisikan kesejahteraan sebagai isu penting di Indonesia. Bila di era Orde Baru cukup dengan melakukan sentralisasi kekuasaan disertai dominasi kekuatan negara, maka di zaman sekarang ini tidak bisa demikian.

Apa yang mesti dilakukan dewasa ini? *Pertama*, penguatan basis perekonomian di perdesaan melalui sektor agraria yaitu: *third wave green revolution*, dan *high yield variety*, tetapi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. *Kedua*, pengembangan *capacity building* dengan *me-link up* dengan *sosial capital* masyarakat yang berbasiskan *local wisdom*. *Ketiga*, melestarikan nilai-nilai dan sistem gotong-royong pada tataran masyarakat. *Keempat*, mengembangkan literasi digital khususnya *digital economy* bagi masyarakat lapisan bawah. *Digital economy* akan menciptakan konektivitas digital sebagaimana yang terjadi pada tingkat petani di Cina. *Kelima*, *descentralized finansial system* seperti *crypto currency* yang transaksinya amat fantastis. Disrupsi ekonomi adalah fakta, akan tetapi darinya kita bisa mendapat ruang untuk menjadikannya peluang berkembang. Meskipun *crypto currency* telah diawasi oleh negara tetapi masih ada aspek yang belum diawasi negara. Mesti diakui bahwa *descentralized finansial system* merupakan salah satu bentuk sistem kapitalisme yang menyerbu dan menyerang Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dewasa ini.

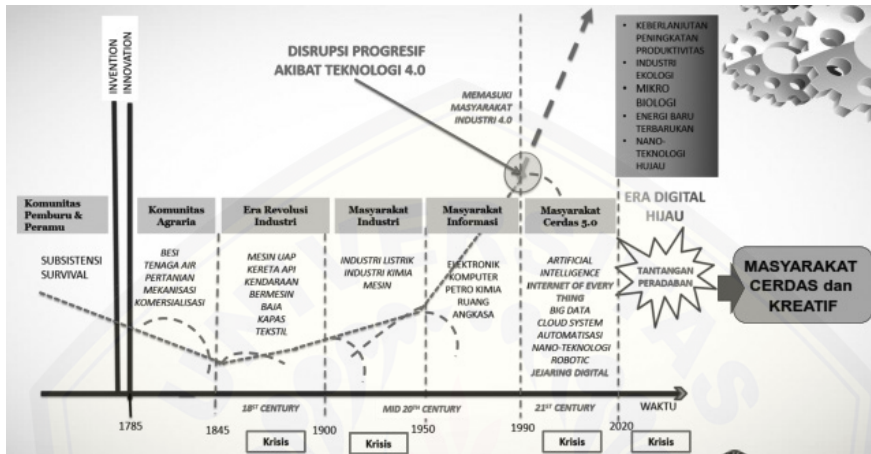
13.4 Digitalisasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Lokal pada Era Transisi Post-COVID19: Lala M. Kolopaking

Revolusi Digital Baru (*New Digital Revolution*) untuk industrialisasi pedesaan adalah jalan yang tepat menuju kesuksesan (Lekhanya 2016). Menurut Jovanovic (2018) digitalisasi berberdampak terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Bahkan menurut Meiller (2020) transformasi digital yang sedang berlangsung di masyarakat telah membantu mengatasi krisis Covid-19.

Pernyataan Sri Mulyani pada tahun 2021, menyatakan bahwa pertumbuhan Indonesia banyak didominasi oleh pertumbuhan padat karya yang menggunakan otot dan keringat, yaitu ditandai banyaknya modal dan tenaga kerja, tetapi tidak menciptakan nilai tambah berdasarkan inovasi. Perkembangan masyarakat saat ini bergerak menuju masyarakat yang cerdas dan kreatif dalam menjawab tantangan peradaban.

Perkembangan peradaban manusia sejatinya telah dimulai sejak abad ke-17, di mana aktivitas masyarakat adalah berburu dan meramu. Kemudian di tahun 1785, terjadi gelombang besar penemuan (*invention*) dan inovasi (*innovation*) yang menyebabkan masyarakat yang hidupnya subsisten dan *survival* berubah menjadi komunitas agraria yang mulai memanfaatkan besi, tenaga air, pertanian, mekanisasi, dan komersialisasi. Pada abad ke-18, terjadi revolusi industri besar-besaran dan menghadirkan penemuan mesin uap, kereta api, kendaraan bermesin, industri baja, kapas, dan tekstil. Kehadiran revolusi industri juga diikuti krisis yang mengantarkan dunia menuju masyarakat industri. Era masyarakat industri tersebut ditandai kehadiran industri listrik, kimia, dan mesin. Dari masyarakat industri, abad ke-21 perubahan yang lebih spektakuler yang menghadirkan masyarakat informasi dengan peralatan elektronik, komputer, industri petro kimia, dan ruang angkasa. Kemudian terjadi disrupsi progresif akibat teknologi 4.0 dan memasuki era masyarakat industri 4.0. Kehadiran industri 4.0 menciptakan

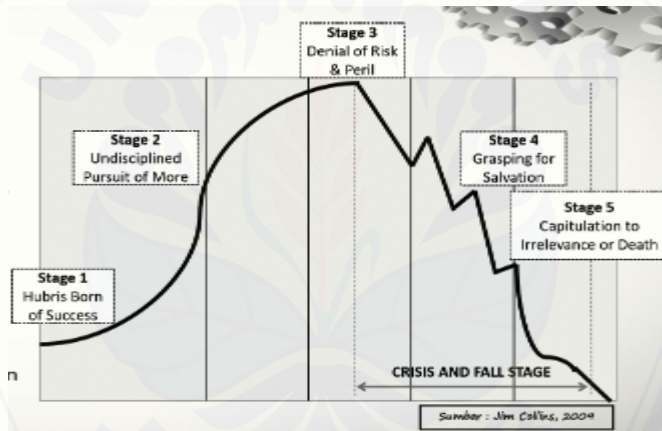
masyarakat 5.0 yang ditandai *artificial intelligence, internet of things, big data, cloud system, otomatisasi, nano teknologi, robotic*, dan jejaring digital. Tahapan perkembangan masyarakat tersebut ditampilkan pada Gambar berikut.



Gambar 13.1 Tahap Perkembangan Masyarakat

Peran serta usaha ekonomi masyarakat dalam transformasi digital melalui tiga tahapan yaitu, transisi, transformasi, dan perubahan sosial. Proses transisi ditentukan oleh pemimpin dan kepemimpinan digital dengan mengubah aktivitas non digital menjadi digital. Tahapan kedua dilanjutkan dengan transformasi dengan mengembangkan teknologi dan data digital melalui *digital creator* sebagai penyedia pengorganisasian sosial dan bisnis baru yang lebih efisien, produktif dan menguntungkan. Aktivitas transformasi ditandai dengan digitalisasi, yaitu penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. Tahapan terakhir adalah perubahan sosial yang mewujudkan masyarakat cerdas (*smart digital society*) dengan menarik profit dan benefit dari ekonomi sosial teknologi digital. Perubahan sosial tersebut ditandai dengan transformasi digital yaitu transformasi aktivitas, proses, dan model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi dan data digital untuk meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, menemukan peluang bisnis baru dengan mengurangi interaksi manusia melalui otomatisasi sistem.

Antisipasi krisis dan prediksi kekacauan (*chaos*) cenderung disiapkan dalam kerangka manajemen protokol krisis ekonomi dan keuangan (Kotler, 2005; David Smith, 2010; Kolopaking, L.M *et al.*, 2015). Teknologi Disrupsi semula diduga sebagai sumber perubahan sosial yang cepat dan tidak dikehendaki, dan menjadi sumber krisis. Namun, *shock* akibat pandemi Covid-19; persoalan di bidang kesehatan menjadi sumber perubahan ekonomi dan sosial. Memasuki era digital, mewujudkan gejala perubahan sosial yang tidak direncanakan tetapi dirasakan dapat menjadi langkah solutif. Waspada era pemulihan ekonomi post Covid-19 *transition*, dapat terjebak krisis apabila pendekatan pembangunan ekonomi tetap menggunakan “pendekatan ekonomi elitis”.



Gambar 13.2 Tahapan krisis

Krisis sebagai situasi yang ditandai dengan kejutan, ancaman serius terhadap nilai-nilai penting dan waktu keputusan yang singkat” (Holsti dalam Guth, 1995) dan membuat kerusakan yang mempengaruhi keberadaan (eksistensi) sebuah sistem sebagai keseluruhan (Pauchant & Mitroff dalam Guth, 1995). Upaya pencegahan akibat krisis memunculkan ketidakpastian dan kecemasan akibat kegagalan memahami dalam memperoleh apa yang sedang dan akan terjadi. Agar krisis tidak menjadi *chaos* perlu pemulihan dari krisis melalui perbaikan sistem. Proses penting agar tidak memperparah keadaan, serta masyarakat tetap memperoleh informasi yang benar, tepat dan dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi kepanikan.

Tantangan hari ini adalah bagaimana memenangkan perebutan dan gagasan karena ancaman mengarah ke *disruptive conflict*. Ada empat poin ancaman yang mengarah ke *disruptive conflict*, yaitu promosi (*branding*) yang mengarah pada semangat berlomba, *framing-opinion (like vs dislike)* yang mengarah pada semangat bertanding, *casting-perception (love vs hate)* yang mengarah ke pertarungan, dan *labelling-contradiction (angel vs devil)* yang mengarah ke dalam pembangunan permusuhan. Keempat poin tersebut mengarahkan kepada krisis sehingga terjadi gonvanvan dan ancaman keruntuhan sebuah sistem makro (negara) dan mikro (organisasi). Situasi ini mengarah kepada *worshipping* yaitu *heaven vs hell* yang dapat mengarahkan ke situasi *chaos (war)*.

Agar tidak terjadi situasi *chaos* maka perlu membangun *creator* ekonomi berbasis sumberdaya lokal nusantara dengan memanfaatkan inovasi. Inovasi dibangun dengan invensi dan komersialisasi digunakan untuk inovasi sosial, yaitu aksi inovatif untuk memecahkan solusi masalah sosial. Inovasi sosial ini digerakkan oleh agensi bukan karena kepentingan perorangan tetapi oleh motivasi spiritualitas (*shared property*) untuk kesejahteraan bersama. Penggabungan disrupti teknologi dan sumberdaya lokal akan menghasilkan inovasi digital sosial yang menciptakan usahawan muda (*creator ekonomi digital*). Saat ini, sebanyak 59,6% generasi muda yang bergelut dalam proses digitalisasi berinovasi berbasis pengelolaan sumberdaya lokal. Jumlah *start up creator digital* tersebut tersebar pada industri pariwisata (9), agro-maritim (37), inovasi pengolahan limbah (10), industri pangan rumahan (12), dan di luar usaha pertanian (46). Pada sektor agro-maritim *startup* di bidang pertanian mendominasi dengan jumlah sebanyak 26, berikutnya perikanan (7), dan peternakan (4). Transformasi digital dalam Nusantaranomic perlu bermuatan solusi masalah struktural secara cerdas serta menguatkan kreasi dan aksi kolektif dalam pengembangan sektor riil untuk menjaga keberlanjutan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aglietta M. 1976. *Régulation et crises du capitalisme*. Paris: Calmann-Lévy.
- Agusalim, L., Karim M., Saefuddin A. 2014. Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional., Vol. 1, (01). *Jurnal Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Universitas Trilogi.
- Adam Smith, 1776. *An Inquiry into The Nature and Causes of Wealth of Nations*.
- Agusalim L. Karim M, dan Saefuddin A. 2014. Rekonstruksi Ekonomi Pancasila sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. *Journal of Social Welfare* <http://www.universitas-trilogi.ac.id/journal/ks> Vol. 1 (1), 39-52
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2006. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, LP3ES.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, sebuah Refleksi Sejarah*. Perguruan Tinggi Mizan.
- Alexandrescu F, Rizzo E, Pizzol L. & Marcomini A. 2016. The social *embeddedness* of *brownfield* regeneration actors: Insights from social *network* analysis. *Journal of Cleaner Production* 139. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.09.007
- Anas, A. A. 2019. *Anti Mainstream Marketing: 20 Jurus mengubah Banyuwangi* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Anoegrajekti, N., & Effendy, B. 2007. Penari Gandrung dan Gerak Sosial Banyuwangi. *Srinthil Media Perempuan Multikulturalan*, 12, 9–27.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Tahun 1945*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief Budiman A. 2006. *Kebebasan, negara, pembangunan kumpulan tulisan, 1965-2005*. Penerbit Pustaka Alvabet.

- Azra, A. 2004. Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme, dalam Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, “Restorasi Pancasila: Mendamaikan Identitas dan Modernisasi”. FISIP UI, Kelompok Tempo Media, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D): Brighten Institute
- Ahrens, J.-P., Landmann, A., & Woywode, M. 2015. Gender preferences in the CEO successions of family firms: Family characteristics and human capital of the successor. *Journal of Family Business Strategy*, 6(2), 86–103.
- Bourdieu, Pierre, and Wacquant, L.J.D. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*, Chicago: University of Chicago Press
- Blikololong JP. 2010. *Du-Hope di Tengah Penetrasi Ekonomi Uang: Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Sistem Barter di Lamalera, Nusa Tenggara Timur*. Disertasi Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
- Boyer R and Toshio Y. 2000 (Editors), *Japanese Capitalism in Crisis. A Regulation Interpretation*. Routledge. Taylor & Francia Group, London and New York, Pg 202–207
- Baisa, Goitom Abrea. 2009. “Commercialization of Smallholder Farming: Determinants Andwelfare Outcomes : A Cross-Sectional Study in Enderta District, Tigrai, Ethiopia.” University of Agder.
- Bentham, J. 1781. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. In Batoche Books. Kitchener.
- Byerlee, Derek, James Stevenson, and Nelson Villoria. 2014. “Does Intensification Slow Crop Land Expansion or Encourage Deforestation?” *Global Food Security* 3(2):92–98.
- Bou Dib, Jonida, Vijesh V. Krishna, Zulkifli Alamsyah, and Matin Qaim. 2018. “Land-Use Change and Livelihoods of Nonfarm Households: The Role of Income from Employment in Oil Palm and Rubber in Rural Indonesia.” *Land Use Policy* 76:828–38.
- Barrett, C. B., T. Reardon, and P. Webb. 2001. “Nonfarm Income Diversification and Household Livelihood Strategies in Rural Africa: Concepts, Dynamics, and Policy Implications.” *Food Policy* 26(4):315–31.

- Bosworth G & Turner R. 2016. Interrogating the meaning of a rural business through a rural capitals framework. *Journal of Rural Studies*, Vol. 60, May 2018, Pages 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.02.002>
- Cervantes-Godoy, Dalila and Joe Dewbre. 2010. *Economic Importance of Agriculture for Poverty Reduction*. No. 23. France.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Czernek-Marszałek, K. 2020a. Sosial *embeddedness* and its benefits for cooperation in a tourism destination. *Journal of Destination Marketing and Management*, 15 (November 2019), 100401. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100401>
- Czernek-Marszałek, K. 2020b. The *overembeddedness* impact on tourism cooperation. *Annals of Tourism Research*, 81(October 2019). <https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102852>
- Czernek-Marszałek, K. 2021. The sources and components of sosial *embeddedness* as determinants of business cooperation in a tourist destination. *Journal of Destination Marketing and Management*, 19 (July 2020). <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100534>
- Cordova MR, Purbonegoro T, Puspitasari R, Subandi R, Kaisupy MT, Wibowo, SPA, Nurjain, Suparmo, & Sapulete S. 2021. Preliminary Study of the Effect of Tourism Activities on Litter Pollution: a Case Study on Padar Island, Komodo National Park, Indonesia *Journal of Ecological Engineering* 2021, 22(8), 131–139 <https://doi.org/10.12911/22998993/140265>
- Cole, S. 2007. Tourism, Culture and Development. In *Tourism, Culture and Development*. Multilingual Matters. <https://doi.org/10.21832/9781845410711>
- Cohen, E. 2012. Globalization, global crises and tourism. *Tourism Recreation Research*, 37(2), 103–111. <https://doi.org/10.1080/02508281.2012.11081695>
- Cohn, Steven Mark, 2007. *Reintroducing Macroeconomics. A Critical Approach*. ME Sharpe. Armonk. New York, London. England.

- Choi, S. H. 2010. The Impacts of Tourism and Local Residents' Support on Tourism Development: A Case Study of the Rural Community of Jeongseon, Gangwon Province, South Korea. *Assumption Journal*.
- Cruz-Saco MA and Zelenev S. 2010. *Intergenerational Solidarity. Strengthening Economic and Sosial Ties*. Palgrave Macmillan.
- Damanhuri DS. 2010, 2013, 2014. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: IPB Press.
- Damanhuri DS. 2017. *Bianglala Renungan dan Dialog Ke-Indonesiaan*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Damanhuri DS. 2022. *Model Negara Kesejahteraan Indonesia: Pendekatan Heterodoks*. Editor: Muhamad Karim & Auhadillah Azizy. Bogor: IPB Press.
- Dahles, H., Prabawa, T. S., & Koning, J. 2020. Local tourism businesses in Indonesia: A pathway to crisis-resilient development? *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 13(1), 17–33. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0027>
- Dahles, H., & Susilowati, T. P. 2015. Business resilience in times of growth and crisis. *Annals of Tourism Research*, 51, 34–50. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.01.002>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. *Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Kelapa Sawit*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2007. "Sistem Penghidupan Dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat Dan Mazhab Bogor." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1(2):169–92.
- Dharmawan, Arya Hadi, Dyah Ita Mardiyarningsih, and Bayu Eka Yulian. 2016. *Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Ekologi Pedesaan: Studi Kasus Di Kutai Kartanegara*. No. 01. Bogor.
- Dharmawan, Arya Hadi, Bayu Eka Yulian, and Faris Rahmadian. 2016. *Struktur Agraria Dan Agroekosistem Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. No. 02. Bogor.

- Euler, Michael, Vijesh Krishna, Stefan Schwarze, Hermanto Siregar, and Marin Qaim. 2017. Oil Palm Adoption, Household Welfare, and Nutrition Among Smallholder Farmers in Indonesia. *World Development* 93:219–35.
- Ellis, Frank. 1998. Household Strategies and Rural Livelihood Diversification. *Journal of Development Studies* 35(1):1–38.
- Ellis, Frank. 1999. Rural Livelihood Diversity in Developing Countries: Evidence and Policy Implications in Natural Resources Perspective. London: Overseas Development Institute.
- Erwin, J., & Smith, Z. A. 2008. Globalization: A Reference Handbook. ABC-CLIO.
- Falah, Miftahul, 2010. Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942. Uga tatar Sunda Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat.
- Finn, J. 2009. Contesting culture: A case study of commodification in Cuban music. *GeoJournal*, 74(3), 191–200. <https://doi.org/10.1007/s10708-008-9220-2>
- Furnivall, J.S. 2009. Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk. Jakarta : Freedom Institute.
- Granovetter, Mark. 1985. “Economic Action and Sosial Structure: The Problem of *Embeddedness*. *American Journal of Sociology*”. Vol. 91, pp. 481–510.
- Granovetter Mark. 1973. The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, Volume 78, Issue 6 (May, 1973), 1360-1380. USA: University of Chicago Press - JSTOR.
- Granovetter, M., & Swedberg, R. 2019. The sociology of economic life, Third edition. In M. Granovetter & R. Swedberg (Eds.), *The Sociology of Economic Life, Third Edition* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494338>
- Gerber, JF and Rolf S. 2012. Towards an Integrated Paradigm in Heterodox Economics Alternative Approaches to the Current Eco-Sosial Crises. London: Palgrave Macmillan.
- Geertz, Clifford. 1989. Penjaja dan Raja. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Greenberg Z, Farja Y, & Gimmon Eli. 2018. *Embeddedness* and growth of small businesses in rural regions. *Journal of Rural Studies* 62(1):174–182. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2018.07.016
- Getz, D., & Page, S. J. 2016. Progress and prospects for event tourism research. *Tourism Management*, 52, 593–631. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.007>
- Goldstein JP, Hillard MG. 2009. *Heterodox Macroeconomics: Keynes, Marx, Ana Globalization*. London dan New York: Routledge.
- Goulding, C. 2000. The commodification of the past, postmodern pastiche, and the search for authentic experiences at contemporary heritage attractions. *European Journal of Marketing*, 34(7), 835–853. <https://doi.org/10.1108/03090560010331298>
- Hansson, Helena, Richard Ferguson, Christer Olofsson, and Leena Rantamäki-Lahtinen. 2013. “Farmers” Motives for Diversifying Their Farm Business - The Influence of Family.” *Journal of Rural Studies* 32:240–50.
- Healy S. 2009. Economics, Alternative. In Kitchin R, Thrift N (eds) *International Encyclopedia of Human Geography*, 3, pp. 338–344. Oxford: Elsevier. <https://www.researchgate.net/publication/292601783>
- Hidayah, Nursantri, Arya Hadi Dharmawan, and Baba Barus. 2016. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perubahan Sosial Ekologi Pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4(3):249–56.
- Indiarti, W. 2018. Wong Osing; Jejak Mula Identitas dalam Sengkarut Makna dan Kuasa (pp. 1–26).
- Indiarti, W. 2016. Masa Lalu Masa Kini Banyuwangi. *International Conference Indonesia: Art & Urban Culture*, 505–521. http://researchdashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/ComTech/Vol. 5 No. 1 Juni 2014/45_ARs_Gatot Suharjanto_Konsep Arsitektur Tradisional Sunda-dimz_OK.pdf
- Ida Laode, 2014. Ekonomi Etnik Di Tengah Kapitalisme. *Opini Sinar Harapan* 24 September 2014. <https://lautanopini.wordpress.com/2014/09/28/ekonomi-etnik-di-tengah-kapitalisme/>

- Jackson W. 2009. *Economics, Culture and Sosial Theory*. Edward Elgar.
- Jacques Derrida, 1989. *Deconstruction and Philosophy*, University of Chicago Press, First thus edition.
- Kartohadikoesomo, S. 2014. *Desa*. Yogyakarta.
- Karsono, Florentinus, T. S., Rohidi, T. R., & Wadiyo. 2019. Banyuwangi Angklung Caruk Festival: Aesthetic Reconstruction in Cultural Commodification Practice. *Advances in Sosial Science, Education and Humanities Research*, Volume 443 International Conference on Science and Education and Technology (ISET 2019), 443(Iset 2019), 265–274. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200620.052>
- Klinken, van G. 2007. *Communal violence and democratization in Indonesia: small town wars*. New York : Routledge
- Kırlar Can, B., Ertaş, M., Yeşilyurt, H., & Günlü Küçükaltan, E. 2017. The Relationship between Tourism and Commodification: A Conceptual Approach. *Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 18(2), 265–282. <https://doi.org/10.24889/ifede.315557>.
- Kumar, A. (2019). A Study on Gender Differences in Motives of Visit Intention , Perceived *Value* and Tourist Satisfaction With. *International Journal on Customer Relations*, 7(2), 16–26.
- Khun Thomas, 1962. *The Strcture of Scientific of Revolution*, University of Chicago Press..
- Lavoie M. 2006. *Introduction to Post-Keynesian Economics*. New York: Palgrave Macmillian
- Lawson, Tony. 2006. The Nature of Heterodox Economics. *Cambridge Journal of Economics* 30: 483–505.
- Light Ivan and Gold SJ, 2000. *Ethnic Economies*. Emerald Group Publisihing Limited
- Lawson T. 2009. Heterodox Economocs and Pluralism, in *Ontology and Economics Tony Lawson and His Critics*, Edited by Edward Fullbrook. New York.
- Lee, Hong-Jong. 2003. Development, Crisis, and Asian *Values*. *East Asian Reviews* 15(2): 27–42.

- Lanya I, Dibia IN, Diara IW and Suarjaya DG. 2017. Analysis of Subak Landuse Change Due to Tourism Accomodation Development in North Kuta Sub-district, Badung Regency, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 98, The 5th Geoinformation Science Symposium 2017 (GSS 2017) 27–28 September 2017, Yogyakarta, Indonesia. Published under licence by IOP Publishing Ltd. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 98 012024. DOI 10.1088/1755-1315/98/1/012024
- Lenggono P. Setia. 2011. Ponggawa dan Patronase Pertambakan: Teori Pembentukan Ekonomi Lokal. Bogor; (Disertasi). Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Lubis, Nina H. 1998. Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800–1942, Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Malik ML. 2013. Etos kerja, Pasar, dan Masjid: Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan. Jakarta. Penerbit LP3ES.
- Mobasher MM. 2002. Reviewed Ethnic Economies by Ivan Light and Steven Gold, Academic Press (2000), xiii+302pp. Journal of Political Ecology Vol. 9. Department of Sosial Sciences, University of Houston/ Downtown, Houston, TX.
- Mason, DS. 2018. A Concise History of Modern Europe: Liberty, Equality, Solidarity, Rowman & Littlefield Publisher, Fourth Edition.
- Majid, N. 2003. Indonesia Kita. Jakarta: Universitas Paramadina.
- Mubyarto 1997. Ekonomi Pancasila. Penerbit Aditya Media.
- Martin, Sarah M. and Kai Lorenzen. 2016. “Livelihood Diversification in Rural Laos.” *World Development* 83:231–43.
- Marx, Karl. 1993. A Contribution to the Critique of Political Economy. edited by M. Dobb and S. W. Ryazanskaya. Moscow: Progress Publishers.
- Miles, M. B., Huberman, a M., & Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. In Sage Publication (3rd ed.)..

- Mingorria, Sara, Gonzalo Gamboa, Berta Martín-López, and Esteve Corbera. 2014. "The Oil Palm Boom: Socio-Economic Implications for Q'eqchi' Households in the Polochic Valley, Guatemala." *Environment, Development and Sustainability* 16(4):841–71.
- Mubyarto, 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Naim M. Asril Z dan Rasyid F. 1987. *Jurus manajemen Indonesia: Sistem Pengelolaan Restoran Minang: Sebuah Prototipe Sistem Ekonomi Pancasila*. Yayasan Obor.
- Nofrian F. 2009. *Pendekatan Ekonomi Heterodoks, Empat Pilar Pemikiran Prancis*. Jakarta: Intitut Global Justice dan Unika Atmajaya.
- Nurkse R. 1953 *Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Cambridge University Press.
- Obidzinski, Krystof, Rubeta Andriani, Heru Komarudin, and Agus Andrianto. 2012. "Environmental and Sosial Impacts of Oil Palm Plantations and Their Implications for Biofuel Production in Indonesia." *Ecology and Society* 17(1):25.
- Pacheco, Pablo. 2006. Agricultural Expansion and Deforestation in Lowland Bolivia: The Import Substitution versus the Structural Adjustment Model. *Land Use Policy* 23(3):205–25.
- Polanyi K. 2003. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Beacon Press Boston.
- Powell, Walter W., dan Smith-Doerr, Laurel. 1994. *Networks and Economic Life*. in Smelser, N. J. and R. Swedberg (editors). 1994. *Handbook of Economic Sociology*. First Edition. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Prasetyantoko A. 2008. *Bencana Finansial, Stabilitas Sebagai Barang Publik*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Ritzer, George, 1985, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (penyadur Alimandan)*, Rajawali Press Jakarta.

- Richins, Marsha L. and Scott Dawson. 1992. "A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation." *Journal of Consumer Research* 19(3):303–16.
- Ritzer, G. and Douglas J Goodman. 2007. Teori Sosiologi. Dari teori Sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Robert R, Yamada T. 2000. Japanese Capitalism in Crisis: A *Regulationist* Interpretation (Edited). London: Published Routledge.
- Scott JC, 1994. Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta; LP3ES.
- Smelser, Neil J. and Richard Swedberg (ed) 1994. The Handbook of Economic Sociology, Prinstone University Press
- Syukur M. 2015. Basis Jaringan Sosial-Ekonomi Penenun Bugis-Wajo. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM
- Soetarto, E. 1999. Dialog Kritis antara Elit dan Golongan Masyarakat Lemah dalam Pembangunan Desa [Disertasi]. Bogor: IPB.
- Sjaf S. 2014. Politik etnik : dinamika politik lokal di Kendari. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shepherd, R. 2002. Commodification, culture and tourism. *Tourist Studies*, 2(2), 183–201. <https://doi.org/10.1177/146879702761936653>.
- Su, X. 2011. Commodification and the selling of ethnic music to tourists. *Geoforum*, 42(4), 496–505. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.03.006>
- Sumarti, T. 2007. Sosiologi Kepentingan (Interest) dalam Tindakan Ekonomi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2), 283–293. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i2.5925>
- Turner, Stepen (ed.). 2005. Emile Durkheim: Sociologist and Moralism. Routledge: London.
- Tambo, Justice A. 2016. Adaptation and Resilience to Climate Change and Variability in North-East Ghana. *International Journal of Disaster Risk Reduction* 17:85–94.

- Tregear, A., & Cooper S. 2016. *Embeddedness*, sosial capital and learning in rural areas: The case of producer cooperatives. Published 1 April 2016. Journal of Rural Studies. DOI:10.1016/J.JRURSTUD.2016.01.011 Corpus ID: 67804973.
- [UUPA] Undang-Undang Pokok Agraria. 1960. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara
- Weber, Max. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Vol I University of California Press, Berkeley.
- Weltin, Meike, Ingo Zasada, Christian Franke, Annette Piorr, Meri Raggi, and Davide Viaggi. 2017. "Analysing Behavioural Differences of Farm Households: An Example of Income Diversification Strategies Based on European Farm Survey Data." *Land Use Policy* 62:172–84.
- Wirawan, I. B. 2014. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Defenisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wiradnyana, K. 2018. *Michel Foucoult: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*, Penerbit Gramedia Digital.
- Ziegler R. 2009. *An Introduction to Sosial Entrepreneurshi. Voice, Precondition, Context*. Edward Elgar
- Zukunftsossier (Future Dossier). 2012. *Alternative Economics and Sosial Concept*. Series Zukunftsossier 3: 1–14.
- Zhuang, X., Yao, Y., & Li, J. 2019. Sociocultural impacts of tourism on residents of world cultural heritage sites in Cina. *Sustainability*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/su11030840>.



BIODATA PENULIS & EDITOR

AGUSTINUS PRASETYANTOKO lebih dikenal luas sebagai ekonom. Sejak 8 Desember 2015 pria yang akrab disapa Pras itu resmi menduduki kursi rektor di Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta menggantikan Prof MM Lanny Widyastuti Pandjaitan, Guru Besar Fakultas Teknik di kampus yang berdiri sejak 1960 tersebut. Gelar doktor didapat dari Ecole Normale Supérieure de Lyon, Prancis memimpin Unika Atma Jaya untuk periode 2015 hingga 2019. Beliau juga aktif terlibat sebagai peneliti di Harvard Kennedy School of Government (HKS), Harvard University, Oxfam, Business Watch Indonesia (BWI), Indonesia, Centre for Financial Policy Study (CFPS), Jakarta, dan Centre Information of Law-Economic Studies (CINLES), Jakarta. Beliau produktif dalam menulis artikel ekonomi di berbagai media. Bidang kepakaran beliau adalah: Bisnis Internasional, *Corporate Governance* dan Manajemen Strategik.

AHMAD ERANIYUSTIKA. Lahir di Ponorogo tahun 1973. Guru Besar FEB Universitas Brawijaya (2010–sekarang); Saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Wakil Presiden RI; Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), 2008–2015; Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015–2017; Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017–2018; Ketua Focus Group Ekonomi Kreatif Pengurus Pusat ISEI 2018–sekarang; Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, 2018–2019; Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA-UB) Periode 2019–2023.

ARYA HADI DHARMAWAN adalah Guru Besar Ekologi Politik, FEMA IPB University. Bidang keahlian beliau adalah ekologi politik, sosiologi pedesaan, sosial ekonomi pertanian, Integrated tropical agricultural and forestry science specializing in rural development studies. Meraih gelar Sarjana dari Sosial Ekonomi Pertanian (1988); Gelar magister–integrated tropical agriculture and forestry dari Georg-August University of Goettingen (1993) dan meraih gelar doktor di bidang Agricultural Sociology and Socio-economic of Rural Development di Universitas yang sama pada tahun 2001. Mata kuliah yang diampu antara lain: ekologi manusia (S-1), ekonomi lokal dan kewirausahaan (S-1), Ekologi Politik (S-2), Sosiologi ekonomi pedesaan (S-2), dinamika ekonomi pedesaan (S-3) dan lain-lain.

ANDI ISHAK, lahir pada 21 November 1973 di Ambon. Penulis menamatkan pendidikan pada Program Studi Doktor Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor tahun 2018. Tertarik pada penelitian dengan lokus pertanian pedesaan dan memiliki pengalaman penelitian terkait dengan bidang ini sejak tahun 1999. Penulis adalah Peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Puluhan artikel telah dipublikasikan penulis baik nasional maupun internasional di bidang komunikasi, penyuluhan, penerapan teknologi, dan ekonomi pedesaan

BAGONG SUYANTO, Lahir di Kertosono tanggal 6 September 1966. Saat ini ia bekerja sebagai dosen di Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada banyak penelitian telah dilakukan —khususnya masalah kemiskinan dan pembangunan, serta masalah anak rawan. Selama ini, Bagong aktif menulis artikel di berbagai media massa dan jurnal, dan telah menghasilkan sejumlah buku. Menikah dengan teman kuliahnya dulu, Rahma Sugihartati dan dikaruniai seorang putri yang semata wayang, Nadia Egalita (18 tahun). Bagong pernah bekerja sebagai konsultan UNICEF untuk program penanganan anak rawan (Children in Need of Special Protection), menjadi Koordinator Bidang Kemasyarakatan Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur, dan konsultan berbagai lembaga sosial lain, seperti Wahana Visi,

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, dan lain-lain. Beberapa buku yang telah dihasilkan, antara lain: *Gejolak Arus Bawah* (1994), *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan* (1996), *Kemiskinan dan Kesenjangan: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Rakyat Miskin* (2005), *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual* (2000), *Masalah Sosial Anak* (2010), *Sosiologi, Teks Pengantar dan terapan* (2010), *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan* (2010), *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial* (2011), *Anak Perempuan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial* (2012).

DIDIN S. DAMANHURI. (Penulis & Editor). Lahir di Talaga, Majalengka, 8 April 1952. Menikah dengan Mimin Kusmini dan dikarunia 4 anak dan 4 cucu. Beralamat di Kompleks Baranangsiang III blok F 10, Bogor 16144. Saat ini Prof. Didin adalah Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan juga Tenaga Ahli bidang Ekonomi LEMHANNAS RI. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan, dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung (1979), Gelar Magister Sains Ekonomi Pertanian diraih dari IPB (1984) dan Master/DEA (Diplome d'Etude Approfondie) in Development Economics, IREPD, Prancis (1988). Selanjutnya gelar Ph.D (Docteur Nouveau) in Political Economics, Institut de Recherche Economique du Developpement (IREPD) Universite Pierre Mendes-France, Prancis, 1993.

Pendidikan informal/Pelatihan yang pernah diikuti antara lain KSA/PPSA Angkatan XV Lemhannas (Januari-Juli 2007); International Work-Shop, Good Governance, Good Corporate Governance (July 2003); Information Technology, Montpellier, France (1987); Suscados Lemhannas (1986).

Jabatan yang pernah dijalani antara lain Staf Ahli Menteri Transmigrasi kependudukan (2000–2001); Kepala Badan Litbang & Informasi Depnakertrans (2001–2004); Staf Ahli Menteri Nakertrans/Ketua Pembinaan TKI & Ketua Tim Interdep Pembinaan TKI (2004–2006); Komisaris Perguruan Tinggi Jamsostek (2001–2007); Sekretaris Senat FEM IPB (sejak 2006–2011); Ketua LSI IPB (1997–2000); Pjs Dekan FKIP IPB (1996); Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB,

sejak tahun 2000 (Dosen tetap Ekonomi Pembangunan IPB sejak tahun 1980 - Sekarang; Dosen tidak tetap 1994–2002 di UI, UNPAD, PPM, Ubinus, Unas); Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas (2008–sekarang).

Pengalaman Pekerjaan/Jabatan lain yang pernah dijalani antara lain Staf Ahli LEMHANAS bidang Ekonomi (2008–2022) ; Ketua lembaga Think-Tank L-KEN (Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara) (2012–sekarang); Staf Ahli Menteri Tenaga-kerja dan Transmigrasi (2005–2006); Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi (BALITPO) Depnakertrans (2001–2005); Ketua Tim Pembenahan TKI Depnakertrans/Inter Departemen (2003–2004); Ketua Departemen Sosial Ekonomi Faperikan IPB (1994–1997); Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Faperikan IPB (1993–1994); Tim Pembekalan Bidang Ekonomi untuk anggota DPRD tingkat I dan II se-Indonesia (1997–1999); Tim Uji Kesahihan Konsep GBHN (1997); Tim Reformasi Ekonomi Menuju Masyarakat Madani (KepPres) (1999); Tim Globalisasi bidang ekonomi, Dewan Riset Nasional (KepMenristek) (1997); Ketua Tim Pengkajian Ekspor LPE Deperindag, Jakarta (1997–1998); Ketua Tim Riset “30 tahun Perusahaan Joint-Venture di Indonesia”, LSPEU Indonesia, Jakarta (1996–1997); Ketua Harian/Ketua Dewan Pakar Brain Society Center (2020-sekarang); Kepala Penelitian Ekonomi-politik CIDES (Center for Information and Development Studies), 1996–1997; Pendiri/Komisaris/Ekonom Senior INDEF (Institute for Development Economic & Finance), Jakarta (1995-Sekarang); Ketua Tim Ahli Dirjen Binapenta Depnaker (1997–1998); Konsultan UNDP-Bappenas untuk Pengembangan UKM (1996–1997); Peneliti REDECON (Resource Development Consultants) (1993–1995); Recherche-Fellow, Centre Asie, IREPD, France (1987–1993); Peneliti LP3ES, Jakarta (1979–1980); Peneliti PPES FE Unpad (1978–1979); Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Koran Mahasiswa UNPAD IDEA (1976–1977).

Aktif dalam Organisasi Profesional antara lain Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), European Sosial Science Java *Network*, Geneva-Swiss, Association des Chercheur Indonesiens en France, Paris dan Group d’Etude et l’Information sur le Development en Indonesie, Paris.

Aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan antara lain Ketua Umum Dewan mahasiswa UNPAD (1976–77); Ketua Pengurus Besar HMI (1979–1981); Waki Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pakar Pusat ICMI (2006–2011); Dewan Pakar Majelis Pengurus Pusat KAHMI (2006–2011); Ketua/Dewan Pembina LSM Pengembangan Koperasi, LSM Pertanian, LSM Nelayan, dll.

Aktif melakukan Penelitian sejak tahun 1979–1981 (LP3ES Jakarta); IPB (1984-sekarang); INDEF (1996-sekarang); L-KEN (2013-sekarang); Lemhannas (2006–2022); Brain Society (BS) Center, tentang Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Makro, Ekonomi Pertanian, Ekonomi Perikanan, Ekonomi Politik.

Aktif menjadi pembicara publik dan peserta seminar, simposium, lokakarya di dalam dan luar negeri. Juga menjadi Pengamat Ekonomi yang sering diwawancara oleh Media Cetak, TV, Media On-line, Radio dalam dan Luar Negeri, terutama sejak tahun 1980.

Aktif menjadi Penulis seperti Tulisan Ilmiah, Ilmiah-populer dan Populer di Jurnal, Majalah dan Koran tentang Ekonomi, Ekonomi-politik dan Pembangunan. Telah Menerbitkan buku sebanyak 65 buah (hingga Desember 2021) sebagian besar tentang ekonomi dan beberapa tentang Pendidikan. Beberapa Buku yang telah diterbitkan (baik sebagai Penulis Tunggal maupun Kontributor), antara lain: Ekonomi Pancasila, Buku I dan II (IPB Press, 2020); Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional (INDEF, 2020); Riset Ekonomi Politik, Perburuan Rente, Korupsi dan Ketimpangan (IPB Press, 2020); Bianglala Renungan dan Dialog KeIndonesiaan (Gramedia, 2018); Ekonomi Politik dan Pembangunan (IPB Press, 2010, 2014 dan 2016); Masalah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia (IPB Press, 2014); Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa (Pustaka Pelajar, 2014); Negara, Pasar dalam Kemelut Globalisasi (LP FEUI, 2008); Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia (LPFE-UI, 2006); Paradoks Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Myohdotcom & IPB, 2000); Pilar-pilar Reformasi Ekonomi-Politik (CIDES, 1999); Ekonomi-Politik Alternatif (Sinar Harapan, 1996); Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia (PT Alumni, 1986). Menerima beberapa Penghargaan, atas nama Kementrian

dan LPNK, Pemda, NGO, Parpol, Ormas sebagai Ahli/Ekonom termasuk dari Luar Negeri (Bangkok, Cafe Town, Washington DC, Tokyo, Paris), antara lain: Satyalancana Karya Satya XX tahun sebagai Guru Besar FEM IPB dari Presiden RI tahun (2009); Satyalancana Sujana Utama Dewan Guru Besar IPB (2013) sebagai Guru Besar FEM IPB Atas Orasi Ilmiah sebagai Guru Besar IPB tahun 2000; Satyalancana Dwidya Sistha sebagai Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI dari Presiden RI (2014); Satyalancana Karya Satya XXX tahun sebagai Guru Besar FEM IPB dari Presiden RI (2016); Certificate The Training in 'Conflict Resolution and Academic Writing' at The Clingendael Institute in the Hague, Netherlands, from March to April 2016; National Writer's Award (Non-Fiction Award 2021): The Certificate is awarded in Developing Political Economy Science which has major impact in Indonesia Economic Thought, including the ideas about Nusantaranomics.

Berbahagia dengan Keluarga: Istri Mimin Kusmini (Sarjana Teknologi Gizi, IKIP Bandung, 1983) dan sempat jadi Staf Pengajar GMSK IPB, 1984–1995) serta 4 orang anak. Anak ke-1 Meis Ihsani (Sarjana Ekonomi Manajemen, Unkris, 2016) (Konsultan: Riset Ekonomi, Literasi Digital), anak ke-2 Gunawan Mirdal (Sarjana Ekonomi Manajemen, Unkris, 2017) (Konsultan: Riset Ekonomi, DigiTeknoPreneur Festival), anak ke-3 Giarahman Deuneuv (S1 Ekonomi Manajemen, 2013) dan S-2 Ekonomi Manajemen, 2019) (BPJamsostek sejak 2014) dan anak ke-4 Gabid Hanafie (Sarjana Komunikasi, 2021) (Bekerja di Jakarta di Media Online). Dari keempat putra-putri dikarunia Cucu: Ayla (SMA, klas1), Fadlan (SMP, klas2), Nida (SMP, klas1), dan Diar (SD, klas1).

ELVAWATI, Pabalutan/05 Januari 1985. Universitas PGRI Sumatra Barat. Meluluskan S1 dan S2 dari Jurusan Sosiologi di Universitas Andalas Padang. Melanjutkan S3 di Jurusan Sosiologi Pedesaan IPB. Menulis di Journal Socius Journal of Sociology Research and Education dengan judul “Penguatan Kapasitas pedagang Dalam Resolusi Konflik Asimetri di Pasar raya Padang Pasca Gempa” (2021); Jurnal Sosiologi Pedesaan Sodality: “From Rubber to Oil Palm: Livelihood Structural Transformation of Local and Transmigrant Farmer Households in Minangkabau” (2019). Menulis buku “Sosiologi Pasar”. Diterbitkan oleh STKIP PGRI Press (2018). Pengabdian

masyarakat yang dilakukan: “Strategi Aset Dalam Pengembangan Ekonomi Petani Pada Masa Pandemi”, “Strategi Aset Dalam Pengembangan Ekonomi Petani Pada Masa Pandemi” (2021).

ENDRIATMO SOETARTO. Lahir di Jakarta, 25 Desember 1952. Adalah Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB. Bidang keahlian beliau adalah Politik Agraria. Beberapa karya buku yang telah dihasilkan antara lain : Pembangunan Masyarakat Desa (Terbitan Universitas terbuka, 2015); Kebijakan Pengelolaan Sumber-Sumber Agraria Untuk Kesejahteraan rakyat (Pustaka wirausaha muda, 2005); Prinsip-prinsip Pembangunan Desa (Pustaka Wirausaha muda, 2005); Pembaruan Agraria dan UUPA (STPN Press, 2007); Saat ini beliau aktif sebagai staf pengajar di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB University.

FACHRU NOFRIAN BAKARUDIN, menyelesaikan pendidikan S-1 di Departemen Filsafat Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, S-2 di Université Paris 10 Nanterre dan Ph.D di Maison des Sciences Economiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dengan judul disertasi “Proses Pembangunan dan Industrialisasi di Indonesia dan Perbandingannya dengan Cina dan India Periode 1945–2013”. Meraih penghargaan sebagai best dissertation dari AFIDES (Association Franco-Indonésien pour les Développement des Sciences) tahun 2013. Pernah bekerja sebagai ekonom untuk kawasan Asia di OECD Development Centre, Paris, Prancis. Makalah diterima dan Narasumber dalam berbagai konferensi dan seminar internasional seperti African Program for Rethinking Development Economics, Bandung Conference, International Initiatives for Promoting Political Economy, International Input-Output Associations Conference, Energy Economics International Conference dan Indonesian Conference on Economic Development. Buku yang sudah dipublikasikan: Pendekatan Ekonomi Heterodox. Publikasi internasional yang sudah diterbitkan: “Changement Politique Economique Institutionnel en Indonésie Période 1945–2013” (Marché et Organisation). Beberapa karya ilmiah yang akan dipublikasikan: “Profit Rate Analysis in Indonesia, Cina and India,” “Growth

Regime Analysis in Indonesia, Cina and India,” “Liberalization and Its Impact on Structural Changes in Indonesia, Cina and India,” “Connectivity Analysis in Indonesia, Cina and India,” “Industrialization and Energy Savings Behaviour,” dan “Industrialization and Emissions Increase in Indonesia, Cina and India.”

GUMILAR RUSLIWA SOMANTRI, adalah Guru besar Departemen Sosiologi FISIP UI. Pernah menjabat Rektor UI periode 2007–2012. Beliau menjadi steering committee Association of Pacific Rim Universities (APRU), Association of Southeast Asian Institutions of High Learning (ASAIHL), dan Sasakawa Young Leaders Forum (SYLFF). Karya akademik penting yang diangkat dari disertasinya adalah *Migration Within Cities* (Jakarta, FE-UI Press, 2007) yang merupakan edisi revisi buku *Migration Within Cities: A Study of Socioeconomic Processes, Intra-City Migration and Grassroots Politics in Jakarta*, yang diterbitkan Universitas Bielefeld, 1996. Buku yang dihasilkan beliau: buku *Ilmu Sosial di Persimpangan Jalan* (Jakarta: FISIP-UI Press, 2006); “Urban Expansion and Sub-urbanization in the Capital Cities: A Comparative Study on Tokyo and Jakarta”, dalam Hiroyoshi Kano *Growing Profil Guru Besar UI Metropolitan Suburbia: A Comparative Sociological Study on Tokyo and Jakarta* (2004); *Metropolitan Suburbia: A Comparative Sociological Study on Tokyo and Jakarta* (2004); “Patterns of Intra-City Migration in Tokyo’s and Jakarta’s Suburban Areas”, dalam Hiroyoshi Kano *Growing Metropolitan Suburbia: A Comparative Sociological Study on Tokyo and Jakarta* (2004); “Towards Democracy Beyond Societies: A Study of Internet Practices in Indonesian Politics”, dalam Indrajit Banerjee (ed), *Rhetoric and Reality: The Internet Challenge for Democracy in Asia* (2003); “Building Community in Jakarta”, dalam Naoki Yoshihara dan Raphaela Dwianto (eds), *Structures and Changes of Grassroots in Japan and Indonesia* (2002); “Looking at the Gigantic Kampung: Urban Hierarchy and General Trends of Intra-City Migration in Jakarta” (2000); “A Study of Socioeconomic and Cultural Changes among Rice Farmers in Indonesia”, dalam Hidetoshi Kato, *Seven Farmers in Asia, Comparative Rural Sociology* (2000). Bidang keahlian beliau adalah sosiologi perkotaan

HARYONO, adalah Dosen di Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia (2000); Magister Sosiologi-Antropologi, Universitas Padjadjaran (2004); Saat ini sedang menyelesaikan S-3 Sosiologi Pedesaan IPB (sedang menunggu promosi doktor). Bidang kajian ilmu Penerima Beasiswa BUDI-DN (Basiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri - 2016) adalah Sosiologi Ekonomi, Sosiologi Pedesaan, Sosiologi Pendidikan dan Sosiologi Kebudayaan

IWAN NURHADI, lahir di Garut, menghabiskan masa remaja sampai menyelesaikan pendidikan menengah atas di Garut. Keinginan menjadi seorang academia mulai saat kuliah S1 di Departemen Antropologi Sosial Universitas Padjadjaran tahun 2002. Pencarian kedirian sebagai seorang ilmuwan menguat setelah menjadi pengajar pada Departemen Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya pada tahun 2005 yang dilanjutkan dengan menempuh Pendidikan S-2 pada Program Magister Sosiologi Pembangunan yang diselesaikan tahun 2008 serta Pendidikan S-3 pada Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB University yang diselesaikan tahun 2022. Lingkup studi yang ditekuni meliputi ekologi manusia, sosiologi ekonomi, sosiologi lingkungan, sosiologi bencana dan sosiologi pedesaan.

JOHARATUL JAMILAH. Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 16 Agustus 1968. Pendidikan S-1 di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada jurusan Dakwah dan Komunikasi tahun 1995; S-2 ditempuh di jurusan Komunikasi Pembangunan Pedesaan di IPB, tahun 2003. Sedangkan Pendidikan S-3 diselesaikan di jurusan Sosiologi Pedesaan, FEMA IPB tahun 2016. Sejak tahun 1997 bekerja sebagai dosen tetap di Sosiologi FISIP UIN Jakarta. Karya ilmiah yang sudah terbit; Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam (2009) pada jurnal Refleksi, UIN Jakarta, Ketahanan Industri Bordir di Tasikmalaya: Studi Etika Ekonomi Islami dan Sunda pada Komunitas Tatar Sunda, Disertasi, (2016). Keterlekatan Etika Moral Islam dan Sunda dalam Bisnis Bordir di Tasikmalaya, dalam jurnal Sodaloty (2016). Gold Mining Related Conflict in Tumpang Pitu, Banyuwangi, East Java (team), ICRI, 2018; The challenge

of radicalizations and deradicalization in Prison: A review of sosial Dynamic Prison Officer and Terrorist inmates (team), ICSPS, 2019. Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Eko Wisata di Tanjung Lesung, Banten (2020), dan The Role of Indonesian Education Base Start up in Enchancing The Learning Quality of Hight School Students in Covid-19 Pandemic (team), ICIC 2021.

LALA M. KOLOPAKING. Lahir di Bogor, 27 Agustus 1958. Adalah dosen di Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Menamatkan S1 di Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi, IPB (1982); S2 di Sosiologi Pedesaan, IPB (1988) dan S3 di Studi Pembangunan, University Sains Malaysia (2000). Saat ini sebagai Ketua Prodi S2/S3 Sosiologi Pedesaan, IPB (2019-Sekarang); Ketua *Working Group Policy Regulatory Science and Digital Culture Innovation 5.0, IPB (2018-sekarang)*; pernah menjadi Ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora, Dewan Riset Nasional Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI (Sampai 2018); Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi Dan Budaya, Kementerian Komunikasi Dan Informatika, RI (sampai 2018); Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (2008–2017). Beberapa publikasi yang dikeluarkan dalam 3 tahun terakhir : *The Sosial Innnovation from Java's VillagersIn The Digital Era to handle Covid-19 Impact in the Digital Era* (Penulis : Kolopaking, L.M, Wahyono, E., Nissa Kania.) (2022); *Measuring The ICT Development ofRurals in Banyuwangi Indonesia* (penulis : Mayza, Thita dan Kolopaking,L.M.) (2021); *Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Papua Berbasis Wilayah Komunitas Adat* (Penulis : Kolopaking, L.M., Fredian Tonny, Irman,Selna Adesetiani) (2021).

MUHAMMAD SYUKUR, M.Si, lahir di Cinnong Kabupaten Bone pada tanggal 10 Juli 1971. Anak keenam (bungsu) dari enam bersuadara. Pendidikan Dasar sampai Menengah dijalani di Kabupaten Bone. Menamatkan Pendidikan S-1 di IAIN Alauddin Makassar Tahun 1995 pada Program Studi Tadris IPS. Pendidikan S-2 di UNPAD Bandung pada Program Studi Sosiologi dan Antropologi dan tamat tahun 2003. Pendidikan S-3 di IPB pada Program Studi Sosiologi Pedesaan dan tamat tahun 2013. Saat ini

telah menjadi dosen di Universitas Negeri Makassar (UNM) tahun 2006. Sejak tahun 2021 penulis menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum-UNM hingga kini. Berbagai Buku, Jurnal dan prosiding baik nasional maupun internasional telah penulis hasilkan. Karya-karya ilmiah penulis dapat dilacak pada ID SINTA: 5999388, ID Scopus: 57216468998, ID WoS: AAG-7204-2019, ID Garuda: 399715 dan ID Google Scholar: SUlwvPcAAAAJ.

P. SETIALENGGONO. menyelesaikan jenjang pendidikan Doktoralnya pada 2011 di Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB. Pernah memimpin beberapa organisasi sosial kemasyarakatan hingga menjadi partisan, sebelum memutuskan kembali menjadi praktisi sosial, sekaligus peneliti di sejumlah lembaga penelitian. Sejak 2014 bergabung sebagai dosen di Universitas Trilogi Jakarta dan dipercaya sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PSEP) dari 2015-2021 dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trilogi dari 2017–2021. Sebagai pendidik pada Program Studi Agribisnis, konsentrasi keilmuan yang ditekuninya adalah Sosiologi Pedesaan; Sosiologi Ekonomi; Komunikasi dan Penyuluhan Pembangunan Pertanian; serta Kajian Agraria– Ekologi. Selain meminati diskursus ekonomi-politik konstitusional dan filsafat kritis–sejarah lokal, yang bersangkutan memiliki passion serta komitmen emansipatif terhadap pemberdayaan dan penguatan kapasitas komunitas–pengetahuan lokal. Ide dan gagasannya tersebar dalam sejumlah artikel dan buku, di antaranya; “Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang” (STPN Press, 2015), editor buku “Kedaulatan Lokal: Pengalaman Empiris Melaksanakan Pilkada Langsung Pertama di Indonesia” (KPM IPB Press, 2006). Juga dalam buku; “Menggugat Kebijakan Agraria” (Pustaka Wirausaha Muda Bogor, 2005); “Metodologi Penelitian Sosiologi” (Prodi Sosiologi Pedesaan SPs IPB, 2006); “Demokrasi Pancasila: Sebuah Risalah” (Penerbit Universitas Trilogi, 2016); “Sistem Ekonomi Pancasila” edisi 1, 2, 3 dan 4 (Rajawali Press, 2017, 2019, 2020, dan 2021); “Penyusunan Rekomendasi, Data dan Informasi Bidang Pelayanan Dasar Pada Pengembangan Sarana Prasarana Perdesaan” (Penerbit Universitas Trilogi, 2018); “Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia” (IPB Press, 2019);

”Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Fakultas Bioindustri Universitas Trilogi” (Penerbit Universitas Trilogi, 2019); “Eulogi Untuk Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro: Mengenang dan Meneladani Sang Guru” (Pusat Studi Agraria IPB, 2020); “Sistem Demokrasi Pancasila” edisi 1 dan 2 (Rajawali Press, 2020 dan 2021); “Pendataan Keluarga Desa Cerdas Mandiri Lestari” (Rajawali Press, 2021); serta “Koperasi Indonesia” dan “Kepemimpinan Pancasila” (segera terbit).

ROKHANI. Lahir Malang, 05 Agustus 1972. Adalah Dosen di Universitas Jember. Meraih gelar Sarjana di Sosial Ekonomi Pertanian/Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (1997); Gelar master dari Sosiologi Pedesaan (SPD) IPB (2005); Gelar Doktor di bidang Sosiologi Pedesaan (SPD) dari IPB (2018). Mengajar beberapa mata kuliah seperti Komunikasi Pembangunan Pertanian, Sosiologi Pertanian, perubahan sosial, Dinamika Pembangunan Masyarakat, pemberdayaan masyarakat pedesaan, dan lain-lain. Beberapa karya ilmiah yang sudah terbit di jurnal antara lain : *Water Scarcity, Mountain Deforestation And The Economic Value Of Water In A Small-Scale Irrigation System: A Case Study In East Java, Indonesia* (2021); *Pembangunan Desa Wisata Gadingan dan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pendekatan Community Based Tourism* (2020) dan lain-lain.

SOFYAN SJAF. Lahir di Kendari-Sulawesi Tenggara pada tanggal 3 Oktober 1978. Saat ini penulis beraktivitas sebagai dosen pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University. Keahlian penulis di bidang sosiologi pedesaan dan etnisitas. Selain aktif mengajar, penulis intensif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bersama warga desa, penulis menekuni penelitian aksi tentang membangun data desa presisi di

Indonesia. Penulis juga aktif sebagai tenaga ahli penyusunan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Republik Indonesia. Kemudian memberikan asistensi kepada beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Republik Indonesia untuk rekomendasi pentingnya regulasi tentang data desa presisi bagi

pembangunan nasional berbasis desa. Saat ini, penulis sebagai Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat,

IPB University. Sebelum diposisi jabatan tersebut, penulis adalah Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), IPB University. Dari dua lembaga tersebut, penulis banyak melakukan studi multidisiplin keilmuan tentang pembangunan dan pemberdayaan di pedesaan, desa cerdas, pengembangan ekonomi lokal di pedesaan, SDG's Desa

dan pangan berbasis komunitas lokal. Karya ilmiah penulis dapat ditelesuri di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Tidak itu saja, penulis juga rutin menulis artikel opini di koran harian nasional, seperti: Kompas, Media Indonesia, Sindo, Jawa Pos, dan Suara Pembaharuan. Beberapa judul buku yang telah di tulis, di antaranya: Trasmigrasi dan Kapitalisme (Sjaf, 2022–Jas Merah), Data Desa Presisi (Sjaf, *et al.*, 2020–IPB Press), Involusi Republik Merdesa (Sjaf, 2019–IPB Press), Politik Etnis: Dinamika Politik Lokal di Kendari (Sjaf, 2014–YOI), Jejak Pangan Beras Mamasa (Sjaf *et al.*, 2010–Litera Media), Potret Kedaulatan Pangan Mamasa (Sjaf *et al.*, 2008–SAINS) dan lain-lain.

UMAR JUORO, Lahir 6 Desember 1959. Adalah Senior Fellow the Habibie Center; Saat ini sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pernah menjadi Direktur Utama Center of Information and Development Studies (CIDES); Pernah menjadi Asisten Wakil Presiden dan Presiden RI, B.J. Habibie tahun 1998–1999 dalam bidang Ekonomi, Keuangan dan Perindustrian; Anggota tim masyarakat madani yang dibentuk Presiden tahun 1999; Komisaris Independen BII (2002); Pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN).



BIODATA EDITOR

MUHAMAD KARIM. lahir di Raha, 1 September 1971. Lulus Sarjana Perikanan dari IPB Bogor tahun 1995. Pascasarjana Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan di IPB Bogor lulus tahun 2005. Pengalaman organisasi: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor sebagai Sekretaris Umum Tahun 1995/1996. Pengurus Besar HMI 1997. Sekretaris Jendral Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wilayah Bogor 2007–2012. Anggota Dewan Pakar Majelis Daerah KAHMI Jawa Barat 2020–2024. Pengurus Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) periode 2019–2023. Center for Information and Development Studies (CIDES) Indonesia 1996–1998. Mendirikan Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) tahun 2007. Kolumnis media nasional dan lokal terkait isu kelautan, perikanan, sumberdaya alam dan kemaritiman: Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Republika, Koran Tempo. Koran Investor Daily, Jurnal Nasional, Koran Sindo, Bisnis Indonesia, Radar Bogor, Kolom Detiknews.com, Kolom Qureta.com, Majalah Cakrawala TNI-AL, dan Majalah Trobos. Narasumber pada (1) radio dan televisi swasta nasional. Televisi: Inews TV, Trans7, Okezone TV, CNN TV, RCTI, Jawa Pos TV, RTV. Radio: RRI Pro 3 Jakarta, RRI Bogor, dan Radio Dakta.

Narasumber/pakar: (1) kementerian/lembaga: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kementerian, Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS), dan, Dewan Ketahanan Nasional (DKN); (2) Perguruan tinggi: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Fakultas MIPA Universitas Pakuan, dan Fakultas Teknik, Institut Teknologi Nasional, Malang; (3) Organisasi Masyarakat Sipil (NGO): Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional, Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNITI) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Publikasi buku antara lain: (i) Debat Publik Seputar Program dan Partai Politik pada Pemilu 2004: Siapa Mau Jadi Presiden, Penerbit Kompas, Tahun 2004 (Kontributor Tulisan); (ii) Bunga Rampai Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Penerbit Humaniora, Bandung Tahun 2005; (iii) Perdebatan Belum Usai. Apakah Laut Penyerap atau Pelepas Karbon? Diterbitkan KIARA 2009 (Bersama Dr. Riza Damanik); (iv) Ekonomi Kelautan dan Pesisir, 2010 Penerbit Graha Ilmu (Bersama Prof. Dr. Apridar dan Dr. Suhana); (v) Analisis Kebijakan Energi Nasional (IPB Press, 2014, Tim Penulis); (vi) Sistem Ekonomi Pancasila, Penerbit Rajawali dan Universitas Trilogi 2017 dan edisi 4 2021 (Anggota Tim Penulis), (vii) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2017., (ix) Renaisans Negara Maritim Indonesia, Penerbit Plantaxia Yogyakarta 2022, (x) Menuju Pembangunan Maritim Berkeadilan, Penerbit Mitra Cendikia Media 2021. (xi) Nelayan Tradisional Menghadapi Perubahan Iklim, Penerbit Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia 2021 (xii) Perampasan Ruang Laut dan Marjinalisasi Nelayan. Penerbit Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia 2022. (xii) Model Negara Kesejahteraan Indonesia: Pendekatan Heterodoks, IPB Press 2022 (Editor)

Kini, sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Bio-Industri, Universitas Trilogi, Jakarta. Selain itu, beraktivitas juga pada organisasi sosial kemasyarakatan: Dewan Pakar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) 2015–2020; Dewan Pakar Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Bogor (APKALI), 2014–2019 dan Dewan Pakar Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) 2020- sekarang.

AUHADILLAH AZIZY. Lahir di Bangkalan, 7 Mei 1978. Meraih S-1 dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK IPB, (2000) dan Master (S-2) pada Jurusan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan, FPIK IPB, (2009). Setelah lulus dari sarjana banyak berkarier sebagai konsultan, peneliti dan pengurus di beberapa perusahaan swasta seperti PT. Gemacitra objeklestari, PT. Bambu Betung Mandiri, PT. Seroja Muda Indonesia dan PT. Daya Cipta Kreasindo. Pernah juga aktif sebagai Peneliti INDEF (Institute for Development of Economic and Finance) (2004–2007), Tenaga ahli di Komite Ekonomi Nasional (KEN) (2012–2014), Pendiri & Sekretaris Pusat

Kajian Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN) (tahun 2013–sekarang), Pendiri & Sekretaris Badan Perkumpulan Pusat Kajian Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) (tahun 2010–sekarang), Tenaga Ahli Anggota DPR RI (2014–2022), Komisaris PT. Primakelola IPB (2019-2021), pendiri Badan perkumpulan Ruang Lestari Indonesia (2021– sekarang).

Gemar berorganisasi sejak mahasiswa sampai saat ini. Aktif dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan seperti Himpunan Alumni FPIK IPB, Himpunan Alumni IPB, MD KAHMI Bogor, ICMI Orwilsus Bogor, Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI). Aktif menulis artikel terkait tema perikanan dan kelautan, Islam dan kebangsaan, ekonomi politik, di media lokal dan nasional. Menjadi Editor dan anggota penulis buku: “Indikator Keberhasilan Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) dan Penilaian Awal pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”. PKSPKL-IPB (Anggota Tim Penyusun, 2011); “Konsep *Mainstreaming Ocean Policy* ke dalam Rencana Pembangunan Nasional”. Bappenas (Editor, 2014); Buku “Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia”. Aliansi Kebangsaan-LKEN (Anggota Tim Penulis); “Pesan Rektor ; *Mindset* Baru Untuk Transformasi”, Karya Prof. Arif Satria (Editor, 2021). Model Negara Kesejahteraan Indonesia: Pendekatan Heterodoks, IPB Press 2022 (Editor)

